



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 81 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2030.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2030, bertujuan :

- a. mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif gambaran umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Lamongan, termasuk tren, capaian, dan indikator utama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengidentifikasi dan memetakan secara detail profil kemiskinan daerah di Kabupaten Lamongan, meliputi karakteristik rumah tangga miskin, penyebab struktural, serta dimensi kerentanan yang dihadapi;
- c. merumuskan strategi, kebijakan, dan program prioritas yang efektif dan terukur dalam rangka pengentasan kemiskinan Kabupaten Lamongan untuk periode jangka menengah pada Tahun 2026-2030; dan
- d. menentukan area atau lokasi prioritas yang memiliki tingkat kemiskinan dan kerentanan tinggi sebagai fokus utama untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, terdiri atas :
 - a. Bab I, pendahuluan;

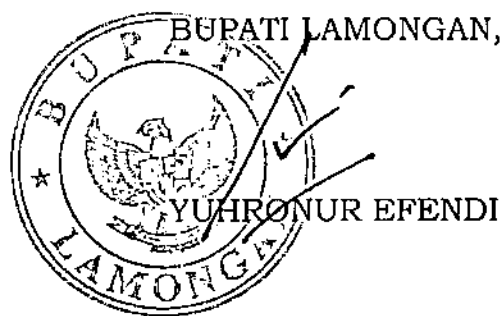
- b. Bab II, gambaran umum daerah;
 - c. Bab III, profil kemiskinan daerah;
 - d. Bab IV, prioritas program;
 - e. Bab V, lokasi prioritas.
- (2) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

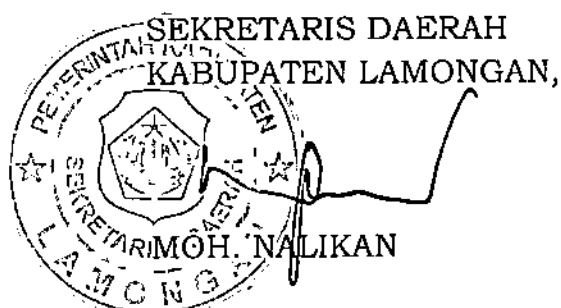
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal *30 Desember* 2025



Diundangkan di Lamongan
pada tanggal *30 Desember* 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR *82*

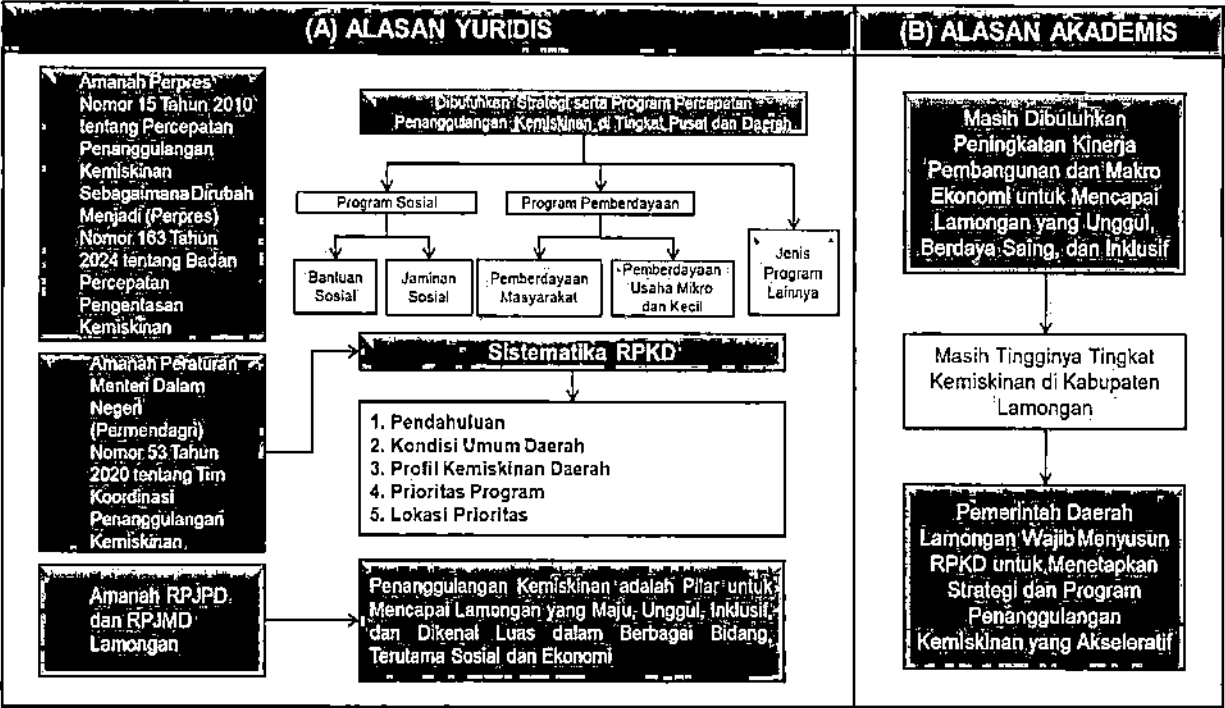
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penanggulangan kemiskinan di Lamongan merupakan amanat konstitusi yang memberikan mandat pada daerah untuk melaksanakan upaya sistematis dan terpadu agar sesuai dengan arah kebijakan nasional. Kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama bagi masyarakat miskin, adalah tanggung jawab utama Pemerintah Daerah. Secara yuridis, penanggulangan kemiskinan di daerah merupakan turunan implementasi dari: (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan sosial dan penanggulangan kemiskinan sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar; (ii) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang menggarisbawahi perlunya sinergi program dan kebijakan yang terencana di setiap tingkatan pemerintahan; dan (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang menjadi pedoman teknis pembentukan, tugas, dan fungsi TKPKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Gambar 1.1. Alasan Yuridis dan Akademis Penyusunan RPKD Lamongan
Sumber: Data Diolah, 2025

Selain alasan yuridis, penanggulangan kemiskinan di Lamongan juga didasarkan pada pertimbangan akademis, yang menyoroti konteks empiris dan tantangan yang dihadapi. Beberapa isu utama yang melatarbelakangi urgensi penanggulangan kemiskinan di



Kabupaten Lamongan antara lain: (i) kemiskinan di Lamongan bersifat kompleks sehingga memerlukan intervensi yang terintegrasi; (ii) masih terdapat disparitas angka kemiskinan antar wilayah di Lamongan, sehingga menuntut pendekatan program yang bersifat kewilayahan dan tepat sasaran; (iii) diperlukan optimalisasi penggunaan data yang akurat

BAB I
PENDAHULUAN

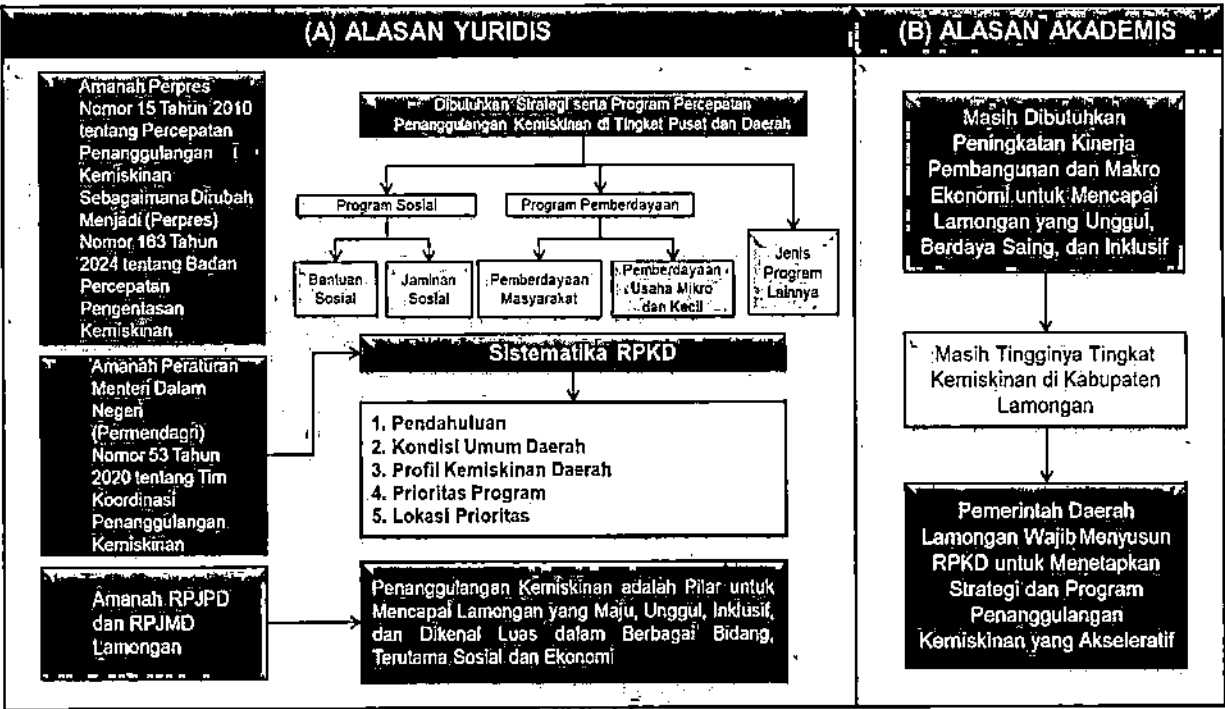
1.1 LATAR BELAKANG

Penanggulangan kemiskinan di Lamongan merupakan amanat konstitusi yang memberikan mandat pada daerah untuk melaksanakan upaya sistematis dan terpadu agar sesuai dengan arah kebijakan nasional. Kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama bagi masyarakat miskin, adalah tanggung jawab utama Pemerintah Daerah. Secara yuridis, penanggulangan kemiskinan di daerah merupakan turunan implementasi dari: (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan sosial dan penanggulangan kemiskinan sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar; (ii) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang menggarisbawahi perlunya sinergi program dan kebijakan yang terencana di setiap tingkatan pemerintahan; dan (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang menjadi pedoman teknis pembentukan, tugas, dan fungsi TKPKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Gambar 1.1. Alasan Yuridis dan Akademis Penyusunan RPKD Lamongan

Sumber: Data Diolah, 2025

Selain alasan yuridis, penanggulangan kemiskinan di Lamongan juga didasarkan pada pertimbangan akademis, yang menyoroti konteks empiris dan tantangan yang dihadapi. Beberapa isu utama yang melatarbelakangi urgensi penanggulangan kemiskinan di



Kabupaten Lamongan antara lain: (i) kemiskinan di Lamongan bersifat kompleks sehingga memerlukan intervensi yang terintegrasi; (ii) masih terdapat disparitas angka kemiskinan antar wilayah di Lamongan, sehingga menuntut pendekatan program yang bersifat kewilayahan dan tepat sasaran; (iii) diperlukan optimalisasi penggunaan data yang akurat

untuk memastikan intervensi program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling rentan; dan (iv) berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sering kali berjalan parsial, sehingga dibutuhkan kerangka kerja yang mampu mengintegrasikan semua program di bawah satu payung strategi.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan akademis, diperlukan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dokumen RPKD adalah pedoman resmi yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang sistematis, terpadu, dan terukur dalam rangka menciptakan model penanggulangan kemiskinan yang akseleratif. Pendekatan yang sistematis sangatlah krusial mengingat kompleksitas masalah kemiskinan multidimensi yang terjadi di berbagai wilayah Lamongan. RPKD diperlukan untuk memastikan bahwa semua intervensi program berbasis pada data akurat. Melalui dokumen RPKD, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat menyelaraskan target daerah dengan sasaran nasional dalam upaya menghapuskan kemiskinan secara efektif.

RPKD mempunyai posisi strategis dalam dokumen perencanaan daerah, terutama dikaitkan dengan visi dan arah pembangunan Kabupaten Lamongan. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan "Lamongan yang Berkelanjutan (Mencerminkan Daerah yang Maju, Unggul, dan Dikenal Luas dalam Berbagai Bidang, Terutama Sosial dan Ekonomi)". Arah pembangunan ini berfokus pada pembangunan inklusif berbasis SDM unggul. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing SDM, memperluas kesempatan kerja, menjamin penyediaan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), serta memberikan perlindungan sosial. Prasyarat untuk mencapai hal tersebut adalah tersedianya model penanggulangan kemiskinan yang akseleratif yang mutlak dituangkan dalam RPKD.

Mengingat peranannya yang strategis, RPKD harus difungsikan sebagai : (i) acuan tunggal bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan seluruh OPD dalam merumuskan rencana aksi, mengalokasikan anggaran, dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan; (ii) menerjemahkan target penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam strategi dan program operasional yang terstruktur; dan (iii) acuan proses monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi belanja daerah yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan. RPKD juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berfokus pada hasil, memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal dalam upaya mencapai masyarakat Lamongan yang sejahtera dan berkeadilan.

Gambar 1.2. Arah Pembangunan Lamongan untuk Mencapai Pembangunan Inklusif Berbasis SDM Unggul



Sumber: Data Diolah, 2025

RPKD disusun dengan analisis yang komprehensif terhadap akar masalah kemiskinan di Lamongan, serta memuat strategi dan langkah-langkah akseleratif yang inovatif dan terukur untuk mencapai target penurunan kemiskinan yang ambisius namun realistis yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2026-2030. Berdasarkan peranan tersebut dan memperhatikan permasalahan kemiskinan yang kompleks di Kabupaten Lamongan, maka penyusunan RPKD Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2030 menjadi sangat penting.

1.2 TUJUAN

Berdasarkan penanggulangan kemiskinan di Lamongan, serta peranan penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Lamongan tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif gambaran umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Lamongan, termasuk tren, capaian, dan indikator utama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
2. mengidentifikasi dan memetakan secara detail profil kemiskinan daerah di Kabupaten Lamongan, meliputi karakteristik rumah tangga miskin, penyebab struktural, serta dimensi kerentanan yang dihadapi.
3. merumuskan strategi, kebijakan, dan program prioritas yang efektif dan terukur dalam rangka pengentasan kemiskinan Kabupaten Lamongan untuk periode jangka menengah pada Tahun 2026-2030.
4. menentukan area atau lokasi prioritas yang memiliki tingkat kemiskinan dan kerentanan tinggi sebagai fokus utama untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan.

1.3 DASAR HUKUM

Ruang lingkup dan muatan dalam RPKD Kabupaten Lamongan tahun 2026-2030 disusun atas dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);
10. Instruksi Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lamongan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah berfungsi untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi umum Kabupaten Lamongan dalam mendukung analisis perumusan RPKD. Kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi, serta tinjauan terhadap pembangunan manusia. Pemahaman yang mendalam sangat esensial untuk mengidentifikasi kelompok sasaran, menentukan wilayah prioritas intervensi, dan menganalisis secara akurat akar permasalahan kemiskinan yang sifatnya multidimensi di Kabupaten Lamongan.

Analisis kondisi umum juga berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan peluang unggulan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai mesin penggerak perekonomian inklusif. Sebaliknya, kondisi ini juga membantu memetakan tantangan dan kendala struktural yang menghambat penurunan angka kemiskinan. Pada akhirnya, hasil analisis ini akan mengerucut pada perumusan isu-isu strategis penanggulangan kemiskinan di Lamongan, yang menjadi fokus utama intervensi dalam RPKD.

2.1 KONDISI FISIK DAN GEOGRAFI

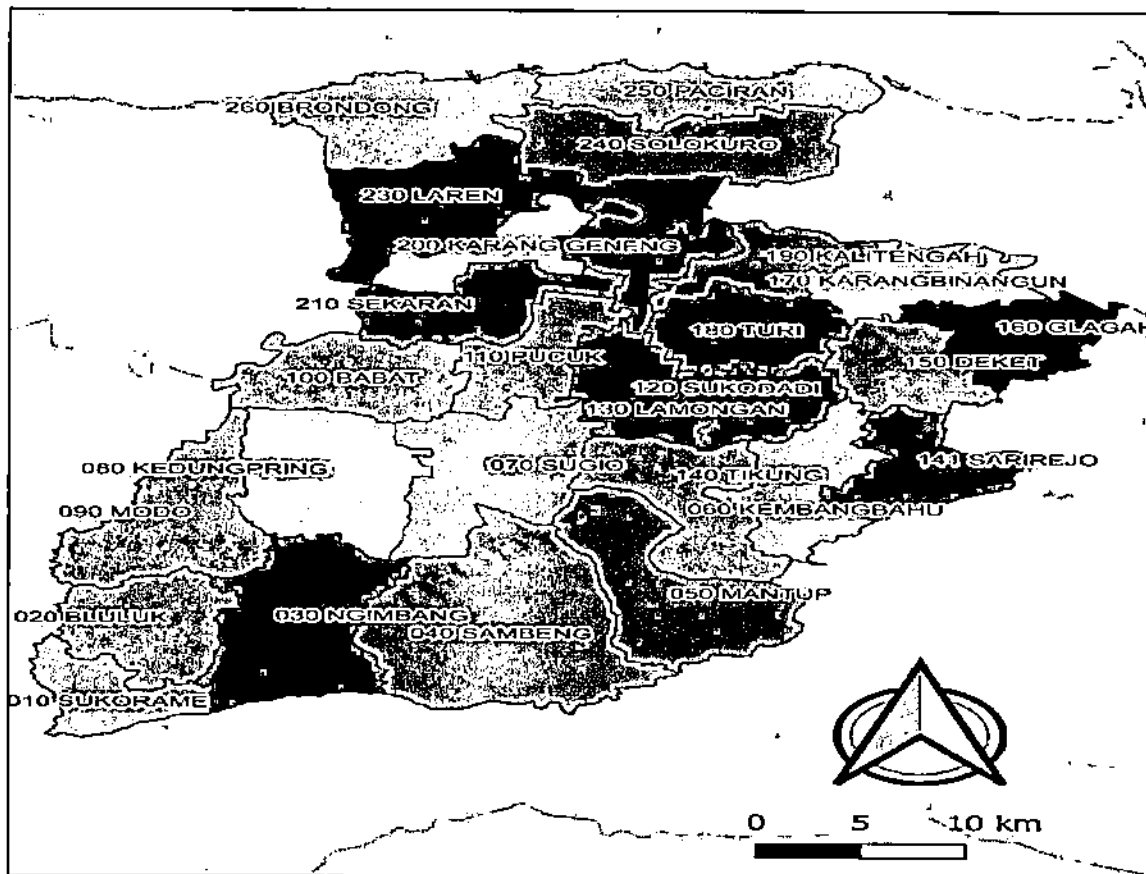
Kondisi fisik dan geografis Kabupaten Lamongan, yang dicirikan oleh keragaman topografi mulai dari wilayah pesisir utara, dataran rendah yang subur di tengah, hingga perbukitan kapur di selatan, memiliki relevansi langsung terhadap pola kemiskinan dan kebutuhan intervensi kebijakan. Wilayah pesisir memiliki potensi ekonomi perikanan namun rentan terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang memengaruhi mata pencaharian nelayan. Sebaliknya, wilayah pertanian di dataran rendah rentan terhadap banjir dan kekeringan, yang berdampak langsung pada produktivitas dan pendapatan petani. Sementara itu, wilayah selatan yang kering dan memiliki akses infrastruktur terbatas seringkali menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan dasar. Oleh karena itu, analisis geografis ini sangat penting untuk mengarahkan strategi berbasis lokasi (*place-based strategy*), sehingga strategi penanggulangan kemiskinan dapat terukur dan tepat sasaran.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak 6°51'54" sampai dengan 7°23'6" lintang selatan dan antara 112°4'41" sampai dengan 112°33'12" bujur timur. Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, Lamongan memiliki batas-batas: (i) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; (ii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto; (iii) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban; dan (iv) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Posisi ini menunjukkan Lamongan sebagai daerah yang memiliki akses strategis ke jalur pelayaran nasional di utara, sekaligus berada dalam koridor ekonomi Jawa Timur yang padat di bagian timur dan selatan. Keberadaan batas Laut Jawa di utara menjadikan Lamongan rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan juga memberikan potensi besar bagi sektor kelautan dan perikanan.

Secara keseluruhan, letak geografis ini memengaruhi konektivitas dan disparitas pembangunan antar wilayah di Lamongan.

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Lamongan



Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2025

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 (tiga) karakteristik yaitu :

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo, dan Kembangbahu. Fakta lain di Bagian Tengah Selatan adalah: (i) kawasan ini dikenal sebagai lumbung pangan utama Lamongan, dengan dominasi kegiatan pertanian sawah irigasi teknis yang intensif; (ii) Ibukota Kabupaten Lamongan terletak di wilayah ini, menjadikannya pusat administrasi, perdagangan, dan jasa yang paling berkembang; dan (iii) aksesibilitas dan kepadatan penduduk cenderung tinggi di bagian tengah.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. Fakta lain di Bagian Selatan dan Utara adalah: (i) meskipun kesuburannya sedang, wilayah ini memiliki potensi pertambangan non-logam (batu kapur) dan menjadi sumber bahan baku mineral; (ii) kawasan Utara (Brondong, Paciran, Solokuro) memiliki pantai dan pelabuhan yang menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap dan pariwisata; dan (iii) ketersediaan air permukaan sering menjadi tantangan, sehingga banyak desa mengandalkan sumber air tanah atau tadah hujan.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan

banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah. Fakta lain di Bagian Tengah Utara adalah : (i) daerah Bonorowo dicirikan oleh genangan air musiman yang luas, berfungsi sebagai tandon alamiah ketika curah hujan tinggi, terutama dari luapan Bengawan Solo; (ii) mata pen-caharian penduduk di kawasan ini sangat bergantung pada ekosistem air, seperti perikanan air tawar (budidaya dan tangkap) dan pertanian rawa; dan (iii) tingginya risiko bencana hidrometeorologi (banjir) sering menye-babkan kerugian pada infrastruktur dan sektor pertanian di wilayah ini

Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sambeng adalah Kecamatan dengan wilayah terluas, dengan luas mencapai 195,44 km² atau mencakup 8,61 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, sedangkan Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Maduran dengan luas 30,15 km² atau 1,87 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Lamongan. Ibukota Kabupaten Lamongan terletak di Kecamatan Lamongan tepatnya di Kelurahan Sidoharjo. Sementara kecamatan terjauh dari ibu kota Lamongan adalah Kecamatan Sukorame dengan jarak tempuh sejauh 51 km dan Kecamatan Paciran dengan jarak tempuh sejauh 50 km.

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, dan Satuan Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Lamongan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa	RW	RT
Sukorame	3.929	2,24	9	42	114
Bluluk	5.800	3,31	9	54	164
Ngimbang	10.006	5,71	19	95	308
Sambeng	15.078	8,61	22	158	349
Mantup	9.123	5,21	15	110	361
Kembangbahu	6.825	3,90	18	101	361
Sugio	8.974	5,12	21	126	365
Kedungpring	8.573	4,89	23	120	383
Modo	8.170	4,66	17	101	290
Babat	6.459	3,69	21	141	290
Pucuk	4.538	2,59	17	80	273
Sukodadi	4.748	2,71	20	114	339
Lamongan	4.094	2,34	12	91	317
Tikung	5.542	2,16	13	49	179
Sarirejo	4.887	2,79	9	42	179
Deket	4.395	2,51	17	90	272
Glagah	5.002	2,85	29	87	283
Karangbinangun	4.726	2,70	21	53	203
Turi	5.250	3,00	19	79	258
Kalitengah	3.695	2,11	20	97	266
Karanggeneng	4.074	2,33	18	64	197
Sekaran	5.405	3,08	21	61	194
Maduran	3.278	1,87	17	71	164
Laren	9.411	5,37	20	47	127
Solokuro	9.487	5,41	16	47	236
Paciran	5.681	3,24	10	59	272

Brondong	8.072	4,61	9	60	279
	175.221	100	462	2.239	7.023

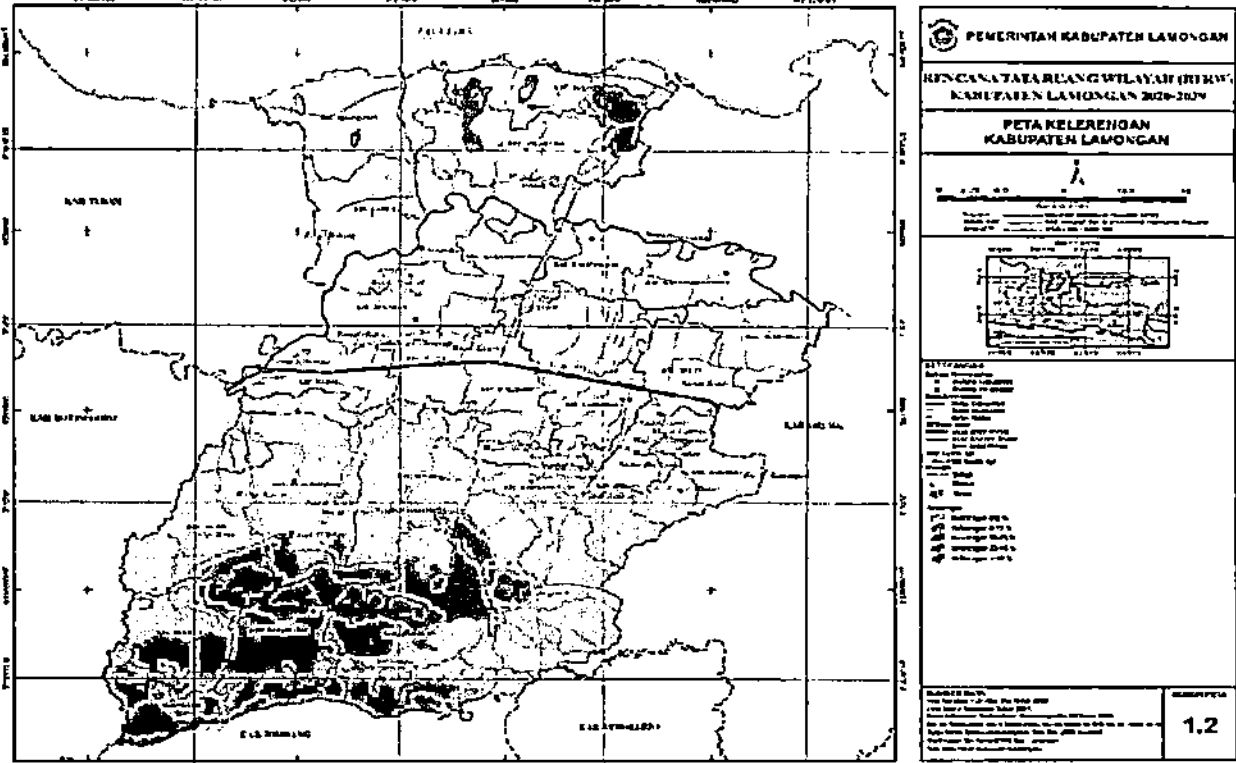
Sumber: Lamongan Dalam Angka (2025)

Kondisi berikutnya adalah analisis topografi yang secara langsung menentukan distribusi dan jenis sumber daya alam serta potensi ekonomi spesifik masing-masing wilayah di Lamongan. Perbedaan ketinggian, jenis tanah, dan ketersediaan air (hidrologi) membagi Lamongan menjadi zona ekonomi yang khas, misalnya daerah dataran rendah yang subur ideal untuk pertanian padi intensif, sedangkan kawasan kapur utara dan selatan kaya akan bahan tambang non-logam dan menawarkan potensi pariwisata berbasis pantai/goa. Dengan memahami struktur geografi ini, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan sektor unggulan di setiap sub-wilayah (pertanian, perikanan, pertambangan, dan jasa), yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan

Secara topografis, Kabupaten Lamongan memiliki ketinggian antara 0–186 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di Kecamatan Ngimbang. Hasil digitasi peta kelerengan menunjukkan bahwa morfologi Lamongan didominasi dataran dengan kelerengan 0–8% seluas 92.290 ha, diikuti 8–15% (50.907 ha), 15–25% (23.919 ha), 25–40% (6.571 ha), dan >40% (1.534 ha). Dengan mengacu kepada klasifikasi kelerengan, maka dapat ditentukan morfologi Kabupaten Lamongan sesuai dengan kelerengannya. Kelerengan 0-8% merupakan dataran, kelerengan 8-15% merupakan Perbukitan berelif halus, kelerengan 15 – 25% merupakan Perbukitan berelif sedang, kelerengan 25-40% sampai >40% merupakan Perbukitan berelif kasar. Secara keseluruhan, topografi Lamongan cenderung datar hingga berge-lombang dengan sebagian kecil wilayah perbukitan di bagian selatan dan barat.

Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Lamongan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

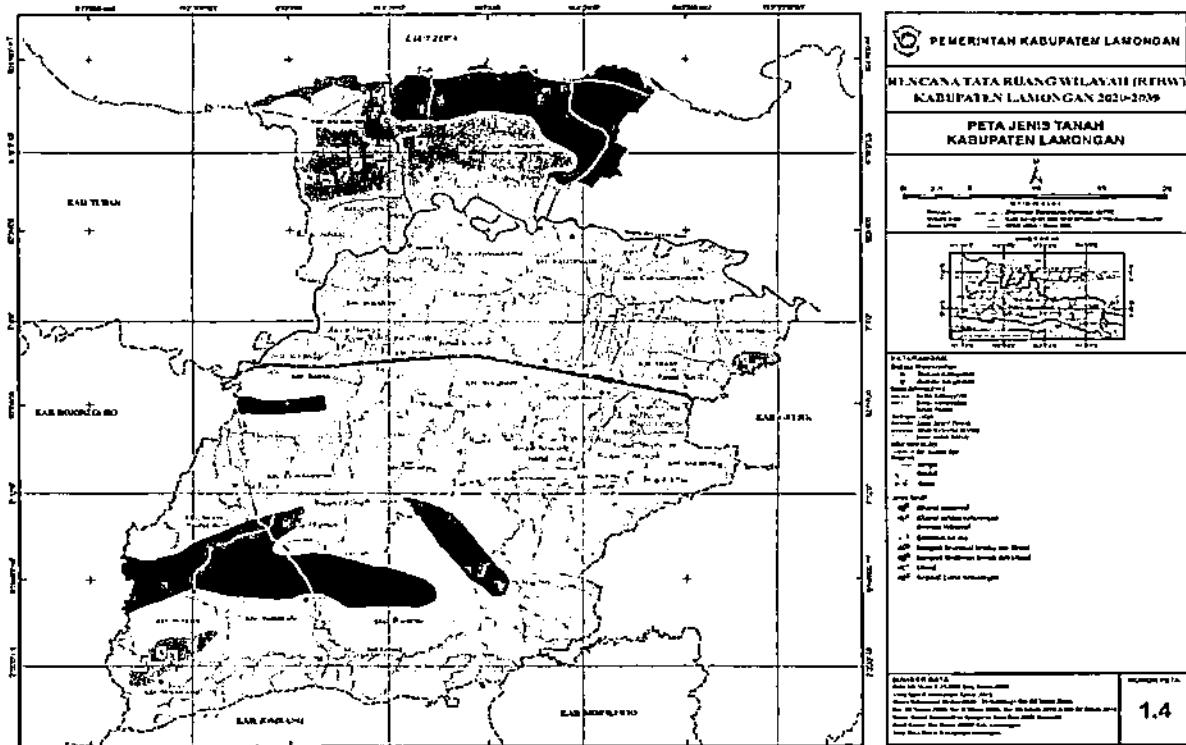


Dominasi morfologi dataran (0-8%) yang mencakup lebih dari sepertiga luas wilayah menunjukkan Lamongan memiliki potensi besar untuk ekspansi kawasan budidaya dan pembangunan infrastruktur dasar dengan biaya yang relatif efisien. Namun, konsentrasi wilayah perbukitan di ketinggian yang lebih curam (15 persen hingga >40 persen) terutama di selatan, mengindikasikan bahwa pembangunan di zona tersebut memerlukan perhatian khusus terhadap risiko erosi dan stabilitas lahan, serta membutuhkan investasi lebih tinggi dalam pembangunan konektivitas. Data kelerengan ini penting untuk perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, sekaligus untuk menentukan strategi program penanggulangan kemiskinan berbasis lahan dan mitigasi bencana di daerah yang rawan.

Secara fisiografis, wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara dan selatan termasuk dalam Zone Rembang yang disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan. Sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randublatung yang kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, pengaruh iklim dan organisme yang bekerja terhadap batuan induk pada relief tertentu dan jangka waktu tertentu serta mampu menumbuhkan tanaman. Rincian klasifikasi fisiografis adalah sebagai berikut:

1. Jenis tanah di Kabupaten Lamongan terdiri dari Alluvial Kelabu Kekuningan seluas 68.760,60 ha, Alluvial Hidromof seluas 2.415,61 ha, Asosiasi Hidromof seluas 1.381,16 ha, Grumosol Kelabu seluas 66.688,90 ha, Komplek Grumosol Kelabu dan Litosol seluas 1.446,90 ha, Komplek Mediteran Merah dan Litosol seluas 23.590,81 ha, Regosol Coklat Kekuningan seluas 9.730,72 ha, Litosol seluas 1.206,02 ha. Dominasi jenis tanah Alluvial dan Grumosol Kelabu menunjukkan Lamongan memiliki potensi besar untuk pertanian pangan, namun jenis tanah Grumosol dan Komplek Mediteran yang keras dan rentan retak saat kering menunjukkan adanya tantangan pengelolaan lahan di wilayah tersebut yang dapat memengaruhi produktivitas petani kecil dan memperburuk kerentanan ekonomi mereka terhadap kemiskinan.
2. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Aluvial seluas 2.422,01 ha, Aluvium dan Endapan Koastal seluas 67.280,03 ha, Formasi Kalipucang seluas 8.121,16 ha, Formasi Lidah seluas 6.294,25 ha, Formasi Pucangan seluas 12.273,89 ha, Formasi Tambakromo seluas 30.660,10 ha, Formasi Lengkong seluas 10.119,28 ha, Anggota Bawah Formasi Tuban seluas 1.022,50 ha, Anggota Napal Formasi Kujang seluas 789,65 ha, Anggota Tengah Formasi Kujang seluas 12.390,10 ha, Anggota Batugamping Prupuh Formasi Kunjung seluas 530,71 ha, Anggota Atas Formasi Kunjung seluas 517,11 ha, Formasi Kalibeng seluas 9.429,20 ha, Formasi Klitik seluas 328,79 ha, Formasi Mundu seluas 11.608,06 ha, Formasi Sonde seluas 1.433,90 ha. Keberadaan formasi batuan seperti Formasi Tambakromo, Anggota Tengah Formasi Kujang, dan formasi yang kaya unsur karbonatan lainnya sangat penting sebagai sumber daya mineral non-logam yang dapat mendukung sektor pertambangan dan industri konstruksi di Lamongan, yang menjadi sumber pendapatan daerah. Namun, daerah dengan dominasi batuan sedimen tua dan kapur (seperti Formasi Kujang atau Formasi Pucangan) sering kali memiliki masalah ketersediaan air tanah yang kritis, yang secara langsung meningkatkan kerentanan masyarakat miskin terhadap kemarau panjang dan membatasi potensi pertanian, sehingga memerlukan intervensi spesifik.

Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Lamongan



Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Gambaran umum berikutnya adalah klimatologi dan hidrologi, dimana pola curah hujan, suhu, dan ketersediaan air permukaan maupun air tanah merupakan variabel vital yang secara langsung menentukan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kebutuhan air minum rumah tangga. Fluktuasi iklim ekstrem, seperti musim kemarau panjang yang memicu kekeringan atau musim hujan intensif yang menyebabkan banjir yang sering terjadi di Lamongan, secara signifikan meningkatkan kerentanan mata pencaharian masyarakat miskin yang sangat bergantung pada sumber daya alam, sehingga memerlukan strategi mitigasi risiko dan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dalam RPKD.

Secara klimatologi, Kabupaten Lamongan memiliki rata-rata curah hujan tahunan sebesar 1.732 mm dengan rata-rata 144 hari hujan per tahun. Variasi curah hujan antar wilayah menunjukkan perbedaan kondisi geografis dan topografi yang cukup mencolok. Wilayah selatan seperti Kecamatan Modo (2.734 mm, 228 hari), Ngimbang (2.507,5 mm, 209 hari), dan Kayen Ngimbang (2.453 mm, 204 hari) memiliki curah hujan relatif tinggi karena berada di kawasan perbukitan. Sedangkan wilayah pesisir utara seperti Paciran (897 mm, 75 hari) dan Brondong (734 mm, 61 hari) mencatat curah hujan yang jauh lebih rendah. Secara umum, bagian selatan Lamongan cenderung lebih basah dibandingkan bagian utara yang lebih kering, dipengaruhi oleh ketinggian wilayah serta kedekatannya dengan kawasan pesisir Laut Jawa.

Perbedaan pola curah hujan yang sangat kontras ini menciptakan dua tantangan kerentanan ekstrem dan peluang sumber daya yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan. Curah hujan tinggi di wilayah selatan memberikan potensi ketersediaan air yang lebih baik untuk pertanian tadah hujan dan perkebunan, namun meningkatkan risiko erosi dan longsor di kawasan perbukitan yang dapat merusak aset masyarakat miskin. Sebaliknya, wilayah pesisir utara yang sangat kering menghadapi keterbatasan sumber air

bersih dan tantangan irigasi yang ekstrem, secara langsung membatasi produktivitas pertanian dan membebani masyarakat miskin dengan biaya akses air. Oleh karena itu, strategi RPKD harus mencakup pengembangan infrastruktur konservasi air seperti embung dan sumur resapan di wilayah kering, serta program diversifikasi mata pencaharian non-pertanian yang adaptif terhadap iklim di kawasan pesisir, guna mengurangi ketergantungan dan kerentanan ekonomi masyarakat terhadap fluktuasi iklim.

Tabel 2.2. Curah Hujan Kabupaten Lamongan

No	Stasiun Pengamatan	Kecamatan	Curah Hujan (mm)	Rata-Rata Hari Hujan (Hari)
1	Lamongan	Lamongan	1,530	92
2	Takeran	Tikung	1,281	83
3	Mantup	Mantup	1,445	80
4	Kembangbahu	Kembangbahu	1,403	86
5	Sukodadi	Sukodadi	1,477	85
6	Gondang	Sugio	1,587	91
7	Kedungpring	Kedungpring	1,414	87
8	Gandang	Ngimbang	1,599	91
9	Prijetan	Kedungpring	1,835	111
10	Kayen	Ngimbang	1,601	81
11	Bluluk	Blukuk	2,050	109
12	Ngimbang	Ngimbang	1,447	82
13	Baru/Girik	Ngimbang	1,727	106
14	Modo	Modo	1,454	91
15	Pucuk	Pucuk	1,727	98
16	Babat	Babat	1,437	99
17	Jabung	Laren	1,396	76
18	Paciran	Paciran	543	53
19	Brondong	Brondong	794	62
20	Bluri	Selokuro	1,132	73
21	Pangkaterejo	Maduran	1,090	75
22	Karanggeneng	Karanggeneng	1,198	79
23	Blawi	Karangbinangun	1,239	70
24	Kuro	Karangbinangun	1,330	89
25	Karangbinangun	Karangbinangun	970	68
Kabupaten Lamongan			1,388	85

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai air dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir pada sebagian wilayah. Namun sebaliknya pada saat musim kemarau, di sebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang. Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km dengan debit rata – rata $531,61 \text{ m}^3/\text{bulan}$ (debit maksimum $1.758,46 \text{ m}^3$ dan debit minimum $19,58 \text{ m}^3$). Kali Blawi sepanjang ± 27 Km dan Kali Lamong sepanjang ± 65 Km yang bermata air di Kabupaten Lamongan, dengan jumlah sebanyak 33 Waduk dengan luas keseluruhan 2.326 Ha dan volume $51.093.192 \text{ m}^3$.

Data hidrologi yang menunjukkan surplus air di musim hujan dan defisit di musim kemarau, ditambah dengan adanya tiga sungai besar dan 33 waduk menghadirkan dilema dan peluang besar bagi penanggulangan kemiskinan. Di satu sisi, melimpahnya air permukaan, terutama dari Bengawan Solo, menciptakan potensi pertanian yang sangat tinggi (irigasi dan perikanan air tawar), yang dapat menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, risiko banjir musiman yang parah akibat luapan sungai-sungai ini dapat merusak lahan, infrastruktur, dan aset produktif, yang secara cepat mendorong masyarakat rentan jatuh kembali ke jurang kemiskinan. Oleh karena itu, strategi RPKD harus fokus pada optimalisasi pengelolaan 33 waduk untuk menjamin ketersediaan air minum dan irigasi selama kemarau, sekaligus melaksanakan program mitigasi banjir yang komprehensif (seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul) untuk melindungi masyarakat miskin dari kerugian ekonomi akibat bencana hidrologi.

Keberadaan waduk di Kabupaten Lamongan dapat mengairi lahan sawah seluas 20.960 Ha, terutama lahan sawah berpengairan teknis dan $\frac{1}{2}$ teknis sehingga keberadaan waduk sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun, dibalik melimpahnya sumberdaya air baik air sungai, air waduk, dan air rawa, masih terdapat beberapa desa di Kabupaten Lamongan berkategori sulit air. Hal tersebut sebagaimana hasil analisa KLHS RPJMD yang menyebutkan bahwa ketersediaan air bersih sebesar 515.817.092 m³/tahun sedangkan kebutuhan air bersih sebesar 2.207.404.800 m³/tahun. Maka dari itu kebutuhan air bersih Kabupaten Lamongan mengalami defisit sebesar -1.691.586.898 m³/tahun. Upaya peningkatan sumber daya air dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Meskipun potensi irigasi dari 20.960 Ha lahan sawah berpengairan teknis berkat keberadaan waduk dapat menjadi bantalan ekonomi (potensi) yang signifikan untuk mencegah kemiskinan di kalangan petani, defisit air bersih tahunan sebesar hampir 1,7 miliar m³ (tantangan) adalah isu krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat miskin. Defisit ini tidak hanya mengancam kesehatan publik karena sanitasi dan air bersih yang tidak memadai, tetapi juga memaksa rumah tangga miskin untuk mengalokasikan pendapatan yang terbatas untuk membeli air, sehingga meningkatkan beban ekonomi dan kerentanan mereka. Oleh karena itu, RPKD harus secara tegas memprioritaskan program perlindungan dan pelestarian sumber air, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur air bersih yang inovatif untuk mengatasi defisit ini, guna menjamin hak dasar masyarakat Lamongan terhadap air yang layak dan mengurangi pengeluaran non-produktif rumah tangga miskin.

Kabupaten Lamongan juga terdapat rawa sebagai penampungan air. Jumlah rawa sebanyak 11 rawa dengan luas keseluruhan 6.878 Ha dan kapasitas volumenya sebesar 59.743.500 m³. Rawa juga sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk kegiatan pertanian. Rawa yang ada di Kabupaten Lamongan dapat mengairi lahan sawah berpengairan sederhana seluas 9.934 Ha. Rawa terluas di Kabupaten Lamongan adalah waduk Jabung dengan luas 4.968 Ha dan volume 37.660.000 m³.

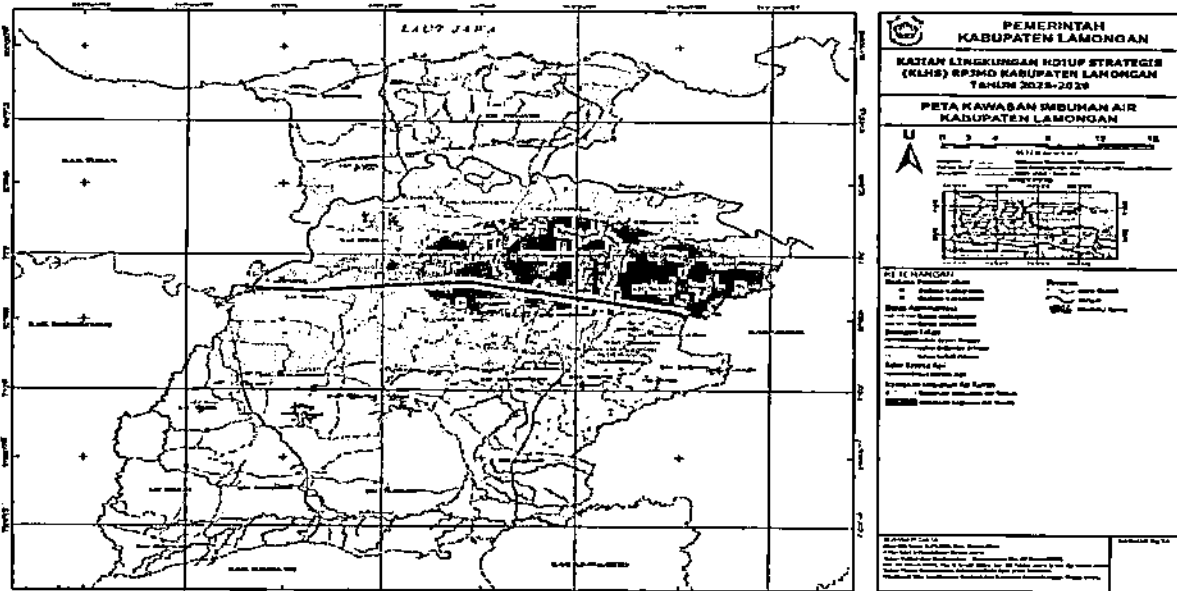
Keberadaan 11 rawa dengan total volume yang signifikan, khususnya Rawa Jabung, menunjukkan adanya potensi besar dalam pemanfaatan lahan basah tidak hanya untuk

Kabupaten Lamongan dibentuk oleh 3 (tiga) cekungan air tanah, yaitu: (i) CAT Panceng yang berada di Kecamatan Brondong, Paciran dan Solokuro; (ii) CAT Tuban yang berada di Kecamatan Brondong; dan (iii) CAT Surabaya – Lamongan yang berada di Kecamatan Laren, Maduran, Karanggeneng, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah, Deket, Turi, Lamongan, Sukodadi, Babat, Sekaran, Sebagian Kembangbahu, Kodo, dan Kedungpring.

[illegible]

Distribusi cekungan air tanah (CAT) menunjukkan kerentanan spesifik di wilayah utara (CAT Panceng dan Tuban), yang didominasi batuan karbonat, dimana kuantitas dan kualitas air tanah sering menjadi masalah kritis bagi masyarakat. Sebaliknya, CAT Surabaya-Lamongan di wilayah tengah dan timur memiliki potensi air tanah yang lebih besar, namun kualitasnya rentan terhadap kontaminasi dari aktivitas pertanian dan domestik. Oleh karena itu, RPKD harus memasukkan strategi konservasi dan perlindungan CAT, terutama di wilayah utara, untuk menjamin ketersediaan air bersih dan menekan pengeluaran rumah tangga miskin akibat krisis air.

Gambar 2.6. Peta Kawasan Imbuhan Air Kabupaten Lamongan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

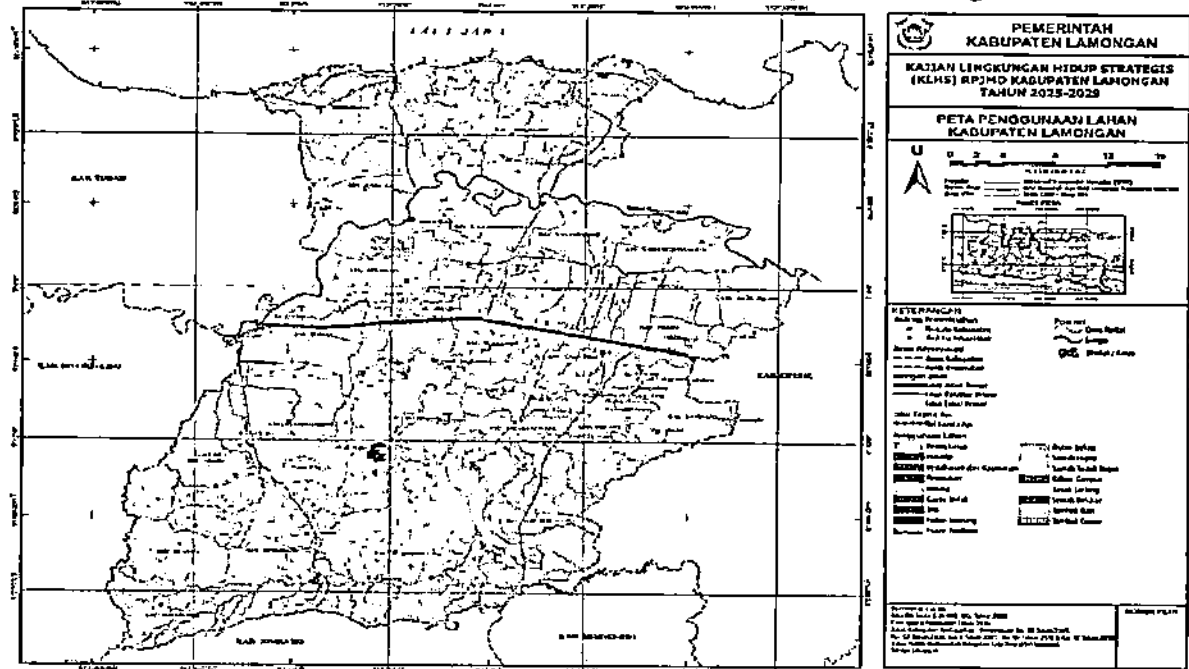
2.1.2 Karakteristik Pembagian Peruntukan Lahan

Pembagian peruntukan lahan atau tata ruang di Kabupaten Lamongan merupakan cerminan dari kondisi fisik dan geografis wilayah serta menentukan potensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Analisis peruntukan lahan sangat vital dalam konteks RPKD karena menunjukkan sebaran kawasan budidaya (pertanian, perikanan, permukiman, industri) dan kawasan lindung, yang secara langsung berkorelasi dengan sumber mata pencaharian utama masyarakat, tingkat kepadatan penduduk, dan ketersediaan ruang untuk infrastruktur. Pemahaman mengenai alokasi lahan menjadi dasar untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, memastikan intervensi program tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga menjaga fungsi ekologis dan ketersediaan lahan untuk generasi mendatang.

Penggunaan lahan di Kabupaten Lamongan saat ini didominasi oleh penggunaan lahan tidak terbangun, berupa sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegalan, tambak, dan hutan dengan prosentase sebesar 88,55 persen atau dengan luas mencapai 155.156,06 ha. Sedangkan lahan terbangun berupa permukiman, pelabuhan dan industri sebesar 15.188,16 ha atau 8,67 persen dari luas wilayah, sedangkan perairan seperti sungai, waduk dan rawa seluas 4.876,50 ha atau 2,78 persen.

Dominasi lahan tidak terbangun (88,55 persen), khususnya sawah dan tambak, menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan basis ekonomi utama Lamongan dan menjadi sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat, termasuk kelompok miskin. Oleh karena itu, strategi RPKD harus fokus pada perlindungan dan peningkatan produktivitas lahan budidaya, dengan tetap memastikan pertumbuhan lahan terbangun (permukiman dan industri) dikelola secara terencana agar tidak mengancam ketahanan pangan dan sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakat rentan.

Gambar 2.7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Peta penggunaan lahan Kabupaten Lamongan dapat dispesifikasi berdasarkan masing-masing jenis peruntukan lahan, seperti hutan, sawah, kebun campur, dan ragam jenis lainnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Spesifikasi Peruntukan Lahan Kabupaten Lamongan dan Implikasinya bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
1	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1. Kondisi Eksisting Luas hutan lindung yang ada di Kabupaten Lamongan sebesar 255,28 ha, sedangkan hutan produksi seluas 31.437,57 ha. Sedangkan jika dilihat berdasarkan KPH, hutan yang ada di Kabupaten Lamongan terbagi oleh 3 (tiga) KPH yaitu KPH Mojokerto seluas 22.679,44 ha, KPH Tuban seluas 7.622,76 ha dan KPH Jombang seluas 1.390,64 ha. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Hutan produksi yang luas menjadi potensi sumber daya kayu dan hasil hutan non-kayu, yang dapat dioptimalkan melalui program perhutanan sosial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di sekitar hutan.

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
		b. Namun, tekanan terhadap kawasan hutan (degradasi atau perambahan) menjadi tantangan yang dapat memicu bencana alam (erosi) dan mengurangi daya dukung lingkungan, yang secara langsung mengancam aset dan mata pencaharian masyarakat rentan. c. Oleh karena itu, RPKD perlu mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan.
2	Hutan Mangrove	1. Kondisi Eksisting Hutan mangrove di Kabupaten Lamongan mempunyai luas 83,50 ha terdapat di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Keberadaan hutan mangrove merupakan aset ekologis vital yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan gelombang laut, serta menjadi tempat pemijahan berbagai jenis biota laut. b. Mangrove memberikan potensi ekonomi berbasis ekowisata dan perikanan berkelanjutan yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir miskin. c. Perluasan dan pelestarian area mangrove harus menjadi prioritas di wilayah utara untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana laut.
3	Sawah	1. Kondisi Eksisting Penggunaan sawah di Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Sawah irigasi di Kabupaten Lamongan seluas 62.297,58 ha, dan sawah tadah hujan mencapai luas 42.127,52 ha. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Luas sawah irigasi yang signifikan (62.297,58 ha) adalah basis utama ketahanan pangan dan penyerap tenaga kerja terbesar, yang menjadi penopang pendapatan mayoritas petani kecil di Lamongan.

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
		b. Namun, luasnya sawah tadah hujan (42.127,52 ha) menimbulkan kerentanan ekonomi yang tinggi bagi petani terhadap musim kemarau dan fluktuasi harga, sehingga pendapatan mereka tidak stabil. c. Strategi RPKD harus mencakup peningkatan efisiensi irigasi sawah tadah hujan melalui pembangunan infrastruktur air skala kecil dan pelatihan teknologi pertanian adaptif iklim untuk menstabilkan pendapatan rumah tangga petani.
4	Kebun Campur	1. Kondisi Eksisting Penggunaan Kebun Campur di Kabupaten Lamongan mencapai luas 4.884,15 ha tersebar hampir diseluruh kecamatan. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Kebun campur merupakan sumber diversifikasi pangan dan pendapatan yang penting bagi rumah tangga miskin, karena menyediakan hasil non-padi (sayuran, buah, rempah) dan dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. b. Potensi kebun campur dapat ditingkatkan melalui program intensifikasi dan hilirisasi produk hortikultura untuk menciptakan nilai tambah, yang sangat relevan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan perempuan di perdesaan. c. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi akses pasar dan permodalan bagi petani kebun campur untuk menjadikan kegiatan ini sumber penghidupan yang berkelanjutan.
5	Tanah Ladang	1. Kondisi Eksisting Penggunaan tanah ladang di Kabupaten Lamongan mencapai luas 13.008,32 ha tersebar hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Meskipun lebih kecil dari sawah, tanah ladang penting untuk diversifikasi komoditas pangan (palawija dan tanaman keras) dan sering menjadi andalan masyarakat miskin yang memiliki akses terbatas ke sawah irigasi.

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
		b. Tantangan utama pada tanah ladang adalah produktivitas yang rendah dan ketergantungan penuh pada curah hujan, sehingga rentan terhadap kegagalan panen yang dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga miskin. c. RPKD perlu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan sistem konservasi tanah dan air untuk meningkatkan hasil ladang dan menstabilkan pendapatan petani lahan kering.
6	Semak Belukar	1. Kondisi Eksisting Penggunaan semak belukar di Kabupaten Lamongan mencapai luas 81,56 ha. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Luas semak belukar yang relatif kecil mengindikasikan tingginya intensitas pemanfaatan lahan di Lamongan, namun keberadaannya dapat menjadi kawasan konservasi kecil atau sumber pakan ternak alternatif bagi masyarakat perdesaan. b. Kawasan semak belukar juga berpotensi untuk direhabilitasi atau dikonversi menjadi kawasan budidaya produktif melalui program perhutanan rakyat atau agrosilvopastura, yang dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat miskin.
7	Tambak	1. Kondisi Eksisting Penggunaan tambak ikan di Kabupaten Lamongan mencapai luas 884,30 ha sedangkan tambak garam seluas 96,28 ha 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Tambak ikan dan garam di wilayah pesisir memberikan potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat di Kecamatan utara. b. Tantangan terbesar yang dihadapi petambak miskin adalah degradasi kualitas air, penyakit, dan fluktuasi harga, serta risiko kehilangan aset akibat abrasi atau gelombang pasang, yang memerlukan intervensi perlindungan sosial dan bantuan teknis.

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
		c. Strategi RPKD harus mendukung budidaya perikanan berkelanjutan (minapadi atau silvofishery) dan meningkatkan nilai tambah produk garam rakyat untuk menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat petambak.
8	Rawa	1. Kondisi Eksisting Penggunaan lahan berupa rawa di Kabupaten Lamongan mencapai luas 2.233,81 ha 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Rawa adalah aset hidrologis yang vital, berfungsi ganda sebagai daerah penampungan air alami (mitigasi banjir) dan menyediakan sumber mata pencaharian melalui perikanan darat dan irigasi sawah sederhana. b. Tantangannya adalah rawa sering kali berada di daerah yang rawan banjir tahunan, yang dapat merusak aset masyarakat miskin, sehingga diperlukan pengelolaan air yang terstruktur untuk menyeimbangkan konservasi dan produktivitas. c. RPKD perlu mendorong program pemberdayaan masyarakat sekitar rawa dengan fokus pada teknik perikanan dan pertanian yang adaptif terhadap kondisi lahan basah.
9	Waduk	1. Kondisi Eksisting Penggunaan lahan berupa waduk di Kabupaten Lamongan mencapai luas 1.729,91 ha. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Luas waduk yang signifikan merupakan potensi strategis untuk memastikan ketersediaan air irigasi teknis sepanjang tahun, yang esensial untuk meningkatkan hasil pertanian dan menstabilkan pendapatan petani kecil sehingga mencegah mereka jatuh miskin b. Selain irigasi, waduk juga memiliki potensi sebagai sumber air baku dan kawasan ekowisata, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
		c. Perawatan dan pendangkalan waduk menjadi tantangan yang harus diatasi melalui program rehabilitasi dan normalisasi untuk mempertahankan manfaatnya bagi penanggulangan kemiskinan.
10	TPA	1. Kondisi Eksisting Penggunaan lahan berupa Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Lamongan mencapai luas 9,12 ha 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Meskipun luasannya kecil, TPA merupakan bagian penting dari manajemen lingkungan perkotaan dan sering menjadi sumber penghidupan bagi kelompok masyarakat paling rentan, yaitu pemulung, yang perlu diakui dan dilindungi. b. Tantangan utamanya adalah dampak negatif TPA terhadap kesehatan dan lingkungan di sekitar permukiman, yang dapat memicu kemiskinan struktural akibat penyakit dan penurunan kualitas hidup. c. RPKD harus mengintegrasikan program peningkatan kesejahteraan pemulung (seperti peningkatan sanitasi dan akses kesehatan) dengan upaya transisi menuju TPA yang lebih ramah lingkungan dan terkelola dengan baik.
11	Sungai	1. Kondisi Eksisting Sungai di Kabupaten Lamongan seluas 912,78 ha. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Sungai adalah sistem drainase dan sumber air baku yang penting, sekaligus menjadi potensi perikanan darat dan pariwisata sungai yang dapat mendukung mata pencaharian masyarakat di sepanjang bantaran sungai. b. Tantangan terbesar adalah risiko banjir tahunan yang merendam kawasan permukiman dan pertanian miskin, serta potensi pencemaran sungai yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup masyarakat rentan. c. Penanggulangan kemiskinan perlu melihat pentingnya program normalisasi dan konservasi sungai, diikuti dengan pemberdayaan ekonomi di sekitar sungai yang ramah lingkungan.

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
12	Permukiman	1. Kondisi Eksisting Permukiman di Kabupaten Lamongan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Luas kawasan permukiman sebesar 14.255,17 ha, baik yang dibangun oleh pengembang maupun swadaya masyarakat. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Perkembangan permukiman yang pesat menunjukkan pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial-ekonomi. Namun hal ini menciptakan tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar (sanitasi dan air bersih) yang layak, terutama di permukiman padat dan kumuh. b. Kawasan permukiman menjadi fokus utama intervensi kemiskinan karena di sinilah masyarakat miskin mengakses layanan dasar, kualitas permukiman yang buruk berbanding lurus dengan kerentanan sosial dan kesehatan. c. RPKD harus mengarahkan program perbaikan rumah tidak layak huni dan peningkatan akses sanitasi yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin.
13	Industri	1. Kondisi Eksisting Industri di Kabupaten Lamongan mulai berkembang terutama industri besar yang berada di kawasan pantai utara Lamongan. Selain itu industri di Kabupaten Lamongan berkembang di jalan yang menghubungkan Babat – Kedungpring – Modo – Ngimbang maupun pada ruas jalan yang menghubungkan Lamongan - Mantup. Selain itu pada ruas jalan yang menghubungkan Sukodadi – Karanggeneng tumbuh kegiatan industri penggilingan padi dan pengepakan beras. Luas per Kawasan pariwisata di Kabupaten Lamongan mencapai luas 71,23 ha dengan dominasi peruntukan berada di Kawasan pesisir utara Kabupaten Lamongan seperti Wisata Bahari Lamongan (WBL), Goa Maharani, makam Sunan Drajat, Tanjung Kodok dlluntukan industri di Kabupaten Lamongan sebesar 636,64 ha. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
		a. Pengembangan kawasan industri di Pantura dan sepanjang koridor jalan utama, serta potensi pariwisata berbasis pesisir dan budaya yang signifikan, merupakan motor penggerak utama penciptaan lapangan kerja di sektor non-pertanian. b. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM agar masyarakat miskin memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pariwisata tersebut, sehingga dapat diakses oleh angkatan kerja lokal. c. Tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan industri dan pariwisata bersifat inklusif dan tidak menimbulkan dampak lingkungan negatif yang justru merugikan kesehatan dan mata pencaharian masyarakat miskin di sekitarnya.
14	Pariwisata	1. Kondisi Eksisting Kawasan pariwisata di Kabupaten Lamongan mencapai luas 71,23 ha dengan dominasi peruntukan berada di Kawasan pesisir utara Kabupaten Lamongan seperti Wisata Bahari Lamongan (WBL), Goa Maharani, makam Sunan Drajat, Tanjung Kodok dll. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Kawasan pariwisata, terutama di pesisir utara, ada-lah potensi ekonomi jasa yang signifikan untuk men-ciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin di sekitarnya, terutama di sektor informal dan UMKM. b. Penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata bersifat inklusif, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan (misalnya homestay dan kuliner) kepada masyarakat lokal. c. Tantangannya adalah menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir dan situs budaya agar potensi pariwisata tidak menurun, yang pada akhirnya dapat mengancam mata pencaharian yang telah terbentuk.

No	Peruntukan Lahan	Rincian Kondisi dan Implikasi bagi Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan
15	Kawasan Transportasi	1. Kondisi Eksisting Kawasan pelabuhan di Kabupaten Lamongan terdiri dari Pelabuhan Umum Sedayu Lawas, Pelabuhan Umum Lamongan Shorebase (Tanjung Pakis), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan untuk kepentingan sendiri serta pelabuhan penyeberangan ASDP. Luas kawasan pelabuhan sebesar 196,75 ha. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Keberadaan berbagai jenis pelabuhan menunjukkan Lamongan adalah hub logistik dan perikanan di Pantura, yang merupakan potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja formal dan informal di sektor maritim dan perdagangan. b. Optimalisasi pelabuhan (terutama PPN) sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pekerja pelabuhan yang rentan terhadap kemiskinan, melalui peningkatan rantai nilai dan akses pasar c. Desain penanggulangan kemiskinan perlu memastikan bahwa pengembangan pelabuhan diiringi dengan perlindungan lingkungan pesisir dari limbah, yang dapat mengancam mata pencaharian tradisional masyarakat.
16	Gardu Induk	1. Kondisi Eksisting Garduk Induk Lamongan berada di Kecamatan Lamongan seluas 14,10 ha. 2. Relevansi dengan Potensi dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan a. Gardu Induk (GI) ini merupakan infrastruktur vital yang menjamin ketersediaan listrik yang stabil, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri, UMKM, dan kegiatan produktif rumah tangga miskin. b. Ketersediaan listrik yang andal adalah prasyarat dasar bagi peningkatan kualitas hidup dan akses pendidikan/informasi bagi keluarga miskin. c. Meskipun tidak secara langsung mengurangi kemiskinan, keberadaan dan keandalan GI berfungsi sebagai faktor pendukung utama bagi semua strategi ekonomi dan sosial yang direncanakan dalam RPKD.

Sumber: Gabungan Hasil Analisis dengan KLHS RPJMD Kab Lamongan 2025-2029

Selain beberapa jenis peruntukan lahan yang dilihat dari potensi, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi alih fungsi lahan. Kasus di Kabupaten Lamongan, perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh tuntutan kebutuhan ruang karena pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan diikuti dengan pertambahan kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan fasilitas umum, kegiatan industri yang keseluruhannya membutuhkan ruang. Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan

penggunaan lahan Kabupaten Lamongan dari tahun 2011 ke tahun 2023, yang secara umum terdapat perubahan yang relatif signifikan.

Tabel 2.4. Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dan Tahun 2023

Pola Ruang	Luas Pola Ruang Lamongan Tahun 2011	Perubahan	Luas Tahun 2023
Hutan Lindung	46.0	209.28	255.28
Hutan Mangrove	81.0	2.50	83.50
Hutan Produksi	33,718.0	-2,280.43	31,437.57
LP2B dan Sawah Irigasi	50,002.0	12,295.58	62,297.58
Padang rumput	88.0	-6.44	81.56
Perkebunan	3,590.0	1,294.15	4,884.15
Permukiman	14,862.0	-21.83	14,255.17
Rencana Kawasan Industri	5,840.0	-5,203.36	636.6
Sawah Tadah Hujan	47,862.0	-5,734.48	42,127.5
Sungai	1,250.0	-337.22	912.78
Tambak	1,063.0	-82.42	980.58
Tegalan	11,831.0	1,177.32	13,008
Waduk	5,608.0	-3,878.09	1,730

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Dampak perubahan lahan di Lamongan adalah berkurangnya daerah pertanian produktif, berkurangnya daerah resapan air, dan meningkatkan aliran permukaan. Dampak utama yang terjadi akibat konversi hutan menjadi lahan perkebunan adalah dapat menyebabkan rusaknya lingkungan pada lahan-lahan tertentu atau berbagai gangguan terhadap lingkungan (banjir, perubahan iklim, maupun longsor), dan kegiatan konversi hutan ini juga dapat mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Selain kondisi tersebut, beberapa kondisi lain akibat perubahan lahan di Kabupaten Lamongan dan relevansinya dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Pertanian Pangan dan Perlindungan Lahan
 - a. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada alokasi lahan untuk LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan Sawah Irigasi, dengan kenaikan seluas 12.295,58 ha (dari 50.002,0 ha menjadi 62.297,58 ha). Peningkatan ini mencerminkan komitmen Lamongan dalam mempertahankan dan memperluas basis produksi pangan, yang merupakan potensi strategis utama dan penyerap tenaga kerja terbesar.
 - b. Namun di sisi lain, terjadi penurunan luas Sawah Tadah Hujan sebesar 5.734,48 ha. Perubahan ini mengindikasikan upaya untuk mengkonversi lahan tadah hujan yang rentan menjadi lahan irigasi, yang sangat penting untuk menstabilkan pendapatan petani miskin dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kegagalan panen akibat iklim. Strategi RPKD harus fokus pada perlindungan LP2B dan peningkatan teknologi irigasi untuk memastikan potensi ini dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kontraksi Kawasan Produksi dan Konservasi
 - a. Terjadi penurunan signifikan pada beberapa kawasan produksi, yaitu Hutan

Produksi (-2.280,43 ha), Sungai (-337,22 ha), dan Waduk (-3.878,09 ha). Penurunan luas hutan produksi dapat mengindikasikan tekanan lahan atau perubahan fungsi, yang berpotensi memengaruhi mata pencaharian masyarakat sekitar hutan dan mengurangi daya dukung lingkungan.

- b. Sementara itu, penurunan luas waduk dan sungai menjadi tantangan serius bagi pengelolaan sumber daya air dan mitigasi risiko bencana banjir/kekeringan. Defisit air bersih yang telah diuraikan sebelumnya akan semakin diperparah dengan berkurangnya luas waduk, yang secara langsung meningkatkan kerentanan masyarakat miskin terhadap krisis air.
3. **Pertumbuhan Lahan Kering dan Resiliensi Pesisir**
 - a. Meskipun terjadi penurunan sawah tadah hujan, lahan Tegalan/Ladang justru mengalami peningkatan sebesar 1.177,32 ha, yang mencerminkan upaya diversifikasi pertanian di lahan kering. Selain itu, Hutan Lindung dan Hutan Mangrove mengalami kenaikan (209,28 ha dan 2,50 ha), menunjukkan adanya upaya konservasi lingkungan.
 - b. Peningkatan hutan lindung dan mangrove adalah peluang besar untuk membangun resiliensi ekologis di wilayah pesisir utara dan kawasan perbukitan. RPKD dapat memanfaatkan tren konservasi ini untuk mengembangkan program ekonomi berbasis lingkungan (ekowisata atau perhutanan sosial) sebagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir dan pinggiran hutan yang rentan.
 4. **Dinamika Kawasan Non-Pertanian**
 - a. Perubahan lain yang menonjol adalah penurunan drastis pada luasan Rencana Kawasan Industri (-5.203,36 ha) dan sedikit penurunan pada luasan Permukiman (-21,83 ha). Meskipun terdapat indikasi penurunan alokasi lahan industri, perlu dicermati apakah ini merupakan realisasi pembangunan atau perubahan rencana tata ruang.
 - b. Sementara itu, penurunan luasan permukiman relatif kecil, menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan penduduk terjadi, ekspansi permukiman mungkin lebih vertikal atau terjadi alih fungsi dari kawasan lain yang tidak terdeteksi. Namun, kawasan permukiman tetap menjadi fokus RPKD, terutama dalam memastikan kualitas layanan dasar, terlepas dari sedikitnya perubahan luasan permukiman secara keseluruhan.

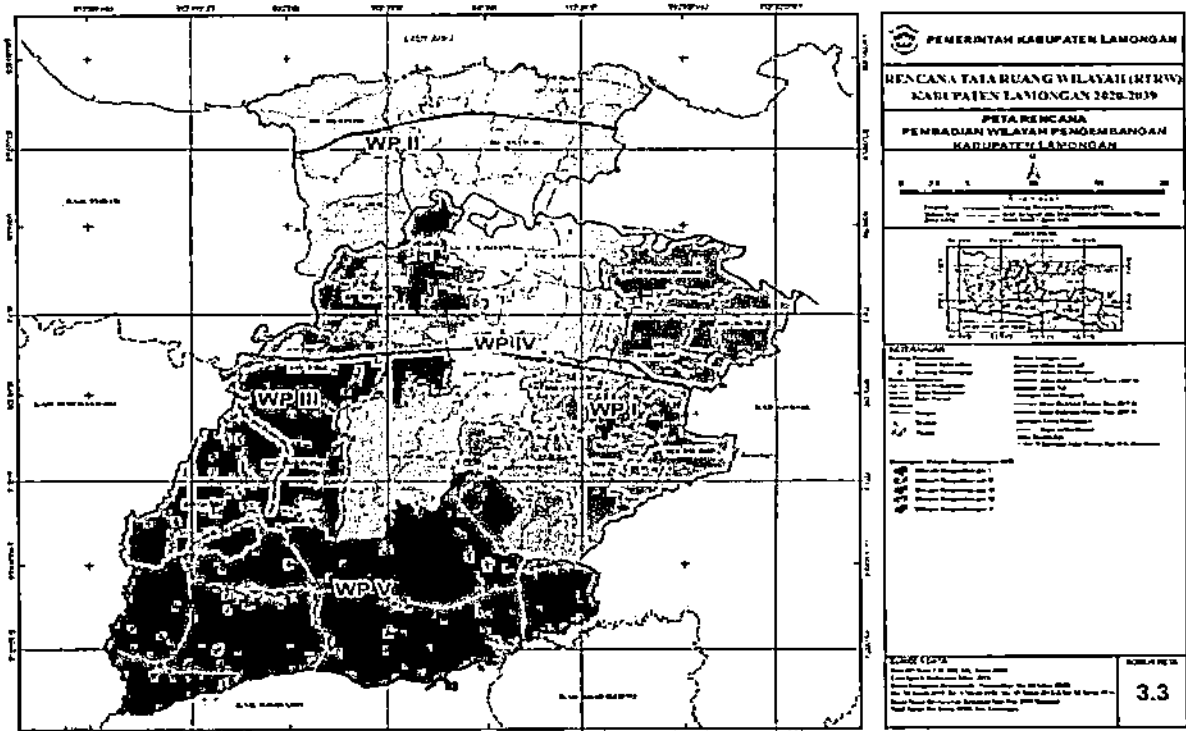
2.1.3 Karakteristik Pengembangan Wilayah

Peninjauan terhadap karakteristik pengembangan wilayah menjadi esensial karena arah dan pola pertumbuhan wilayah menentukan lokasi konsentrasi aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk, serta disparitas akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Analisis ini, yang mencakup pembagian wilayah ke dalam klaster atau zona pengembangan, memungkinkan identifikasi pusat-pusat pertumbuhan (potensi) yang dapat dijadikan mesin penggerak ekonomi inklusif dan wilayah yang tertinggal dengan konsentrasi kemiskinan tinggi. Dengan memahami karakteristik ini, RPKD dapat merumuskan kebijakan yang bersifat spasial dan diferensiatif, memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak hanya terfokus pada pusat kota, tetapi juga efektif menjangkau wilayah pinggiran dan

kawasan terpencil dengan intervensi yang tepat sasaran sesuai dengan potensi dan hambatan unik di masing-masing zona pengembangan.

1. Kabupaten Lamongan Sebagai Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila
 - a. Secara spasial, Kabupaten Lamongan termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional. Kawasan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi masing-masing daerah serta menurunkan ketimpangan antar daerah khususnya daerah-daerah di sekitar Kota Surabaya. Pada tahun 2019, kawasan ini diperluas hingga mencakup Jombang, Bojonegoro, dan Tuban mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038.
 - b. Keterlibatan Lamongan dalam SWP ini memberikan peluang akses yang lebih luas terhadap pasar kerja dan investasi regional, yang harus dimanfaatkan oleh RPKD untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan persaingan SDM dan potensi urbanisasi yang perlu diantisipasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi lokal.
2. Pusat Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Lamongan
 - a. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan 2020-2039, dari 27 kecamatan dibagi menjadi lima Pusat Wilayah Pengembangan (WP) yang didasarkan pada: (i) pergerakan terhadap pusat wilayah pengembangan (WP); (ii) tersedianya akses penunjang ke pusat wilayah pengembangan (WP); (iii) kesamaan terhadap potensi wilayah; dan (iv) mengurangi kesenjangan wilayah dan karakter penduduk. Tujuannya untuk menjalankan fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.
 - b. Pembagian WP ini menjadi kerangka kunci untuk mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi kemiskinan dan ketimpangan yang paling tinggi, sehingga intervensi RPKD dapat dilaksanakan secara fokus dan terukur. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan harus diselaraskan dengan fungsi dominan masing-masing WP untuk memaksimalkan dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Gambar 2.8. Peta Rencana Pembagian Pengembangan Kabupaten Lamongan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan diwujudkan melalui rencana pengembangan perdesaan dan perkotaan. Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat, dengan pengembangan agropolitan di Kecamatan Ngimbang dan minapolitan di Kecamatan Brondong, Paciran dan Glagah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan serta sentra bahan baku pangan.

Fokus pada pengembangan Agropolitan (Ngimbang) dan Minapolitan (Brondong, Paciran, Glagah) merupakan strategi kunci untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang mayoritas berada di sektor pertanian dan perikanan. RPKD harus memanfaatkan struktur ruang ini dengan cara mengarahkan investasi infrastruktur dan program peningkatan nilai tambah (hilirisasi) ke sentra-sentra tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja di luar sektor primer, dan pada akhirnya mempercepat penurunan angka kemiskinan berbasis mata pencaharian di wilayah pedesaan dan pesisir.

Dalam pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Lamongan diarahkan sebagai simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dibedakan menjadi:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), adalah Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusilo. Karakter PKN dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - a. Status PKN, sebagai bagian dari kawasan Gerbang Kertosusilo, memberikan Lamongan keunggulan kompetitif dalam menarik investasi besar dan mengembangkan sektor industri-jasa, yang menjadi potensi utama penciptaan lapangan kerja formal. Investasi ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik dan berkualitas (pekerjaan formal) bagi lulusan muda Lamongan, yang merupakan langkah vital dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, RPKD perlu memastikan adanya sinkronisasi antara kebutuhan industri di PKN dengan program pelatihan vokasi dan pendidikan di daerah.

- b. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan berupa tingginya biaya hidup di kawasan pusat dan potensi meningkatnya kemiskinan perkotaan jika pertumbuhan ekonomi tidak inklusif bagi pekerja berpendidikan rendah. Defisit perumahan yang layak dan kenaikan harga kebutuhan pokok di sekitar pusat kota harus diatasi melalui program subsidi silang dan pembangunan hunian terjangkau agar kenaikan upah tidak terkuras habis oleh biaya hidup. Hal ini bertujuan untuk melindungi kelompok pekerja berpendidikan rendah agar tetap dapat mengakses pekerjaan formal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - c. Strategi RPKD harus fokus pada peningkatan skill mismatch dan penyediaan perumahan layak huni bagi pekerja miskin di kawasan PKN.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Paciran - Brondong, Kecamatan Babat, Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Ngimbang. Karakter PKL dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
- a. PKL berfungsi sebagai simpul-simpul regional yang sangat strategis untuk meratakan pembangunan dan mengoptimalkan potensi lokal, seperti Paciran-Brondong (Minapolitan) dan Ngimbang (Agropolitan). Pengembangan sentra-sentra ini memungkinkan spesialisasi ekonomi, dimana intervensi RPKD dapat diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk unggulan di masing-masing lokasi. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja teknis yang memanfaatkan keunggulan komparatif wilayah tersebut.
 - b. Keberadaan PKL ini penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada PKN dan memberikan akses pasar yang lebih dekat bagi produk-produk pertanian dan perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat miskin di sekitarnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan pasar di PKL menjadi prioritas untuk menekan biaya logistik bagi produsen kecil dan meningkatkan harga jual produk mereka. Peningkatan akses pasar secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.
 - c. RPKD harus memastikan alokasi anggaran infrastruktur dan pemberdayaan terdistribusi ke PKL ini untuk memacu pertumbuhan yang inklusif.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Kecamatan Sukorame, Bluluk, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Pucuk, Tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren, Solokuro. Karakter PPK dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan PPK, yang mencakup banyak kecamatan, memegang peran krusial dalam mendekatkan pelayanan publik dasar dan administrasi pemerintahan kepada mayoritas penduduk perdesaan, termasuk yang miskin. Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana di PPK, seperti Puskesmas dan kantor layanan terpadu, secara langsung berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi hambatan geografis bagi kelompok miskin. Intervensi RPKD harus menjamin bahwa PPK memiliki kapasitas layanan yang memadai dan terjangkau.

- b. Meskipun skalanya lebih kecil dari PKL, PPK adalah titik penting distribusi program sosial dan bantuan kemiskinan yang efektif. Efektivitas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan modal usaha sangat bergantung pada kelancaran akses dan koordinasi di level PPK. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan di PPK menjadi kunci untuk memastikan ketepatan sasaran dan kecepatan respon terhadap masalah kemiskinan.
 - c. Strategi RPKD perlu memastikan kualitas infrastruktur PPK ditingkatkan agar dapat melayani kegiatan ekonomi dan sosial yang efisien, sehingga mengurangi biaya transportasi bagi masyarakat miskin untuk mengakses layanan.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi wilayah Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup, Desa Deketagung Kecamatan Sugio, Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng, Desa Centini Kecamatan Laren, Desa Weru Kecamatan Paciran. Karakter PPL dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
- a. PPL, yang berpusat pada tingkat desa, merupakan garis depan intervensi RPKD karena berhubungan langsung dengan komunitas dan kelompok rumah tangga termiskin. Pendekatan di PPL harus bersifat partisipatif (bottom-up), dimana program-program harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan spesifik yang diidentifikasi oleh masyarakat desa itu sendiri. Hal ini menjamin ketepatan sasaran intervensi dan memperkuat modal sosial sebagai landasan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.
 - b. Lokasi PPL harus menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur sosial dasar berskala mikro, seperti sanitasi, air bersih, dan akses jalan lingkungan, yang berdampak paling cepat pada peningkatan Indeks Kualitas Hidup (IKH) masyarakat. Pengembangan PPL menjadi sentra layanan dasar dapat secara efektif mengurangi risiko kesehatan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor lingkungan (misalnya stunting dan penyakit menular). Pemberdayaan UMKM mikro di PPL menjadi kunci untuk menghasilkan pendapatan tambahan non-pertanian bagi perempuan dan rumah tangga yang rentan.
 - c. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM mikro harus diintensifkan di PPL ini untuk menciptakan peluang penghidupan yang berkelanjutan di tingkat tapak.

Selanjutnya terkait dengan sistem jaringan, secara keseluruhan pengembangan prasarana akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Lamongan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan prasarana lingkungan. Berkaitan dengan kebijakan strategis

pengembangan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan pada beberapa sektor sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah maka perlu dilakukan revitalisasi pertanian dan peternakan. Karakter sektor pertanian di Lamongan dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - a. Revitalisasi ini memiliki potensi besar untuk menaikkan produktivitas dan pendapatan petani kecil, yang merupakan mayoritas penduduk miskin di Lamongan, melalui adopsi teknologi dan manajemen pertanian modern. Peningkatan hasil panen per hektar dan efisiensi biaya produksi secara langsung akan meningkatkan Surplus Rumah Tangga Pertanian (SRTP), yang merupakan indikator penting dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi integrasi petani ke dalam sistem informasi pasar untuk menjamin harga jual yang menguntungkan.
 - b. Tantangannya adalah memastikan akses yang adil terhadap modal, bibit unggul, dan teknologi bagi petani miskin, bukan hanya bagi petani skala besar. Selain itu, penguatan kelembagaan koperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadi kunci untuk mengatasi masalah skala ekonomi dan daya tawar petani miskin terhadap tengkulak dan pasar besar. Asuransi pertanian berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi agar petani tidak jatuh miskin saat terjadi gagal panen akibat bencana hidrometeorologi.
 - c. Strategi RPKD harus mencakup program asuransi pertanian dan pelatihan vokasi untuk kelompok tani miskin agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan pasar, sekaligus mengurangi risiko kegagalan panen.
2. Sektor Perikanan, meningkatkan budidaya darat dan perikanan tangkap melalui pengembangan secara intensifikasi, kecukupan sarana prasarana, dan pengembangan Kawasan perikanan. Karakter sektor perikanan di Lamongan dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan intensifikasi perikanan tangkap dan budidaya, terutama di kawasan Minapolitan, adalah peluang utama untuk menciptakan mata pencaharian alternatif dan meningkatkan pendapatan di wilayah pesisir yang miskin. Peningkatan hasil budidaya melalui penerapan teknologi bioflok atau budidaya terintegrasi dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan per unit lahan, yang sangat vital bagi petambak skala kecil. Strategi ini juga membuka peluang bagi diversifikasi usaha keluarga miskin di wilayah perairan.
 - b. Tantangan utama adalah degradasi lingkungan tambak, serta fluktuasi harga dan hasil tangkapan yang tidak stabil, yang membuat nelayan/petambak rentan terhadap kemiskinan musiman. Hilirisasi, seperti pengolahan hasil laut dan produk olahan ikan, merupakan cara efektif untuk menstabilkan harga dan menciptakan lapangan kerja pengolahan yang menyerap tenaga kerja perempuan di daerah pesisir. Oleh karena itu, penyediaan sarana pengolahan dan pendinginan (cold storage) di kawasan PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

dapat menjadi prioritas.

- c. RPKD harus mendukung program hilirisasi produk perikanan dan pembangunan koperasi nelayan/petambak agar mereka memiliki daya tawar dan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga mengurangi dominasi tengkulak.
3. Sektor Pariwisata, meningkatkan peran pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu meningkatkan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Karakter sektor pariwisata di Lamongan dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
- a. Pariwisata adalah mesin pencipta lapangan kerja di sektor jasa dan UMKM yang memiliki barrier to entry (hambatan masuk) yang rendah, sangat cocok untuk menyerap tenaga kerja dari rumah tangga miskin dan perempuan. Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal dapat menjadi saluran langsung bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka. Sektor ini juga berperan dalam mengurangi pengangguran tersembunyi, terutama di kalangan perempuan di perdesaan.
 - b. Untuk itu, RPKD harus mengarahkan program pelatihan keterampilan keramahan (hospitality) dan fasilitasi modal usaha bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam rantai nilai pariwisata (misalnya kuliner, souvenir, dan akomodasi sederhana). Penguatan regulasi dan peran serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diperlukan untuk mencegah praktik eksklusi dan memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari pertumbuhan sektor pariwisata.
 - c. Tantangannya adalah memastikan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan tidak menggeser masyarakat miskin dari lokasi strategis.
4. Sektor Industri, pembangunan sektor industri terutama agroindustri, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengembangan industri di daerah diharapkan tumbuh dan berkembang, industri-industri yang berbasis pada bahan baku produk pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ada di daerah dengan tetap menjaga kelanjutan pembangunan. Karakter sektor industri di Lamongan dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
- a. Fokus pada agroindustri sangat relevan untuk RPKD karena secara langsung menciptakan keterkaitan (linkage) antara sektor pertanian/perikanan dengan sektor industri, sehingga nilai tambah produk Lamongan tidak keluar daerah. Pengembangan klaster agroindustri di dekat sentra produksi dapat memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga harga jual produk primer petani (bahan baku) menjadi lebih kompetitif dan menguntungkan. Hal ini merupakan strategi struktural untuk mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya nilai tambah produk pertanian.
 - b. Keterkaitan ini akan menstabilkan harga bahan baku dan memperluas lapangan

kerja teknis dan non-teknis, yang merupakan peluang besar bagi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Fasilitasi modal usaha (KUR/UMKM) dan pelatihan manajemen bisnis bagi kelompok miskin menjadi prioritas agar mereka mampu bersaing dan menciptakan IKM yang inovatif dan berkelanjutan.

- c. RPKD harus menjamin bahwa pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis agroindustri mendapatkan pendampingan teknis dan akses pembiayaan yang mudah, sehingga masyarakat miskin dapat naik kelas dari produsen bahan baku menjadi pelaku industri pengolahan.

Selain beberapa sistem jaringan di atas, Kabupaten Lamongan juga sudah menetapkan kawasan strategis yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Penetapan kawasan strategis dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelestarian lingkungan, dan menciptakan sentra industri atau usaha kecil menengah. Penetapan kawasan strategis ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk memfokuskan alokasi sumber daya dan investasi infrastruktur pada area yang memiliki potensi ekonomi tertinggi, sehingga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi lebih besar. Dengan mengarahkan program pengembangan UMKM dan IKM di kawasan strategis, RPKD dapat memastikan bahwa peningkatan pendapatan dan peluang kerja lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan relevansinya dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Industri dan Maritim di Wilayah Utara yang menjadi kawasan peruntukan industri strategis didukung pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. Karakter Kawasan Peruntukan Industri dan Maritim di Wilayah Utara dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan ini menawarkan peluang besar dalam diversifikasi pekerjaan dari sektor perikanan tradisional ke sektor industri dan logistik formal, yang memberikan penghasilan lebih stabil bagi masyarakat pesisir yang miskin.
 - b. Tantangannya adalah memitigasi risiko skill gap antara kebutuhan tenaga kerja industri dan kualifikasi masyarakat lokal, serta mencegah degradasi lingkungan pesisir akibat aktivitas pelabuhan dan industri yang dapat merusak sumber daya perikanan tradisional.
2. Kawasan Agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Wilayah Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Ngimbang dengan Kawasan pendukung meliputi: Kecamatan Mantup, Kembangbahu, Sukorame, Blubuk, Sambeng, Modo dan Kecamatan Kedungpring. Karakter Kawasan Agropolitan di Lamongan dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan Agropolitan di Ngimbang dan wilayah pendukungnya adalah kunci untuk mengoptimalkan sumber daya pertanian lahan kering dan berbukit, yang dapat menjadi basis pengentasan kemiskinan melalui peningkatan nilai tambah komoditas non-padi (misalnya ternak dan hortikultura).
 - b. Tantangannya terletak pada keterbatasan infrastruktur air dan konektivitas di

wilayah selatan, sehingga RPKD harus memprioritaskan pembangunan irigasi mikro dan akses jalan usaha tani untuk menjamin potensi pertanian ini dapat diakses oleh petani miskin.

3. Kawasan Minapolitan, meliputi:

- a. Minapolitan Tangkap dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Brondong dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Paciran. Karakter Minapolitan Tangkap di Lamongan dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kawasan ini memiliki potensi besar dalam perikanan tangkap yang dapat ditingkatkan melalui modernisasi armada dan teknologi penangkapan ikan, sehingga meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.
 - 2) Tantangannya adalah memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan melindungi nelayan tradisional dari kemiskinan struktural akibat persaingan dengan armada besar, yang memerlukan penguatan kelembagaan koperasi dan perlindungan sosial.
- b. Minapolitan Budidaya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Glagah dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Sekitarnya. Karakter Minapolitan Budidaya di Lamongan dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan budidaya perikanan air tawar dan tambak di kawasan Glagah merupakan peluang utama diversifikasi usaha bagi masyarakat miskin di wilayah rawa dan Bonorowo.
 - 2) RPKD harus mendukung pendampingan teknis dan akses pasar untuk budidaya intensif yang ramah lingkungan, guna mengurangi risiko gagal panen akibat penyakit atau fluktuasi air, sehingga pendapatan petani budidaya menjadi lebih stabil.
- c. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan pusat pengembangan di Kecamatan Babat. Karakter Kawasan Perdagangan dan Jasa di Lamongan dan relevansi dengan potensi dan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pusat pengembangan di Babat sangat penting sebagai simpul ekonomi regional yang menghubungkan Lamongan dengan wilayah barat dan selatan Jawa Timur, menawarkan peluang besar untuk pengembangan UMKM dan sektor jasa.
 - 2) RPKD harus memfasilitasi pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat miskin di sekitar Babat agar mereka dapat memanfaatkan peluang perdagangan dan jasa, sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor primer yang rentan.

2.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Tinjauan terhadap kawasan rawan bencana merupakan komponen krusial dalam menyusun RPKD, mengingat Kabupaten Lamongan dihadapkan pada risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir tahunan terutama sepanjang aliran Bengawan Solo, serta ancaman kekeringan di wilayah utara dan selatan yang didominasi kapur. Ancaman

bencana ini bukan hanya merupakan masalah lingkungan, tetapi juga merupakan faktor pendorong kerentanan yang dapat merusak aset produktif masyarakat (lahan, ternak, alat tangkap) dan secara cepat menjerumuskan rumah tangga rentan kembali ke jurang kemiskinan. Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan kawasan rawan bencana berfungsi sebagai dasar bagi RPKD untuk mengintegrasikan strategi mitigasi risiko dan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, sehingga menjamin keberlanjutan hasil-hasil pembangunan dan melindungi kelompok masyarakat termiskin dari guncangan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks kebencanaan, Kabupaten Lamongan memiliki beragam potensi kerawanan bencana dengan tingkat risiko yang bervariasi. Spektrum ancaman meliputi banjir yang menjangkau hampir seluruh kecamatan, gelombang pasang di kawasan pesisir utara, kebakaran hutan dan lahan di bagian selatan, kekeringan pada zona pertanian tadah hujan, tanah longsor di sepanjang Daerah Aliran Sungai, serta potensi gempa bumi dengan tingkat kerawanan yang berbeda antarwilayah. Pemetaan ancaman ini menjadi rujukan karena setiap zona pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan tingkat bahaya dan kerentanan bencana sebagai dasar mitigasi.

Bahaya yang tergolong tinggi meliputi banjir dengan luas terdampak sekitar 93.657 ha, cuaca ekstrem seluas 178.205 ha, karhutla sebesar 32.942 ha, serta longsor meskipun relatif kecil dengan luas 368 ha. Potensi bencana dengan kategori sedang mencakup gempa bumi yang meliputi 178.205 ha, likuifaksi seluas 74.216 ha, dan kekeringan seluas 178.205 ha. Sementara itu, potensi rendah terdapat pada gelombang ekstrem (743 ha) dan tsunami (526 ha). Secara keseluruhan, wilayah Lamongan menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem, terutama di kawasan dataran rendah dan daerah yang berdekatan dengan aliran Sungai Bengawan Solo.

Tingginya potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan cuaca ekstrem, mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah dan populasi Lamongan, terutama kelompok masyarakat miskin yang bermukim di dataran rendah, berada dalam situasi kerentanan ganda. Bencana ini secara langsung mengancam aset produktif (lahan pertanian, tambak, rumah) dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, mendorong rumah tangga rentan kembali menjadi miskin. Selain itu, potensi kekeringan dengan kategori sedang (178.205 ha) di sisi lain menambah kompleksitas ancaman. Oleh karena itu, RPKD harus mengintegrasikan manajemen risiko bencana berbasis komunitas dan penyediaan jaring pengaman sosial yang adaptif bencana, termasuk program asuransi mikro atau bantuan modal pascabencana, untuk memitigasi dampak guncangan terhadap masyarakat miskin dan mempercepat pemulihan ekonomi mereka.

Tabel 2.5. Luas Wilayah Potensi Bahaya Bencana Kabupaten Lamongan

Jenis (Luas Ha)	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Potensi Bahaya Banjir	1.412	39.360	52.884	93.657	Tinggi
Potensi Cuaca Ekstrem	31.230	23.443	123.532	178.205	Tinggi
Potensi Gelombang Ekstrem	743	0	0	0	Rendah
Potensi Bahaya Gempa Bumi	155.372	22.833	0	178.205	Sedang
Potensi Bahaya Likuifaksi	459	73.408	349	74.216	Sedang

Potensi Bahaya Karhutla	1.640	25.424	5.878	32.942	Tinggi
Potensi Bahaya Kekeringan	0	178.205	0	178.205	Sedang
Potensi Bahaya Longsor	75	106	187	368	Tinggi
Potensi Bahaya Tsunami	526	0	0	526	Rendah

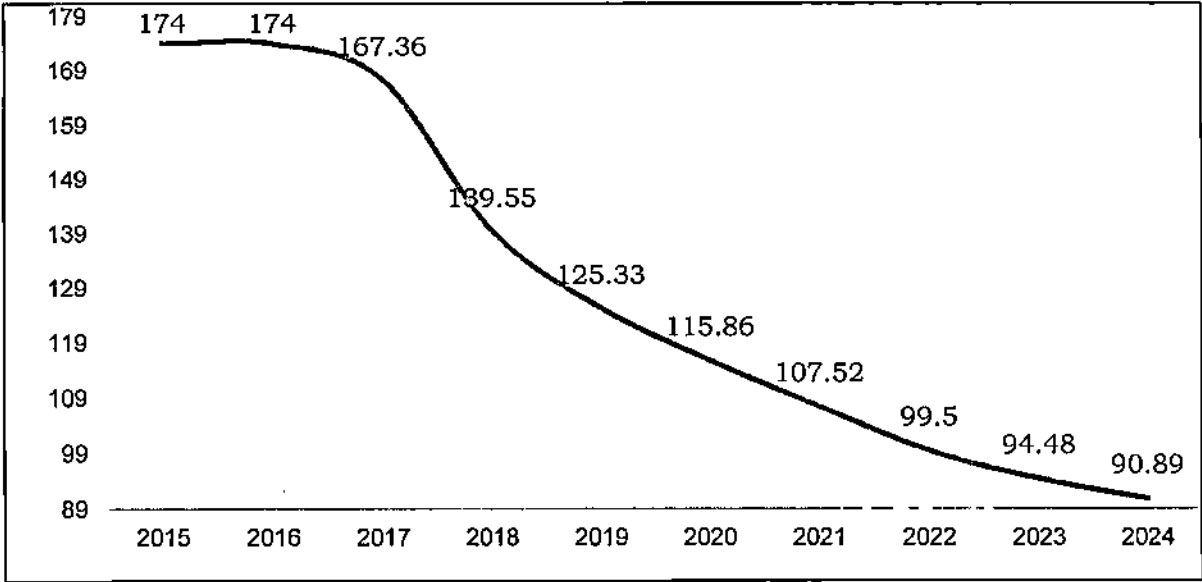
Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur 2022 – 2026

Secara spasial, kerawanan bencana di Lamongan tercermin dari besarnya luasan wilayah terdampak. Banjir tercatat seluas 102.730,12 Ha yang tersebar di 17 kecamatan dan berpotensi mengganggu permukiman, lahan pertanian, serta jaringan infrastruktur utama. Ancaman kekeringan menjangkau 35.158,13 Ha di 8 kecamatan, terutama di wilayah selatan yang bergantung pada sistem irigasi non-teknis sehingga sangat sensitif terhadap variabilitas curah hujan. Di kawasan pesisir Paciran dan Brondong, gelombang pasang dan abrasi mengancam area seluas 2.059,21 Ha yang berimplikasi pada mundurnya garis pantai dan tergerusnya lahan produktif. Selain itu, terdapat 32.148,88 Ha kawasan dengan risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 12 kecamatan, dan tanah longsor seluas 11.233,18 Ha pada 8 kecamatan di sepanjang aliran sungai, sehingga menggambarkan bahwa hampir seluruh lanskap Lamongan berada dalam tekanan risiko bencana dengan karakter berbeda.

Untuk mengukur secara terintegrasi tingkat risiko tersebut, digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai indikator komposit yang menggabungkan dimensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Secara nasional, IRB diformulasikan dengan menimbang komponen bahaya sekitar 40 persen, kerentanan 30 persen, dan kapasitas 30 persen, sehingga perubahan kecil pada ketiga komponen tersebut akan langsung tercermin pada nilai indeks akhir. Dokumen IRBI BNPB menegaskan bahwa bahaya yang dinilai meliputi sembilan jenis ancaman utama, antara lain banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrim dan abrasi, sementara kerentanan mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan kapasitas menggambarkan kekuatan kelembagaan, sistem informasi, kesiapsiagaan, sampai efektivitas mitigasi yang dijalankan pemerintah daerah dan masyarakat.

Nilai IRB Kabupaten Lamongan menunjukkan penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Indeks tercatat sebesar 115,86 poin pada tahun 2020, turun menjadi 107,52 poin pada 2021, kemudian 99,50 poin pada 2022, kemudian 94,48 poin pada 2023, dan mencapai 90,89 poin pada tahun 2024. Penurunan hampir 25 poin dalam periode 2020–2024 menggambarkan adanya perbaikan gradual kapasitas penanggulangan bencana serta upaya pengurangan risiko yang mulai berdampak. Mengacu pada klasifikasi IRB nasional, rentang nilai sekitar 13–144 masih berada pada kategori risiko sedang, sehingga Lamongan tetap dikategorikan sebagai daerah dengan risiko bencana yang signifikan, namun dengan kecenderungan risiko yang menurun dibandingkan awal periode.

Gambar 2.9. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lamongan



Sumber: BPBD Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

Tren penurunan IRB mengindikasikan bahwa berbagai intervensi mitigasi struktural dan non-struktural yang dilakukan Pemerintah Daerah mulai mengurangi potensi kerugian jiwa, kerusakan aset, dan gangguan fungsi lingkungan, meskipun tingkat risikonya masih belum dapat dikatakan rendah. Dengan karakter wilayah yang didominasi banjir dan kekeringan pada satu sisi, serta kebakaran hutan, abrasi pantai, dan longsor di sisi lain, penguatan kapasitas daerah perlu terus diarahkan pada pengembangan sistem peringatan dini, penataan ruang berbasis risiko, peningkatan ketahanan infrastruktur, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat. IRB yang cenderung menurun dapat dibaca sebagai momentum untuk mempercepat integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

Sejalan dengan kecenderungan penurunan IRB tersebut, upaya pengurangan risiko di Kabupaten Lamongan terefleksikan dalam serangkaian intervensi konkret yang memperkuat kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan kelembagaan penanggulangan bencana. Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pembentukan 138 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) hingga tahun 2024, disertai pelatihan bagi 338 relawan penanggulangan bencana yang terdaftar. Kegiatan sosialisasi dan gladi kesiapsiagaan bencana juga dilaksanakan secara rutin di 27 kecamatan untuk memastikan pemahaman dan respons cepat masyarakat terhadap potensi ancaman.

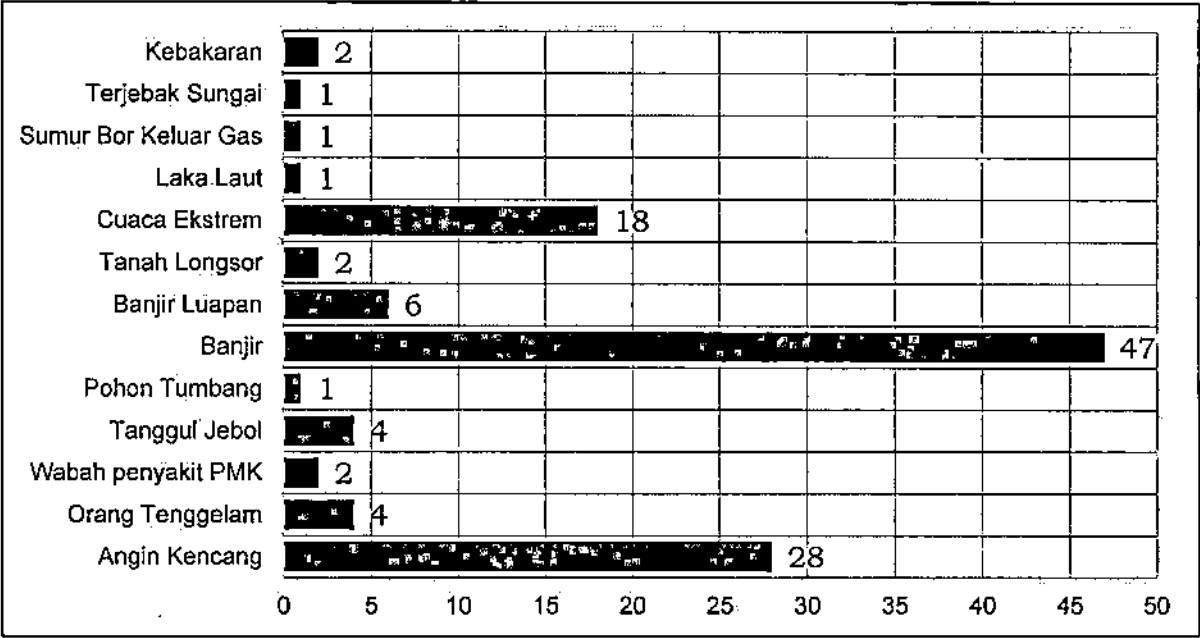
Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur mitigasi diwujudkan melalui pemasangan Sistem Peringatan Dini (EWS) banjir di 6 lokasi strategis serta pembangunan gudang logistik penanganan bencana, yang dipadukan dengan program normalisasi jaringan irigasi oleh OPD teknis guna mengurangi dampak genangan dan banjir berulang. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah ditopang oleh tersusunnya dokumen perencanaan berbasis risiko, antara lain Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lamongan Tahun 2023–2027, yang menjadi acuan utama dalam perencanaan dan penganggaran program penanggulangan bencana lintas perangkat daerah.

Meskipun berbagai upaya pengurangan risiko telah menunjukkan hasil positif, tantangan struktural dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan masih cukup besar. Gambaran tantangan tersebut tercermin dari komposisi kejadian bencana

tahun 2025, yang menunjukkan bahwa sebagian besar insiden masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan angin kencang. Pola ini memperlihatkan bahwa penurunan indeks risiko belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan frekuensi kejadian, sehingga kebutuhan akan penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan tetap mendesak di seluruh wilayah kecamatan.

Berdasarkan grafik Jenis Bencana Tahun 2025, banjir tercatat sebagai kejadian paling dominan dengan 47 insiden, disusul angin kencang sebanyak 28 kejadian dan cuaca ekstrem sebanyak 18 kejadian. Ketiga jenis bencana ini seluruhnya berkaitan dengan dinamika iklim dan cuaca, sehingga mempertegas bahwa Lamongan sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Disamping itu, juga tercatat 6 kejadian banjir luapan dan 4 kejadian tanggul jebol, yang mengindikasikan adanya tekanan pada sistem drainase dan infrastruktur pengendali banjir, terutama di kawasan permukiman dan lahan pertanian yang berada di dataran rendah atau sepanjang aliran sungai.

Gambar 2.10. Jenis Bencana di Kabupaten Lamongan Tahun 2025



Sumber: BPBD Kabupaten Lamongan, Tahun 2025

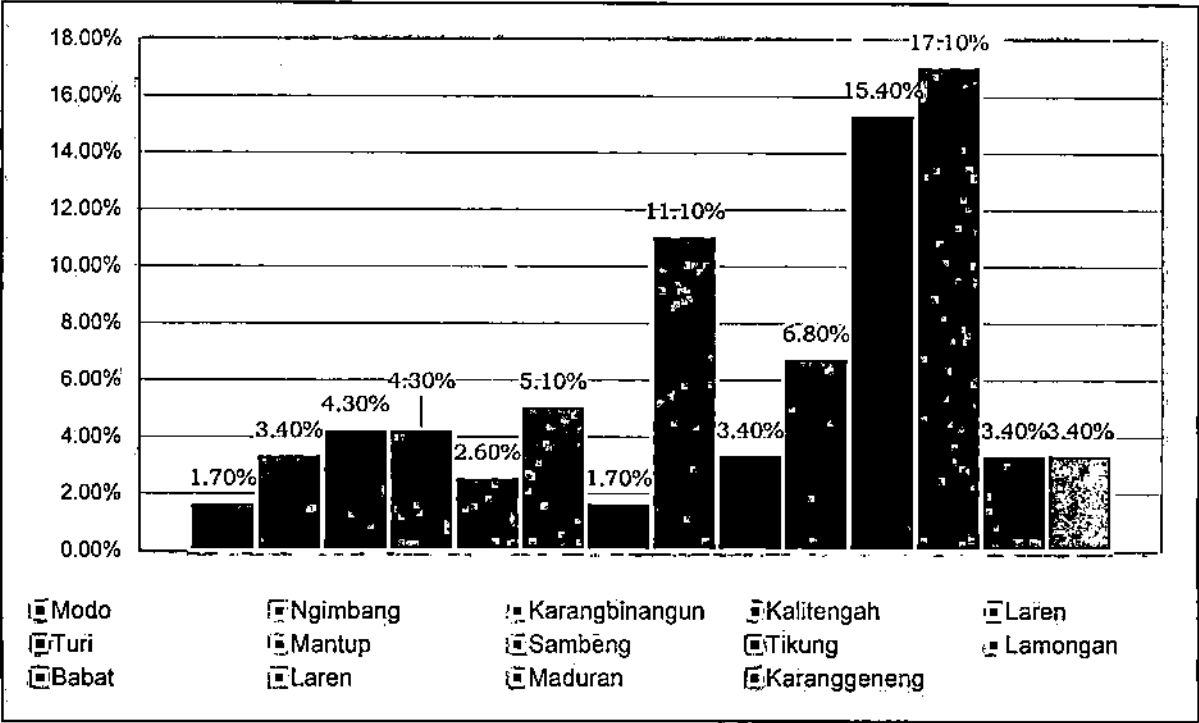
Jenis bencana lain yang muncul dengan frekuensi lebih rendah, seperti kebakaran (2 kejadian), tanah longsor (2 kejadian), wabah penyakit PMK (2 kejadian), orang tenggelam (4 kejadian), laka laut (1 kejadian), terjebak sungai (1 kejadian), sumur bor keluar gas (1 kejadian), dan pohon tumbang (1 kejadian), tetap perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian ekonomi pada skala lokal. Meskipun jumlah kejadiannya tidak sebesar banjir dan angin kencang, keberadaan bencana-bencana ini menunjukkan bahwa spektrum ancaman di Lamongan cukup beragam, meliputi aspek hidrometeorologi, geologi, kecelakaan, hingga gangguan kesehatan hewan yang dapat berdampak pada ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

Pada saat yang sama, kapasitas penanganan bencana dengan frekuensi lebih rendah perlu diperkuat melalui peningkatan kemampuan respon cepat, edukasi keselamatan di wilayah perairan dan sungai, serta penguatan layanan kesehatan hewan untuk mencegah dan mengendalikan wabah seperti PMK. Dengan demikian, penurunan indeks risiko yang

telah dicapai dapat dipertahankan dan diperluas dampaknya menjadi peningkatan ketahanan bencana yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Lamongan.

Sebaran kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa risiko tidak merata, melainkan terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu. Persentase tertinggi terlihat di Kecamatan Laren sebesar 17,10 persen, diikuti Babat sebesar 15,40 persen dan Sambeng sebesar 11,10 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa tiga kecamatan tersebut menjadi episentrum kejadian bencana, yang kemungkinan berkaitan dengan kombinasi faktor hidrometeorologi, kondisi morfologi wilayah, serta penggunaan lahan yang intensif di sekitar permukiman dan lahan pertanian. Sementara itu, Kecamatan Lamongan sebagai wilayah perkotaan juga mencatat persentase cukup tinggi yaitu 6,80 persen, menandakan bahwa pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan pun tidak sepenuhnya bebas dari ancaman bencana.

Gambar 2.11. Sebaran Bencana berdasarkan Kecamatan Tahun 2025



Sumber: BPBD Kabupaten Lamongan, Tahun 2025.

Di luar kecamatan dengan tingkat terdampak sangat tinggi, terdapat kelompok kecamatan dengan tingkat terdampak menengah seperti Turi (5,10 persen), Karangbinangun dan Kalitengah (masing-masing 4,30 persen), serta Ngimbang, Tikung, Maduran, dan Karanggeneng yang masing-masing berada pada kisaran 3,40 persen. Kelompok ini mencerminkan kawasan yang kerap mengalami gangguan bencana, namun dengan skala relatif lebih rendah dibanding Laren, Babat, dan Sambeng. Meski demikian, frekuensi kejadian yang berulang di wilayah menengah ini tetap berpotensi menimbulkan kerugian akumulatif, terutama pada jaringan jalan, lahan pertanian produktif, serta infrastruktur pelayanan dasar.

Kecamatan dengan persentase terdampak terendah tercatat di Modo dan Mantup dengan masing-masing 1,70 persen, serta Laren pada kategori rendah sebesar 2,60 persen (yang kemungkinan menggambarkan jenis atau periode kejadian berbeda dengan Laren pada kategori sangat tinggi). Angka ini tidak berarti wilayah tersebut aman dari bencana, tetapi menunjukkan bahwa intensitas atau luas wilayah terdampak relatif lebih kecil.

Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat upaya pencegahan sejak dini, sehingga wilayah dengan risiko rendah tidak bertransformasi menjadi kantong baru bencana akibat tekanan perubahan iklim, alih fungsi lahan, maupun kelemahan tata kelola lingkungan.

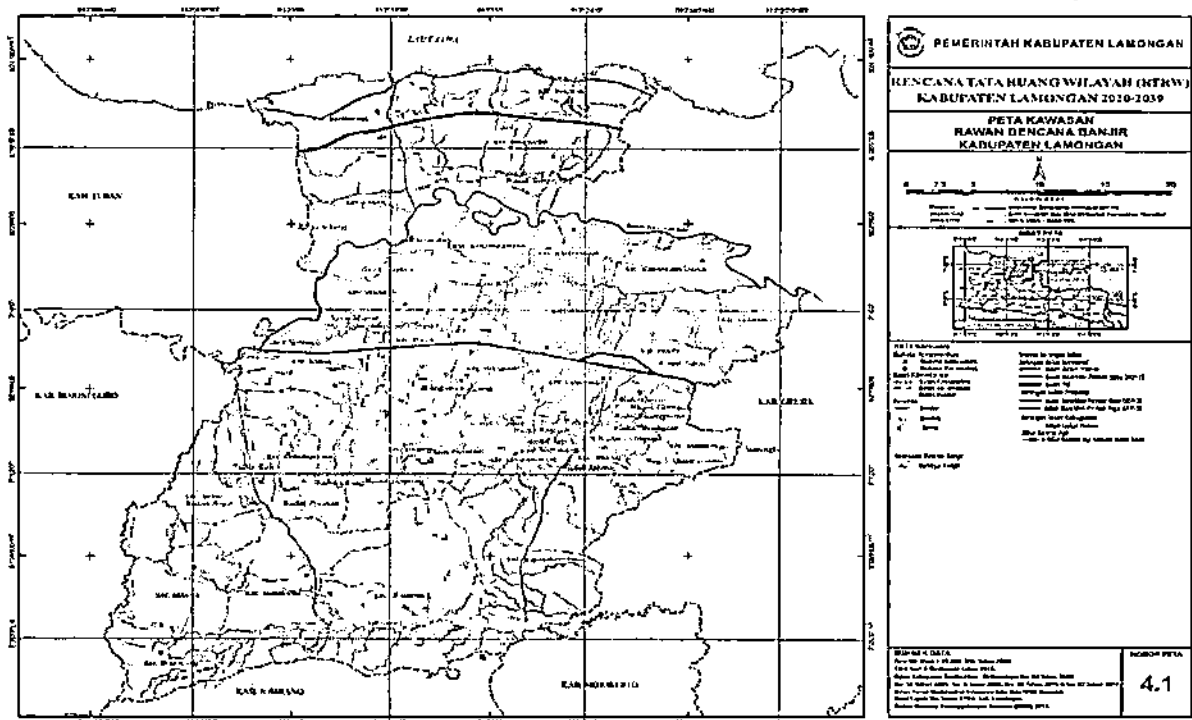
Pola sebaran kecamatan terdampak tersebut sejalan dengan kebutuhan strategi penanggulangan bencana yang menekankan pengurangan risiko hidrometeorologi, terutama banjir, angin kencang, dan cuaca ekstrem. Kecamatan dengan tingkat terdampak sangat tinggi seperti Laren, Babat, dan Sambeng perlu diprioritaskan dalam penguatan sistem peringatan dini, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, serta penataan penggunaan lahan di kawasan rawan. Pada saat yang sama, kecamatan dengan tingkat terdampak menengah dan rendah membutuhkan penguatan kapasitas respon cepat, edukasi kebencanaan, dan dukungan infrastruktur dasar agar penurunan indeks risiko yang sudah dicapai dapat diperluas menjadi peningkatan ketahanan bencana yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Lamongan.

Kawasan Rawan Bencana berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Lamongan yang merupakan dampak dari perubahan iklim, meliputi: (i) kawasan rawan banjir; (ii) gelombang pasang; (iii) kebakaran; (iv) kekeringan; dan (v) tanah longsor.

A. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang berpotensi tergenang air karena frekuensi kejadian banjir yang tinggi, baik pernah maupun berulang kali terjadi. Di Kabupaten Lamongan, kerawanan tersebut dipengaruhi oleh luapan Sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, dan anak-anak sungainya, yang diperparah oleh curah hujan tinggi, perubahan penggunaan lahan, berkurangnya daerah resapan, serta menurunnya daya tampung sungai akibat sedimentasi dan penumpukan sampah. Meskipun banjir berpotensi terjadi di seluruh wilayah, beberapa kecamatan hanya mengalami genangan pada titik-titik tertentu. Berdasarkan pemetaan terbaru, kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kecamatan dengan klasifikasi risiko rendah, sedang, dan tinggi yang secara total mencapai sekitar 91.993,15 Ha. Kondisi ini menggariskan bahwa banjir telah menjadi bagian dari dinamika lingkungan Lamongan

Gambar 2.12. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah 2020-2039 Kabupaten Lamongan

Tabel 2.6. Luas Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Total ha)	Luas Wilayah (ha)	Kawasan Rawan Terhadap Wilayah (%)
1	Sukorame	962,57	3.928,70	24,50%
2	Bluluk	1.794,55	5.799,93	30,94%
3	Ngimbang	2.095,02	10.006,02	20,94%
4	Sambeng	3.229,39	15.078,34	21,42%
5	Mantup	1.788,09	9.123,19	19,60%
6	Kembangbahu	2.640,79	6.825,07	38,69%
7	Sugio	4.474,02	8.974,19	49,85%
8	Kedungpring	3.842,20	8.572,74	44,82%
9	Modo	4.591,01	8.169,76	48,09%
10	Babat	3.832,79	6.459,43	71,17%
11	Pucuk	3.832,79	4.538,49	84,45%
12	Sukodadi	4.457,89	4.747,56	93,90%
13	Lamongan	4.083,23	4.093,53	99,68%
14	Tikung	2.458,71	5.541,58	44,37%
15	Sarirejo	1.539,10	4.886,95	31,49%
16	Deket	4.381,22	4.395,15	99,68%
17	Glagah	4.961,44	5.001,33	99,20%
18	Karangbinangun	4.665,42	4.726,21	98,71%
19	Turi	5.251,24	5.250,09	100,02%
20	Kalitengah	3.686,81	3.694,60	99,79%
21	Karanggeneng	4.052,37	4.073,99	99,47%
22	Sekaran	5.394,67	5.404,96	99,81%
23	Maduran	3.241,58	3.277,68	98,90%
24	Laren	6.437,01	9.411,28	68,40%
25	Solokuro	518,93	9.486,89	5,47%

26	Paciran	670,29	5.681,33	11,80%
27	Brondong	2.492,74	8.071,51	30,85%
	Total	91,477.77	175220.71	

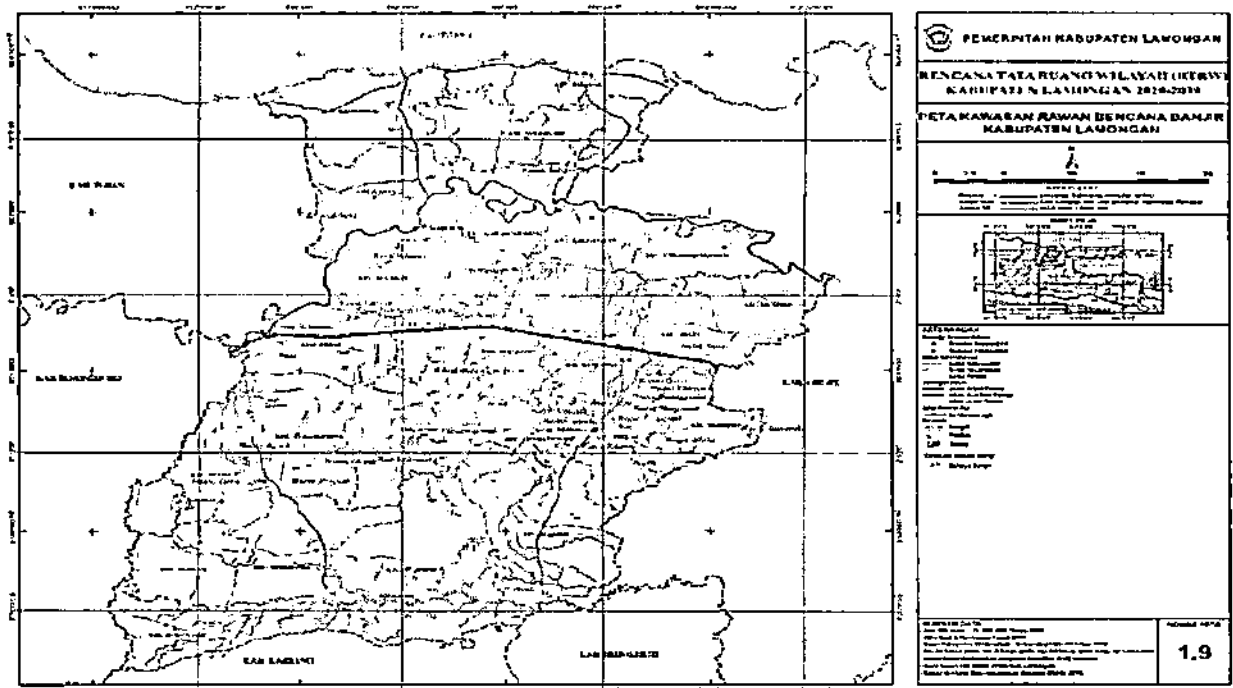
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Data di atas menunjukkan bahwa kategori kerawanan tinggi mendominasi luasan kawasan rawan banjir, yaitu seluas 62.219,45 Ha atau sekitar dua pertiga dari total area rawan. Kategori sedang mencakup 29.253,40 Ha atau hampir sepertiga luas kawasan, sedangkan kategori rendah hanya sekitar 520,30 Ha dengan sebaran yang relatif terbatas. Komposisi ini menegaskan bahwa sebagian besar wilayah yang terdampak banjir bukan sekadar bersifat insidental, tetapi berada pada tingkat ancaman tinggi yang berpotensi mengganggu permukiman, lahan pertanian produktif, jaringan jalan, serta fasilitas publik lainnya. Dengan kata lain, banjir di Lamongan bukan hanya persoalan lokal pada beberapa desa tertentu, melainkan risiko yang sistemik dan meluas di skala kabupaten.

Secara spasial, kawasan dengan kerawanan tinggi umumnya terletak di dataran rendah dan koridor sungai utama, terutama di hilir Bengawan Solo dan Sub-DAS Kali Lamong, sebagaimana juga ditunjukkan oleh berbagai kajian hidrologi yang menempatkan Lamongan sebagai salah satu wilayah dengan persebaran “sangat rawan banjir” yang luas di Jawa Timur. Sementara itu, kawasan berkerawanan sedang cenderung berada pada zona transisi antara dataran banjir dan wilayah yang sedikit lebih tinggi, yang tetap berisiko tergenang ketika terjadi hujan lebat dan peningkatan muka air sungai. Kategori rendah umumnya terdapat pada kantong-kantong wilayah yang relatif lebih tinggi elevasinya atau memiliki sistem drainase yang lebih baik, tetapi tetap memerlukan kewaspadaan karena perubahan tata guna lahan dan peningkatan curah hujan ekstrem dapat dengan cepat mengubah pola aliran permukaan dan menambah titik genangan baru.

Keterpaparan yang tinggi terhadap banjir ini, dipadukan dengan fakta bahwa Lamongan juga sering mengalami kekeringan pada musim kemarau, menempatkan Lamongan pada situasi kerentanan iklim yang kompleks. Siklus banjir-kekeringan berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian, ketersediaan air bersih, dan stabilitas mata pencaharian rumah tangga, terutama di wilayah perdesaan yang bergantung pada sawah irigasi dan tambak. Oleh karena itu, informasi dari tabel kerawanan banjir bukan hanya berfungsi sebagai gambaran teknis, tetapi menjadi dasar penting untuk merancang strategi adaptasi yang lebih komprehensif, mulai dari pengendalian tata ruang berbasis risiko, rehabilitasi daerah resapan dan sempadan sungai, penguatan infrastruktur pengendali banjir, hingga pengembangan skema perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap guncangan iklim di Kabupaten Lamongan.

Gambar 2.13. Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Lamongan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Ragam uraian di atas mencerminkan bahwa kawasan rawan banjir Lamongan menghadirkan tantangan keberlanjutan yang mendasar bagi penanggulangan kemiskinan. Meskipun genangan air musiman menciptakan peluang bagi ekosistem perikanan air tawar dan irigasi air, risiko banjir yang berdampak pada sekitar 93.657 ha lahan secara signifikan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat miskin. Banjir dapat merusak aset pertanian dan permukiman, memaksa pengeluaran darurat, dan mengganggu akses terhadap layanan dasar, sehingga memicu kemiskinan kronis dan transien. Oleh karena itu, RPKD harus memandang kawasan rawan banjir ini sebagai wilayah prioritas intervensi multidimensi, dengan strategi yang mencakup pembangunan infrastruktur mitigasi (tanggul, normalisasi sungai), program adaptasi mata pencaharian (pertanian/perikanan tahan banjir), serta penguatan jaring pengaman sosial yang cepat dan tepat sasaran untuk melindungi aset dan pendapatan kelompok miskin.

B. Kawasan Rawan Bencana Cuaca Eskترم

Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem di Lamongan memerlukan perhatian khusus dalam kerangka RPKD. Bahaya ini mencakup angin kencang, puting beliung, dan curah hujan sangat lebat yang tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur umum tetapi juga secara langsung mengancam keselamatan dan merusak aset produktif berskala mikro milik rumah tangga miskin, seperti atap rumah, tanaman perkebunan, dan fasilitas budidaya kecil. Intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang meningkat akibat perubahan iklim menjadi faktor pendorong utama kerentanan, memaksa masyarakat miskin mengeluarkan biaya perbaikan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, RPKD harus memasukkan program penguatan struktur hunian sederhana dan sistem peringatan dini berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi perlindungan aset dan pencegahan agar masyarakat rentan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan pasca-bencana.

Cuaca ekstrem merujuk pada kejadian cuaca yang menyimpang jauh dari pola normalnya dan berlangsung dengan intensitas yang cukup untuk menimbulkan kerusakan serta membahayakan keselamatan jiwa dan harta. Menurut BMKG, kondisi ini ditandai oleh kombinasi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan, dan jarak pandang yang berada di luar kisaran lazim, misalnya hujan sangat lebat hingga sekitar ≥ 150 mm/24 jam, angin kencang di atas 25 knot (± 45 km/jam), atau penyimpangan suhu beberapa derajat di atas nilai normal suatu wilayah. Fenomena yang termasuk kategori ini antara lain hujan lebat disertai petir dan angin kencang, puting beliung, siklon tropis, maupun gelombang panas yang berkepanjangan.

Munculnya cuaca ekstrem dipengaruhi oleh berbagai proses dinamis di atmosfer. Hujan ekstrem umumnya terjadi ketika kelembapan udara sangat tinggi, massa udara tidak stabil, dan terdapat mekanisme pengangkatan yang kuat, misalnya karena pertemuan massa udara (front dingin atau hangat), gelombang atmosfer, atau sirkulasi siklon tropis sehingga awan konvektif tumbuh cepat dan menghasilkan curah hujan sangat lebat dalam waktu singkat. Sebaliknya, suhu panas ekstrem atau gelombang panas sering kali berkaitan dengan dominasi pusat tekanan tinggi yang membuat udara turun dan mengering, sehingga awan sulit terbentuk dan radiasi matahari yang masuk tidak diimbangi pendinginan oleh awan dan hujan; kondisi ini diperkuat oleh pola monsun, fenomena El Niño, serta posisi semu matahari (misalnya saat ekuinoks) yang meningkatkan fluks energi ke permukaan. Di tingkat global, kejadian seperti badai siklon, hujan sangat lebat, kekeringan, dan heatwave merupakan bentuk ekstremitas dari variabilitas iklim yang frekuensi dan intensitasnya cenderung berubah dalam iklim yang memanas.

Tabel 2.7. Luas Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Total ha)	Luas Wilayah (ha)	Kawasan Rawan Terhadap Wilayah (%)
1	Sukorame	3.928,70	3.928,70	100,00%
2	Bluluk	3.919,03	5.799,93	67,57%
3	Ngimbang	10.006,02	10.006,02	100,00%
4	Sambeng	15.078,34	15.078,34	100,00%
5	Mantup	9.123,19	9.123,19	100,00%
6	Kembangbahu	6.825,07	6.825,07	100,00%
7	Sugio	8.974,19	8.974,19	100,00%
8	Kedungpring	8.572,74	8.572,74	86,87%
9	Modo	8.169,76	8.169,76	100,00%
10	Babat	6.459,43	6.459,43	100,00%
11	Pucuk	4.538,49	4.538,49	100,00%
12	Sukodadi	4.747,56	4.747,56	100,00%
13	Lamongan	4.093,53	4.093,53	100,00%
14	Tikung	5.541,58	5.541,58	100,00%
15	Sarirejo	4.886,95	4.886,95	100,00%
16	Deket	4.395,15	4.395,15	100,00%
17	Glagah	5.001,33	5.001,33	100,00%
18	Karangbinangun	4.726,21	4.726,21	100,00%
19	Turi	5.250,09	5.250,09	100,00%

20	Kalitengah	3.694,60	3.694,60	100,00%
21	Karanggeneng	4.073,99	4.073,99	100,00%
22	Sekaran	5.404,96	5.404,96	100,00%
23	Maduran	3.277,68	3.277,68	100,00%
24	Laren	9.411,28	9.411,28	100,00%
25	Solokuro	9.486,89	5.518,93	100,00%
26	Paciran	5.681,33	5.681,33	100,00%
27	Brondong	8.071,51	8.071,51	66,69%
	Total	169.525,24	175.220,72	96,75%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Karakter cuaca ekstrem juga sangat dipengaruhi oleh interaksi antara atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Perubahan faktor luar seperti variasi orbit dan jarak Bumi-Matahari mengontrol distribusi radiasi jangka panjang, sementara di sisi lain aktivitas manusia mengubah sifat permukaan melalui deforestasi, urbanisasi, dan konversi lahan. Berbagai studi menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan mengubah albedo, kapasitas menyimpan air, dan fluks energi permukaan, sehingga memodifikasi suhu permukaan, pola angin lokal, dan distribusi curah hujan; di suatu wilayah curah hujan dapat meningkat, sementara di wilayah lain yang berdekatan justru menurun. Deforestasi dan pengurangan badan air menyumbang emisi karbon dan mengganggu siklus hidrologis, sehingga bukan hanya memengaruhi iklim global tetapi juga memunculkan iklim mikro yang lebih panas dan lebih kering atau sebaliknya lebih lembap di tingkat lokal.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, kombinasi faktor-faktor tersebut tercermin pada tingginya proporsi wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana cuaca ekstrem. Berdasarkan KLHS RPJMD, sekitar 96,75 persen dari luas wilayah Lamongan setara kurang lebih 169.525,24 Ha termasuk dalam kawasan rawan cuaca ekstrem, dengan rincian kategori rendah 22.141,10 Ha, kategori sedang 20.129,60 Ha, dan kategori tinggi mencapai 127.254,54 Ha. Artinya, hampir seluruh kecamatan di Lamongan berpotensi terdampak hujan lebat, angin kencang, dan anomali suhu yang dapat memicu banjir, longsor lokal, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada aktivitas pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kondisi ini sejalan dengan hasil kajian kerentanan banjir yang menempatkan Lamongan terutama kecamatan-kecamatan seperti Laren dan kawasan dataran rendah lain sebagai wilayah dengan risiko hidrometeorologi.

ekonomi menunjukkan bahwa intervensi harus bersifat diferensial. Pada kawasan yang rawan cuaca ekstrem dan dihuni oleh masyarakat miskin (petani, nelayan, buruh informal), strategi penanggulangan kemiskinan harus dilengkapi dengan program perlindungan sosial adaptif (adaptive social protection), seperti skema asuransi mikro bersubsidi atau transfer tunai bersyarat pascabencana, untuk mencegah mereka menjual aset produktif (seperti ternak atau alat tangkap) demi pemulihan.

C. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Kawasan pesisir utara Lamongan, tempat konsentrasi permukiman, pariwisata, dan aktivitas perikanan, menghadapi ancaman kerawanan bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi, meskipun data awal menempatkannya dalam kategori risiko rendah. Potensi bahaya ini secara spesifik mengancam infrastruktur vital pelabuhan dan tambak, serta merusak permukiman nelayan yang umumnya terletak di garis pantai. Bagi masyarakat miskin di wilayah pesisir yang mata pencahariannya sangat bergantung pada kelestarian ekosistem laut, bencana ini dapat menyebabkan hilangnya lahan tambak, rusaknya alat tangkap, dan abrasi yang mengikis aset rumah tangga. Oleh karena itu, RPKD perlu menekankan strategi mitigasi berbasis ekologis, seperti rehabilitasi hutan mangrove dan pembangunan breakwater alami, yang berfungsi sebagai benteng perlindungan aset dan sumber daya alam, sekaligus menyediakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui program konservasi.

Gelombang pasang ekstrem atau badai gelombang tinggi merupakan fenomena laut yang dipicu oleh kombinasi angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, serta pengaruh gravitasi bulan dan matahari. Di kawasan pesisir Lamongan, kejadian ini berpotensi menimbulkan bencana karena ketinggian gelombang dapat meningkat tajam, terlebih ketika bersamaan dengan hujan deras dan tekanan udara yang tidak stabil. Dalam kondisi tersebut, gelombang yang menghantam garis pantai berulang kali akan mengikis daratan, merusak struktur alami maupun buatan, dan memicu proses abrasi yang menggerus garis pantai secara perlahan.

Abrasi dan gelombang ekstrem di kawasan pesisir utara Lamongan disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan faktor manusia. Secara alamiah, angin di atas permukaan laut memindahkan energi ke air, membentuk arus dan gelombang yang menggerus tebing dan sedimen pantai, dimana intensitas pengikisan meningkat tajam saat badai atau cuaca ekstrem. Namun, proses kerentanan ini diperparah oleh aktivitas manusia yang tidak selaras dengan daya dukung lingkungan pesisir, perusakan terumbu karang menghilangkan pemecah gelombang alami, penebangan hutan mangrove menghilangkan barrier penahan ombak dan penstabil sedimen, sementara penambangan pasir pantai secara berlebihan mengurangi material yang seharusnya menggantikan sedimen yang tergerus.

Tabel 2.8. Luas Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Lamongan

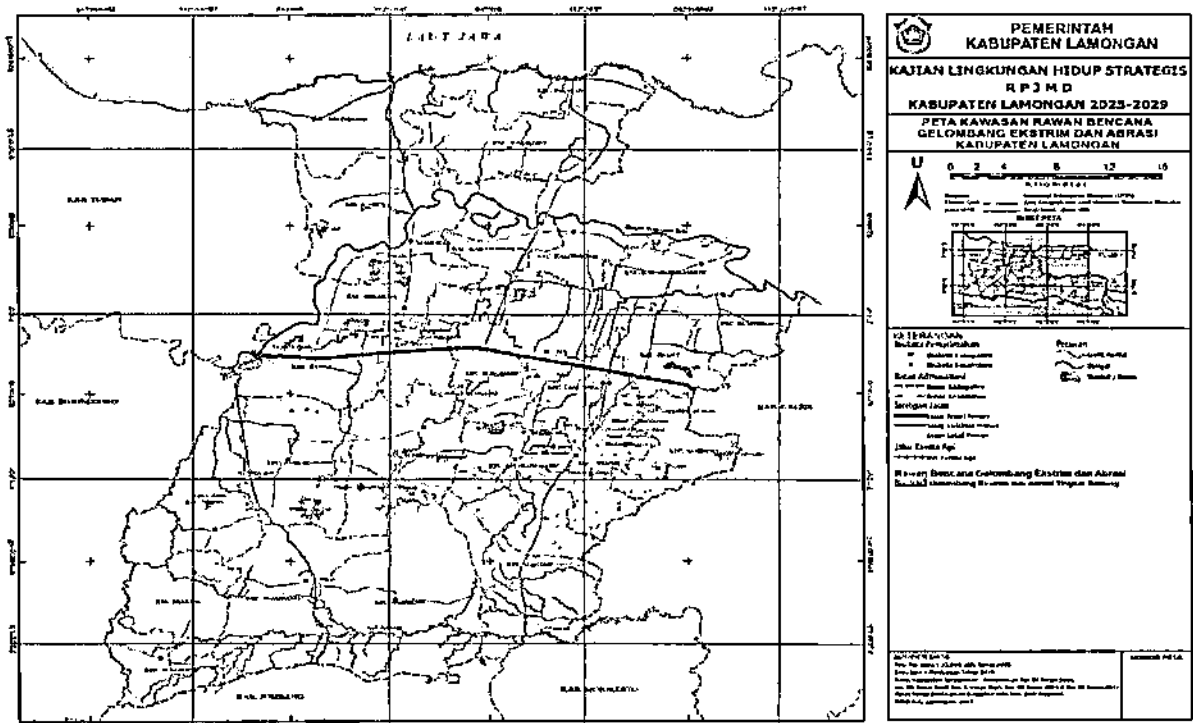
No	Kecamatan	Gelombang Ekstrem dan Abrasi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase Luas Gelombang Ekstrem dan Abrasi terhadap Luas Wilayah (%)
1	Brondong	282.52	8.071,51	3,50
2	Paciran	323.09	5.681,33	5,69

Jumlah	605.61	13.752,84	4,40
--------	--------	-----------	------

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Dampak yang ditimbulkan akibat abrasi dan gelombang ekstrem sangat luas dan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial ekonomi. Penyusutan lebar pantai dari waktu ke waktu menyebabkan menyempitnya lahan yang dapat di dimanfaatkan untuk permukiman maupun aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Kerusakan sarana dan prasarana, seperti permukiman, jalan, jembatan, serta fasilitas pelabuhan, menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu konektivitas antarwilayah. Bagi nelayan, kerusakan infrastruktur dan kondisi gelombang yang tidak menentu mengakibatkan penurunan frekuensi melaut, tingginya biaya operasional, serta meningkatnya risiko kecelakaan di laut. Selain itu, hilangnya hutan bakau dan habitat pesisir lainnya menyebabkan berkurangnya tempat berkembang biak dan berlindung ikan, sehingga produktivitas perikanan tangkap di sekitar pantai cenderung menurun.

Gambar 2.15. Peta Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kab Lamongan



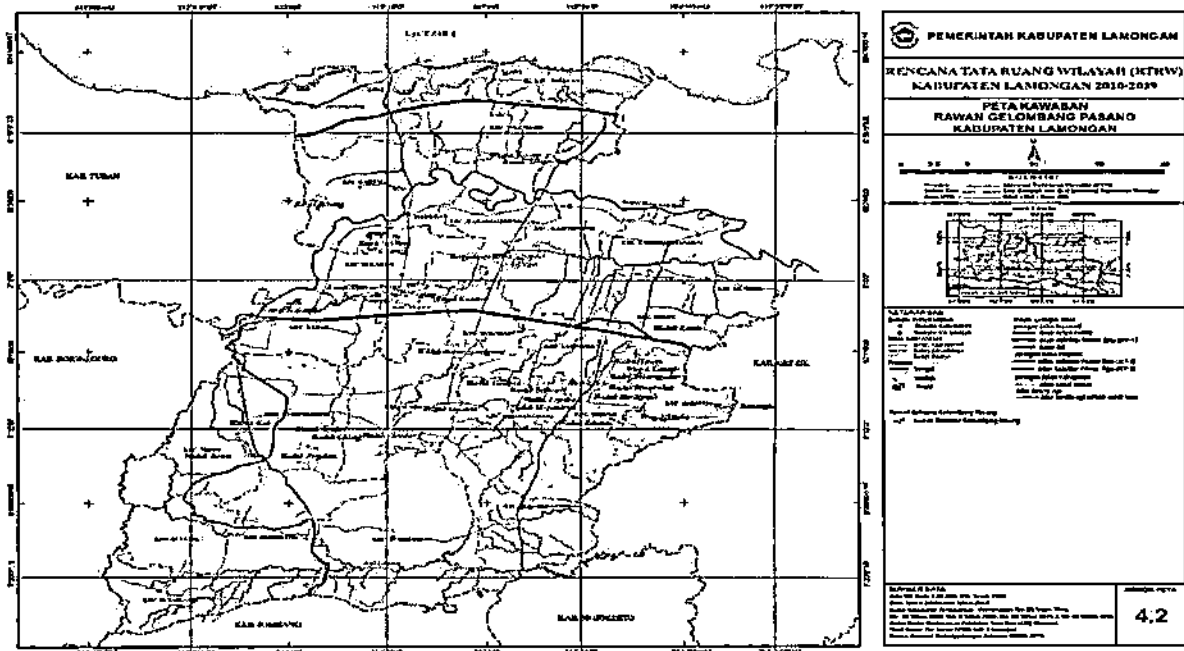
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Kabupaten Lamongan, kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi terkonsentrasi di wilayah pesisir Kecamatan Brondong dan Paciran. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa di Kec. Brondong luas kawasan gelombang ekstrem dan abrasi mencapai sekitar 282,52 Ha dari total luas wilayah 8.071,51 Ha, atau sekitar 3,50 persen. Sementara itu, Kec. Paciran memiliki kawasan rawan seluas kurang lebih 323,09 Ha dari total 5.681,33 Ha, berarti sekitar 5,69 persen wilayahnya berpotensi terdampak Secara keseluruhan, luas kawasan gelombang ekstrem dan abrasi di kedua kecamatan tersebut mencapai sekitar 605,61 Ha dari 13.752,84 Ha wilayah pesisir, atau setara 4,40 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan gelombang dan abrasi di pesisir Lamongan bukan fenomena marginal melainkan risiko yang harus di-antisipasi melalui pengelolaan pesisir terpadu, penguatan ekosistem pelindung seperti mangrove dan terumbu karang serta

pengaturan aktivitas pemanfaatan pasir dan ruang pantai agar tidak melampaui daya dukung lingkungan

Gelombang pasang yang umumnya terjadi di wilayah pesisir, khususnya di beberapa desa yang berada di sepanjang garis pantai. Di Kec. Brondong, wilayah yang terdampak meliputi Desa Labuhan, Lohgung, Sedayulawas, dan Kelurahan Brondong. Sementara di Kec Paciran, fenomena ini sering terjadi di Desa Banjarwati, Drajat, Kandangsemangkon, Kemantren, Kranji, Paciran, Sidokelar, Tlogosadang, Tunggul, Weru, Sidokumpul, Waru Lor, Paloh, serta Kelurahan Blimbing.

Gambar 2.16. Peta Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kabupaten Lamongan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan (RPKD), dampak abrasi dan gelombang ekstrem menuntut strategi perlindungan aset yang terintegrasi. Kerugian finansial akibat rusaknya sarana prasarana perikanan dan pariwisata di kawasan seluas 605,61 Ha secara langsung menghilangkan modal usaha dan rumah tangga miskin, memaksa nelayan mengurangi frekuensi melaut dan mengganggu rantai nilai perikanan. Oleh karena itu, RPKD harus memprioritaskan program rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove dan terumbu karang) sebagai solusi mitigasi ganda, yaitu: (i) melindungi garis pantai dari erosi sambil menciptakan lapangan kerja berbasis konservasi; dan (ii) memulihkan habitat ikan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap. Selain itu, diperlukan skema asuransi risiko bencana bagi nelayan/petambak dan bantuan teknis untuk penguatan struktur rumah nelayan agar upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dapat bertahan dari guncangan bencana laut.

D. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Meskipun potensi bencana Tsunami di Kabupaten Lamongan dikategorikan rendah dengan perkiraan luas terdampak yang kecil, tinjauan terhadap risiko ini tetaplah fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam RPKD. Ancaman Tsunami, meskipun jarang, memiliki dampak katastrofik yang mampu melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi pesisir dan memicu kemiskinan massal dalam waktu singkat, terutama di wilayah Paciran dan Brondong yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan

sentra ekonomi maritim. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh kesiapsiagaan darurat dan perencanaan spasial yang berbasis risiko tinggi, termasuk pembangunan jalur evakuasi yang jelas dan penguatan sistem peringatan dini di sepanjang kawasan pesisir untuk memitigasi potensi kerugian aset bagi masyarakat termiskin.

Sebaran kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi di pesisir Kabupaten Lamongan dapat diukur melalui data luasan wilayah terdampak di masing-masing kecamatan pesisir. Data ini penting karena tidak hanya menunjukkan dimana ancaman abrasi dan gelombang tinggi paling dominan, tetapi juga seberapa besar proporsi wilayah setiap kecamatan yang berpotensi terdampak. Dengan demikian, informasi kuantitatif mengenai luas kawasan rawan menjadi dasar untuk menentukan prioritas intervensi pengelolaan pesisir, penataan ruang, serta program mitigasi struktural dan non-struktural agar upaya pengurangan risiko dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

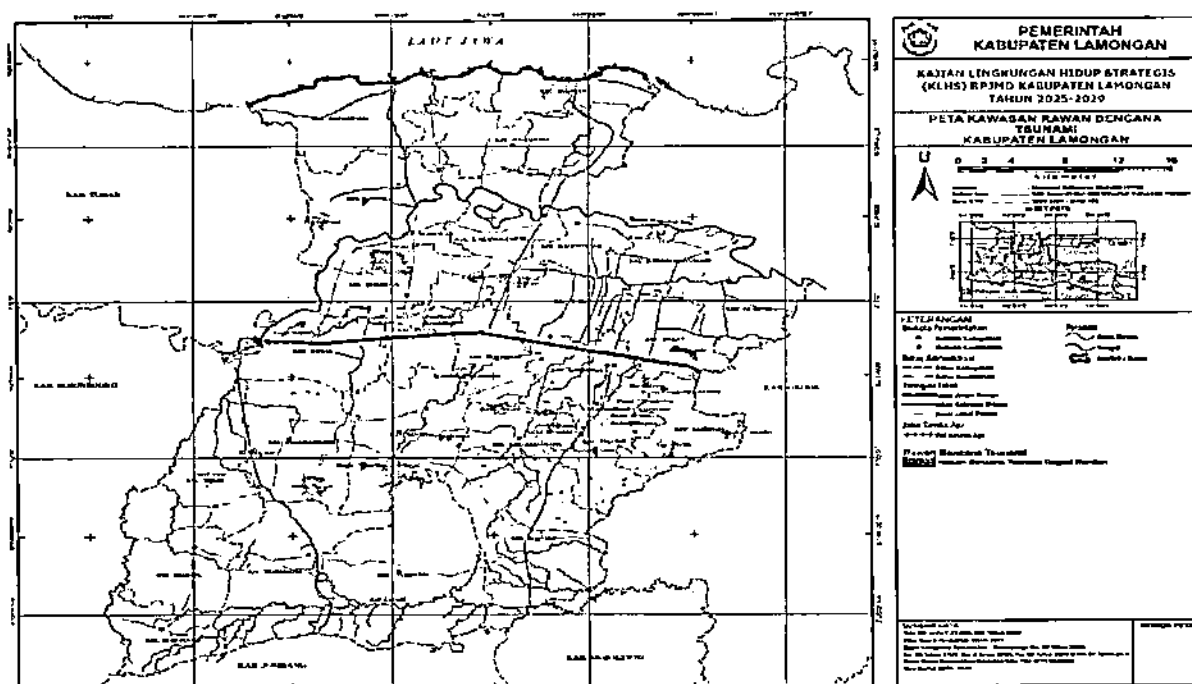
Data menunjukkan bahwa kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Lamongan terkonsentrasi pada dua kecamatan pesisir, yaitu Brondong dan Paciran. Di Kec. Brondong, luas area yang terklasifikasi rawan mencapai 282,52 Ha dari total luas wilayah 8.071,51 Ha, atau sekitar 3,50 persen. Sementara itu, di Kec. Paciran luas kawasan rawan sedikit lebih besar, yakni 323,09 Ha dari total 5.681,33 Ha, sehingga porsi wilayah yang berisiko mencapai 5,69 persen. Secara agregat, kedua kecamatan memiliki total kawasan gelombang ekstrem dan abrasi seluas 605,61 Ha dari 13.752,84 Ha wilayah pesisir, atau sekitar 4,40 persen. Konsentrasi kerawanan menuntut intervensi RPKD yang terfokus pada dua kecamatan tersebut, dimana program perlindungan aset dan mata pencaharian harus disinergikan dengan upaya mitigasi bencana pesisir. Program lain yang dinilai relevan adalah rehabilitasi ekosistem mangrove dan pembangunan infrastruktur pengaman pantai.

Tabel 2.9. Luas Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Gelombang Ekstrem dan Abrasi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase Luas Gelombang Ekstrem dan Abrasi terhadap Luas Wilayah (%)
1	Brondong	282.52	8.071,51	3,50
2	Paciran	323.09	5.681,33	5,69
Jumlah		605.61	13.752,84	4,40

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Gambar 2.17. Peta Kawasan Bencana Tsunami Kabupaten Lamongan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Jika dilihat secara keseluruhan, porsi 4,40 persen kawasan pesisir Lamongan yang sudah teridentifikasi sebagai rawan gelombang ekstrem dan abrasi menggambarkan bahwa risiko ini bukan fenomena terbatas pada titik kecil, melainkan sudah menyentuh skala kawasan. Angka tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan fungsi strategis pesisir Lamongan sebagai sentra perikanan, jalur transportasi laut, dan kawasan permukiman padat penduduk. Apabila proses abrasi dibiarkan tanpa intervensi, penyusutan garis pantai dan kerusakan ekosistem pesisir dapat berdampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi lokal, terutama bagi rumah tangga nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sumber daya laut.

Ancaman abrasi pada 4,40 persen wilayah pesisir Lamongan menjadi tantangan eksistensial bagi masyarakat miskin di kawasan tersebut, karena penyusutan garis pantai secara langsung mengancam lahan tambak, infrastruktur pelelangan, dan permukiman nelayan. Namun, kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi RPKD untuk menggeser strategi dari respons bencana menjadi ekonomi hijau berbasis mitigasi, yaitu dengan melibatkan masyarakat miskin dalam program padat karya konservasi, seperti penanaman dan pemeliharaan mangrove. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng fisik terhadap abrasi, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan yang stabil kepada rumah tangga miskin, memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Lamongan menjadi adaptif terhadap risiko pesisir dan perubahan iklim.

Fakta di atas dapat menjadi dasar penetapan prioritas kebijakan pengelolaan pesisir, dimana Paciran layak ditempatkan sebagai fokus utama penguatan perlindungan pantai, rehabilitasi mangrove, dan pengaturan pemanfaatan ruang pantai, sementara Brondong memerlukan upaya konsolidasi untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekonomi yang sudah berkembang, seperti pelabuhan perikanan dan sentra perdagangan hasil laut. Sejalan dengan itu, peta kawasan rawan bencana tsunami menunjukkan bahwa seluruh garis pantai utara Lamongan juga masuk dalam zona bahaya tsunami tingkat rendah, sehingga

strategi pengelolaan pesisir harus sekaligus mempertimbangkan skenario multi-bencana (abrasi, gelombang ekstrem, dan tsunami) melalui penyiapan jalur evakuasi, penataan permukiman aman tsunami, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas di sepanjang pesisir Laut Jawa.

E. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Meskipun Lamongan didominasi oleh dataran rendah, tinjauan terhadap kawasan rawan bencana tanah longsor tetap relevan, terutama di wilayah selatan dan barat daya yang memiliki morfologi perbukitan kapur, seperti di Kecamatan Ngimbang dan Mantup, dengan luas terdampak relatif kecil sekitar 368 Ha. Walaupun potensi longsor tergolong rendah, dampaknya terhadap masyarakat yang bermukim di lereng perbukitan dapat bersifat fatal dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa, rusaknya lahan pertanian kering, dan ter-putusnya akses transportasi, yang kesemuanya dapat mendorong masyarakat setempat ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, RPKD perlu memfokuskan programnya pada edukasi mitigasi risiko dan pemanfaatan lahan berkelanjutan (misalnya pertanian berbasis konservasi) di kawasan perbukitan tersebut, guna meminimalkan kerugian aset dan melindungi komunitas rentan dari guncangan bencana geologis.

Data menunjukkan bahwa Kec Sambeng memiliki kawasan rawan tanah longsor terluas dengan total 142,27 Ha, terdiri atas 8,53 Ha kategori rendah, 37,62 Ha kategori sedang, dan 96,13 Ha kategori tinggi. Luasan ini setara 0,94 persen dari total wilayah Sambeng, menjadikannya wilayah dengan ancaman paling dominan di Lamongan bagian selatan. Sementara itu, Kecamatan Ngimbang memiliki 58,67 Ha kawasan rawan longsor (0,59 persen dari total wilayah), dengan porsi terbesar berada pada kategori tinggi sebesar 50,98 Ha. Kecamatan Sukorame juga menunjukkan tingkat kerawanan yang cukup signifikan dengan total 69,73 Ha (1,77 persen dari wilayah), dimana sebagian besar termasuk kategori sedang.

Tabel 2.10. Luas Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Rawan Bencana Longsor Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Total (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Kawasan Rawan Bencana Longsor terhadap Luas Wilayah (%)
1	Sukorame	9.30	60.43	0.00	69.73	3928.70	1.77
2	Ngimbang	0.00	7.69	50.98	58.67	10006.02	0.59
3	Sambeng	8.53	37.62	96.13	142.27	15078.34	0.94
4	Brondong	0.00	16.74	74.53	91.27	8071.51	1.13
Jumlah		17.83	122.48	221.64	361.95	37084.57	0.98

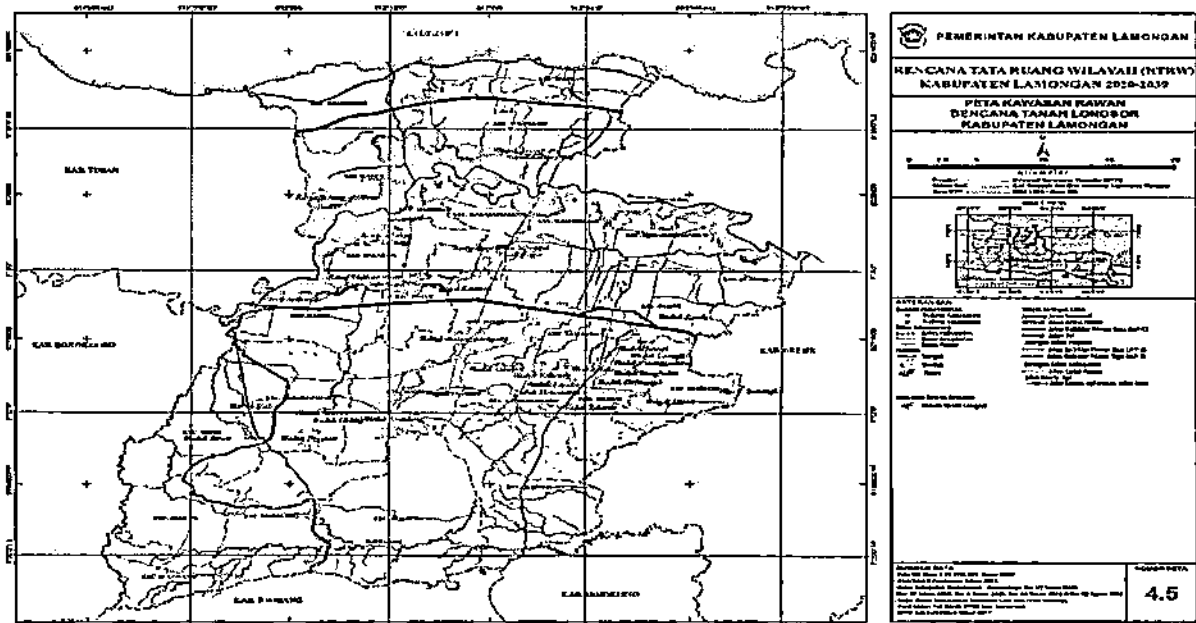
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Selain ketiga wilayah tersebut, Kecamatan Brondong di pesisir utara juga tercatat memiliki potensi longsor seluas 91,27 Ha (1,13 persen), dengan 74,53 Ha diantaranya masuk kategori tinggi. Meskipun lokasinya jauh dari daerah perbukitan, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh struktur tanah yang labil, aktivitas pemotongan lereng untuk pembangunan, atau erosi tebing di sekitar wilayah pantai dan perbukitan karst kecil di sekitarnya. Jika dijumlahkan, total kawasan rawan longsor di Kabupaten Lamongan

mencapai 361,95 Ha, dengan 17,83 Ha kategori rendah, 122,48 Ha kategori sedang, dan 221,64 Ha kategori tinggi. Angka ini menunjukkan meskipun secara persentase hanya mencakup sekitar 0,98 persen dari total wilayah, dampaknya dapat signifikan terhadap wilayah permukiman dan infrastruktur di daerah rawan.

Kawasan rawan tanah longsor di Kab Lamongan umumnya berada di desa-desa sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo yang memiliki lereng curam dan kondisi tanah labil. Wilayah dengan potensi longsor meliputi beberapa Kec seperti Babat, Glagah, Kalitengah, Karangbinangun, Karanggeneng, Laren, Maduran, dan Sekaran. Kerentanan longsor dipicu oleh erosi tebing sungai, kemiringan lereng, serta berkurangnya vegetasi penahan tanah di wilayah tersebut. Dalam konteks RPKD, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan program reboisasi tebing sungai dan pembangunan struktur penahan (seperti bronjong atau geotextile) di desa-desa yang teridentifikasi paling rentan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana serta larangan aktivitas yang mempercepat erosi di sekitar tebing sangat krusial untuk mengurangi risiko kerugian.

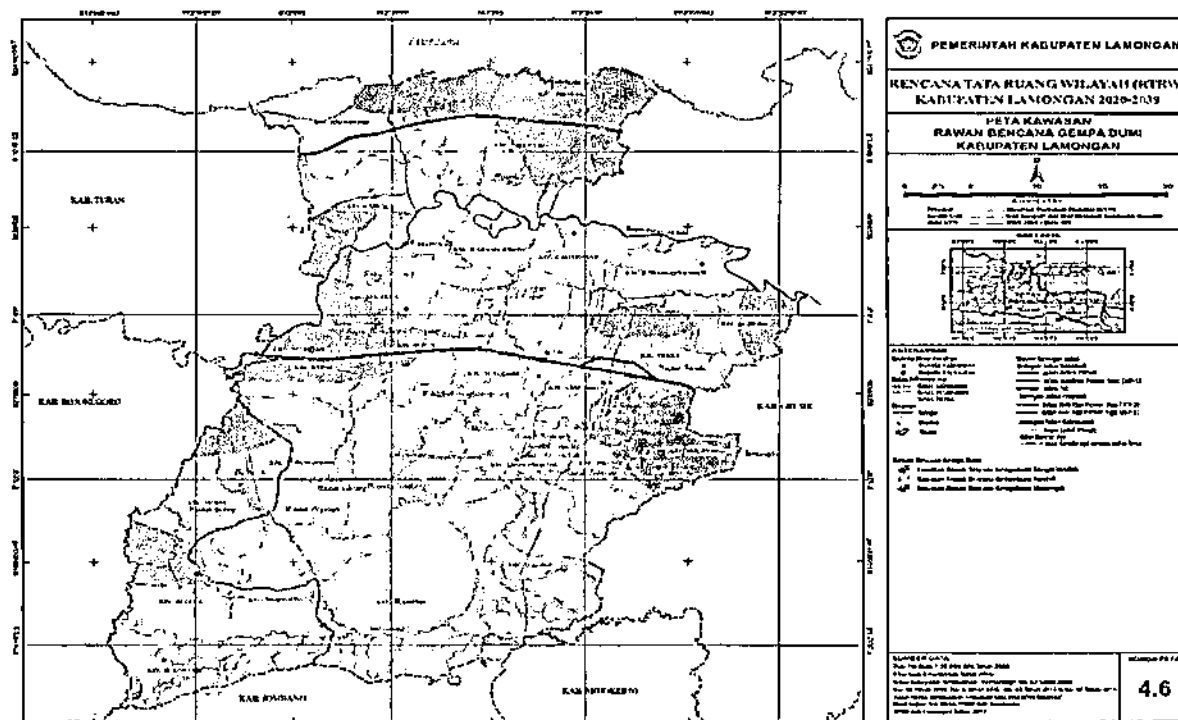
Gambar 2.18. Peta Kawasan Rawan Longsor Kabupaten Lamongan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Pelengkap dari kawasan rawan longsor biasanya disandingkan dengan data kerawanan gempa bumi. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah rawan gempa bumi seluas 175.220,73 Ha, dengan sebagian besar berada pada kategori rendah (V-VI MMI) seluas 135.522,47 Ha (77,36%), disusul kategori sangat rendah (IV MMI) seluas 21.560,52 Ha (12,31%), dan menengah (VII-VIII MMI) seluas 18.137,74 Ha (10,33%), tanpa ada wilayah yang masuk kategori tinggi (>VIII MMI). Potensi gempa menengah terutama terdapat di Kecamatan Modo, Laren, Sekaran, dan Solokuro, sedangkan sebagian besar wilayah lainnya seperti Ngimbang, Sambeng, Sugio, dan Kembangbahu termasuk zona rawan rendah. Secara umum, Lamongan tergolong wilayah dengan risiko gempa bumi rendah, namun kawasan bagian timur dan selatan tetap perlu diwaspadai karena memiliki potensi aktivitas seismik lebih tinggi.

Gambar 2.19. Peta Kawasan Gempa Bumi Kabupaten Lamongan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Dengan mempertimbangkan sebaran dan karakteristik risiko tersebut, kebijakan mitigasi di Kabupaten Lamongan perlu diarahkan pada upaya pengelolaan tata guna lahan berbasis kemiringan lereng, rehabilitasi vegetasi penahan erosi, serta penguatan sistem drainase di wilayah perbukitan. Kegiatan seperti penanaman kembali vegetasi hutan, pembatasan pembukaan lahan baru di lereng curam, dan pembangunan saluran air berlapis batu dapat membantu menekan potensi longsor di masa mendatang. Selain itu, masya-rakat di kecamatan berisiko tinggi seperti Sambeng, Ngimbang, dan Sukorame perlu mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan mitigasi bencana dan sistem peringatan dini berbasis komunitas agar dampak tanah longsor dapat diminimalisir secara efektif.

Konsentrasi kerawanan tanah longsor berkategori tinggi di wilayah selatan seperti Sambeng, Ngimbang, dan Sukorame, serta di Brondong, merupakan tantangan serius karena secara langsung mengancam keselamatan dan aset pertanian lahan kering milik rumah tangga miskin. Risiko ini menuntut RPKD untuk mengintegrasikan program perlindungan lahan dan mata pencaharian melalui pemberian insentif kepada petani miskin agar mereka menerapkan pola tanam konservasi dan agroforestri di lereng-lereng curam. Program rehabilitasi lahan ini sekaligus menciptakan peluang padat karya berbasis lingkungan yang memberikan pendapatan alternatif kepada masyarakat. Selain itu, pemetaan dan relokasi permukiman di zona longsor kategori tinggi harus diprioritaskan untuk menghindari kerugian aset dan jiwa, sehingga memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak sia-sia akibat guncangan bencana geologis.

F. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

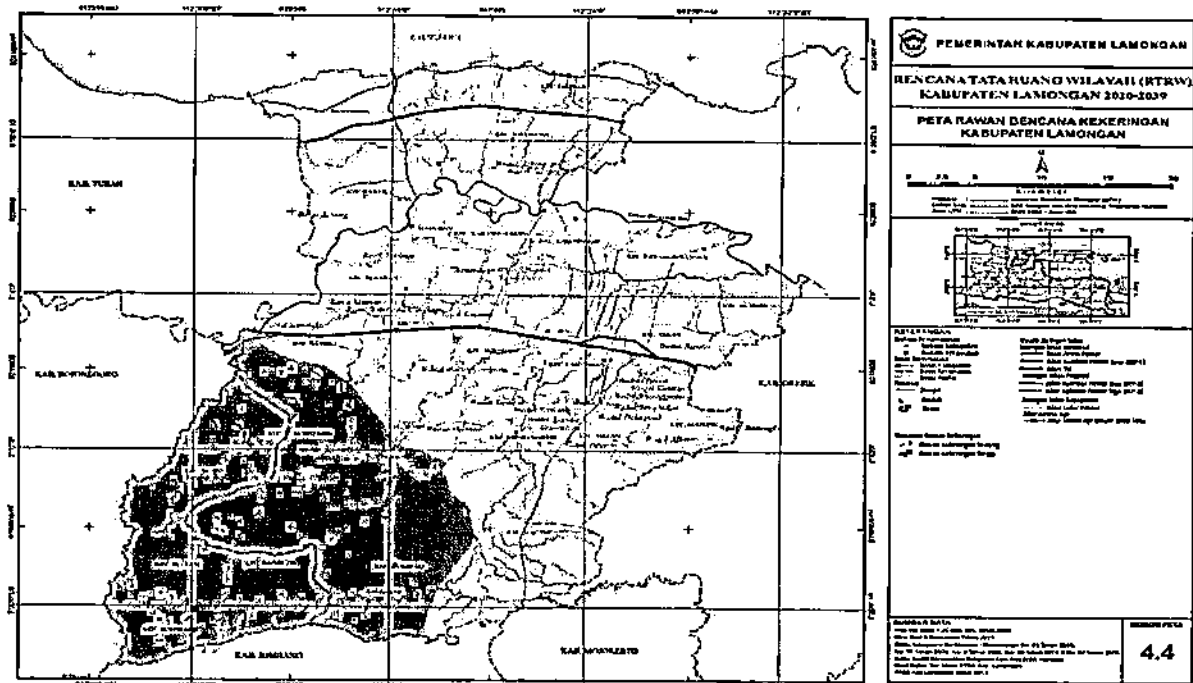
Kawasan rawan bencana kekeringan menjadi ancaman yang memiliki potensi sedang dan luas terdampak signifikan di Kabupaten Lamongan, terutama di wilayah yang bergantung pada tadah hujan atau daerah dengan struktur tanah karst di utara dan

selatan. Kekeringan secara langsung mengancam sektor pertanian pangan dan peternakan, yang merupakan sumber penghidupan mayoritas masyarakat miskin di perdesaan, menyebabkan kegagalan panen, penurunan hasil ternak, dan krisis air bersih. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada hilangnya pendapatan, tetapi juga memicu masalah kesehatan masyarakat dan memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, RPKD harus memprioritaskan investasi dalam infrastruktur konservasi air seperti pembangunan embung, sumur dangkal, dan instalasi air bersih, serta mendorong adaptasi pertanian tahan kekeringan sebagai strategi utama untuk melindungi mata pencaharian kelompok rentan.

Sebaran kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Lamongan menunjukkan pola spasial yang sangat jelas jika dilihat dari kombinasi tabel dan peta. Total luas kawasan rawan kekeringan sekitar 123.077 Ha dengan cakupan hampir seluruh kecamatan, dimana banyak diantaranya memiliki persentase kawasan rawan terhadap luas wilayah mencapai 100 persen. Hal ini berarti secara administratif hampir seluruh wilayah kecamatan masuk ke dalam zona potensi kekeringan, sehingga kekeringan bukan lagi ancaman lokal yang terbatas, tetapi menjadi karakter ekologis penting yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama sektor pertanian dan penyediaan air bersih.

Pola keruangan yang tergambar pada peta menunjukkan bahwa wilayah bagian barat dan selatan Lamongan didominasi zona risiko tinggi, yang beririsan dengan kecamatan seperti Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Sukorame, dan sebagian Mantup. Kecamatan Bluluk, Ngimbang, Mantup, Sukorame, Kedungpring, Modo, hingga Laren tercatat memiliki 100 persen luas wilayah sebagai kawasan rawan kekeringan. Sambeng meskipun persentasenya "hanya" sekitar 44,38 persen, namun secara absolut masih memiliki luasan rawan yang cukup besar, sehingga kombinasi antara intensitas kekeringan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadikan wilayah ini sangat rentan. Zona merah pada peta merepresentasikan area dengan tekanan kekeringan yang kuat, dimana penurunan ketersediaan air permukaan dan tanah berpotensi mengganggu produksi pangan dan ketersediaan air domestik. Kondisi ini menuntut adanya intervensi serius melalui pembangunan infrastruktur konservasi air, seperti embung dan sumur resapan, yang terintegrasi dengan jaringan irigasi di wilayah-wilayah yang didominasi zona risiko tinggi. Selain itu, diperlukan pula penerapan sistem pertanian yang lebih adaptif kekeringan, termasuk penanaman varietas unggul tahan kering dan modifikasi pola tanam, untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Gambar 2.20. Peta Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Tabel 2.11. Luas Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Total (ha) Rawan Kekeringan	Luas Wilayah (ha)	% Kawasan Rawan Kekeringan terhadap Wilayah (%)
1	Sukorame	3.928,70	3.928,70	100,00%
2	Bluluk	5.799,93	5.799,93	100,00%
3	Ngimbang	10.006,02	10.006,02	100,00%
4	Sambeng	6.691,47	15.078,34	44,38%
5	Mantup	9.123,19	9.123,19	100,00%
6	Kembangbahu	351,69	6.825,07	5,15%
7	Sugio	8.887,85	8.974,19	99,04%
8	Kedungpring	8.572,74	8.572,74	100,00%
9	Modo	8.169,76	8.169,76	100,00%
10	Babat	6.169,76	6.459,43	95,49%
11	Pucuk	4.538,49	4.538,49	100,00%
12	Sukodadi	4.747,56	4.747,56	100,00%
13	Lamongan	6.459,43	4.093,53	157,90%
14	Tikung	5.541,58	5.541,58	100,00%
15	Sarirejo	4.886,95	4.886,95	100,00%
16	Deket	4.395,15	4.395,15	100,00%
17	Glagah	5.001,33	5.001,33	100,00%
18	Karangbinangun	4.726,21	4.726,21	100,00%
19	Turi	5.250,09	5.250,09	100,00%

No	Kecamatan	Total (ha) Rawan Kekeringan	Luas Wilayah (ha)	% Kawasan Rawan Kekeringan terhadap Wilayah (%)
20	Kalitengah	3.694,60	3.694,60	100,00%
21	Karanggeneng	4.073,99	4.073,99	100,00%
22	Sekaran	5.404,96	5.404,96	100,00%
23	Maduran	3.277,68	3.277,68	100,00%
24	Laren	9.411,28	9.411,28	100,00%
25	Solokuro	5.518,93	5.518,93	100,00%
26	Paciran	5.681,33	5.681,33	100,00%
27	Brondong	8.071,51	8.071,51	100,00%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Bagian tengah Lamongan dalam peta ditunjukkan sebagai zona risiko sedang (kuning) yang memanjang dari wilayah perbatasan selatan hingga mendekati pesisir utara. Zona ini meliputi sejumlah kecamatan yang pada tabel memiliki luasan rawan cukup besar namun tidak sepenuhnya menutupi wilayah kecamatan, misalnya Kembangbahu, Sugio, Babat, dan sebagian Sari-rejo dan Tikung. Pada wilayah ini, tekanan kekeringan cenderung muncul musiman, yaitu pada tahun-tahun kering atau ketika fenomena El Niño menguat, wilayah kuning dapat mengalami penurunan produksi pertanian dan kekurangan air irigasi, sementara pada tahun-tahun normal dampaknya relatif lebih dapat diredam. Artinya, kebijakan pengelolaan air dan irigasi di zona ini perlu dirancang fleksibel untuk mengantisipasi variabilitas iklim tahunan.

Sementara itu, zona timur dan sebagian timur-tengah Lamongan ditandai sebagai kawasan risiko rendah yang meliputi kecamatan seperti Paciran, Solokuro, Sekaran, Kalitengah, Karanggeneng, hingga sebagian Glagah dan Deket. Meskipun banyak kecamatan tersebut tetap tercatat memiliki persentase kawasan rawan mendekati atau bahkan 100 persen (karena seluruh wilayah diklasifikasikan sebagai rawan rendah-sedang), karakter “hijau” di peta menunjukkan bahwa intensitas kekeringan di sana relatif lebih ringan dibanding zona merah dan kuning. Wilayah ini biasanya memiliki akses air yang lebih baik, baik dari jaringan irigasi, kedekatan dengan badan air, maupun kondisi geologi yang lebih mendukung penyimpanan air tanah. Namun demikian, peningkatan suhu akibat perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan tetap berpotensi mendorong pergeseran zona hijau menjadi kuning atau bahkan merah bila tidak diantisipasi.

Secara keseluruhan, pola yang tampak dari peta dan tabel menegaskan adanya gradien kerentanan kekeringan dari timur (lebih rendah) menuju barat-selatan (lebih tinggi). Gradien ini sangat relevan dengan struktur sosial ekonomi Lamongan yang masih didominasi oleh sektor pertanian lahan kering, tegalan, dan sawah tadah hujan di kecamatan-kecamatan rawan tinggi. Rumah tangga petani kecil, buruh tani, dan pelaku UMKM berbasis pertanian di wilayah rentan berpotensi menghadapi kerugian produksi, penurunan pendapatan, serta peningkatan biaya akses air bersih ketika musim kemarau memanjang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperkuat lingkaran kemiskinan, terutama di desa-desa yang belum memiliki infrastruktur air dan irigasi yang memadai.

Implikasinya, strategi pengelolaan risiko kekeringan di Kabupaten Lamongan harus berlapis dan spasial spesifik. Zona risiko tinggi memerlukan prioritas pembangunan

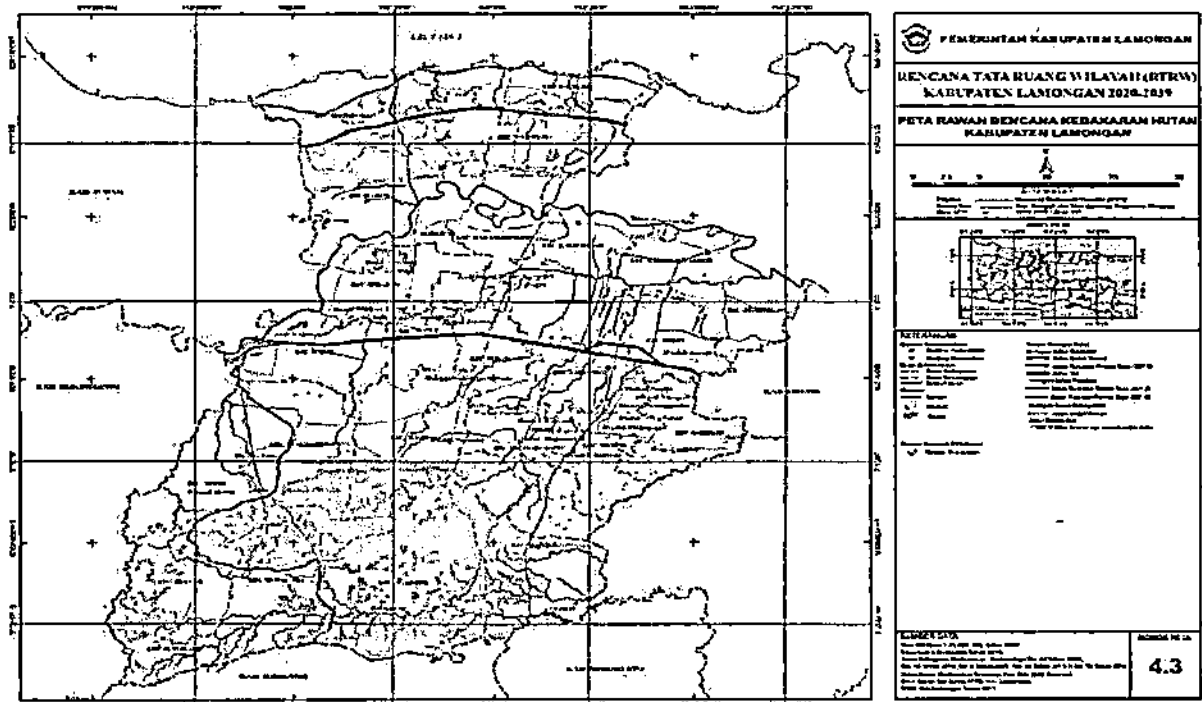
infrastruktur sumberdaya air (embung, sumur dalam, jaringan irigasi dan perpipaan), penerapan teknologi hemat air, serta diversifikasi mata pencaharian yang tidak sepenuhnya bergantung pada tanaman yang boros air. Zona sedang perlu diperkuat dengan sistem peringatan dini kekeringan, pengelolaan irigasi berbasis jadwal dan kuota air, serta pengaturan pola tanam yang adaptif terhadap prakiraan iklim musiman. Sementara zona risiko rendah harus dijaga fungsinya sebagai “buffer area” dengan menjaga tutupan lahan, melindungi daerah resapan, dan mengendalikan alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi kapasitas penyimpanan air.

G. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan

Meskipun Lamongan bukanlah kabupaten dengan hutan hujan lebat, potensi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tetap menjadi risiko signifikan, terutama di kawasan hutan produksi dan lahan tegalan kering. Karhutla merupakan ancaman ganda bagi penanggulangan kemiskinan, karena melalui kerusakan langsung terhadap aset hutan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar hutan (melalui program perhutanan sosial). Oleh karena itu, RPKD harus mengintegrasikan program pencegahan Karhutla berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat miskin di sekitar hutan dalam kegiatan pengawasan dan konservasi lahan, sekaligus memberikan insentif ekonomi agar mereka tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Sebaran kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa ancaman ini tidak merata, tetapi terkonsentrasi pada kelompok kecamatan tertentu dengan karakter tutupan lahan dan kondisi biofisik yang relatif kering. Total luas kawasan rawan Karhutla di Kabupaten Lamongan mencapai sekitar 32,37 ribu Ha. Wilayah yang berpotensi mengalami bencana kebakaran di Kabupaten Lamongan umumnya berada di kawasan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung. Daerah yang termasuk dalam kategori rawan tersebut antara lain Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, dan Kedungpring. Kecamatan Sambeng merupakan daerah dengan kawasan rentan Karhutla paling luas seluas 9.039,25 Ha, kemudian diikuti Kecamatan Ngimbang dengan luas 3.974,02 Ha, yang ketiga adalah Kecamatan Mantup dengan luas 2.425,63 Ha.

Gambar 2.21. Peta Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Konsentrasi risiko tinggi pada kawasan hutan di beberapa kecamatan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan patroli pencegahan kebakaran secara rutin, terutama saat musim kemarau ekstrem. Upaya mitigasi harus melibatkan sinergi aktif antara BPBD, Perhutani, dan kelompok masyarakat setempat untuk deteksi dini dan respons cepat. Pengendalian pembukaan lahan dengan cara membakar juga harus diperketat di sekitar kawasan hutan yang rentan. Selain itu, penting untuk memasukkan program edukasi pencegahan Karhutla ke dalam desa-desa penyangga hutan sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang.

Tabel 2.12. Kawasan Rawan Karhutla Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan	Total (ha) Rawan Karhutla	Luas Wilayah (Ha)	Persen Kawasan Rawan Terhadap Wilayah (%)
1	Sukorame	1.153,90	3.928,70	29,37
2	Bluluk	1.477,38	5.799,93	25,47
3	Ngimbang	2.741,44	10.006,02	27,40
4	Sambeng	7.588,07	15.078,34	50,32
5	Mantup	2.018,06	9.123,19	22,12
6	Kembangbahu	9,00	6.825,07	0,13
7	Sugio	1.204,34	8.974,19	13,42
8	Kedungpring	1.508,73	8.572,74	17,60
9	Modo	920,82	8.169,76	11,27
10	Babat	64,46	6.459,43	1,00
11	Deket	7,45	4.395,15	0,17
12	Glagah	442,21	5.001,33	8,84
13	Laren	2.398,25	9.411,28	25,48
14	Solokuro	4.941,94	9.486,89	52,09
15	Paciran	2.430,08	5.681,33	42,7
16	Brondong	3.454,83	8.071,51	42,80

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Berikutnya adalah kawasan rawan kekeringan, yaitu wilayah yang berpotensi mengalami defisit air, dimana ketersediaan air jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan untuk kehidupan, pertanian, kegiatan ekonomi, maupun lingkungan. Di Kabupaten Lamongan, kekeringan terjadi hampir di seluruh kecamatan dan diklasifikasikan menjadi dua tingkat kerawanan, yaitu kekeringan sedang seluas 121.260,39 Ha dan kekeringan tinggi seluas 53.960,33 Ha.

Sebaliknya, sejumlah kecamatan seperti Kembangbahu, Deket, dan Glagah hanya memiliki luasan rawan Karhutla yang relatif kecil (di bawah 10 persen dari luas wilayah), yang tercermin pada peta sebagai area kerawanan yang jauh lebih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur penggunaan lahan misalnya dominasi sawah irigasi, permukiman, dan badan air memberikan perlindungan relatif terhadap potensi kebakaran skala besar. Namun, kajian nasional menegaskan bahwa perubahan tutupan lahan melalui deforestasi dan konversi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat dengan cepat meningkatkan kerentanan sebuah wilayah terhadap Karhutla, karena mengurangi kelembapan tanah dan menambah bahan bakar kering.

Konsentrasi Karhutla di klaster selatan barat (Sambeng, Ngimbang, Mantup) dan tingginya luasan rawan kekeringan (total 175.220,72 Ha) merupakan tantangan ganda yang paling signifikan bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Lamongan, karena keduanya secara langsung mengancam mata pencaharian berbasis lahan kering. Wilayah-wilayah ini menampung kelompok masyarakat miskin yang bergantung pada hutan dan pertanian tadah hujan. Peluangnya terletak pada kemampuan RPKD untuk mengintegrasikan program perhutanan sosial berbasis pencegahan Karhutla yang memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat agar berperan aktif menjaga hutan, sekaligus memprioritaskan investasi konservasi air di kawasan rawan kekeringan tinggi. Strategi ini harus memastikan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga tentang membangun resiliensi lingkungan dan ekonomi masyarakat miskin terhadap risiko degradasi hutan dan krisis air yang semakin intensif.

H. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

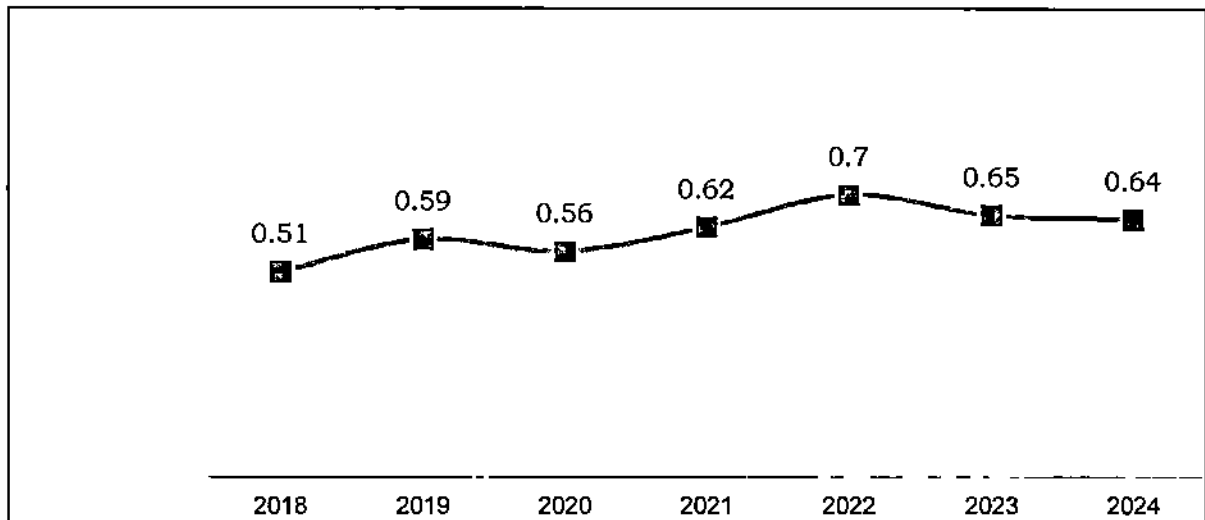
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mencegah, mengurangi, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Indeks ini umumnya dihitung dengan mempertimbangkan berbagai dimensi, seperti tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin kuat kapasitas daerah untuk bertahan dan bangkit ketika bencana terjadi, sehingga IKD menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai keberhasilan kebijakan pengurangan risiko bencana dan pembangunan berketahanan.

Jika risiko masih tinggi namun IKD meningkat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat sudah mulai mampu meredam dampak bencana meskipun ancaman fisiknya belum berkurang secara signifikan. Sebaliknya, jika IKD stagnan atau menurun di tengah ancaman yang besar, berarti kapasitas adaptif dan respons daerah masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, pembacaan tren IKD sepanjang 2018-2024 menjadi dasar untuk menilai sejauh mana intervensi kebijakan, program

penguatan kapasitas, serta pembangunan infrastruktur mitigasi di Kabupaten Lamongan telah memberikan hasil yang nyata.

Data IKD menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan meningkat dari 0,51 pada tahun 2018 menjadi 0,59 pada 2019, kemudian sedikit menurun ke 0,56 pada 2020. Setelah itu, indeks kembali naik menjadi 0,62 pada 2021 dan mencapai puncak 0,70 pada 2022, sebelum mengalami penurunan ringan menjadi 0,65 pada tahun 2023 dan 0,64 pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan tren penguatan ketahanan daerah secara umum dengan fase percepatan yang cukup signifikan pada periode 2020-2022. Hal ini kemungkinan terkait dengan intensifikasi program kesiapsiagaan, pembentukan desa tangguh bencana, serta penyiapan infrastruktur dan sistem peringatan dini setelah adanya berbagai kejadian bencana dan pengalaman penanganan kedaruratan beberapa tahun terakhir.

Gambar 2.22. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lamongan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Pergerakan IKD yang cenderung naik, meski disertai fluktuasi, mengindikasikan bahwa fondasi ketahanan bencana di Kabupaten Lamongan mulai terbentuk dan menguat. Namun, koreksi kecil pada 2023 dan 2024 juga menjadi sinyal bahwa penguatan kapasitas tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan dan pelatihan, tetapi perlu diikuti dengan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor, serta perluasan jangkauan program ke kecamatan dan desa yang masih memiliki kerentanan tinggi. Dengan kata lain, grafik IKD 2018-2024 menggambarkan kemajuan, namun sekaligus menegaskan perlunya konsistensi dan pendalaman program agar peningkatan ketahanan tidak hanya bersifat temporer, melainkan menjadi tren jangka panjang.

Peningkatan signifikan IKD Lamongan dari 0,51 (2018) menjadi 0,64 (2024) menciptakan peluang bagi keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan, karena kemampuan adaptif dan respons daerah yang lebih tinggi dari dampak guncangan bencana (banjir, kekeringan, cuaca ekstrem). Kenaikan IKD harus dimanfaatkan untuk mengintegrasikan secara penuh prinsip pengurangan risiko bencana ke dalam program sosial dan ekonomi, misalnya dengan mewajibkan asuransi pertanian atau memberikan bantuan perbaikan rumah tahan bencana kepada keluarga miskin. Pemanfaatan peluang ini memerlukan sinkronisasi antara dokumen RPKD dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah agar intervensi sosial ekonomi dan kebencanaan saling mendukung.

Melalui integrasi ini, setiap program pengentasan kemiskinan dapat didesain sekaligus sebagai investasi ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tantangan utamanya adalah memastikan penguatan IKD tersebut benar-benar inklusif, yaitu kapasitas dan infrastruktur ketahanan bencana (seperti desa tangguh bencana) tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi diperluas jangkauannya ke desa-desa yang memiliki konsentrasi kemiskinan tertinggi dan kerentanan ganda (misalnya miskin dan rawan banjir), sehingga koreksi kecil IKD pada 2023–2024 dapat diatasi melalui peningkatan kualitas dan pemerataan program. Oleh karena itu, fokus anggaran dan program perlu digeser menuju pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah perdesaan yang menjadi kantong kemiskinan dan kerawanan bencana. Pemerataan ini akan menjamin bahwa peningkatan IKD tidak hanya tercermin dalam statistik makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh rumah tangga miskin yang paling rentan terhadap guncangan lingkungan.

2.1.5 Critical Point Kondisi Fisik dan Geografi Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan ragam penjelasan kondisi fisik dan geografis di atas, maka dapat disusun beberapa critical point yang relevan dengan penyusunan RPKD Lamongan, yaitu:

1. Kondisi fisik Lamongan yang terbagi menjadi tiga zona utama—wilayah pesisir utara, dataran aluvial di tengah, dan perbukitan kapur selatan—menciptakan tipologi kemiskinan yang berbeda dan menuntut strategi RPKD yang spesifik. Di wilayah pesisir (seperti Paciran dan Brondong), kemiskinan cenderung bersifat struktural karena kerentanan mata pencaharian nelayan terhadap fluktuasi iklim dan degradasi lingkungan. Sementara itu, di wilayah dataran rendah yang dilewati Bengawan Solo, kemiskinan terkait erat dengan risiko bencana tahunan (banjir dan kekeringan) yang menghantam produktivitas pertanian dan mengganggu akses layanan dasar. RPKD harus mengarahkan program pemberdayaan ekonomi non-agraria di wilayah utara dan selatan, sekaligus memprioritaskan pembangunan infrastruktur tahan guncangan bencana di zona rentan di tengah, untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian keluarga miskin.
2. Lamongan dihadapkan pada kerentanan geografis ganda yang menjadi faktor struktural kemiskinan. Luapan air Bengawan Solo secara berkala mengisolasi desa-desa di wilayah sekitarnya, merusak infrastruktur, dan menyebabkan gagal panen, yang secara langsung mendorong keluarga rentan kembali jatuh ke jurang kemiskinan. Oleh karena itu, RPKD tidak cukup hanya berfokus pada bantuan sosial. Program harus diintegrasikan dengan upaya transformasi struktural melalui pembangunan tanggul, sistem irigasi teknis yang adaptif terhadap kekeringan, dan yang paling penting, program asuransi pertanian yang disubsidi untuk melindungi modal kerja petani miskin dari kerugian akibat bencana.
3. Secara geografis, wilayah Lamongan Selatan (seperti Bluluk, Sukorame, dan Mantup) memiliki karakteristik perbukitan kapur dengan kepadatan penduduk rendah, jarak yang jauh dari pusat ekonomi, dan aksesibilitas infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan ini menghambat akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja, sehingga kemiskinan di wilayah ini

cenderung bersifat persisten. RPKD harus secara tegas menerapkan pendekatan afirmasi wilayah, mengalokasikan anggaran dan program peningkatan IPM (seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan jaringan telekomunikasi) secara proporsional lebih besar ke wilayah selatan. Tujuan utamanya adalah membuka isolasi geografis, sehingga potensi sumber daya manusia dan ekonomi lokal dapat terintegrasi dengan pertumbuhan regional.

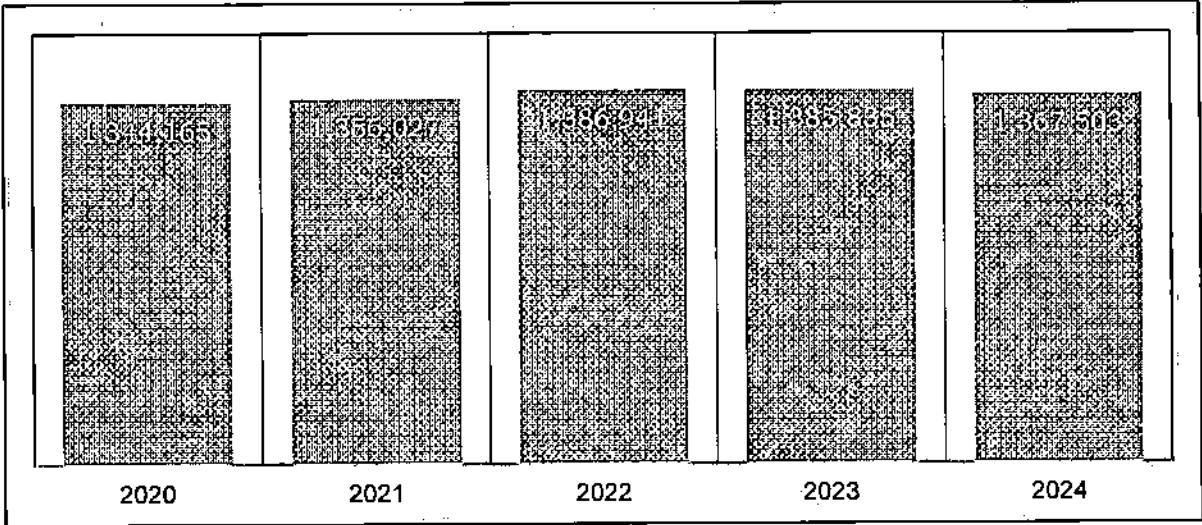
2.2 KONDISI SOSIAL DEMOGRAFI

Tinjauan terhadap kondisi sosial demografi diperlukan karena memberikan gambaran tentang karakteristik populasi, sebaran penduduk, dan struktur angkatan kerja yang secara langsung berkaitan dengan tingkat kerentanan dan kebutuhan masyarakat. Analisis demografi mencakup ragam aspek seperti komposisi usia, tingkat pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, dan disparitas gender, yang keseluruhannya menjadi indikator kunci dalam mengidentifikasi siapa yang miskin dan mengapa mereka miskin. Dengan memahami dinamika sosial demografi, rancangan intervensi dalam RPKD dapat terarah dan spesifik (misalnya program pelatihan vokasi untuk angkatan kerja muda yang miskin atau program kesehatan ibu dan anak di wilayah dengan tingkat fertilitas tinggi), sehingga menjamin bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis pada bukti dan kebutuhan riil populasi di Lamongan.

2.2.1 Perkembangan Jumlah dan Struktur Penduduk

Indikator pertama untuk melihat sosial demografi adalah perkembangan jumlah penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Lamongan periode 2020–2024, terlihat bahwa besaran penduduk secara umum berada pada kisaran lebih dari 1,3 juta jiwa. Jumlah penduduk meningkat dari 1.344.165 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.356.027 jiwa pada tahun 2021, lalu kembali naik cukup signifikan hingga mencapai puncak 1.386.941 jiwa pada tahun 2022. Setelah itu, jumlah penduduk cenderung stagnan dan sedikit menurun menjadi 1.385.835 jiwa pada tahun 2023, kemudian turun lebih lanjut menjadi 1.367.503 jiwa pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan fase pertumbuhan penduduk yang relatif menguat hingga 2022, diikuti dengan kecenderungan penurunan ringan dalam dua tahun terakhir.

Gambar 2.23. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan



Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka (Diolah)

Selain jumlah total, struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan persebaran wilayah kecamatan menentukan seberapa besar beban ketergantungan dan kapasitas tenaga kerja yang dimiliki daerah. Komposisi penduduk usia produktif akan berpengaruh langsung terhadap potensi pertumbuhan ekonomi, sementara proporsi penduduk usia muda dan lanjut usia akan menentukan kebutuhan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pembahasan mengenai jumlah penduduk Kabupaten Lamongan perlu ditempatkan sebagai konteks awal sebelum mengurai lebih lanjut struktur penduduk, sehingga arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika demografi yang terjadi.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kunci yang meng-gambarkan seberapa cepat jumlah penduduk di suatu wilayah berubah dari waktu ke waktu. Indikator ini menangkap hasil bersih dari dinamika kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, sehingga sangat penting untuk membaca arah perkembangan demografi daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan, pemantauan laju pertumbuhan penduduk menjadi dasar dalam menyusun proyeksi kebutuhan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur sosial, serta untuk mengantisipasi tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Selain itu, pola partum-buhan penduduk akan berpengaruh langsung terhadap potensi bonus demografi maupun beban ketergantungan yang ditanggung penduduk usia produktif.

Tabel 2.13. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pen-duduk	1.344.165	1.356.027	1.371.509	1.385.835	1.367.503
2.	Laju Pertumbuh-an Penduduk	13,04%	0,88%	1,14%	1,04%	-1,32

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk periode 2020–2024, terlihat pola yang cenderung menurun dengan dinamika yang cukup tajam. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan tercatat sangat tinggi, yakni sekitar 13,04 persen, kemudian turun drastis menjadi 0,88 persen pada tahun 2021. Setelah itu, laju pertumbuhan kembali bergerak pada kisaran yang relatif stabil, yaitu 1,14 persen pada 2022 dan 1,04 persen pada 2023. Pola ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pertumbuhan pada 2020, peningkatan jumlah penduduk Lamongan cenderung melandai dan bergerak pada laju moderat di kisaran satu persen per tahun selama dua tahun berikutnya. Memasuki tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk berbalik menjadi negatif sebesar -1,32 persen. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya kombinasi faktor, seperti menurunnya angka kelahiran, meningkatnya mobilitas keluar daerah, atau adanya penyesuaian administratif dalam pencatatan penduduk.

Dinamika laju pertumbuhan penduduk Lamongan menciptakan peluang bagi RPKD untuk memfokuskan sumber daya pada peningkatan kualitas hidup penduduk eksisting, tidak hanya pada upaya mengalokasikan sumber daya besar untuk melayani pertambahan penduduk baru. Namun laju pertumbuhan penduduk juga ada yang negatif yang kemungkinan didorong oleh mobilitas keluar (migrasi), juga menjadi tantangan karena

dapat mengindikasikan bahwa angkatan kerja produktif (terutama kaum muda) mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar Lamongan, meninggalkan daerah dengan proporsi penduduk lanjut usia dan beban ketergantungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, RPKD harus menjadikan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan sense of belonging (rasa memiliki) sebagai prioritas, agar penduduk usia produktif, terutama yang rentan miskin, tidak terpaksa bermigrasi dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.

Proyeksi penduduk merupakan instrumen penting bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka menengah. Melalui proyeksi, pemerintah dapat memperkirakan besaran penduduk yang harus dilayani, baik dari sisi penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, perumahan, transportasi, maupun dari sisi pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial. Informasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana tata ruang, perencanaan investasi publik, dan penentuan prioritas program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup penduduk.

Selain jumlah penduduk, proyeksi struktur umur, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, serta angka ketergantungan memberi gambaran mengenai arah perubahan demografi yang akan dihadapi. Komponen-komponen ini menentukan sejauh mana Kabupaten Lamongan masih memiliki ruang untuk memanfaatkan bonus demografi, sekaligus seberapa besar tekanan yang muncul akibat bertambahnya penduduk usia lanjut. Pembahasan mengenai proyeksi penduduk bukan hanya melihat pertambahan angka secara absolut, tetapi juga membaca pergeseran komposisi penduduk yang akan mempengaruhi desain kebijakan pembangunan manusia dan ekonomi daerah.

Tabel 2.14. Proyeksi Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Komponen	Penduduk Th 2024	Proyeksi Penduduk (Ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk						
Laki-Laki	684.425	692.953	696.579	699.953	703.049	705.876
Perempuan	683.078	693.437	697.643	701.655	705.459	709.037
Total	1.367.503	1.386.390	1.394.222	1.401.608	1.408.508	1.414.913
Rasio Jenis Ke- lamin Perempu- an Terhadap Laki-Laki (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kepadatan Pen- duduk (jiwa / km2)	7,87	7,91	7,96	8,00	8,04	8,08
Komposisi Penduduk (%)						
0-14 Tahun	19,77%	19,70%	19,62%	19,54%	19,45%	19,35%
15-64 Tahun	69,49%	69,12%	68,75%	68,38%	68,03%	67,69%
65 + Tahun	10,74%	11,18%	11,63%	12,08%	12,52%	12,96%
Angka Keter- gantungan (%)	43,90%	44,68%	45,46%	46,24%	47,00%	47,74%

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Lamongan 2025-2029 (Diolah)

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2025-2029, jumlah penduduk Kab. Lamongan diperkirakan meningkat secara bertahap dari 1.367.503 jiwa pada tahun 2024

menjadi sekitar 1.414.913 jiwa tahun 2029. Peningkatan penduduk terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk laki-laki dari 684.425 jiwa menjadi 705.876 jiwa dan perempuan dari 683.078 jiwa menjadi 709.037 jiwa, dengan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang (sekitar 1,00) sepanjang periode proyeksi. Kepadatan penduduk juga diproyeksikan naik perlahan dari 7,87 jiwa per km² pada tahun 2024 menjadi sekitar 8,08 jiwa per km² pada tahun 2029, yang mengindikasikan peningkatan tekanan penduduk terhadap ruang wilayah meskipun laju pertumbuhannya tergolong moderat.

Dari sisi struktur umur, proyeksi menunjukkan kecenderungan penu-runan proporsi penduduk usia muda 0–14 tahun dari 19,77 persen pada tahun 2024 menjadi sekitar 19,35 persen pada tahun 2029, sementara proporsi usia produktif 15–64 tahun juga menurun dari 69,49 persen menjadi 67,69 persen. Sebaliknya, persentase penduduk usia 65 tahun ke atas meningkat cukup konsisten dari 10,74 persen pada tahun 2024 menjadi 12,96 persen pada tahun 2029, yang tercermin pada kenaikan angka ketergantungan dari 43,90 persen menjadi 47,74 persen. Pola ini menandakan menguatnya proses penuaan penduduk (ageing population) di Kab. Lamongan, sehingga perencanaan ke depan perlu memberi perhatian lebih besar pada penguatan layanan kesehatan lansia, jaminan sosial, serta strategi peningkatan produktivitas penduduk usia kerja untuk mengimbangi bertambahnya beban ketergantungan.

Proyeksi struktur umur Lamongan menunjukkan adanya pergeseran demografi menuju penuaan penduduk. Perubahan ini menimbulkan tantangan serius bagi RPKD, karena meningkatnya beban ketergantungan berarti sumber daya ekonomi rumah tangga miskin harus dialokasikan lebih besar untuk perawatan dan kebutuhan lansia yang tidak produktif, sehingga mengurangi kemampuan investasi dan akumulasi aset. Namun, kondisi ini juga membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja muda melalui investasi terarah pada pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, sambil mengembangkan skema jaminan sosial dan kesehatan lansia yang adaptif untuk mencegah keluarga miskin jatuh ke dalam kemiskinan akibat biaya perawatan orang tua.

Sebaran penduduk tidak merata antar kecamatan, dimana Babat (91,3 ribu jiwa), Paciran (92,3 ribu jiwa), dan Lamongan (72 ribu jiwa) menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar. Sebaliknya, kecamatan dengan populasi terendah adalah Sarirejo (25,6 ribu jiwa) dan Maduran (34,2 ribu jiwa). Pertumbuhan penduduk bervariasi beberapa wilayah seperti Tikung (3,56%), Sarirejo (2,56%), dan Paciran (2,23%) mengalami peningkatan signifikan, sedangkan wilayah seperti Sekaran (-7,6%) dan Maduran (-6,34%) justru mengalami penurunan populasi yang cukup tajam, mengindikasikan perbedaan dinamika demografis antar wilayah, baik karena faktor migrasi, urbanisasi, maupun daya tarik ekonomi lokal.

Dari sisi kepadatan penduduk, rata-rata kepadatan Kab. Lamongan mencapai 8 jiwa per km², dengan variasi yang mencolok antar kecamatan. Babat memiliki kepadatan tertinggi (15 jiwa/km²) diikuti Paciran (11 jiwa/km²) dan Brondong (11 jiwa/km²) yang merupakan wilayah pesisir dan pusat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, wilayah selatan seperti Sukorame (5 jiwa/km²) dan Bluluk (4 jiwa/km²) tergolong jarang penduduk karena didominasi kawasan hutan dan pertanian. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Lamongan relatif seimbang di hampir seluruh kecamatan, berkisar antara 97–102,

menunjukkan distribusi gender yang stabil tanpa ketimpangan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan struktur demografis Lamongan yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pesisir, dengan perbedaan pertumbuhan penduduk yang menggambarkan variasi potensi dan tantangan pembangunan antar wilayah.

Tabel 2.15. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamongan 2024

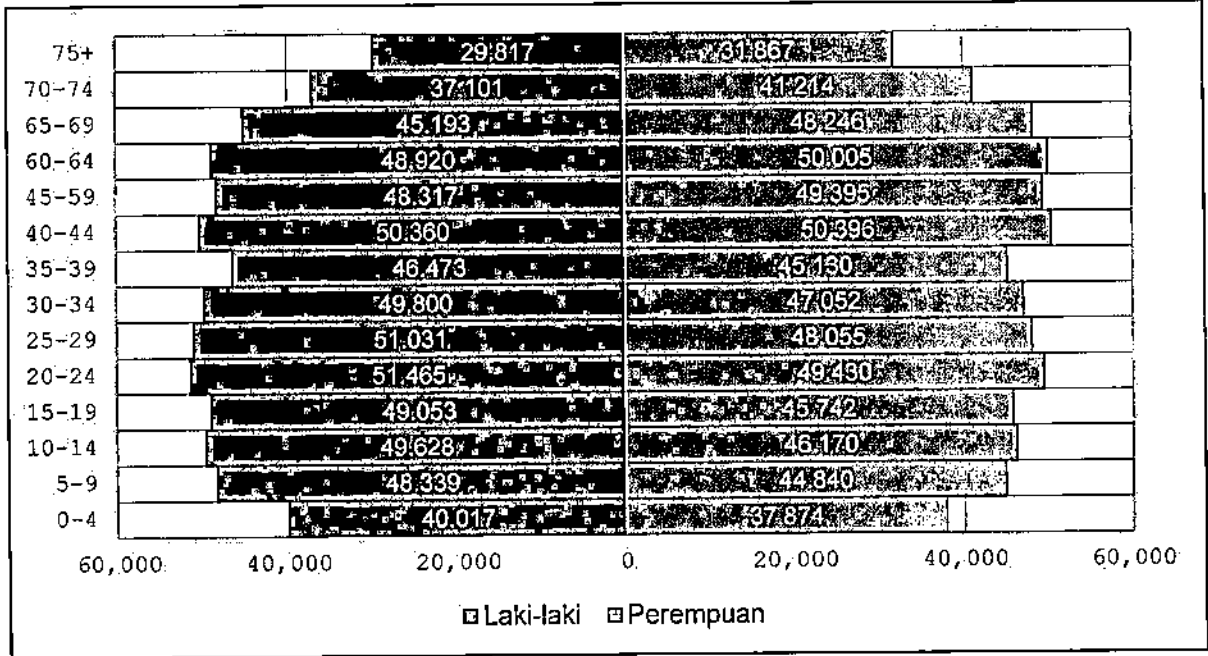
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Sukorame	3.929	2,24	9	42	114
Sukorame	21.6	-0.15	1.56	5	100.2
Bluluk	23.1	-0.04	1.67	4	97.8
Ngimbang	49.5	1	3.57	4	100.7
Sambeng	52.8	0.18	3.81	3	101
Mantup	46.9	0.24	3.38	5	99.2
Kembangbahu	50.6	0.92	3.65	8	100.5
Sugio	63.3	0.29	4.56	7	100.1
Kedungpring	62	-0.95	4.48	7	100.6
Modo	51.2	-0.27	3.7	7	100.2
Babat	91.3	-1.1	6.59	15	102.7
Pucuk	48.9	-1.84	3.53	11	101.6
Sukodadi	59.6	3.06	4.3	11	99.3
Lamongan	71.1	2.25	5.13	18	97.9
Tikung	47.6	3.56	3.44	9	98.8
Sarirejo	25.6	2.56	1.85	5	97.7
Deket	44.1	0.06	3.18	9	100.2
Glagah	41.3	-0.46	2.98	10	100.8
Karangbinangun	40.9	1.23	2.95	8	99.7
Turi	55.3	1.86	3.99	9	101.9
Kalitengah	36.5	1.9	2.64	8	99.7
Karang Geneng	44.2	1.18	3.19	9	100
Sekaran	44.4	-7.6	3.21	9	102.1
Maduran	34.2	-6.34	2.47	11	99.8
Laren	51.1	-0.6	3.69	5	100.8
Solokuro	49.9	3.84	3.6	5	100.6
Paciran	100	2.23	7.21	21	102.2
Brondong	78.7	2.17	5.68	11	102.2
Lamongan	1385.8	0.45	100	8	100.6

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2025

Konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah utara (pesisir) dan barat (Babat) menuntut adanya perencanaan infrastruktur dan layanan publik yang lebih intensif, seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi, untuk menghindari munculnya kantong-kantong kemiskinan perkotaan atau pesisir yang padat. Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan rendah di wilayah selatan memerlukan strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal (seperti agrobisnis atau ekowisata) untuk mencegah urbanisasi yang berlebihan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Struktur umur penduduk Kab. Lamongan tahun 2024 membentuk pira-mida dengan dasar yang cukup lebar dan puncak yang mengecil, menandakan bahwa komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia muda hingga usia produktif. Kelompok umur 20-24 tahun merupakan yang terbesar dengan jumlah sekitar 100.895 jiwa, diikuti kelompok 25-29 tahun dan 40-44 tahun, masing-masing sekitar 99.086 jiwa dan 100.756 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Lamongan memiliki populasi usia kerja yang besar, yang berpo-tensi menjadi kekuatan demografis bagi pembangunan ekonomi daerah. Sementara itu, jumlah penduduk pada kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) relatif lebih kecil, mencerminkan struktur penduduk yang masih produktif dan belum menua. Secara umum, distribusi antara laki-laki dan perempuan ter-lihat seimbang di setiap kelompok umur, dengan perbedaan jumlah yang tidak signifikan. Pola ini mengindikasikan bahwa Lamongan berada pada fase tran-sisi demografi, dengan potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan.

Gambar 2.24. Piramida Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka, 2025

Peluang bonus demografi harus dioptimalkan melalui investasi pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional untuk menyerap angkatan kerja muda yang melimpah. Kegagalan dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi kelompok usia produktif terbesar (20-29 tahun) berisiko mengubah potensi bonus demografi Kabupaten Lamongan menjadi beban, yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masa-masa akan datang.

2.2.2 Karakteristik Sosial Budaya

Indikator berikutnya adalah kondisi sosial masyarakat yang bisa dilihat dari klaster sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya masyarakat, seperti karakteristik atau partisipasi dalam kegiatan sosial, merupakan determinan penting yang memengaruhi kemampuan keluar dari perangkap kemiskinan. Kerentanan sosial yang tinggi (misalnya angka putus sekolah yang tinggi atau norma yang menghambat perempuan bekerja) dapat

pertanian atau buruh non-formal, membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan eksternal (harga komoditas, gagal panen, bencana alam).

3. Klaster Kemiskinan Sedang-Tinggi: Berdasarkan kajian pemetaan kemiskinan di Jawa Timur, ketiga kabupaten ini sering masuk dalam klaster dengan rasio penduduk miskin yang cenderung sedang hingga tinggi, dibandingkan wilayah urban di Jawa Timur. (Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan pernah dicatat memiliki persentase kemiskinan yang berdekatan).
4. Modal Sosial yang Kuat: Di sisi lain, masyarakat di klaster ini umumnya memiliki modal sosial (solidaritas, gotong royong) yang cukup kuat, yang menjadi aset penting dalam upaya penanggulangan bencana dan kemiskinan berbasis komunitas.

Relevansi klaster pengembangan wilayah Lamongan (Labanegoro) terhadap isu kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Dimasukkannya Kabupaten Lamongan ke dalam Klaster Labanegoro memiliki implikasi signifikan terhadap dimensi sosial demografi dan strategi penanggulangan kemiskinan. Klaster ini umumnya dicirikan oleh basis ekonomi pertanian, sumber daya alam, dan pertumbuhan industri yang terkonsentrasi di utara. Keberadaan Lamongan dalam klaster ini menciptakan peluang untuk integrasi pasar kerja dan aliran modal yang lebih baik, dimana kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional dapat diserap oleh sektor industri dan jasa. Kondisi tersebut dapat menjadi katup pelepas bagi kemiskinan perdesaan dengan menawarkan pekerjaan non-pertanian yang stabil, yang sangat penting untuk mengurangi konsentrasi penduduk miskin di sektor primer yang rentan terhadap risiko iklim.
2. Tantangan utama yang dihadapi oleh RPKD adalah memastikan bahwa masyarakat Lamongan yang miskin, terutama yang memiliki tingkat pendidikan rendah, memiliki akses yang adil terhadap peluang kerja regional. Peningkatan infrastruktur transportasi antar-klaster sangat penting untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja. Namun, jika disparitas keterampilan (*skill mismatch*) tidak diatasi, masyarakat Lamongan hanya akan menjadi pemasok tenaga kerja informal atau buruh kasar, sementara peluang formal dikuasai oleh pekerja dari Klaster 5 (Metropolitan) yang berpendidikan lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi RPKD perlu memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi lokal (misalnya Balai Latihan Kerja/BLK) dengan kurikulum yang disinkronkan dengan kebutuhan industri Klaster Labanegoro.
3. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap Klaster Labanegoro mengarahkan RPKD untuk mengembangkan kebijakan yang bersifat eksternal dan kolaboratif. Strategi pengentasan kemiskinan Lamongan tidak bisa hanya bergantung pada sumber daya internal, melainkan harus memanfaatkan kekuatan klaster, misalnya melalui kerja sama perdagangan hasil pertanian/perikanan. Di sisi sosial demografi, keberadaan dalam klaster ini juga menuntut kesiapsiagaan Lamongan dalam menghadapi migrasi sirkuler dan fluktuasi penduduk yang mencari kerja, sehingga perencanaan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan) harus adaptif terhadap dinamika populasi regional.

Secara umum, karakter Labanegoro memberikan konteks bahwa kemiskinan di Lamongan bukan hanya masalah kekurangan uang (kemiskinan konsumsi), tetapi juga masalah struktural yang terkait dengan kerentanan bencana dan tantangan geografis

regional. RPKD harus merespons dengan strategi yang tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga transformasi struktural (pendidikan dan infrastruktur tahan bencana). Beberapa implikasi bagi RPKD adalah sebagai berikut:

1. RPKD idealnya memasukkan strategi mitigasi kerentanan ganda (banjir musiman dan kekeringan). Intervensi sosial dan ekonomi harus tahan guncangan bencana, misalnya pemberian bantuan modal yang disertai asuransi gagal panen. Penguatan Destana (Desa Tangguh Bencana) di wilayah pesisir dan sepanjang Bengawan Solo harus disinkronkan langsung dengan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) agar bantuan perbaikan rumah dan kesiapsiagaan tepat sasaran. Program bantuan juga perlu didampingi edukasi perubahan iklim untuk membangun kesadaran adaptif masyarakat miskin.
2. RPKD Lamongan harus menjadikan peningkatan akses dan kualitas pendidikan sebagai pilar utama, bukan sekadar pelengkap. Program beasiswa dan intervensi peningkatan keterampilan harus disasar langsung ke keluarga miskin. Program pelatihan vokasi harus disusun berdasarkan kebutuhan riil industri di wilayah Lamongan dan klaster Labanegoro lainnya untuk memastikan tingkat penyerapan kerja yang tinggi bagi lulusan.
3. RPKD dapat mengoptimalkan efektivitas program dengan memanfaatkan modal sosial. Program pemberdayaan ekonomi (usaha mikro dan kecil) harus berbasis komunitas, dikelola oleh kelompok masyarakat yang sudah solid, untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas. Model penyaluran dana bergulir berbasis kelompok di tingkat desa dapat diadopsi karena lebih sesuai dengan budaya lokal dan memiliki tingkat pengembalian yang lebih baik. Penguatan kelembagaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) juga harus menjadi fokus agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif di perdesaan.
4. RPKD Lamongan idealnya dirancang dengan pendekatan afirmasi wilayah. Alokasi program dan anggaran harus lebih besar untuk wilayah selatan (seperti Sukorame, Bluluk, Mantup) yang secara historis memiliki kepadatan penduduk rendah, akses terbatas, dan tingkat kemiskinan yang cenderung lebih persisten (miskin struktural). Pembangunan infrastruktur dasar (jalan dan telekomunikasi) di wilayah selatan harus dipercepat untuk membuka akses pasar dan layanan publik, yang merupakan prasyarat keberhasilan intervensi ekonomi.
5. RPKD perlu mendorong diversifikasi mata pencaharian di luar sektor pertanian tradisional, misalnya pelatihan pengolahan hasil pertanian, pengembangan pariwisata berbasis alam, dan mendorong penyerapan tenaga kerja ke sektor jasa dan industri. Program diversifikasi harus fokus pada penciptaan nilai tambah, misalnya dengan memfasilitasi sertifikasi produk pertanian/olahan agar dapat mengakses pasar yang lebih luas.

2.2.3 Kondisi Pembangunan Manusia

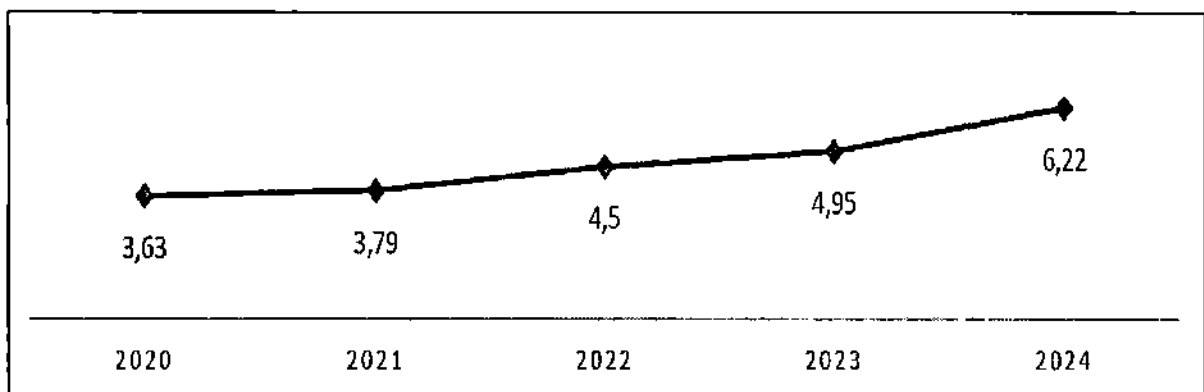
Pembangunan manusia dibutuhkan dalam RPKD karena menjadi indikator utama untuk mengukur kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat, yang secara langsung menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan secara permanen. Selain itu, kondisi pembangunan manusia yang baik menjamin masyarakat

memiliki kapasitas dan produktivitas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

Indikator pertama dalam melihat kondisi pembangunan manusia adalah Pemerlu Perhatian Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang merupakan kelompok masyarakat dengan berbagai masalah sosial dan ekonomi sehingga memerlukan intervensi dan bantuan khusus dari pemerintah untuk mencapai taraf hidup yang layak. Data mengenai PPKS sangat krusial bagi RPKD karena mengidentifikasi secara spesifik kelompok sasaran yang paling rentan dan multidimensi, seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, hingga korban tindak kekerasan dan bencana. Analisis terhadap jumlah dan sebaran PPKS di Lamongan akan memberikan gambaran mengenai beban sosial yang harus ditanggung daerah dan menjadi dasar untuk merumuskan program perlindungan sosial yang terintegrasi dan rehabilitasi sosial yang efektif, memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada kemiskinan moneter, tetapi juga mengatasi akar masalah kerentanan sosial.

Data capaian PPKS Kabupaten Lamongan menunjukkan tren peningkatan jumlah PPKS yang dilayani atau diintervensi secara signifikan, dari 3,63 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 6,22 ribu jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini bisa diinterpretasikan sebagai peluang positif yang mencer-minkan meningkatnya jangkauan dan sensitivitas Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, menjangkau, dan memberikan intervensi kepada kelompok rentan sosial yang sebelumnya tidak terlayani. Artinya, sistem pendataan dan penyaluran program sosial Lamongan menjadi lebih baik dan inklusif. RPKD harus memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat integrasi data PPKS ke dalam Basis Data Terpadu agar program penang-gulangan kemiskinan berbasis klaster kerentanan (misalnya, lansia terlantar, anak yatim/piatu miskin) dapat diimplementasikan secara lebih presisi dan tepat sasaran.

Gambar 2.26. Capaian PPKS Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024



RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Namun, peningkatan capaian PPKS juga menghadirkan tantangan keberlanjutan dan kualitas layanan. Lonjakan PPKS yang dilayani menunjukkan bahwa beban sosial yang harus ditanggung oleh Lamongan masih besar. RPKD perlu memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada kelompok PPKS tidak hanya bersifat karitatif (sekadar bantuan), tetapi juga rehabilitatif dan pemberdayaan, terutama bagi penyandang disabilitas usia produktif dan korban tindak kekerasan, agar mereka mampu mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Dengan demikian, RPKD harus fokus pada penguatan kelembagaan sosial di tingkat kecamatan dan desa, serta peningkatan anggaran

untuk program outreach dan pemberdayaan ekonomi spesifik bagi setiap kategori PPKS, sehingga peningkatan layanan ini berkorelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan sekaligus menggambarkan potensi kerentanan terhadap kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar sering kali berbanding lurus dengan meningkatnya berbagai persoalan sosial, seperti anak terlantar, perempuan rawan sosial, penyandang disabilitas, hingga tuna susila. Selain itu, masalah sosial juga muncul dari keluarga dengan kondisi tempat tinggal tidak layak dan keluarga miskin yang hidup di bawah garis kesejahteraan.

Kondisi sosial masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kerentanan sosial yang berkaitan dengan kepadatan penduduk dan keberadaan kelompok rentan. Kelompok rentan yang hidup dalam kondisi miskin meliputi perempuan khususnya remaja putri, ibu hamil, dan ibu menyusui serta anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Kelompok-kelompok ini memerlukan perhatian, perlindungan, dan kebijakan khusus agar mampu beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi situasi kemiskinan.

Tabel 2.16. Tabel Persebaran Bayi Dengan Gizi Buruk Per Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Kecamatan	2022	2023	2024	Kecamatan	2022	2023	2024
Babat	13	10	7	Modo	11	24	8
Bluluk	4	4	5	Ngimbang	6	5	6
Brondong	1	2	0	Paciran	17	10	8
Deket	11	5	6	Pucuk	1	3	1
Glagah	13	10	9	Sambeng	9	10	5
Kalitengah	15	22	41	Sarirejo	2	2	1
Karang Geneng	13	9	4	Sekaran	6	5	7
Karangbinangun	11	10	10	Solokuro	4	5	6
Kedungpring	8	21	0	Sugio	4	4	4
Kembangbahu	5	6	1	Sukodadi	19	28	37
Lamongan	0	7	11	Sukorame	4	16	24
Laren	0	0	1	Tikung	2	1	7
Maduran	3	4	6	Turi	19	13	15
Mantup	4	2	5	Total	205	238	235

Sumber: EPPGBM Kab. Lamongan (Diolah)

Berdasarkan data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, bayi dengan gizi buruk di Kab. Lamongan menunjukkan fluktuasi dari tahun 2022 hingga 2024 dengan tren penurunan secara umum, meskipun masih ter-jadi peningkatan di beberapa wilayah. Pada tahun 2022, kasus tertinggi tercatat di Kec. Sukodadi (19 kasus), Turi (19 kasus), dan Paciran (17 kasus), sementara beberapa kecamatan seperti Brondong dan Pucuk hanya mencatat 1 kasus. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan di beberapa wilayah, khususnya Kecamatan Sukodadi (28 kasus) dan Modo (24 kasus), yang menjadi dua wilayah dengan kasus tertinggi, sedangkan sejumlah kecamatan seperti Tikung dan Mantup melaporkan jumlah kasus rendah (1-2 kasus).

Memasuki tahun 2024, sebagian besar kecamatan mengalami penurunan kasus gizi buruk secara signifikan. Namun demikian, beberapa wilayah masih menunjukkan angka

yang cukup tinggi, terutama Kalitengah (41 kasus) dan Sukodadi (37 kasus), yang mengindikasikan masih adanya permasalahan gizi kronis di wilayah tersebut. Sementara itu, kecamatan seperti Kembangbahu, Laren, Pucuk, dan Sarirejo mencatat hanya 1 kasus gizi buruk, menunjukkan perbaikan kondisi gizi masyarakat di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, tren data ini mencerminkan bahwa meskipun Kabupaten Lamongan telah mengalami kemajuan dalam penanganan gizi buruk, upaya intervensi gizi spesifik dan sensitif masih diperlukan di wilayah dengan kasus tinggi, terutama pada daerah padat penduduk dan dengan akses kesehatan yang terbatas. Contohnya, intervensi yang dibutuhkan di Kalitengah dan Sukodadi harus bersifat fokus dan terpadu, melibatkan penyediaan makanan tambahan, edukasi gizi bagi ibu hamil dan Baduta, serta perbaikan sanitasi lingkungan. Upaya ini dapat menjadi bagian integral dari RPKD, mengingat gizi buruk sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dasar.

Tabel 2.17. Persebaran Bayi Stunting Per Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Kecamatan	2022	2023	2024	Kecamatan	2022	2023	2024
Babat	114	139	94	Modo	119	62	140
Bluluk	93	77	74	Ngimbang	203	136	141
Brondong	5	3	5	Paciran	155	57	19
Deket	146	123	132	Pucuk	7	1	1
Glagah	156	90	159	Sambeng	139	100	213

Kecamatan	2022	2023	2024	Kecamatan	2022	2023	2024
Kalitengah	86	50	67	Sarirejo	21	14	31
Karang Geneng	24	27	24	Sekaran	132	71	84
Karangbinangun	26	111	171	Solokuro	132	168	126
Kedungpring	183	179	111	Sugio	40	35	40
Kembangbahu	173	162	109	Sukodadi	221	203	428
Lamongan	69	56	48	Sukorame	114	100	72
Laren	17	5	11	Tikung	119	112	116
Maduran	126	123	83	Turi	154	84	92
Mantup	349	194	190	Total	3.123	2.482	2.781

Sumber: EPPGBM Kab. Lamongan (Diolah)

Data EPPGM (Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Dengan Teknologi Elektronik) Kabupaten Lamongan tahun 2022–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi antar kecamatan. Pada tahun 2022, kasus tertinggi terdapat di Mantup (349 kasus), Sukodadi (221 kasus), dan Glagah (156 kasus). Tahun 2023 menunjukkan penurunan di sebagian besar wilayah, meski Mantup (194 kasus) dan Kedungpring (179 kasus) masih tinggi. Namun pada 2024, terjadi lonjakan di Sukodadi (428 kasus) dan Sambeng (213 kasus), sementara kecamatan seperti Pucuk dan Laren mencatat angka terendah. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam penurunan stunting, beberapa wilayah masih memerlukan intervensi gizi yang lebih intensif, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas.

Lonjakan kasus di Sukodadi dan Sambeng pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa faktor-faktor risiko stunting, seperti sanitasi buruk dan pola asuh gizi yang tidak memadai, masih persisten dan memerlukan tracing kasus secara individu. Oleh karena itu, RPKD Lamongan perlu memastikan alokasi dana dan program intervensi spesifik (pemberian nutrisi) dan sensitif (sanitasi, air bersih) diprioritaskan di kecamatan-kecamatan dengan kasus stunting tertinggi, seperti Sukodadi dan Sambeng, untuk mencapai eliminasi stunting yang lebih cepat. Selain itu, kecepatan penanganan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dibutuhkan untuk mengatasi isu sanitasi dan akses air bersih di kantong-kantong stunting, karena ini merupakan akar masalah stunting yang bersifat multidimensi.

Indikator berikutnya adalah jumlah kematian ibu, dimana untuk kasus di Kabupaten Lamongan selama periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2022 tercatat 14 kasus dengan angka kematian ibu sebesar 52,02 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 41 kasus atau 94,37, sebelum kembali menurun pada 2024 menjadi 10 kasus dengan AKI sebesar 53,97. Kasus kematian ibu paling banyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Kembangbahu, Sukodadi, dan Paciran, sementara beberapa kecamatan seperti Ngimbang, Sambeng, dan Tikung tidak melaporkan kasus selama tiga tahun terakhir. Penurunan pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan persalinan, namun lonjakan pada tahun sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan layanan maternal, pemeriksaan kehamilan teratur, serta kesiapsiagaan tenaga medis dalam mencegah kematian ibu di Kab Lamongan.

Tabel 2.18. Jumlah Kematian Ibu Per Kecamatan Kab Lamongan Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	2022	2023	2024
1	Sukorame	Sukorame	0	0	1
2	Bluluk	Bluluk	0	1	0
3	Ngimbang	Ngimbang	0	0	0
4	Sambeng	Sambeng	0	0	0
5	Mantup	Mantup	0	0	0
6	Kembangbahu	Kembangbahu	1	0	2
7	Sugio	Sugio	0	1	1
8	Kedungpring	Kedungpring	0	0	0
9	Kedungpring	Dradah	0	0	0
10	Modo	Modo	0	1	0
11	Modo	Karangpilang	0	0	0
12	Babat	Babat	0	0	1
13	Babat	Moropelang	0	1	0
14	Pucuk	Pucuk	1	1	0
15	Sukodadi	Sukodadi	1	0	1
16	Sukodadi	Sumberaji	0	0	0
17	Lamongan	Lamongan	0	0	0
18	Tikung	Tikung	1	0	1
19	Sarirejo	Dermolemahbang	0	0	0
20	Deket	Deket	0	0	0
21	Glagah	Glagah	0	1	0
22	Karangbinangun	Karangbinangun	0	1	0
23	Kalitengah	Kalitengah	0	1	0
24	Turi	Turi	0	1	0
25	Karanggeneng	Karanggeneng	0	1	1
26	Sekaran	Sekaran	0	0	0

No	Kecamatan	Puskesmas	2022	2023	2024
27	Maduran	Maduran	0	0	0
28	Laren	Laren	1	0	1
29	Solokuro	Payaman	0	1	0
30	Paciran	Paciran	2	1	0
31	Paciran	Tlogosadang	0	1	0
32	Brondong	Brondong	1	1	1
Jumlah AKI			8	14	10

Sumber: EPPGBM Kab. Lamongan (Diolah)

Mengingat AKI yang tinggi pada 2023, RPKD Lamongan harus mengintegrasikan program pencegahan kematian ibu melalui peningkatan cakupan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) minimal 6 kali dan penyediaan jaminan kesehatan yang proaktif bagi ibu hamil dari keluarga miskin. Intervensi harus difokuskan pada wilayah Puskesmas dengan kasus tertinggi (Kembangbahu, Sukodadi, Paciran) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas penanganan kegawatdaruratan obstetri dan penguatan edukasi risiko tinggi di tingkat desa.

Angka Kematian Bayi, dimana jumlahnya di Kab Lamongan periode 2022-2024 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2022 tercatat 73 kasus, naik menjadi 105 kasus pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 120 kasus pada 2024. Kasus tertinggi terjadi di wilayah kerja Puskesmas Kembangbahu, Kedungpring, Sukodadi, dan Paciran. Sementara beberapa kecamatan seperti Ngimbang, Sugio, dan Bluluk melaporkan angka rendah. Peningkatan ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, terutama pada fase persalinan dan perawatan bayi baru lahir, sehingga diperlukan penguatan layanan kesehatan dasar dan pendampingan gizi serta kehamilan untuk menekan angka kematian bayi di Lamongan.

Tabel 2.19. Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan Kab Lamongan Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	2022	2023	2024
1	Sukorame	Sukorame	4	0	4
2	Bluluk	Bluluk	2	0	6
3	Ngimbang	Ngimbang	4	3	5
4	Sambeng	Sambeng	7	7	4
5	Mantup	Mantup	3	3	1
6	Kembangbahu	Kembangbahu	0	0	2
7	Sugio	Sugio	1	3	3
8	Kedungpring	Kedungpring	0	0	2
9	Kedungpring	Dradah	4	7	6

No	Kecamatan	Puskesmas	2022	2023	2024
10	Modo	Modo	3	0	2
11	Modo	Karangpilang	2	3	7
12	Babat	Babat	2	7	4
13	Babat	Moropelang	2	0	2
14	Pucuk	Pucuk	3	5	6
15	Sukodadi	Sukodadi	3	3	5
16	Sukodadi	Sumberaji	2	2	2
17	Lamongan	Lamongan	1	5	8
18	Tikung	Tikung	2	5	3
19	Sarirejo	Dermolemahbang	2	1	4
20	Deket	Deket	5	4	4
21	Glagah	Glagah	0	4	2
22	Karangbinangun	Karangbinangun	0	5	4
23	Kalitengah	Kalitengah	3	1	4
24	Turi	Turi	1	3	0
25	Karanggeneng	Karanggeneng	3	3	3
26	Sekaran	Sekaran	3	3	4
27	Maduran	Maduran	5	18	10
28	Laren	Laren	1	0	1
29	Solokuro	Payaman	1	9	9
30	Paciran	Paciran	2	1	0
31	Paciran	Tlogosadang	0	1	0
32	Brondong	Brondong	1	1	1
Jumlah AKI			73	105	120

Sumber: EPPGBM Kab. Lamongan (Diolah)

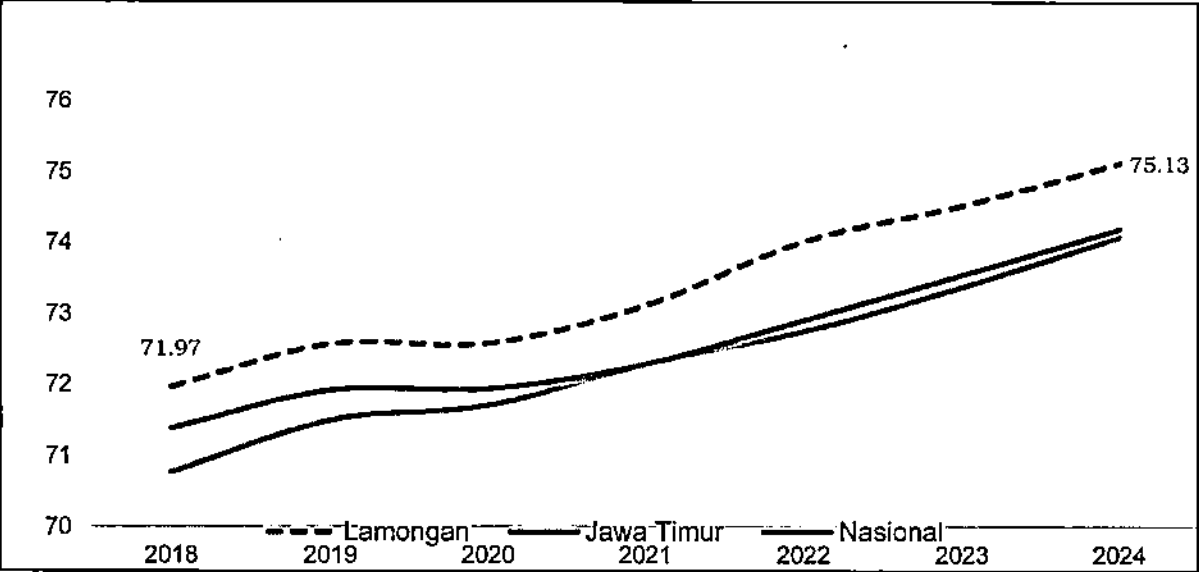
Peningkatan signifikan pada AKB memerlukan evaluasi mendalam terhadap kualitas dan akses pelayanan neonatal, terutama di Puskesmas yang mencatat kasus tertinggi seperti Kembangbahu, Kedungpring, Sukodadi, dan Paciran. Oleh karena itu, RPKD harus mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan intensif tenaga kesehatan dalam penanganan komplikasi neonatal dan memastikan setiap bayi baru lahir dari keluarga miskin mendapatkan pendampingan kesehatan dan gizi yang berkelanjutan.

Berikutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui IPM, dapat diketahui sejauh mana penduduk mampu mengakses hasil pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek kesejahteraan lainnya. IPM memiliki peran strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi dasar penting dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi setiap daerah.

Grafik IPM menunjukkan bahwa Kab Lamongan mengalami peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2018–2024. Pada tahun 2018, nilai IPM Lamongan tercatat sebesar 71,97 dan terus meningkat hingga mencapai 75,13 pada tahun 2024. Capaian ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur (74,09) maupun nasional (74,20) pada tahun yang sama. Tren peningkatan IPM Lamongan menggambarkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Secara umum, pertumbuhan IPM Lamongan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional

menunjukkan bahwa upaya pembangunan sumber daya manusia di daerah ini berjalan efektif, meskipun peningkatan berkelanjutan tetap dibutuhkan agar kesenjangan antar wilayah semakin mengecil.

Gambar 2.27. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2024



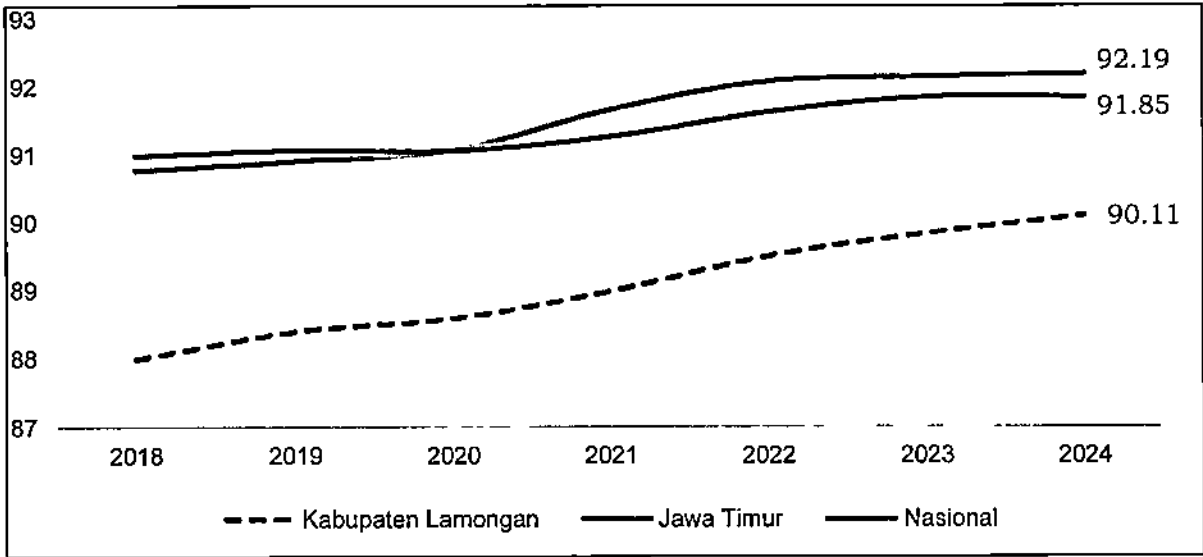
Sumber: BPS, 2025

Meskipun IPM tinggi secara agregat, RPKD perlu fokus pada pemerataan komponen IPM, khususnya di wilayah selatan Lamongan. Selain itu, perlu diidentifikasi sub-indikator yang masih lemah, seperti potensi disparitas angka harapan hidup atau rata-rata lama sekolah di kantong-kantong kemiskinan, untuk menjadi fokus intervensi spesifik RPKD. Selain itu, intervensi program dalam RPKD harus didesain untuk mengangkat secara spesifik output dan outcome dari dimensi kesehatan dan pendidikan keluarga miskin agar tidak terjadi bias IPM yang didorong hanya oleh pertumbuhan pendapatan di wilayah urban.

Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu ukuran yang menggambarkan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yakni antara laki-laki dan perempuan. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara kelamin laki-laki dan perempuan. Suatu daerah dapat dikatakan telah mencapai kesetaraan gender apabila nilai IPG-nya mendekati atau sama dengan 100.

Grafik IPG menunjukkan selama periode 2018-2024, capaian Kab. Lamongan terus mengalami peningkatan meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Pada tahun 2018, IPG Lamongan berada di kisaran 88, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 90 tahun 2024. Sementara itu, IPG Jawa Timur dan nasional cenderung stabil dengan nilai di atas 91 sepanjang periode yang sama. Tren ini mencerminkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Lamongan semakin menurun, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk menyetarakan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar sejajar dengan capaian provinsi maupun nasional.

Gambar 2.28. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2018-2024

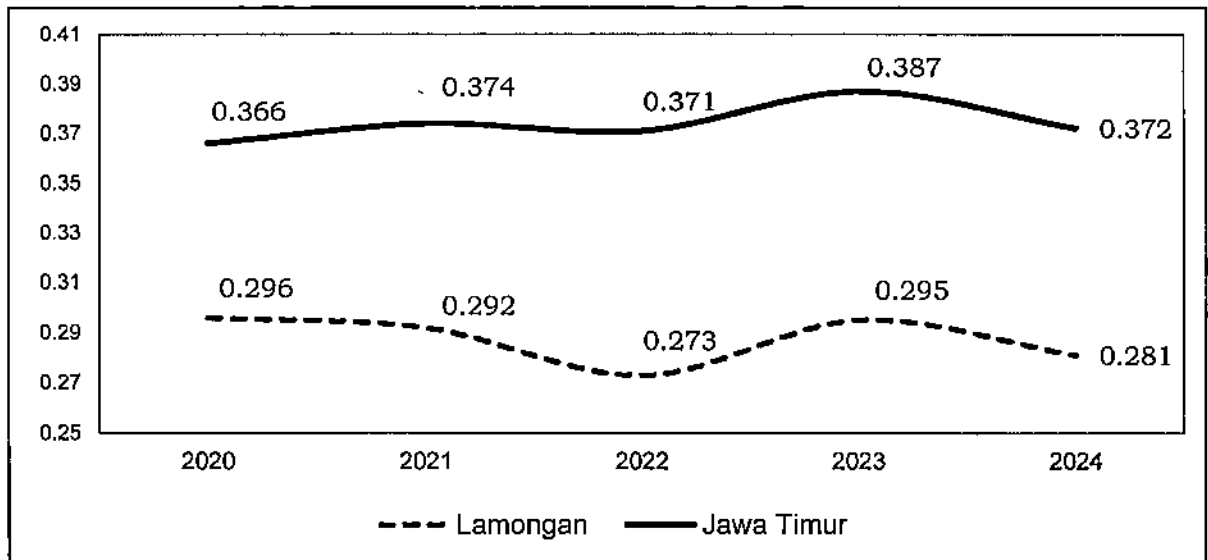


Sumber: BPS, 2025

Data di atas mencerminkan bahwa salah satu fokus utama dalam RPKD Lamongan adalah arahan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi formal dan politik, serta penanganan isu ketidaksetaraan dalam dimensi pendapatan, mengingat IPG Lamongan masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi. Program pemberdayaan harus secara eksplisit menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan di daerah tertinggal dan mem-beri dukungan modal usaha kepada kepala rumah tangga perempuan miskin untuk mempercepat tercapainya nilai IPG di atas 91. Beberapa contoh program yang bisa dituangkan seperti: (i) memberikan beasiswa penuh dan biaya hidup bagi anak perempuan dari keluarga miskin ekstrem untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK atau Perguruan Tinggi Vokasi; atau (ii) menyediakan starter kit usaha (misalnya peralatan menjahit, alat masak, atau bibit unggul) dan pendampingan bisnis selama 6 bulan.

Berdasarkan data Indeks Gini tahun 2018–2024, tingkat ketimpangan di Kabupaten Lamongan cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018, Indeks Gini Lamongan berada di angka 0,313 dan mengalami sedikit penurunan hingga mencapai titik terendah pada 2021 sebesar 0,292, kemudian sempat naik ke 0,295 pada 2023 sebelum kembali turun ke 0,281 pada 2024. Sementara itu, Jawa Timur menunjukkan pola fluktuasi ringan dengan kisaran yang lebih tinggi, dari 0,379 pada tahun 2018, naik hingga 0,387 pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 0,372 pada tahun 2024. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Lamongan relatif lebih rendah dan cenderung membaik dalam jangka waktu tersebut, sementara Jawa Timur secara keseluruhan masih menghadapi tingkat ketimpangan yang lebih besar meskipun dengan variasi yang tidak terlalu signifikan.

Gambar 2.29. Indeks Gini Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

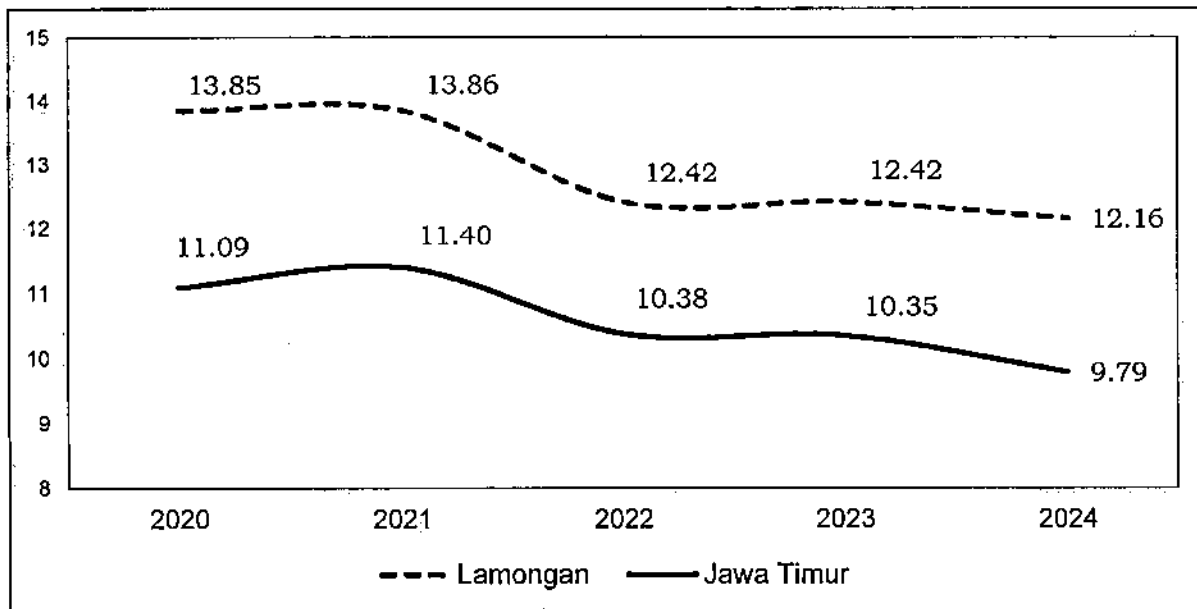


Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2025 (Diolah)

Nilai Indeks Gini Lamongan yang secara konsisten berada di bawah 0,30 (khususnya 0,281 pada 2024) mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Lamongan tergolong merata, menempatkannya pada kategori ketimpangan rendah. Oleh karena itu, RPKD Lamongan harus berfokus pada strategi peningkatan pendapatan agregat (pertumbuhan ekonomi) sambil tetap menjaga pemerataan yang sudah baik ini, terutama dengan menargetkan peningkatan pendapatan kelompok 40 persen terbawah (keluarga miskin dan rentan) melalui skema pro-poor growth.

Data Gini Rasio dapat disandingkan dengan perkembangan data kemiskinan. Data tingkat kemiskinan Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur periode 2017–2024 menunjukkan tren penurunan, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa tahun. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Lamongan tercatat sebesar 14,42 persen, kemudian sempat menurun hingga 13,21 persen pada 2019, namun kembali meningkat saat pandemi 2020–2021 hingga mencapai 13,86 persen. Setelah itu, angka kemiskinan kembali menurun secara bertahap hingga mencapai 12,16 persen pada 2024. Sementara itu, Jawa Timur menunjukkan tren serupa tetapi dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dari 11,77 persen pada 2017 menjadi 9,79 persen pada 2024. Perbandingan ini menggambarkan bahwa meskipun Kabupaten Lamongan mengalami kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, tingkat kemiskinannya masih berada di atas rata-rata provinsi, menandakan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih terarah untuk mempercepat penurunan kemiskinan di wilayah tersebut.

Gambar 2.30. Perentase Penduduk Miskin Kab Lamongan Tahun 2020-2024



Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2025 (Diolah)

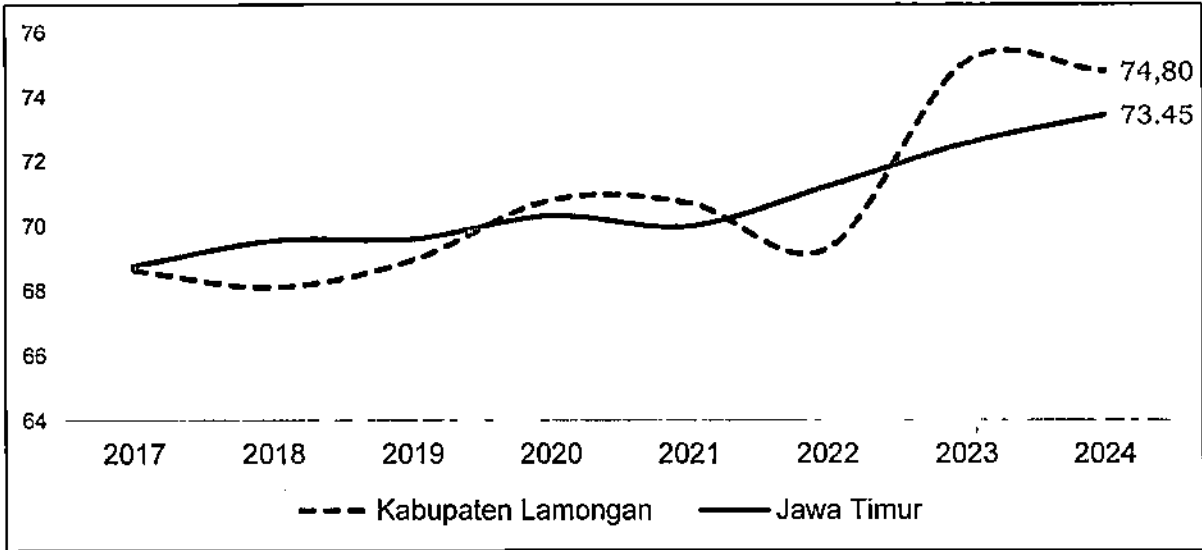
2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan

Data perkembangan kemiskinan dapat disandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengukur persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nilai TPAK yang tinggi, terutama pada kelompok usia produktif dan perempuan, menunjukkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berkontribusi pada ekonomi.

TPAK Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur selama periode 2017–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. Pada tahun 2017, TPAK Lamongan tercatat sebesar 68,65 persen dan mengalami fluktuasi ringan hingga tahun 2022, sebelum melonjak signifikan menjadi 74,8 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan partisipasi penduduk usia kerja di Lamongan dalam aktivitas ekonomi, yang bisa mencerminkan pulihnya kondisi pasca-pandemi dan membaiknya peluang kerja di sektor-sektor produktif. Di sisi lain, Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari 68,78 persen pada 2017 menjadi 73,45 persen pada tahun 2024. Meskipun secara umum tren keduanya searah, sejak tahun 2023 Lamongan mulai melampaui rata-rata provinsi, menandakan adanya dinamika positif di pasar tenaga kerja daerah yang patut dipertahankan dan diperkuat melalui kebijakan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Meskipun TPAK tinggi, RPKD harus fokus pada peningkatan kualitas partisipasi, yaitu dengan memastikan mayoritas angkatan kerja yang berpartisipasi terserap di sektor formal dengan upah layak, bukan hanya di sektor informal atau pertanian subsisten. Tingginya TPAK Lamongan yang melampaui provinsi Jawa Timur harus dimanfaatkan untuk menarik investasi padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Gambar 2.31. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Lamongan Tahun 2017-2024



Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2025 (Diolah)

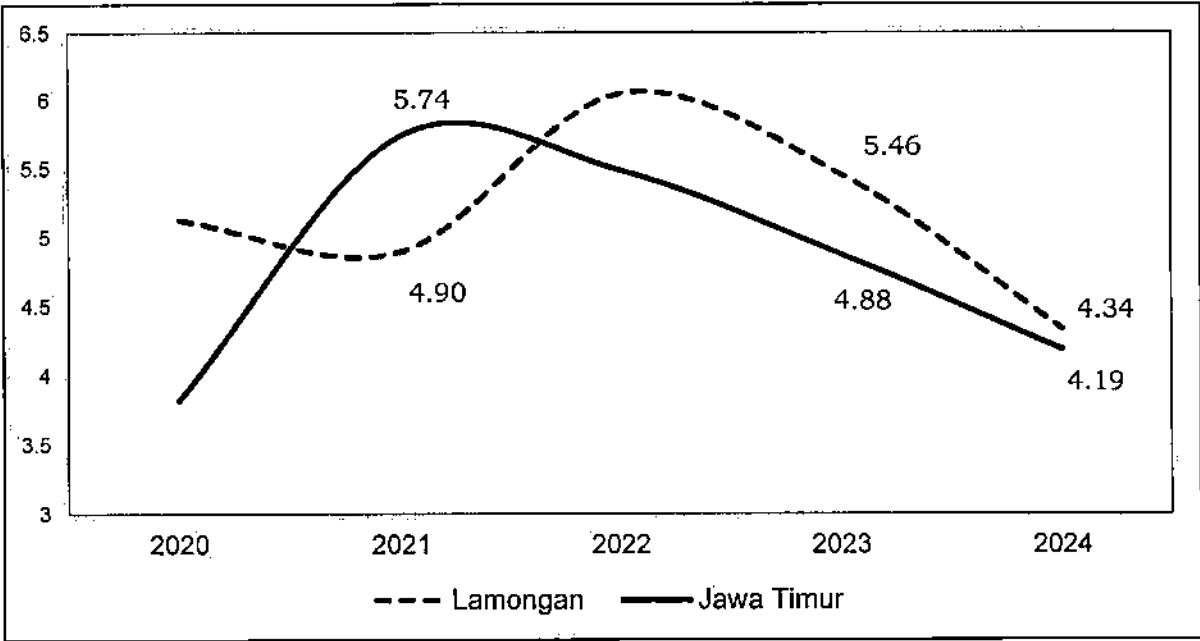
Analisis TPAK Lamongan harus ditelaah secara mendalam per kecamatan dan berdasarkan kelompok gender untuk mengidentifikasi kantong-kantong penduduk usia kerja yang tidak/kurang berpartisipasi, yang seringkali menjadi cerminan dari kemiskinan tersembunyi. Oleh karena itu, RPKD perlu memastikan program intervensi seperti bursa kerja mini dan pelatihan kewirausahaan mikro diselenggarakan langsung di desa-desa dengan TPAK rendah, terutama yang dihuni oleh keluarga miskin dan rentan. Selain itu, program dalam RPKD harus fokus pada penyediaan lapangan kerja yang berkualitas (bukan hanya pekerjaan informal) dan skema peningkatan kewirausahaan untuk menyerap angkatan kerja yang partisipatif.

Data TPAK dapat diperdalam dengan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data TPT Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur periode 2017–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun di akhir periode. Pada tahun 2017, TPT Lamongan berada di angka 4,12 persen, kemudian menurun ke 3,1 persen pada 2018, namun meningkat tajam pada masa pandemi hingga mencapai puncaknya 6,05 persen pada tahun 2022. Setelah itu, tingkat pengangguran berangsur turun menjadi 4,34 persen pada 2024, menandakan pemulihan kondisi ketenagakerjaan. Pola serupa terlihat di Jawa Timur, dengan TPT yang naik dari 3,91 persen pada 2018 menjadi 5,84 persen di 2020, lalu turun konsisten hingga 4,19 persen pada 2024. Meskipun fluktuasi di Lamongan lebih tajam, perbaikan dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa pasar kerja daerah mulai kembali stabil, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan peluang kerja pasca-pandemi.

TPT Lamongan yang berada di angka 4,34 persen (tahun 2024) yang masih lebih tinggi dari TPT alamiah (biasanya di bawah 4 persen) meng-indikasikan bahwa meskipun TPAK tinggi, masih ada tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi semua angkatan kerja yang berpartisipasi. Oleh karena itu, RPKD harus menargetkan

penurunan TPT menjadi di bawah 4 persen dalam jangka menengah melalui program skilling dan reskilling masif, dikhususkan bagi lulusan SMA/SMK dan kelompok miskin yang baru masuk pasar kerja, untuk mengurangi pengangguran terdidik dan pengangguran musiman.

Gambar 2.32. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamongan



Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2025 (Diolah)

2.2.5 Critical Point Kondisi Sosial Demografi Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan ragam penjelasan kondisi sosial demografi di atas, maka dapat disusun beberapa critical point yang relevan dengan penyusunan RPKD Lamongan, yaitu:

1. Kondisi sosial-demografi Kabupaten Lamongan menunjukkan dinamika yang kompleks, yang harus menjadi landasan kritis dalam penyusunan RPKD. Indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi (75,13) dan Indeks Gini yang rendah (0,281) secara agregat memberikan gambaran positif mengenai kualitas hidup dan pemerataan pendapatan, menempatkan Lamongan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, TPAK yang melampaui rata-rata provinsi (74,8 persen) menandakan tingginya motivasi penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Namun, data ini harus disikapi dengan hati-hati. Penyebaran kasus gizi buruk dan stunting yang masih tinggi dan melonjak di beberapa kecamatan (misalnya Sukodadi, Kalitengah, Sambeng) serta peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan yang persisten dan mengalami kerentanan struktural. Tingginya TPAK berpotensi didominasi oleh sektor informal atau pekerjaan rentan, yang tidak menjamin peningkatan kesejahteraan berkelanjutan.
2. Oleh karena itu, relevansi kondisi sosial-demografi terhadap penanggulangan kemiskinan di Lamongan terletak pada perlunya pergeseran fokus dari intervensi berbasis agregat (makro) ke intervensi berbasis lokasi dan kelompok sasaran (mikro). RPKD harus secara eksplisit mengadopsi pendekatan afirmasi wilayah untuk mengatasi ketimpangan internal (terutama di wilayah selatan) dan pendekatan

multidimensi untuk mengatasi masalah gizi dan kesehatan ibu-anak yang merupakan cerminan kemiskinan kronis. Program harus memastikan bahwa peningkatan IPM yang terjadi sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui dukungan modal dan pelatihan bagi perempuan miskin, serta penurunan TPT melalui *skilling* angkatan kerja agar kualitas partisipasi kerja dapat diubah dari sekadar partisipasi menjadi pendapatan yang layak.

3. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPKD harus bergeser dari pendekatan general ke pendekatan yang afirmasi wilayah dan multidimensi. Data mengenai kantong-kantong gizi buruk dan stunting serta peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) memberikan peta prioritas yang jelas. Intervensi sumber daya (kesehatan, sanitasi, gizi) harus diprioritaskan di kecamatan-kecamatan menjadi kantong gizi buruk dan AKB. Pendekatan multidimensi memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari dimensi non-pendapatan (kesehatan, pendidikan, dan kerentanan). Selain itu, untuk menanggapi tuntutan Indeks Pembangunan Gender (IPG), RPKD perlu memperkuat program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan miskin, memberikan akses setara terhadap aset produktif, dan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga, yang secara konsisten terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan kronis.

2.3 KONDISI MAKRO EKONOMI DAERAH

Kondisi ekonomi makro daerah menjadi penjelasan yang fundamental dalam RPKD karena bertujuan menyediakan konteks menyeluruh (holistik) mengenai kapasitas ekonomi dan pertumbuhan Lamongan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Data makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan struktur lapangan usaha berfungsi sebagai diagnostik utama untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berpotensi menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin dan mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif. Dengan memahami tren dan potensi PDRB, RPKD dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mentransformasi struktur ekonomi daerah menuju sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan rata-rata, dan secara berkelanjutan mengangkat status ekonomi keluarga miskin dari kerentanan ke kemandirian.

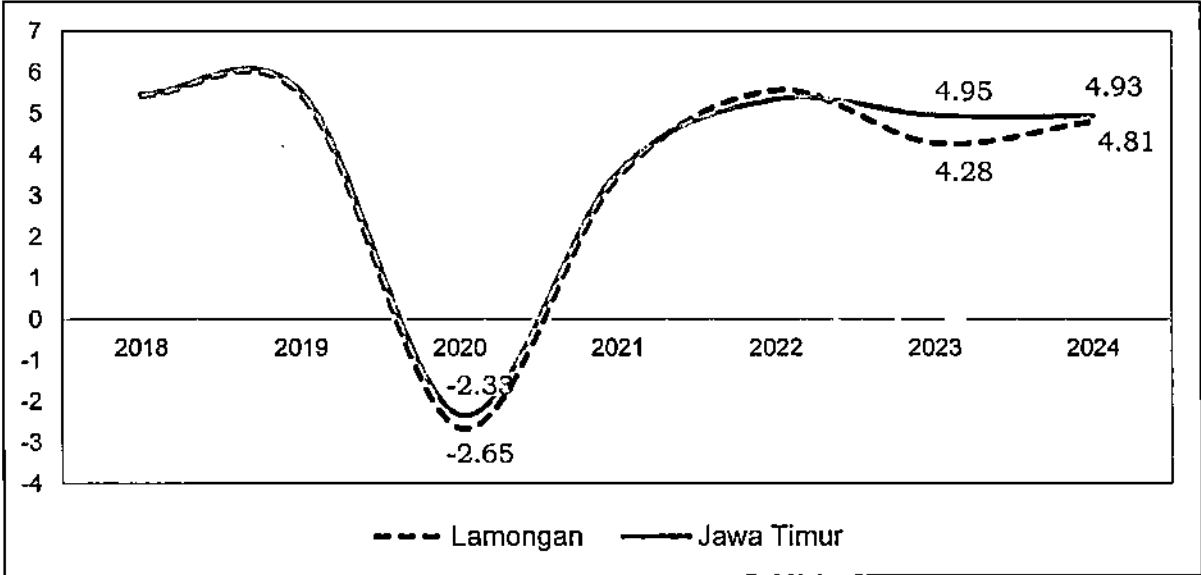
2.3.1 Pertumbuhan dan Struktur PDRB

Indikator pertama untuk melihat kondisi makro ekonomi daerah adalah pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi Lamongan harus dianalisis dari sisi kualitasnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat pro-poor dan job-creating (menciptakan lapangan kerja) agar dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin. Analisis pertumbuhan ekonomi dibutuhkan RPKD dalam mengarahkan kebijakan insentif investasi ke sektor-sektor yang berkorelasi tinggi dengan penurunan kemiskinan, seperti pertanian hilir, industri pengolahan, dan jasa padat karya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan selama periode 2018–2024 menunjukkan pola yang sejalan dengan tren ekonomi Provinsi Jawa Timur, dengan

fluktuasi yang cukup tajam akibat dampak pandemi. Pada tahun 2018-2019, pertumbuhan ekonomi Lamongan stabil di kisaran 5,4 persen, namun mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 sebesar -2,65 persen, sedikit lebih dalam dibandingkan rata-rata Jawa Timur (-2,33 persen). Pemulihan terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,43 persen, dan kembali menguat pada tahun 2022 mencapai 5,56 persen, menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi. Meskipun sempat melambat di tahun 2023 menjadi 4,28 persen, pertumbuhan kembali meningkat ke 4,81 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan bahwa ekonomi Lamongan telah berhasil bangkit dari tekanan pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan positif, dengan kinerja yang relatif stabil dan kompetitif terhadap rata-rata provinsi.

Gambar 2.33. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan (Persen)



Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2025 (Diolah)

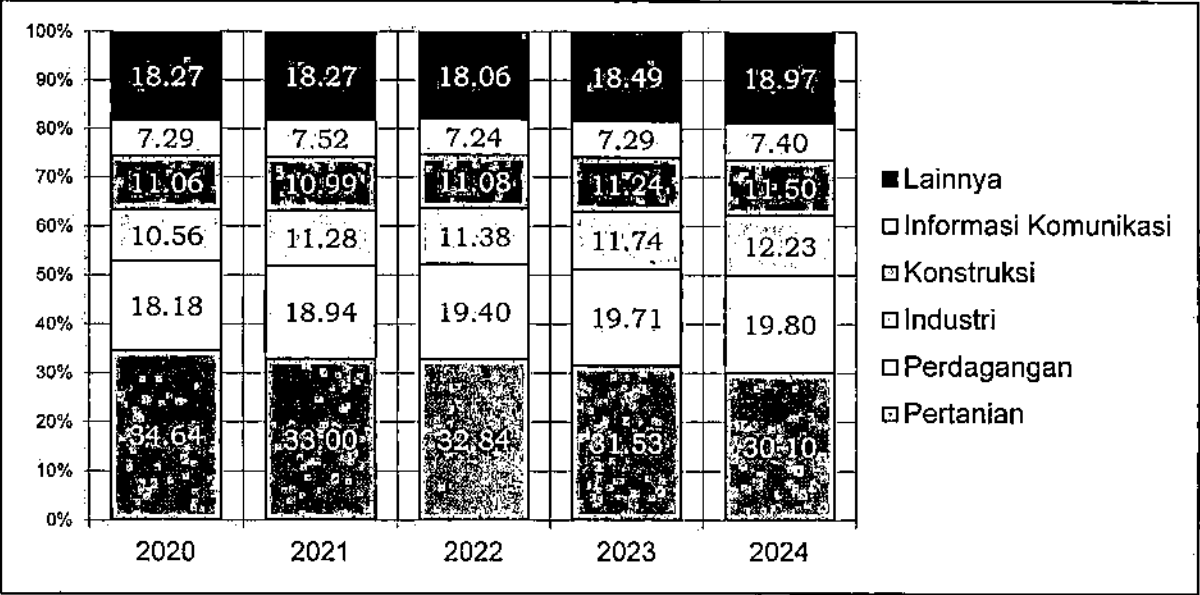
Meskipun pertumbuhan tahun 2024 mencapai 4,81 persen, RPKD harus memastikan laju pertumbuhan ini didukung oleh sektor non-agraria yang memiliki efek pengganda tinggi, seperti industri pengolahan dan jasa, untuk menghindari stagnasi akibat ketergantungan berlebih pada sektor pertanian dan perikanan. Pertumbuhan di atas 5 persen harus menjadi target jangka menengah untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi (PMDN dan PMA) yang diarahkan ke ragam sektor yang mampu memberi dampak terbesar bagi kelompok 40 persen penduduk terbawah di Kabupaten Lamongan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dirinci melalui struktur PDRB. Struktur ekonomi Kabupaten Lamongan menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2024, dengan pergeseran kontribusi antar sektor ekonomi yang menggambarkan proses transformasi struktural daerah. Pada tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan kontribusi sebesar 34,64 persen, namun secara bertahap mengalami penurunan hingga mencapai 30,10 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan mulai berkurangnya produksi dan produktivitas sektor pertanian sumbangan nilai tambahnya terhadap perekonomian daerah.

Sebaliknya, sektor industri pengolahan dan jasa menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kontribusi industri pengolahan meningkat dari 18,18 persen pada 2020

menjadi 12,23 persen pada tahun 2024, mencerminkan tumbuhnya aktivitas manufaktur dan pengolahan. Sektor perdagangan juga terus memperkuat peran ekonominya, naik dari 18,18 persen pada 2020 menjadi 19,80 persen pada tahun 2024, dan menjadi salah satu sektor basis terhadap perekonomian Lamongan. Sektor lain yang terus berkembang dan relatif tinggi sumbangannya dibandingkan sektor-sektor lainnya adalah konstruksi serta informasi dan komunikasi.

Gambar 2.34. Struktur PDRB Kabupaten Lamongan (Persen)



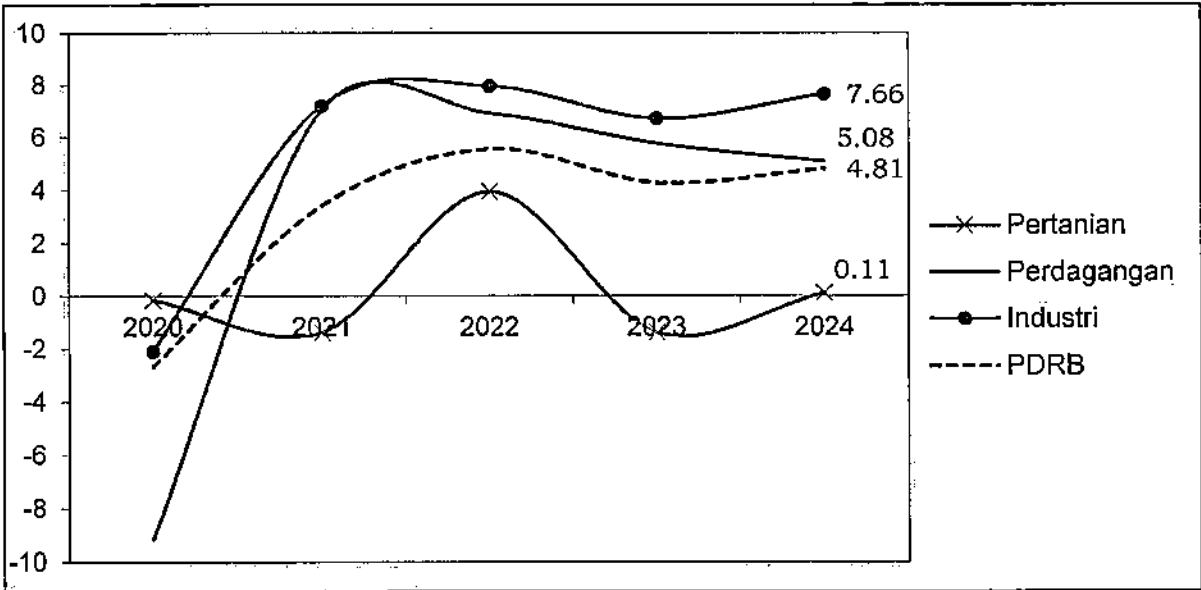
Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2025 (Diolah)

Pergeseran struktur PDRB Lamongan, yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor primer (pertanian dan perikanan) dan peningkatan kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan) serta tersier (perdagangan dan jasa), adalah indikator positif adanya transformasi struktural ekonomi yang sejalan dengan peningkatan status pembangunan daerah, namun meskipun kontri-busi pertanian menurun, sektor ini masih menampung sebagian besar pen-duduk miskin dan rentan. Oleh karena itu RPKD harus fokus pada optima-lisasi sektor industri pengolahan (dari 12,23 persen) dan sektor jasa untuk di jadikan mesin pertumbuhan utama yang memiliki daya serap tenaga kerja besar. Strategi ini harus dilakukan melalui pemberian insentif investasi di ke-dua sektor tersebut, sekaligus mendorong modernisasi sektor pertanian (misalnya pengolahan hasil pasca panen dan agrowisata) agar mampu mencip-takan nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan petani miskin, sehingga mempercepat pengurangan ketergantungan pada pertanian subsisten.

Struktur PDRB dapat dilihat dari kinerja pertumbuhan masing-masing sektor. Berdasarkan grafik pertumbuhan sektor utama Kabupaten Lamongan, terlihat bahwa dinamika ekonomi ditopang oleh Sektor Industri yang menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi dan stabil, mencapai 7,66 persen pada tahun 2024. Kontribusi signifikan Industri berfungsi sebagai motor pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mampu menarik pertumbuhan PDRB secara keseluruhan (4,81 persen). Sementara itu, Sektor Perdagangan menunjukkan pola pertumbuhan yang mengikuti PDRB namun dengan tingkat yang moderat, mencapai 5,08 persen di tahun 2024. Kontras dengan kedua sektor tersebut, Sektor Pertanian menunjukkan volatilitas yang tinggi dan cenderung stagnan dalam dua

tahun terakhir. Pola ini mengkonfirmasi perlunya perhatian khusus pada Sektor Pertanian karena menopang mata pencaharian banyak penduduk miskin, agar pertumbuhan makro yang tinggi dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata.

Gambar 2.35. Pertumbuhan Sektor Utama Kabupaten Lamongan

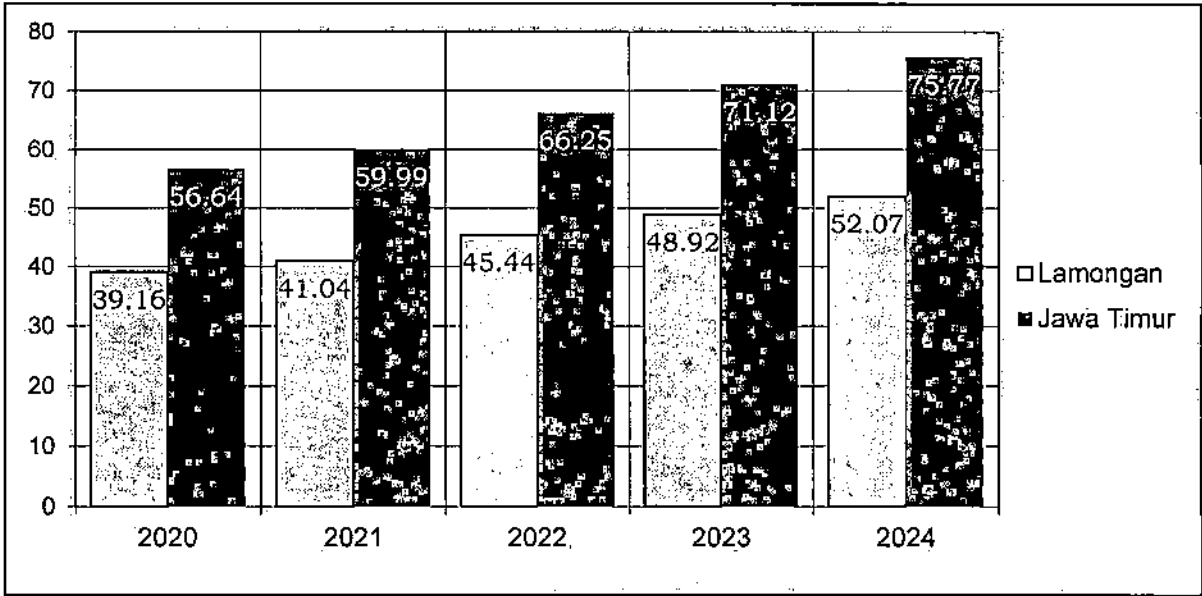


Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2025 (Diolah)

2.3.2 PDRB Per Kapita

Kinerja sektoral akan menentukan besaran PDRB per kapita, sekaligus menjadi indikator makro daerah dalam mendeteksi kemiskinan. PDRB per kapita Kabupaten Lamongan selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun dengan fluktuasi kecil di awal periode. Sejak tahun 2021, PDRB per kapita Lamongan terus meningkat hingga mencapai Rp52,07 Juta pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB per kapita Jawa Timur secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Lamongan, dengan tren kenaikan yang relatif stabil dari Rp56,64 pada tahun 2020 menjadi Rp75,77 Juta pada tahun 2024. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Lamongan positif, kesenjangan PDRB per kapita antara Lamongan dan rata-rata provinsi masih cukup lebar, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di Lamongan masih tertinggal dibandingkan rata-rata Jawa Timur.

Gambar 2.36. PDRB Per Kapita Kabupaten Lamongan (RpJuta)



Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2025 (Diolah)

Peningkatan PDRB per kapita Lamongan secara konsisten dari tahun 2021 hingga mencapai Rp52,07 Juta pada 2024 adalah peluang. Tren positif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah (didorong oleh sektor unggulan seperti pertanian/perikanan dan industri pengolahan) memiliki basis yang solid. Peningkatan yang terjadi menyediakan sumber daya fiskal dan lapangan kerja yang dapat digunakan untuk menarik penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan.

Meski demikian, tantangan terbesar adalah kesenjangan PDRB per kapi-ta yang lebar dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur (Lamongan Rp52,07 Juta vs. Jatim Rp75,77 Juta pada 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa Lamongan masih tertinggal dalam hal produktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan agregat. Keterlambatan ini memerlukan upaya akselerasi investasi yang jauh lebih besar dan terfokus untuk mendongkrak PDRB, ter-utama melalui peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor yang berkontribusi paling besar.

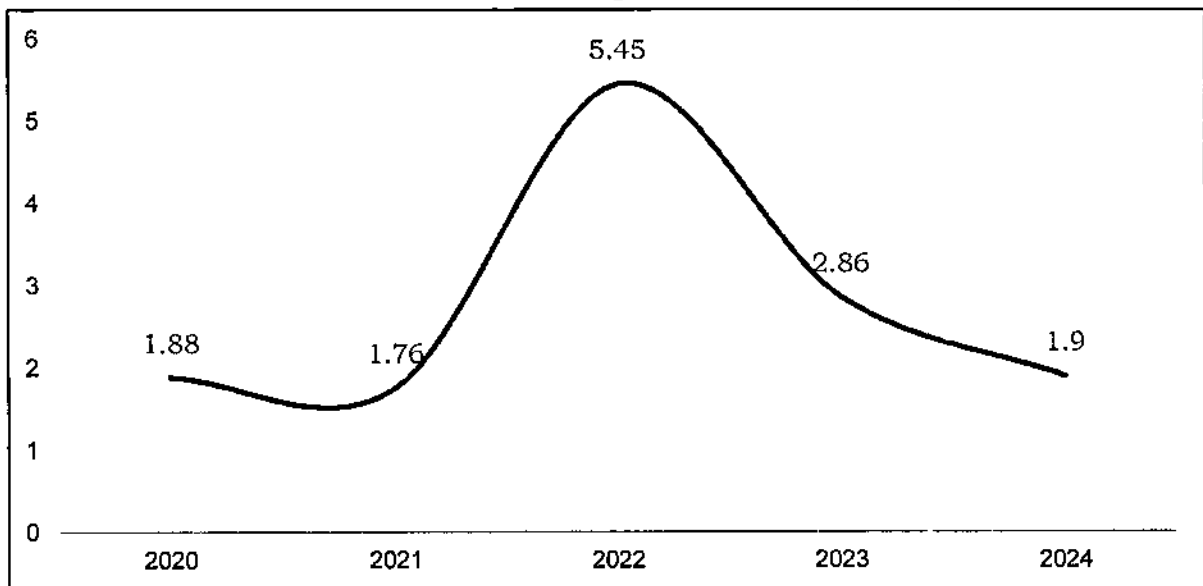
Kesenjangan PDRB per kapita yang lebar dengan Jawa Timur juga meng-indikasikan Lamongan harus mengakselerasi pertumbuhan sektor industri dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi (high value-added sectors) untuk me-ningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat secara signifikan. RPKD harus menargetkan peningkatan PDRB per kapita melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja miskin dan mendorong investasi yang menghasilkan skill premium, sehingga disparitas kesejahteraan dengan provinsi dapat diperkecil dalam jangka menengah.

2.3.3 Perkembangan Inflasi

Indikator makro ekonomi daerah juga dapat dilihat dari perkembangan inflasi. Inflasi yang tinggi, khususnya pada kelompok bahan makanan dan energi, secara langsung menggerus daya beli masyarakat miskin yang proporsi pengeluarannya untuk kebutuhan dasar sangatlah besar. Oleh karena itu, RPKD harus memasukkan strategi pengendalian inflasi daerah, terutama pada komoditas pangan, melalui skema buffer stock (stok penyangga) dan optima-lisasi distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga yang mendukung ketahanan ekonomi keluarga miskin.

Tingkat inflasi di Kabupaten Lamongan dalam periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 1,88 persen dan sedikit menurun menjadi 1,76 persen pada tahun 2021, mencerminkan stabilitas harga di masa pandemi. Namun pada tahun 2022, inflasi melonjak tajam hingga mencapai 5,45 persen, sejalan dengan tekanan harga nasional akibat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan kenaikan harga bahan pokok serta energi. Setelah itu, laju inflasi kembali menurun menjadi 2,86 persen pada tahun 2023 dan turun lebih lanjut ke 1,9 persen pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kondisi harga mulai terkendali. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa Lamongan mampu menjaga stabilitas inflasi dengan baik, terutama setelah gejolak ekonomi global tahun 2022. Data fluktuasi inflasi di Kabupaten Lamongan dari 2020 hingga 2024 juga memberikan indikator penting mengenai stabilitas ekonomi makro dan daya beli masyarakat, yang sangat krusial bagi penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2.37. Inflasi Kabupaten Lamongan (Persen)



Sumber: BPS, 2025 (Diolah)

Tren inflasi yang terkendali (kembali ke level 1,9 persen pada tahun 2024 setelah sempat melonjak) adalah peluang besar untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Inflasi yang rendah (sesuai target Bank Indonesia) menunjukkan keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengelola pasokan dan distribusi barang. Stabilitas ini sangat penting karena harga barang kebutuhan pokok memiliki bobot yang besar dalam pengeluaran keluarga miskin. Stabilitas harga pasca-gejolak 2022 memberikan ruang bagi RPKD untuk fokus pada kebijakan fiskal ekspansif (seperti subsidi pertanian, bantuan sosial yang terukur) tanpa khawatir memicu inflasi lebih lanjut.

Meski demikian, kenaikan tajam di tahun 2022 (5,45 persen) menunjukkan Lamongan sangat rentan terhadap shock harga yang berasal dari faktor eksternal (kenaikan harga energi/BBM atau gangguan pasokan pangan global/ nasional). Dalam konteks kemiskinan, lonjakan inflasi ini secara langsung menggerus pendapatan riil masyarakat miskin, yang seringkali menjadi pemicu utama masyarakat pra-sejahtera jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.

Mengingat Lamongan adalah daerah agraris, tantangan dalam RPKD adalah memastikan pengendalian inflasi inti (non-pangan) dan inflasi volatile (pangan). Kenaikan

inflasi pada komoditas pangan akan sangat memukul penduduk miskin. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus memperkuat ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi irigasi, pembangunan lumbung pangan, dan perbaikan rantai distribusi untuk memotong biaya logistik yang menjadi komponen penting pembentuk harga eceran. Selain itu, dibutuhkan strategi yang memastikan bahwa stabilitas harga yang dicapai pada tahun 2024 dapat dipertahankan melalui peningkatan efisiensi sektor produksi dan perbaikan logistik regional, sebagai buffer (penyangga) utama agar gejolak harga tidak lagi memiskinkan masyarakat.

2.3.4 Critical Point Kondisi Makro Ekonomi Daerah Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan ragam penjelasan kondisi makro ekonomi daerah di atas, maka dapat disusun beberapa critical point yang relevan dengan penyusunan RPKD Lamongan, yaitu:

1. Kondisi makro ekonomi Kabupaten Lamongan menampilkan gambaran optimis sekaligus tantangan struktural yang krusial bagi penyusunan RPKD. Secara umum, Lamongan berada pada jalur transformasi struktural yang positif, dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang pulih dan kompetitif (4,81 persen pada 2024) serta pergeseran dominasi PDRB dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan dan perdagangan. Sektor Industri telah menjadi motor pertumbuhan utama (tumbuh 7,66 persen pada 2024), memberikan peluang besar bagi RPKD untuk menjadikan sektor ini sebagai mesin penciptaan lapangan kerja berkualitas dan investasi yang mampu mendongkrak PDRB per kapita Lamongan Rp52.076,88 (lima puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) meski masih jauh tertinggal dari rata-rata Provinsi Jawa Timur.
2. Namun, terdapat tantangan besar terkait kualitas pertumbuhan dan inklusivitasnya. Sektor Pertanian, yang masih menampung mayoritas penduduk miskin dan rentan, menunjukkan pertumbuhan yang sangat stagnan dan volatil (hanya 0,11 persen pada 2024), mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat belum secara efektif mengangkat kesejahteraan kelompok terbawah. Selain itu, ancaman inflasi pada bahan makanan terus menggerus daya beli keluarga miskin.
3. Untuk mengatasi tantangan pertumbuhan stagnan sektor pertanian (hanya 0,11 persen pada 2024) sambil memanfaatkan mesin pertumbuhan industri (tumbuh 7,66 persen), RPKD harus merumuskan strategi integrasi vertikal yang kuat. Peluang terletak pada menjadikan sektor industri pengolahan sebagai pasar utama bagi produk pertanian dan perikanan Lamongan. Investasi industri tidak hanya harus padat karya, tetapi juga padat bahan baku lokal (misalnya industri pengolahan ikan, produk jagung, atau produk ternak). Integrasi ini akan menciptakan *multiplier effect* (efek berganda) yang maksimal, yaitu pertumbuhan industri akan menarik permintaan, yang kemudian memicu modernisasi dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Strategi ini secara langsung menjawab tantangan inklusivitas, yaitu memastikan bahwa keuntungan dari pertumbuhan makro ekonomi (*Job-Creating Growth*) dapat mengalir ke basis ekonomi masyarakat miskin (*Pro-Poor Resilience*) melalui mekanisme harga jual produk pertanian yang lebih tinggi dan stabil.
4. Oleh karena itu, arah strategi RPKD harus difokuskan pada dua poros utama, yaitu:

- a. *Job-Creating Growth*: Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Lamongan hingga di atas 5 persen melalui insentif investasi di sektor industri dan jasa yang padat karya dan *high-value added* untuk mengurangi TPT dan meningkatkan PDRB per kapita. Peningkatan investasi ini harus diikuti dengan program pelatihan vokasi massal (*skilling* dan *reskilling*) yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0, untuk menjembatani kesenjangan kompetensi dan secara langsung menyerap angkatan kerja Lamongan yang memiliki TPAK tinggi. Insentif harus diberikan kepada investor yang menjamin rasio penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70 persen dan menawarkan upah di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK), demi mempercepat peningkatan PDRB per kapita dan daya beli keluarga miskin.
 - b. *Pro-Poor Resilience*: Melindungi dan memodernisasi sektor pertanian agar lebih berdaya tahan dan bernilai tambah tinggi, sekaligus memastikan stabilitas harga pangan (inflasi) melalui optimalisasi *buffer stock* dan rantai pasok, demi menjaga keberlangsungan hidup dan daya beli keluarga miskin. Modernisasi sektor pertanian harus mencakup pengembangan irigasi tahan guncangan bencana (banjir/kekeringan) dan hilirisasi hasil pertanian (pengolahan pasca panen) untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani miskin yang memiliki pertumbuhan PDRB yang sangat rendah. Sementara itu, Strategi pengendalian inflasi harus diperkuat dengan subsidi distribusi pangan dari sentra produksi ke kantong-kantong kemiskinan, serta penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk kemandirian pangan mikro keluarga miskin yang rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan dasar.
5. Keberhasilan implementasi strategi dua poros ini (*Job-Creating Growth* dan *Pro-Poor Resilience*) sangat bergantung pada keseimbangan ruang fiskal dan penguatan tata kelola. Strategi penanggulangan kemiskinan harus mampu memroyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis, yang didorong oleh peningkatan aktivitas industri dan jasa, untuk membiayai program afirmasi sosial. Tantangannya adalah memastikan bahwa belanja daerah memiliki efektivitas yang tinggi, misalnya dana yang dialokasikan untuk modernisasi irigasi harus benar-benar menghasilkan irigasi tahan guncangan, bukan hanya rehabilitasi rutin. Penguatan tata kelola juga berarti mengaitkan insentif investasi industri dengan kewajiban sosial (seperti penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70 persen) dan pemenuhan standar upah yang layak (di atas UMK). Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada mencapai angka pertumbuhan PDRB yang tinggi, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang memastikan pertumbuhan tersebut berimplikasi langsung pada peningkatan daya beli, penurunan TPT, dan pengentasan kemiskinan di Lamongan.

2.4 KONDISI INFRASTRUKTUR

Gambaran umum kondisi infrastruktur merupakan komponen vital dalam RPKD karena infrastruktur berperan sebagai katalis utama yang menghubungkan masyarakat miskin dengan sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur yang buruk atau tidak memadai menciptakan kemiskinan struktural dan isolasi geografis, seperti yang terlihat di sebagian wilayah Lamongan Selatan, menghambat mobilitas tenaga kerja

dan meningkatkan biaya logistik, sehingga membatasi peluang usaha masyarakat miskin. Oleh karena itu, bagian ini berfungsi sebagai dasar diagnosis untuk memetakan kesenjangan infrastruktur antar wilayah dan merumuskan program investasi publik yang ditargetkan secara spesifik untuk membuka aksesibilitas, meningkatkan kualitas layanan dasar, dan me-ngurangi biaya hidup serta membuka peluang ekonomi bagi keluarga miskin.

2.4.1 Posisi Infrastruktur Lamongan dalam Kawasan Regional

Kondisi infrastruktur di Lamongan dititikberatkan pada skala regional dan posisi Lamongan di Jawa Timur. Hal tersebut karena dapat menjadi penentu utama arah strategi pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan (RPKD). Dengan menempatkan Lamongan sebagai bagian dari kawasan strategis Jawa Timur, fokus analisis ini secara eksplisit mengidentifikasi peluang besar untuk menarik investasi dan menciptakan pekerjaan yang lebih baik. Misalnya, peluang terbesar terletak pada aksesibilitas Lamongan ke pusat-pusat ekonomi utama seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban melalui jaringan jalan nasional dan kereta api. Infrastruktur pelabuhan (khususnya untuk perikanan) dan jaringan jalan yang menghubungkan sentra produksi (pertanian di selatan dan perikanan di utara) ke kawasan industri menjadi penarik investasi

Gambar 2.38. Peta Posisi Lamongan dalam Konstelasi Infrastruktur Jawa Timur

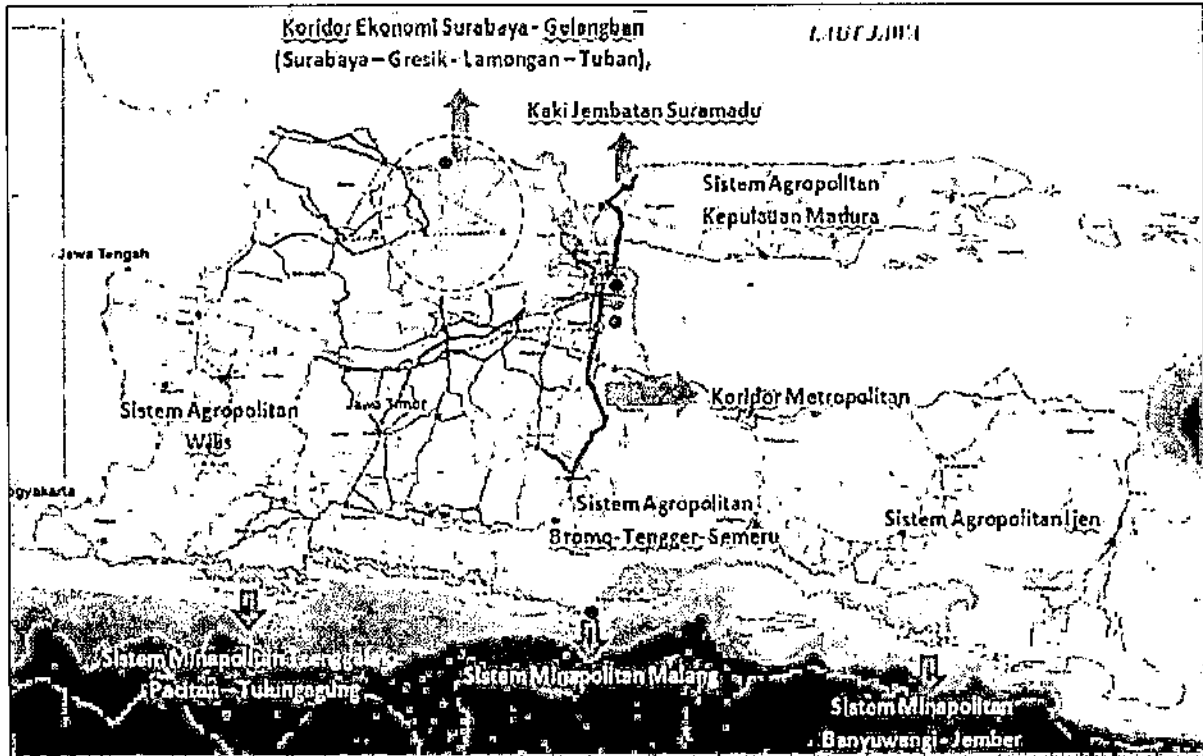


Sumber: Rencana Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

Peluang berikutnya dari aspek infrastruktur adalah bagi pengembangan nilai tambah ekonomi berbasis konektivitas regional. Hal ini dapat dilihat dari posisi Lamongan di Provinsi Jawa Timur. Lamongan diposisikan memiliki konektivitas yang kuat antara pariwisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai akselerator penurunan angka kemiskinan. Lamongan berada di Koridor Ekonomi Surabaya - Gelangban (Surabaya - Gresik - Lamongan - Tuban). Posisi ini menambah dimensi strategis dalam menekankan pentingnya sektor pertanian dan perikanan dalam konteks pengentasan kemiskinan. Strategi tersebut menuntut RPKD untuk memperkuat infrastruktur logistik dan rantai pasok yang

menghubungkan klaster Agropolitan (pertanian) dan Minapolitan (perikanan) di Lamongan secara langsung dengan pasar dan pelabuhan di Koridor Ekonomi Surabaya-Gresik, sehingga nilai tambah hasil bumi dapat ditingkatkan dan langsung diserap oleh ekonomi regional.

Gambar 2.39. Peta Konektivitas Pariwisata, Agropolitan, dan Minapolitan



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur 2023-2043

Posisi Lamongan yang berada di Koridor Ekonomi Surabaya – Gelangan dan didukung oleh konektivitas kuat antara pariwisata, agropolitan, dan minapolitan memberikan peluang untuk mengimplementasikan strategi "Pro-Poor Resilience" yang jauh lebih terintegrasi. Strategi penanggulangan kemiskinan harus merumuskan program investasi infrastruktur yang tidak hanya fokus pada hard infrastructure untuk industr, tetapi juga pada soft infrastructure dan rural infrastructure. Ini termasuk pembangunan irigasi modern, cold storage di sentra perikanan, serta akses jalan yang menghubungkan sentra produksi agropolitan dan minapolitan ke pasar dan destinasi pariwisata. Strategi tersebut akan secara langsung meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, yang secara mayoritas diusahakan oleh kelompok miskin, sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri dapat diimbangi oleh pendapatan yang lebih stabil dan tinggi dari sektor primer.

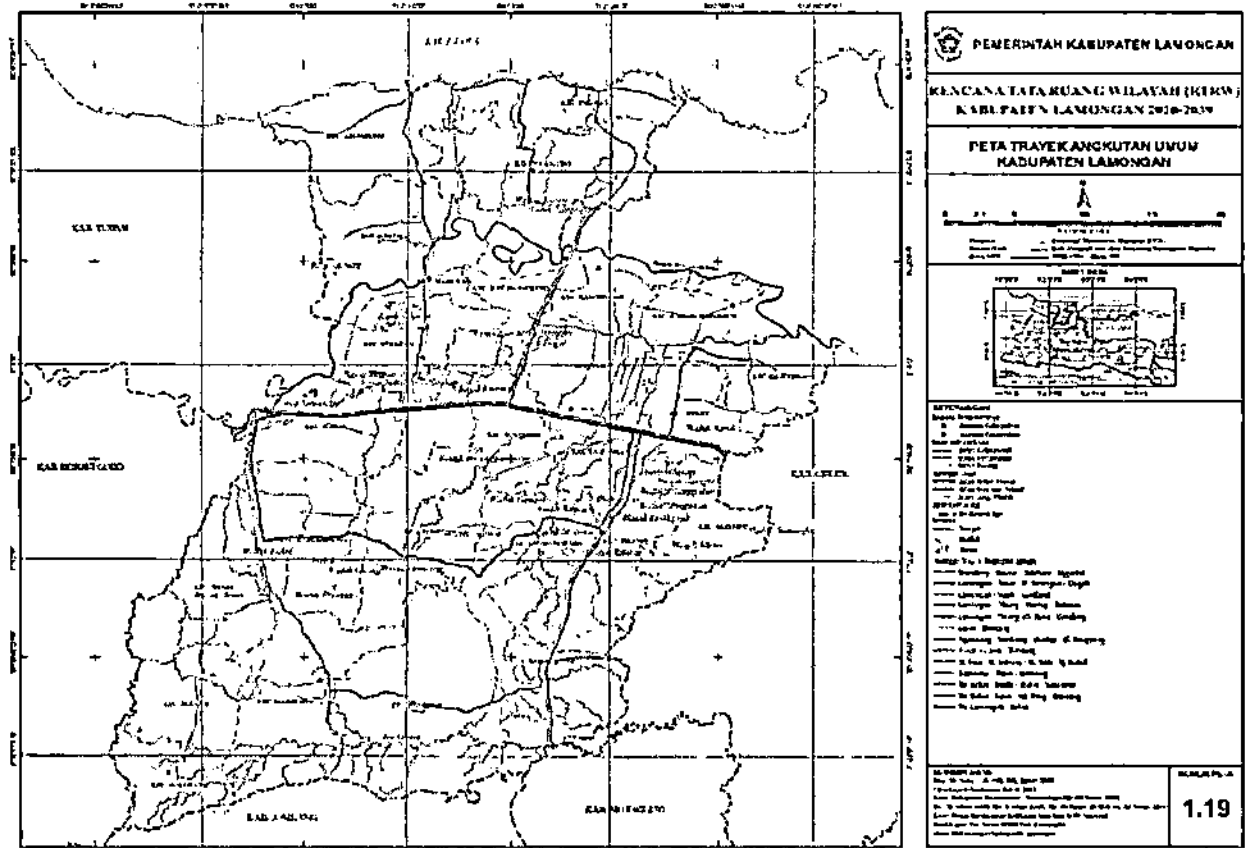
2.4.2 Kondisi Infrastruktur Transportasi

Dalam rangka mengoptimalkan posisi strategis Lamongan, masih dibutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi terutama trayek untuk memperkuat konektivitas. Saat ini sudah ada 3 (tiga) pelayanan angkutan umum di Lamongan, yaitu:

1. Angkota Kota Dalam Propinsi (AKDP);
2. Angkutan lintas batas yang terdiri dari Babat-Jombang, Babat-Bojonegoro, dan Babat-Surabaya; dan

- Angkutan perdesaan yang setidaknya ada 14 trayek. Meski demikian, masih diperlukan pengembangan trayek angkutan umum yang menghubungkan sentra produksi perdesaan (Agropolitan/Minapolitan) dengan pusat-pusat konsumsi dan industri di dalam kabupaten dan Koridor Ekonomi Surabaya-Gresik, demi mengefisienkan pergerakan barang dan jasa serta meningkatkan aksesibilitas tenaga kerja.

Gambar 2.40. Peta Trayek Angkutan Umum Kabupaten Lamongan



Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan

Layanan Angkutan Penumpang di Kabupaten Lamongan untuk AKAP, AKDP dan Lintas Batas sudah dapat dilayani dengan baik. Sementara layanan angkutan penumpang antar pusat kecamatan masih banyak yang belum dilayani dengan baik.

Berikutnya adalah sistem transportasi moda penyebrangan, dimana kondisinya saat ini sudah dilayani oleh Pelabuhan Penyebrangan ASDP dengan rute Paciran – Bawean serta Paciran – Glonggong Sulawesi. Pelabuhan umum di Kabupaten Lamongan antara lain: (i) Pelabuhan Umum Sedayu Lawas (Brondong) seluas 96.583 M²; (ii) Pelabuhan Umum Lamongan Shorebase (Pelabuhan Umum Tanjung Pakis Paciran); dan (iii) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 433.304 M².

Ketersediaan infrastruktur pelabuhan yang beragam di Lamongan, mulai dari Pelabuhan Penyebrangan ASDP Paciran (rute domestik Paciran–Bawean dan antar-pulau Paciran–Glonggong Sulawesi) hingga Pelabuhan Umum Sedayu Lawas, Lamongan Shorebase, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, menegaskan peran Lamongan sebagai gerbang maritim utama. Pelabuhan ini memberikan keunggulan komparatif dalam menunjang strategi Job-Creating Growth, khususnya untuk ekspor produk industri pengolahan sehingga mendukung aktivitas sektor Minapolitan (Perikanan) yang vital bagi strategi Pro-Poor Resilience. RPKD harus fokus pada optimalisasi dan modernisasi kapasitas Pelabuhan Umum Lamongan Shorebase sebagai pelabuhan kargo dan logistik

untuk memperlancar rantai pasok industri, sekaligus mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan miskin.

Relevansi konektivitas transportasi terhadap penanggulangan kemiskinan di Lamongan terletak pada kemampuannya untuk memangkas biaya logistik yang selama ini membebani para pelaku usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan. Ke depan harus diperbaiki pengembangan trayek angkutan umum yang menghubungkan sentra Agropolitan dan Minapolitan ke pusat konsumsi, sehingga Pemerintah Daerah secara tidak langsung memberikan jaminan akses pasar yang lebih efisien bagi masyarakat perdesaan. Integrasi ini memastikan bahwa peningkatan produktivitas di tingkat hulu dapat terserap maksimal oleh pasar industri di Koridor Ekonomi Surabaya-Gresik, sehingga margin keuntungan yang diterima oleh petani dan nelayan meningkat dan mempercepat transisi mereka keluar dari garis kemiskinan.

Selain itu, optimalisasi pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Lamongan Shorebase dan PPN Brondong memiliki implikasi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal. Fokus RPKD pada modernisasi kapasitas kargo dan logistik bukan hanya soal memperlancar arus barang, melainkan menciptakan ekosistem industri pengolahan yang padat karya di sekitar kawasan maritim. Hal ini sejalan dengan strategi Job-Creating Growth, dimana penyerapan tenaga kerja dari keluarga miskin ke dalam sektor formal industri maritim dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan memperkuat resiliensi ekonomi daerah terhadap fluktuasi pasar global.

Secara strategis, pengembangan infrastruktur moda penyeberangan rute Paciran-Bawean dan Paciran-Glonggong juga harus dipandang sebagai peluang untuk memperluas jejaring ekonomi antar wilayah. Dengan memposisikan Lamongan sebagai gerbang maritim utama, daerah memiliki daya tawar lebih tinggi dalam menarik investasi yang mendukung sektor Minapolitan. Bagi RPKD, kunci utamanya adalah memastikan bahwa pembangunan fisik pelabuhan ini dibarengi dengan program pemberdayaan kapasitas masyarakat lokal, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi maritim, tetapi aktif sebagai pelaku usaha atau tenaga kerja terampil yang mendukung rantai pasok logistik nasional.

2.4.3 Kondisi Infrastruktur Kelistrikan

Jenis infrastruktur yang mampu mendorong percepatan nilai tambah ekonomi adalah listrik. Listrik merupakan infrastruktur dasar yang paling krusial dalam mendorong percepatan nilai tambah ekonomi karena sebagai input esensial bagi hampir seluruh aktivitas produktif, terutama di sektor industri pengolahan yang diharapkan ke depan mampu menjadi motor pertumbuhan Lamongan. Ketersediaan listrik yang andal dan dengan kapasitas memadai tidak hanya menjamin keberlangsungan operasional harian industri, tetapi juga berfungsi sebagai faktor penarik investasi (Job-Creating Growth).

Bagi industri di Lamongan, pasokan energi yang stabil pada golongan tarif I3 dan I4 akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, sehingga produk-produk Lamongan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus menjamin bahwa kapasitas distribusi listrik ditingkatkan, terutama di

kawasan yang ditargetkan untuk pengembangan industri, untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan PDRB per kapita.

Kondisi infrastruktur listrik di Kab. Lamongan menunjukkan kapasitas pelayanan yang terdistribusi ke berbagai sektor, mencerminkan struktur ekonominya yang beragam. Secara keseluruhan, Lamongan memiliki total 142.176 pelanggan listrik, dengan total kapasitas terpasang mencapai 165.600.995 dan total listrik yang didistribusikan sebesar 279.742.062. Pelanggan terbesar secara jumlah adalah sektor Rumah Tangga, yang mencapai. Meskipun demikian, terdapat pula alokasi yang signifikan untuk sektor non-rumah tangga, termasuk pelanggan Sosial, pelanggan Usaha/Multiguna, dan pelanggan Industri. Angka distribusi ini menegaskan bahwa infrastruktur kelistrikan telah tersedia sebagai penopang utama kehidupan sosial dan ekonomi, dan menjadi dasar penting untuk perencanaan pembangunan daerah.

Total kapasitas terpasang sebesar 165.600.995 dan total distribusi 279.742.062 menunjukkan Lamongan memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk menopang kehidupan sosial dan ekonomi saat ini. Ketersediaan tersebut adalah peluang untuk menarik dan mendukung investasi di sektor industri pengolahan, yang menjadi target utama RPKD untuk mendorong PDRB per kapita.

Tabel 2.20. Jumlah Pelanggan, Kapasitas Terpasang, dan Listrik yang Didistribusikan Wilayah Lamongan

No	Golongan Tarif		Pelanggan	Kapasitas Terpasang	Listrik yang didistribusikan
1	Rumah Tangga	S1	-	-	
		R1	126.440	91.024.450	164.773.542
		R2	338	1.612.100	1.980.657
		R3	27	393.900	739.557
2	Sosial	S2	4.934	10.140.600	13.758.739
		S3	4	2.805.000	4.122.184
3	Usaha, Multiguna dan Hotel	B1	9.089	10.978.350	13.992.966
		B2	573	10.054.500	14.536.628
		B3	1	865.000	351.830
		L	2	11.000	121.365
4	Industri	I1	8	63.900	44.174
		I2	53	6.260.500	7.163.093
		I3	12	25.490.000	45.174.528
		I4	-	-	-
5	Gedung/Kantor	P1	349	3.101.550	4.965.327
		P2	-	-	-
6	Jalan	P3	349	2.600.145	8.017.472
	Jumlah		142.176	165.400.995	279.742.062

Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan

Bagaimanapun, keandalan pasokan listrik adalah faktor penarik investasi non-negosiasi. Strategi penanggulangan kemiskinan harus menjamin bahwa kawasan yang ditargetkan untuk pengembangan industri (misalnya di Koridor Ekonomi Surabaya-Gelangan) memiliki kapasitas distribusi yang ditingkatkan melebihi kebutuhan saat ini (oversupply siap pakai). Hal tersebut memberikan kepastian bagi calon investor dan secara langsung mendukung strategi Job-Creating Growth yang bertujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Meskipun jumlah pelanggan Rumah Tangga adalah yang terbesar (menunjukkan elektrifikasi yang tinggi), tantangan utama bagi strategi penanggulangan kemiskinan di Lamongan adalah memastikan alokasi kapasitas yang signifikan dan berkualitas bagi pelanggan Industri dan Usaha/Multiguna. Untuk mencapai target pertumbuhan industri yang agresif (di atas 7,66 persen), strategi penanggulangan kemiskinan harus memetakan potensi gap antara kebutuhan listrik yang diproyeksikan (berdasarkan target pertumbuhan industri) dengan kapasitas terpasang saat ini.

Strategi penanggulangan kemiskinan (Pro-Poor Resilience) dan pertumbuhan ekonomi harus menjamin bahwa kapasitas distribusi ditingkatkan secara strategis. Peningkatan ini tidak hanya penting di kawasan industri, tetapi juga untuk mendukung modernisasi sektor pertanian dan perikanan (misalnya untuk pengoperasian pompa irigasi listrik, pendingin gudang/tempat pelelangan ikan, dan unit pengolahan pasca panen). Dengan demikian, listrik menjadi alat ganda, yaitu mendukung industri besar dan sekaligus meningkatkan nilai tambah serta ketahanan ekonomi bagi masyarakat miskin di sektor primer.

2.4.4 Kondisi Infrastruktur Jaringan Air Minum

Jenis infrastruktur paling krusial bagi penanggulangan kemiskinan adalah jaringan air minum. Hal ini disebabkan karena akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan merupakan dasar dari kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, yang secara langsung memengaruhi produktivitas dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Ketiadaan akses air bersih memaksa keluarga miskin untuk mengalokasikan waktu dan energi untuk mengambil air, yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.

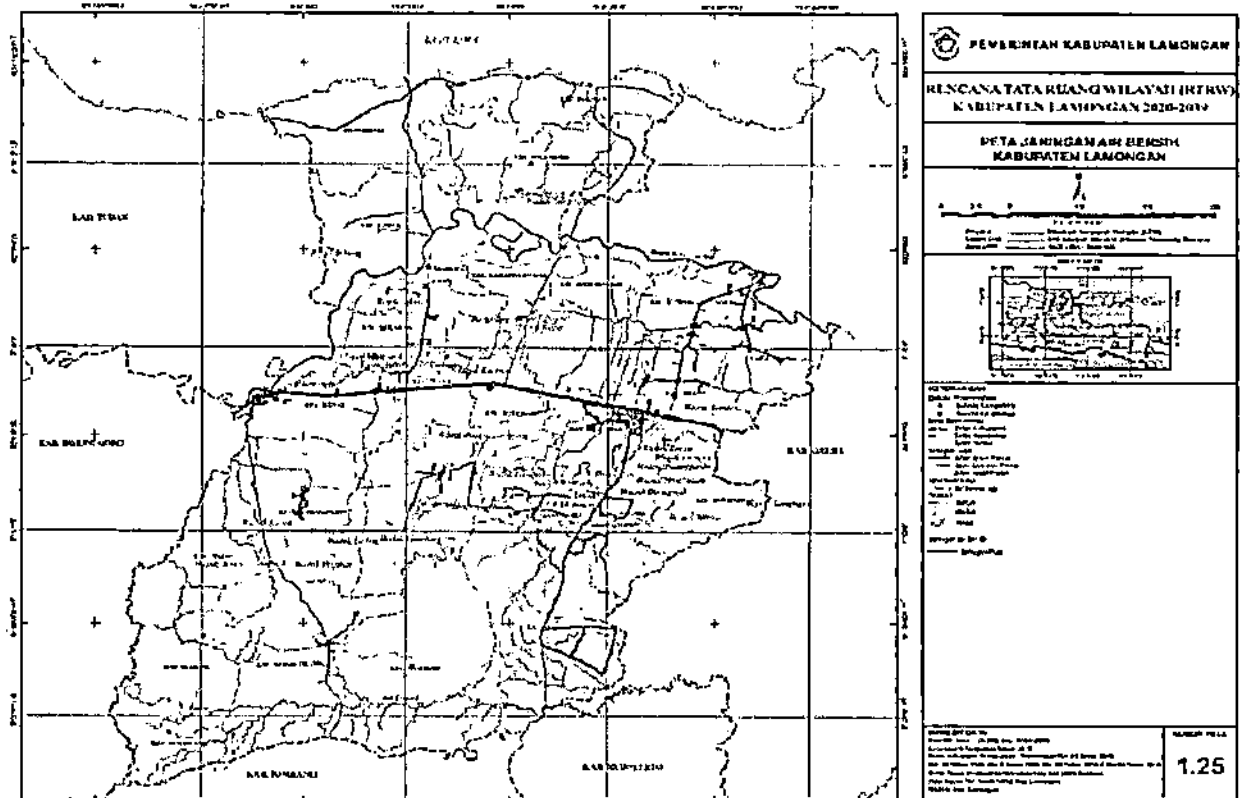
Selain itu meningkatkan risiko penyakit berbasis air yang menyebabkan biaya kesehatan tinggi dan hilangnya hari kerja atau sekolah. Oleh karena itu, investasi RPKD pada pengembangan dan rehabilitasi jaringan air minum, ter-utama di kantong-kantong kemiskinan dan permukiman padat, harus menjadi prioritas utama. Hal ini tidak hanya mengurangi kerentanan kesehatan keluarga miskin (Pro-Poor Resilience), tetapi juga membebaskan potensi ekonomi mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih, penduduk di Kab. Lamongan memanfaatkan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM. Sistem perpipaan non PDAM dikelola oleh HIPPAM serta PJT (Perusahaan Jasa Tirta). Sedangkan pelayanan air bersih non perpipaan di Kabupaten Lamongan dipenuhi dari sumur, sungai, telaga, mata air, Penampungan Air Hujan (PAH), ataupun lainnya.

Sistem pemenuhan air bersih di Kabupaten Lamongan yang didominasi oleh kombinasi perpipaan (PDAM, HIPPAM, dan PJT) dan non perpipaan (sumur, sungai, telaga) mencerminkan tingginya kerentanan masyarakat miskin terhadap isu sanitasi dan kesehatan. Ketergantungan pada sumber non-perpipaan, terutama sumur, sungai, dan telaga, sering kali tidak menjamin kualitas air yang higienis, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit berbasis air dan beban pengeluaran kesehatan keluarga miskin.

RPKD harus mengakui bahwa peningkatan akses air bersih adalah prioritas Pro-Poor Resilience yang setara dengan infrastruktur listrik dan jalan. Oleh karena itu, strategi harus diarahkan pada ekspansi cakupan layanan PDAM dan pemberdayaan HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) di tingkat desa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber non-perpipaan yang tidak aman, sehingga waktu yang sebelumnya digunakan untuk memperoleh air dapat dialihkan ke kegiatan ekonomi produktif, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin. Selain itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus mengalokasikan dana khusus untuk subsidi pemasangan sambungan rumah (SR) dan pembangunan infrastruktur pengolahan air minum berbasis komunitas (HIPPAM) di kawasan dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Selain itu, perlu adanya regulasi tarif air minum yang bersifat progresif dan pro-poor, yang menjamin keluarga miskin dapat mengakses layanan dasar dengan biaya terjangkau.

Gambar 2.41. Peta Jaringan Air Bersih Kabupaten Lamongan



Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan

Implementasi strategi Pro-Poor Resilience melalui sektor air minum juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan sumber daya di tengah perubahan iklim. Kabupaten Lamongan, yang secara geografis memiliki variasi wilayah mulai dari pesisir hingga dataran rendah yang rawan kekeringan, memerlukan diversifikasi sumber air baku agar layanan HIPPAM dan PDAM tetap stabil sepanjang tahun. RPKD perlu mendorong skema perlindungan sumber mata air dan optimalisasi pemanenan air hujan secara kolektif di wilayah-wilayah yang secara teknis sulit dijangkau jaringan perpipaan primer, sehingga masyarakat miskin tidak terjebak pada pembelian air tangki dengan harga mahal saat musim kemarau tiba.

Selain itu, aspek tata kelola kelembagaan di tingkat desa menjadi faktor penentu efektivitas bantuan infrastruktur. Penguatan kapasitas manajerial pengelola HIPPAM dalam hal pemeliharaan teknis dan manajemen keuangan sangat diperlukan agar aset yang telah

dibangun tidak cepat rusak. Dalam kerangka RPKD, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang diberikan pemerintah benar-benar berkelanjutan, dimana masyarakat miskin mendapatkan kepastian layanan tanpa dibebani biaya pemeliharaan yang tidak terduga akibat kerusakan sistem yang tidak terkelola dengan baik.

Secara lebih luas, relevansi penyediaan air minum perpipaan ini berkaitan erat dengan upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Lamongan. Ketersediaan air bersih yang aman di tingkat rumah tangga merupakan prasyarat mutlak bagi sanitasi yang baik dan praktik hidup sehat, yang secara akumulatif akan menurunkan prevalensi penyakit infeksi pada anak-anak dari keluarga miskin. Dengan demikian, investasi pada jaringan air minum dalam RPKD bukan sekadar membangun fisik pipa, melainkan investasi jangka panjang pada kualitas SDM Lamongan agar mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui perbaikan kesehatan sejak usia dini.

Terakhir, digitalisasi pemantauan kualitas air dan keterjangkauan harga harus menjadi bagian dari pengawasan rutin Pemerintah Daerah. RPKD dapat mengusulkan sistem pelaporan berbasis komunitas untuk memastikan bahwa regulasi tarif pro-poor benar-benar diterapkan di lapangan dan kualitas air yang sampai ke rumah tangga miskin memenuhi standar kesehatan. Transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi air bersih ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam infrastruktur air minum memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya beli serta kesejahteraan warga yang paling rentan.

2.4.5 Kondisi Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi

Selain air bersih, kerentanan lain yang perlu dilihat adalah kaitannya dengan persampahan dan sanitasi. Infrastruktur persampahan dan sanitasi yang buruk merupakan salah satu penyebab struktural kemiskinan dan kerentanan non-ekonomi. Pengelolaan sampah yang tidak memadai, terutama di daerah padat penduduk dan miskin, menciptakan lingkungan yang tidak sehat, meningkatkan polusi air dan udara, serta secara langsung berkontribusi pada penyebaran penyakit menular. Sama halnya dengan air bersih, buruknya sanitasi dan persampahan akan membebani keluarga miskin dengan biaya pengobatan yang tinggi dan hilangnya waktu produktif.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menyebutkan potensi timbulan sampah Kab. Lamongan dalam setahun se-besar 201,686.44 ton/tahun atau 552.57 ton/hari. Prosentase sampah ter-tangani sebesar 36.65 persen sedangkan prosentase sampah terkelola 50.73 persen. Sumber sampah di Kab. Lamongan sebesar 58.14 ton berasal dari sam-pah lain lain yaitu sampah yang tidak termasuk dalam kategori sampah spesifik seperti sampah yang mengandung B3, puing bongkaran bangunan, sampah yang timbul akibat bencana, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang belum ada teknologi pengolahannya dan sampah yang timbul tidak periodik. Sampah rumah tangga sebanyak 30,14 ton, sampah kawasan industri sebanyak 10,21 ton, perkantoran sebanyak 0,28 ton, pasar sebanyak 0,32 ton, perniagaan sebanyak 0,41 ton dan fasilitas publik sebanyak 10,21 ton.

Dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilihat proyeksi timbunan sampah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Proyeksi timbulan sampah untuk Kabupaten Lamongan

didasarkan peningkatan jumlah penduduknya dengan asumsi rata-rata timbulan sampah perkapita sebesar 0,4 Kg/Orang/ hari berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Sedangkan Timbulan sampah tahun 2023 menggunakan data SIPSN. Sedangkan proyeksi jumlah kebutuhan TPST menggunakan Kriteria perencanaan TPST berdasarkan SNI Nomor 03-1733 Tahun 2004 yakni 1 TPST dapat menampung sampah yang dihasilkan dari 120.000 penduduk. Proyeksi ini dapat menjadi basis perencanaan RPKD untuk mengukur kebutuhan investasi infrastruktur persampahan dan secara proaktif mencegah dampak buruk lingkungan dan kesehatan terhadap masyarakat miskin.

Tabel 2.21. Proyeksi Timbulan Sampah dan Penanganan Sampah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Lamongan

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Pen- duduk (Jiwa)	1.386.390	1.394.222	1.401.608	1.408.508	1.414.913
Timbulan Sam- pah (ton/Thn)	202,412.94	203,556.41	204,634.77	205,642.17	206,577.30
Pengurangan Sampah Tahun an (Ton/Thn)	31,022.19	32,467.65	33,916.58	35,366.77	36,816.65
Pengurangan Sampah (%)	15.33	15.95	16.57	17.20	17.82
Penanganan Sampah (Ton/ Thn)	74,178.74	74,597.79	74,992.98	75,362.16	75,704.86
Persen Pena- nganan Sam- pah Tahunan (Ton/Tahun)	36.65	36.65	36.65	36.65	36.65

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Sampah Terkelola (Ton/Thn)	105,200.94	107,065.44	108,909.56	110,728.93	112,521.51
Persen Sampah Terkelola	51.97	52.60	53.22	53.85	54.47
Daur Ulang Sampah Tahunan (Ton/Thn)	27,887.83	28,045.38	28,193.95	28,332.75	28,461.59
Bahan Baku Sampah Tahunan (Ton/Thn)	915.79	920.96	925.84	930.40	934.63
Recycling Rate	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	12	12	12	12	12
Proyeksi kebutuhan luas TPA (ha)	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4

Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan

Berdasarkan data di atas, Kab. Lamongan menghadapi kesenjangan signifikan dalam pengelolaan sampah, dimana potensi timbunan sampah mencapai 552,57 ton/hari, namun persentase sampah tertangani hanya 36,65 persen dan yang terkelola hanya 50,73 persen. Kesenjangan antara timbunan dan penanganan sampah ini, yang didominasi oleh sampah Rumah Tangga (30,14 ton) dan sampah Lain-lain (58,14 ton), menciptakan risiko lingkungan dan kesehatan yang tinggi, terutama di kantong-kantong kemiskinan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik berkontribusi pada pencemaran air dan udara, yang merupakan faktor penyebab penyakit dan meningkatkan biaya penge-luaran kesehatan bagi keluarga miskin. Oleh karena itu, RPKD harus meman-dang investasi pada infrastruktur persampahan, termasuk peningkatan persentase sampah terkelola, sebagai intervensi Pro-Poor Resilience yang esensial untuk menurunkan kerentanan non-ekonomi dan membebaskan sumber daya keluarga miskin dari beban pengobatan.

Proyeksi timbunan sampah selama lima tahun ke depan, yang didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk dengan asumsi 0,4 Kg/Orang/hari, mem-berikan basis perencanaan yang kuat bagi RPKD untuk mengukur kebutuhan investasi infrastruktur persampahan secara proaktif. Berdasarkan kriteria SNI, kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dihitung berdasarkan kapasitas menampung 120.000 penduduk per TPST. Proyeksi ini harus diterjemahkan menjadi alokasi anggaran dan pembangunan fisik untuk menjamin ketersediaan fasilitas pengolahan yang memadai. RPKD harus fokus pada pembangunan TPST yang strategis agar layanan pengelolaan sampah menjangkau wilayah padat penduduk dan miskin secara merata, serta men-dukung program daur ulang dan pengurangan sampah di sumbernya. Dengan mengukur investasi berdasarkan proyeksi ini, Lamongan dapat mencegah eskalasi masalah persampahan yang akan memburuk

seiring dengan pertumbuhan penduduk, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan layak huni untuk mendukung peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan juga harus memprioritaskan peningkatan cakupan layanan persampahan formal (pengumpulan dan pengolahan) dan mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas (Bank Sampah atau TPS 3R) di tingkat desa dan kelurahan. Strategi ini akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan mendukung terciptanya lingkungan yang layak huni, yang merupakan prasyarat dasar bagi peningkatan kualitas hidup.

Sistem persampahan beririsan dengan sanitasi sebagai infrastruktur dasar bagi penanggulangan kemiskinan. Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Lamongan telah memiliki sarana prasarana pembuangan air limbah domestik. Bahkan pada Kecamatan Pucuk, Turi, dan Lamongan, masyarakat pada ketiga daerah tersebut telah ODF (Open Defecation Free). Sedangkan, jumlah Rumah tangga (KK) yang belum memiliki jamban dan masih BABS adalah sekitar 9,5 persen atau sebanyak 30.201 KK.

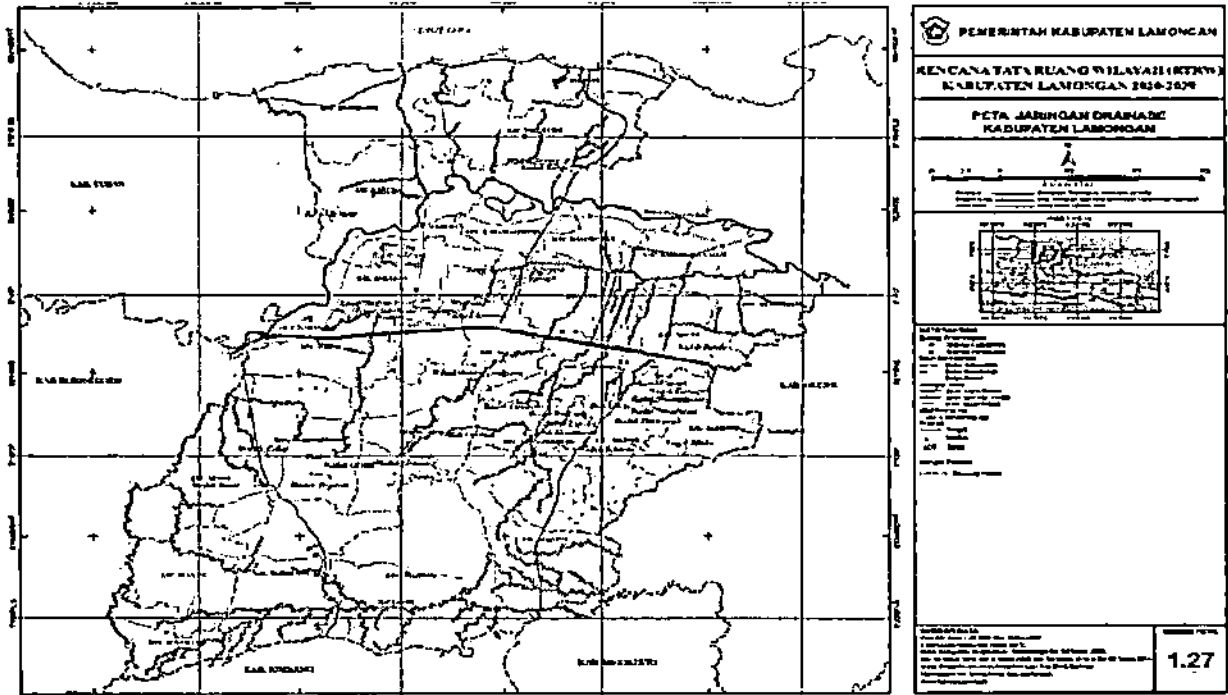
Sarana pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Lamongan meliputi cubluk/jamban tidak aman, cubluk dengan septiktank, jamban bersama, MCK komunal, dan IPAL. MCK Komunal dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Cipta Karya yang tersebar di beberapa desa. Untuk IPAL, masih terpusat hanya pada lokasi tertentu dengan cakupan pelayanan kurang dari 200 KK, misalnya pada IPAL di Perumahan Graha Kecamatan Tikung dengan pelayanan mencakup 162 KK dan beberapa IPAL skala kecil perumahan yang tersebar di beberapa kelurahan Kecamatan Lamongan dengan pelayanan tiap IPAL kurang dari 50 KK. Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Lamongan sebagian belum standar.

Sementara itu, kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lamongan sebagian besar telah berfungsi dengan baik dan digunakan secara maksimal oleh warga. Untuk pemeliharaan sarana prasarana air limbah domestik seperti MCK Komunal, biasanya dilakukan sendiri oleh warga dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di Kabupaten Lamongan juga terdapat IPAL Komunal hanya pada beberapa kawasan kecil. IPAL Komunal terbesar melayani 162 KK berada di Perumahan Graha Kecamatan Tikung sedangkan IPAL dengan skala 5 – 10 KK tersebar di beberapa kelurahan di Kecamatan Lamongan.

2.4.6 Kondisi Infrastruktur Drainase

Sama seperti sanitasi, drainase adalah infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap strategi "Pro-Poor Resilience", terutama karena Lamongan memiliki wilayah pesisir dan wilayah yang rentan banjir. Infrastruktur drainase yang memadai adalah komponen kritis dari ketahanan wilayah (resilience), dan oleh karena itu, harus menjadi prioritas RPKD setara dengan air bersih dan sanitasi. Buruknya sistem drainase, termasuk jaringan drainase yang tersumbat atau tidak terhubung, menyebabkan genangan dan banjir lokal, yang bukan hanya merusak infrastruktur jalan dan rumah tinggal, tetapi juga secara langsung melumpuhkan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin.

Gambar 2.42. Peta Jaringan Drainase Kabupaten Lamongan



Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan

Banjir berulang meningkatkan kerentanan keluarga miskin dengan merusak aset, menyebabkan kerugian panen, dan memperburuk kondisi kesehatan serta sanitasi lingkungan. Penanggulangan kemiskinan harus mengalokasikan sumber daya untuk rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder, khususnya di kawasan permukiman miskin dan kawasan industri (untuk mendukung Job-Creating Growth). Prioritas harus diberikan pada pembangunan sistem yang terintegrasi untuk mencegah luapan air, sehingga memitigasi dampak bencana dan menjamin keberlangsungan hidup dan usaha masyarakat miskin.

Sistem drainase di Kabupaten Lamongan masih bertumpu pada sungai yang ada sebagai drainase primer. Sedangkan sistem drainase sekunder berada di sisi jalan yang bermuara ke sungai. Secara umum, Kabupaten Lamongan mempunyai ketinggian yang relatif datar bahkan pada beberapa wilayah banyak dijumpai cekungan-cekungan yang saat ini berupa rawa. Di beberapa daerah masih terdapat area dengan keadaan genangan yang berlangsung periodik selama setengah bulan sampai dengan tiga bulan pada musim kemarau. Informasi mengenai sistem drainase di Lamongan ini mencerminkan kerentanan geofisik daerah dan urgensi penanganan drainase dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi topografi Lamongan yang didominasi wilayah datar dan cekungan rawa menuntut pendekatan drainase yang tidak hanya sekadar mengalirkan air, tetapi juga mengelolanya secara terintegrasi melalui sistem polder atau kolam retensi. Dalam konteks RPKD, keberadaan genangan yang berlangsung hingga lama (contohnya >2 bulan) di wilayah tertentu merupakan beban ekonomi yang sangat berat bagi rumah tangga miskin, karena membatasi mobilitas dan akses ke tempat kerja. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus mencakup normalisasi rawa-rawa sebagai fungsi penampung air alami sekaligus optimalisasi pompa pembuang di titik-titik kritis guna memperpendek durasi genangan, sehingga siklus ekonomi masyarakat tidak terhenti terlalu lama akibat faktor cuaca.

Selain itu, rehabilitasi drainase sekunder di sisi jalan harus diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur jalan itu sendiri untuk mencegah kerusakan dini akibat rendaman air. Bagi masyarakat miskin di perdesaan, rusaknya akses jalan akibat drainase yang buruk berarti peningkatan biaya transportasi hasil bumi dan risiko kecelakaan yang tinggi. Strategi Pro-Poor Resilience mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat lokal melalui program padat karya dalam pemeliharaan rutin saluran drainase. Hal tersebut memberikan manfaat ganda, yaitu: (i) menjamin saluran tetap berfungsi optimal untuk mencegah banjir; dan (ii) memberikan penghasilan tambahan langsung bagi keluarga miskin di wilayah terdampak.

Terakhir, integrasi perencanaan drainase dengan pemetaan kawasan pemukiman padat merupakan langkah krusial untuk mencegah degradasi sanitasi lingkungan saat musim hujan. Di kawasan kumuh perkotaan maupun pesisir Lamongan, buruknya drainase sering kali menyebabkan luapan air limbah domestik yang memicu penyebaran penyakit menular. Dengan menempatkan perbaikan drainase sebagai prioritas dalam RPKD, pemerintah secara proaktif melindungi derajat kesehatan masyarakat rentan. Keberhasilan dalam memitigasi dampak banjir melalui sistem drainase yang andal akan menciptakan rasa aman bagi warga untuk berinvestasi pada usaha skala kecil di hunian mereka, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

2.4.7 Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi

Infrastruktur irigasi memegang peran krusial dalam konteks penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam mendukung strategi "Pro-Poor Resilience" dan mengoptimalkan potensi pengembangan Agropolitan. Kondisi sektor Pertanian Lamongan yang saat ini tumbuh sangat rendah dan volatil (hanya 0,11 persen pada 2024) memerlukan intervensi yang kuat, dan irigasi adalah kuncinya.

Sistem irigasi yang berfungsi baik dan efisien menjamin pasokan air yang stabil bagi lahan pertanian, memungkinkan peningkatan intensitas tanam, diversifikasi komoditas, dan peningkatan produktivitas panen, yang semuanya secara langsung akan meningkatkan pendapatan petani miskin. Oleh karena itu, mengulas kondisi, cakupan, dan efisiensi jaringan irigasi, mulai dari primer, sekunder, hingga tersier, adalah fundamental untuk merumuskan investasi yang tepat. Investasi ini harus mampu memitigasi risiko kekeringan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri dapat diimbangi oleh peningkatan kesejahteraan yang merata di sektor berbasis lahan.

Sistem irigasi di Kabupaten Lamongan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) seksi pengairan, yaitu: (i) Seksi Pengairan Lamongan; (ii) Seksi Pengairan Kedungpring; (iii) Seksi Pengairan Pucuk; (iv) Seksi Pengairan Karanggeneng; (v) Seksi Pengairan Sumlaran; (vi) Seksi Pengairan Laren; dan (vii) Seksi Pengairan Kuro. Masing-masing seksi ini mengairi lahan sawah baik sawah irigasi teknis, setengah teknis dan sawah sederhana. Berdasarkan data, sawah irigasi teknis seluas 14.924 Ha, sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis seluas 10.551 Ha dan sawah irigasi sederhana seluas 20.551 Ha.

Data luas irigasi di Kabupaten Lamongan menunjukkan total area irigasi seluas 46.026 hektar, yang terbagi dalam tiga klasifikasi utama, yaitu Teknis, Setengah Teknis ($\frac{1}{2}$ Teknis), dan Sederhana. Secara keseluruhan, jenis irigasi Sederhana memiliki cakupan terluas, mencapai 20.551 Ha atau sekitar 44.65 persen dari total, diikuti oleh irigasi Teknis

dengan 14.924 Ha dan Setengah Teknis dengan 10.551 Ha. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian masih mengandalkan sistem irigasi yang relatif sederhana.

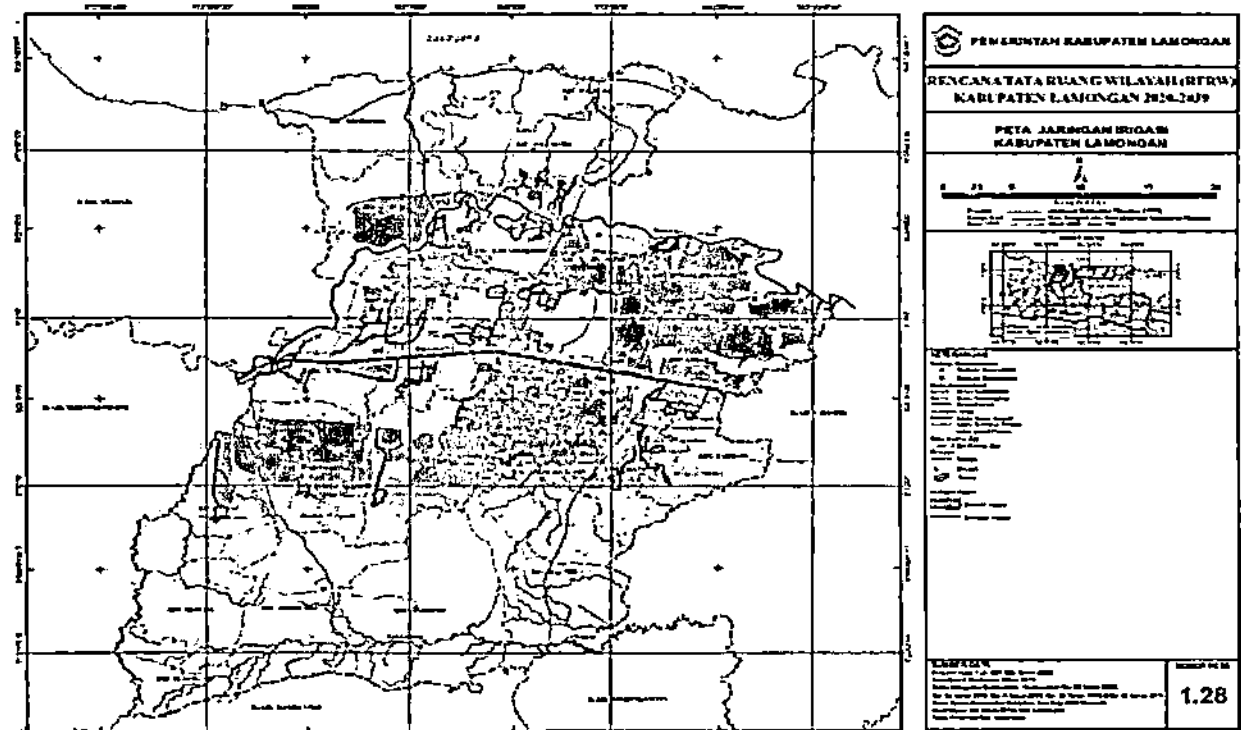
Seksi Pengairan Kuro merupakan wilayah dengan area irigasi terluas, mencapai 9.986 Ha, yang seluruhnya (100 persen) merupakan irigasi Sederhana. Sementara itu, Seksi Pengairan Pucuk juga memiliki area irigasi Sederhana yang signifikan (5.512 Ha), berkontribusi pada total luasnya yang mencapai 7.122 Ha. Sebaliknya, Seksi Pengairan Sumlaran memiliki area irigasi Teknis terbesar (6.555 Ha), menunjukkan adanya konsentrasi infrastruktur irigasi yang lebih maju di wilayah tersebut. Seksi Pengairan Lamongan dan Kedungpring secara dominan mengandalkan irigasi Setengah Teknis dan Teknis, dengan Kedungpring memiliki area Teknis terbesar kedua (4.513 Ha). Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat pengembangan dan kualitas infrastruktur irigasi antar seksi pengairan di Kabupaten Lamongan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh topografi, sumber air, dan prioritas pembangunan lokal.

Tabel 2.22. Luas Irigasi Sesuai dengan Seksi Pengairan Kabupaten Lamongan

No	Seksi Pengairan	Teknis	½ Teknis	Sederhana	Total
1	Seksi Pengairan Lamongan	754	5.344	0	6.098
2	Seksi Pengairan Kedungpring	4.513	1.818	0	6.331
3	Seksi Pengairan Pucuk	0	1.610	5.512	7.122
4	Seksi Pengairan Karanggeneng	3.102	677	2.576	6.355
5	Seksi Pengairan Sumlaran	6.555	36	334	6.925
6	Seksi Pengairan Laren	0	1.066	2.143	3.209
7	Seksi Pengairan Kuro	0	0	9.986	9.986
Jumlah		14.924	10.551	20.551	46.026

Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan

Gambar 2.43. Peta Jaringan Irigasi Kabupaten Lamongan



Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan

Data luas irigasi sangat relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan karena sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar

penduduk miskin di Lamongan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur irigasi secara langsung menentukan produktivitas pertanian. Sistem irigasi Teknis dan Setengah Teknis yang lebih andal (total 25.475 Ha) memungkinkan petani untuk menanam lebih dari satu kali setahun (indeks pertanaman tinggi), mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan keluarga petani. Konsentrasi irigasi Sederhana yang tinggi (20.551 Ha) di beberapa wilayah, terutama Kuro dan Pucuk, menunjukkan adanya peluang investasi untuk peningkatan infrastruktur agar pengairan menjadi lebih efisien dan terjamin. Peningkatan dari irigasi Sederhana ke Teknis dapat menstabilkan produksi pangan, menciptakan ketahanan pangan lokal, dan mengubah status ekonomi petani dari subsisten menjadi lebih makmur, yang merupakan kunci utama dalam strategi pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan.

2.4.8 Kondisi Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

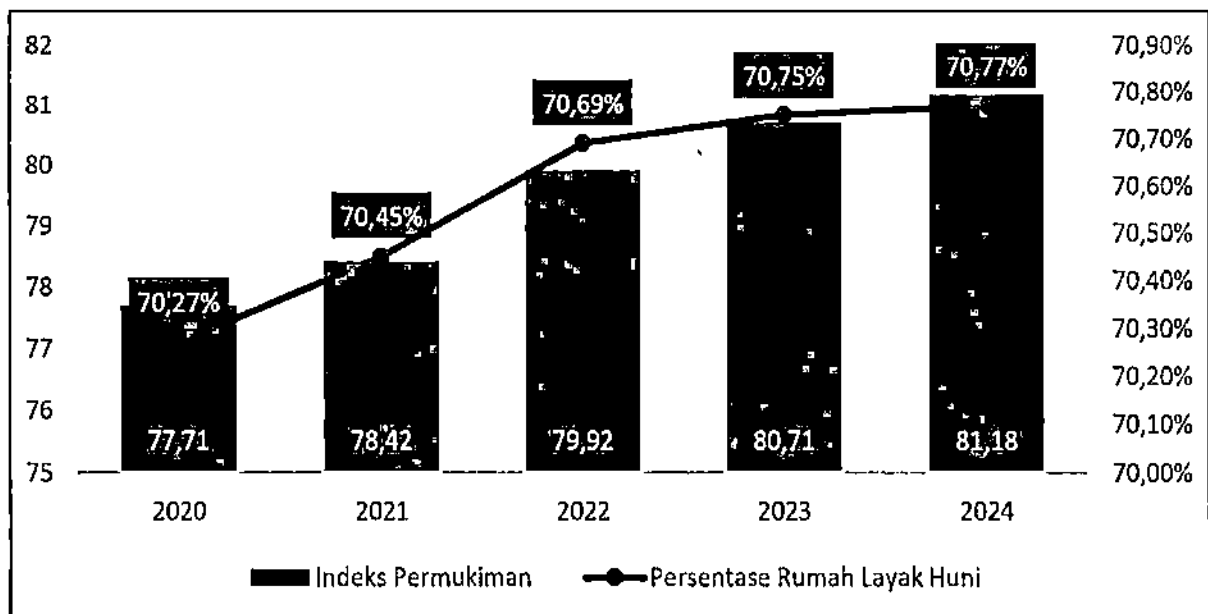
Penjelasan kondisi infrastruktur perumahan dan permukiman dalam RPKD sangat krusial karena kualitas hunian merupakan salah satu dimensi dasar dalam mengukur kemiskinan multidimensi. Akses terhadap rumah layak huni yang dilengkapi dengan sanitasi memadai dan air minum bersih tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga secara langsung memengaruhi derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat miskin. Dengan memetakan ketimpangan infrastruktur permukiman, Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan intervensi fisik dengan program sosial, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pengurangan beban pengeluaran melalui penyediaan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas.

Kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dapat dilihat dari Indeks Permukiman, yaitu ukuran komposit (gabungan) yang menilai kualitas suatu kawasan permukiman berdasarkan ketersediaan dan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dasar. Komponen yang dinilai mencakup:

1. jalan lingkungan, yaitu kualitas dan jangkauan jalan di dalam kawasan permukiman;
2. drainase lingkungan, yaitu ketersediaan dan fungsi sistem drainase untuk mencegah genangan;
3. pengelolaan air limbah, yaitu sistem pembuangan air limbah domestik;
4. pengelolaan persampahan, yaitu ketersediaan tempat sampah dan layanan pengangkutan; dan
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu ketersediaan taman atau area hijau di lingkungan.

Data di bawah ini menunjukkan tren persentase Rumah Layak Huni dan Indeks Permukiman di Kabupaten Lamongan untuk periode tahun 2020–2024. Grafik menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif yang konsisten pada kedua indikator tersebut setiap tahunnya. Indeks Permukiman (batang hijau) meningkat dari angka 77,71 pada tahun 2020 menjadi 81,18 pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, Persentase Rumah Layak Huni (garis merah) juga mengalami kenaikan dari 70,27 persen menjadi 70,77 persen pada periode yang sama. Kenaikan yang selaras ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Lamongan berjalan beriringan dengan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Gambar 2.44. Persentase Rumah Layak Huni dan Indeks Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan, 2025

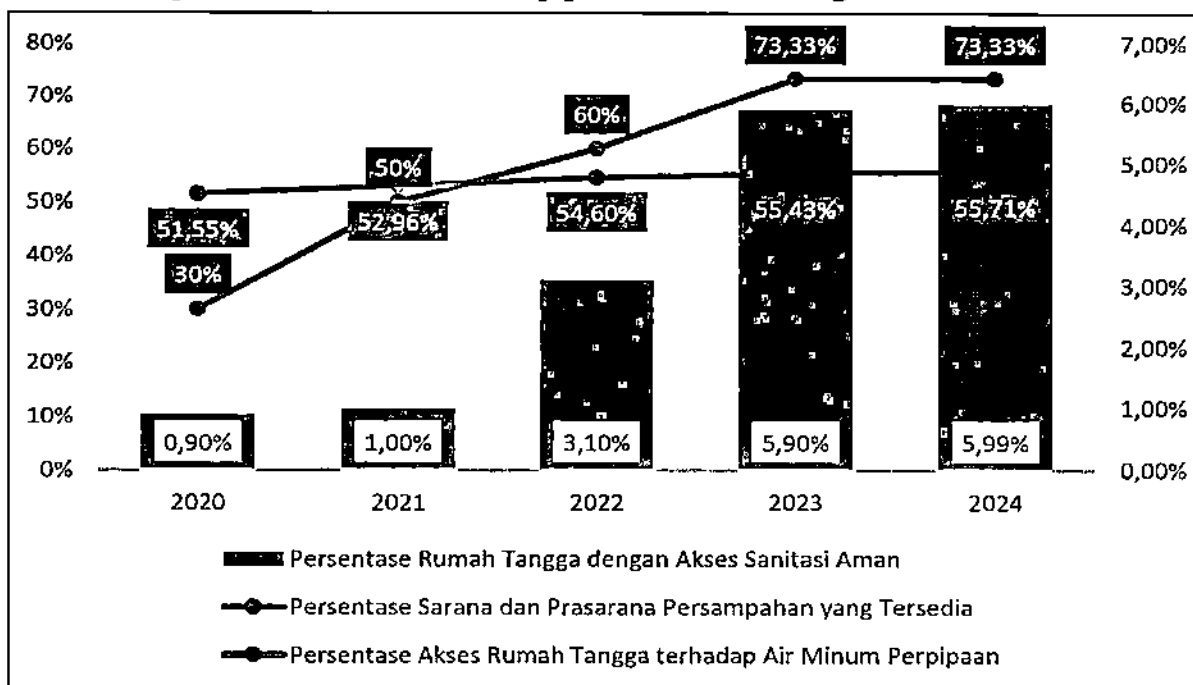
Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan integrasi program pembangunan infrastruktur dasar dalam kerangka RPKD. Kenaikan Indeks Permukiman yang cukup signifikan menunjukkan perbaikan pada aspek-aspek pendukung lingkungan seperti akses air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan. Sementara itu, pertumbuhan pada persentase Rumah Layak Huni memberikan sinyal positif bahwa program stimulan perumahan seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah menjangkau masyarakat secara bertahap, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan dari dimensi perumahan.

Namun jika dicermati lebih lanjut, pertumbuhan Persentase Rumah Layak Huni cenderung melandai pada dua tahun terakhir (2023-2024) dibandingkan lonjakan yang terjadi antara 2021 ke 2022. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi atau inovasi pembiayaan perumahan yang lebih masif untuk mengejar target yang lebih tinggi. Keberlanjutan tren positif sangat penting karena ketersediaan hunian yang sehat merupakan fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup penduduk, sehingga mereka memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap risiko kemiskinan. Selain itu juga diperlukan strategi yang lebih agresif dalam penyediaan perumahan yang terjangkau dan percepatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni guna memastikan lebih banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak.

Selanjutnya adalah terkait akses sanitasi, persampahan, dan air minum perpipaan. Data di Lamongan menunjukkan kecenderungannya selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Lonjakan paling mencolok terlihat pada persentase sarana persampahan yang melompat dari 30 persen di tahun 2020 menjadi 73,33 persen di tahun 2024, serta peningkatan akses sanitasi aman yang tumbuh dari angka di bawah 0,90 persen hingga mencapai 5,99 persen. Pencapaian ini mengindikasikan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan lingkungan, yang merupakan

fondasi vital dalam RPKD untuk mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat miskin sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Gambar 2.45. Kondisi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi, Persampahan, dan Air Minum Perpipaan di Kab Lamongan Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PRKPCK Kabupaten Lamongan, 2025

Peningkatan kinerja mencerminkan adanya upaya intensif dalam pengembangan sistem sanitasi berbasis masyarakat serta pembangunan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Sistem pengelolaan sampah, baik dalam bentuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sistem pengangkutan, maupun pengolahan akhir juga mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk persentase akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan yang meningkat menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperluas cakupan layanan air bersih sebagai kebutuhan dasar.

Penyediaan air minum menjadi salah satu indikator infrastruktur perumahan yang berkualitas. Pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat masih dirasa kurang, karena baru 55,71 persen masyarakat Lamongan yang terlayani akses air minum melalui sistem perpipaan. Ketersediaan air minum perpipaan tercermin melalui indikator Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan, yaitu rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan dengan beberapa kriteria, yaitu: (i) rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; (ii) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); dan (iii) tersedia setiap saat dibutuhkan.

2.4.9 Kondisi Infrastruktur Pelayanan Publik

Gambaran umum mengenai kondisi infrastruktur pelayanan publik, meliputi sektor pendidikan (sekolah), kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit), dan fasilitas ekonomi (pasar, perbankan, dll) memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas hidup dan daya saing daerah. Data ini sangat krusial karena menunjukkan distribusi akses dan kualitas layanan yang diterima masyarakat di berbagai wilayah, yang secara langsung berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan mengetahui lokasi dan kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan, dapat dirumuskan kebijakan pemerataan, memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan dasar. Sementara itu, kondisi infrastruktur ekonomi (pasar, perbankan, dll) sangat menentukan kelancaran kegiatan ekonomi, daya tarik investasi, dan efisiensi rantai pasok lokal, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Lamongan tahun 2024 menunjukkan ketersediaan yang cukup memadai di berbagai sektor. Pada sektor pendidikan, terdapat 6.960 unit TK atau setingkat, 1.177 SD, 345 SMP, dan 234 SMA, yang mencerminkan pemerataan sarana pendidikan hingga ke tingkat menengah atas. Di bidang kesehatan, tersedia 19 rumah sakit, 65 poliklinik, 32 puskesmas, 109 puskesmas pembantu, serta 161 apotek, yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. Sementara itu, pada sektor ekonomi, Kabupaten Lamongan memiliki 150 pasar tradisional, 15 pasar kota atau negeri, 1 mall/plaza, serta 111 bank dengan 15 kantor bank, menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis dan tersebar baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 2.23. Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Fasilitas Pendidikan		Fasilitas Kesehatan		Fasilitas Ekonomi	
TK Setingkat	6960	Rumah Sakit	19	Pasar Tradisional	150
SD Setingkat	1177	Poliklinik	65	Pasar Kota/Negeri	15
SMP Setingkat	345	Puskesmas	32	Mall/Plaza	1
SMA Setingkat	234	Puskesmas Pembantu	109	Bank	111
		Apotek	161	Kantor Bank	15

Sumber: BPS, 2025

Data di atas menciptakan kondisi eksisting, peluang dan tantangan relevansinya bagi penanggulangan kemiskinan di Lamongan, antara lain:

1. Sektor Pendidikan

- Ketersediaan yang luas, dengan 6.960 unit TK, 1.177 SD, 345 SMP, dan 234 SMA, menunjukkan pondasi pendidikan yang kuat dari tingkat pra-sekolah hingga menengah atas. Rasio unit sekolah dasar dan menengah yang tinggi dibandingkan dengan TK (meskipun TK lebih banyak secara jumlah) mengindikasikan upaya pemerataan akses pendidikan wajib belajar di seluruh wilayah Lamongan.
- Ketersediaan sarana pendidikan yang luas dari TK hingga SMA menciptakan peluang besar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Akses yang merata memungkinkan anak dari keluarga miskin untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar dan menengah, yang merupakan prasyarat utama untuk mendapatkan pekerjaan formal dan berpendapatan layak di masa depan.
- Meski demikian, tantangannya terletak pada kualitas pendidikan (mutu guru, fasilitas laboratorium/praktik) dan biaya non-formal (seragam, transportasi, buku) yang masih memberatkan keluarga miskin. Tingginya angka putus sekolah di tingkat menengah seringkali disebabkan oleh kebutuhan keluarga akan tenaga kerja, sehingga dibutuhkan program beasiswa yang lebih ketat sasarannya dan sekolah kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

2. Sektor Kesehatan

- a. Infrastruktur kesehatan juga tergolong lengkap, ditandai dengan 19 rumah sakit sebagai fasilitas rujukan utama dan 32 puskesmas yang didukung oleh 109 puskesmas pembantu (pustu). Distribusi pustu yang banyak ini sangat penting karena memastikan pelayanan kesehatan primer dapat dijangkau oleh penduduk di daerah pedesaan atau terpencil, yang merupakan kunci dalam mencapai target kesehatan masyarakat.
- b. Distribusi fasilitas primer yang cukup, terutama 109 Puskesmas Pembantu (Pustu), menjadi peluang untuk memastikan kesehatan masyarakat miskin dapat tertangani sejak dini. Kesehatan yang baik, khususnya nutrisi dan pencegahan stunting, akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi biaya berobat di masa depan, sehingga pengeluaran keluarga miskin dapat dialihkan untuk kebutuhan lain.
- c. Tantangannya adalah akses finansial, meskipun ada BPJS, jaminan ketersediaan obat dan kualitas layanan di Pustu yang lokasinya jauh masih menjadi kendala. Selain itu, rasio tenaga kesehatan (dokter/bidan) yang memadai di daerah terpencil seringkali menjadi masalah, yang dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama.

3. Sektor Ekonomi

- a. Aktivitas ekonomi terlihat dinamis dan inklusif. Keberadaan 150 pasar tradisional menunjukkan dukungan kuat terhadap ekonomi rakyat dan UMKM yang tersebar luas. Sementara itu, 15 pasar kota/negeri dan keberadaan 1 mall/plaza mencerminkan adanya sentra perdagangan modern. Ketersediaan 111 bank dengan 15 kantor bank menandakan aksesibilitas layanan keuangan yang cukup baik, mendukung transaksi, modal kerja, dan stabilitas perbankan di daerah.
- b. Banyaknya 150 pasar tradisional adalah peluang besar untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan UMKM, yang seringkali menjadi jalur keluar dari kemiskinan bagi ibu rumah tangga dan kelompok rentan lainnya. Ketersediaan 111 bank juga menjadi peluang untuk inklusi keuangan, memfasilitasi akses modal usaha, kredit mikro, dan tabungan bagi pelaku usaha kecil.
- c. Tantangannya adalah modernisasi dan revitalisasi pasar tradisional agar tetap kompetitif dan higienis. Selain itu, masih ada kesenjangan digital yang menghambat UMKM kecil dalam mengakses platform pemasaran modern. Akses perbankan yang terpusat di kantor bank (15 kantor) mungkin belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin di desa terpencil, sehingga diperlukan inovasi layanan keuangan digital atau agen perbankan desa.

Berdasarkan data di atas, ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang masif di Kabupaten Lamongan harus dipandang sebagai modalitas utama dalam strategi pengentasan kemiskinan yang berpusat pada penguatan kapasitas individu (SDM). Integrasi antara tingginya jumlah sarana pendidikan (6.960 TK hingga 234 SMA) dan infrastruktur kesehatan primer (109 Pustu) memberikan peluang bagi RPKD untuk menciptakan program perlindungan sosial yang lebih holistik. Sebagai contoh, sekolah-sekolah dan Pustu dapat dijadikan titik simpul penyaluran intervensi tambahan, seperti

program makanan tambahan untuk anak sekolah dari keluarga miskin guna menekan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar. Dengan demikian, fasilitas fisik yang ada tidak hanya berfungsi sebagai gedung layanan, tetapi juga sebagai pusat jaring pengaman sosial yang memastikan penduduk miskin mendapatkan akses ganda pada kesehatan dan pendidikan secara simultan.

Selain itu, keberadaan 150 pasar tradisional sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan menuntut adanya kebijakan RPKD yang fokus pada penguatan ekosistem kewirausahaan di tingkat lokal. Pasar tradisional harus diposisikan sebagai "inkubator ekonomi" bagi kelompok rentan, dimana Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi zonasi khusus atau keringanan retribusi bagi pedagang kecil yang masuk dalam data desil kemiskinan. Relevansinya dengan infrastruktur perbankan (111 bank) adalah perlunya dorongan skema pembiayaan mikro yang terhubung langsung dengan aktivitas di pasar-pasar tersebut. Hal ini penting untuk memutus ketergantungan masyarakat miskin terhadap akses permodalan informal yang tidak resmi (rentenir), sehingga margin keuntungan yang didapat dari berdagang benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

Terakhir, implikasi strategis dari sebaran infrastruktur ini adalah urgensi digitalisasi layanan publik untuk mengatasi kendala geografis di wilayah Lamongan yang luas. Mengingat hanya tersedia 15 kantor bank pusat untuk melayani populasi yang besar, RPKD perlu mendorong perluasan agen perbankan dan layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) yang berbasis di Pustu atau balai desa. Transformasi layanan berbasis digital akan mengurangi beban biaya transportasi yang seringkali menjadi hambatan utama bagi warga miskin dalam menjangkau fasilitas kesehatan rujukan atau kantor perbankan di pusat kota. Dengan menyatukan ketersediaan fisik infrastruktur dan kemudahan akses digital, Kabupaten Lamongan dapat mempercepat perwujudan ekonomi inklusif yang mampu menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

2.4.10 Critical Point Kondisi Infrastruktur Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan ragam penjelasan kondisi infrastruktur di atas, maka dapat disusun beberapa critical point pada masing-masing jenis infrastruktur yang relevan dengan penyusunan RPKD Lamongan, yaitu:

1. Posisi Infrastruktur Lamongan dalam Kawasan Regional

- a. Temuan paling krusial dari posisi infrastruktur Lamongan dalam regional Jawa Timur adalah penegasan posisi Lamongan sebagai bagian dari Kawasan *Central Business District* (CBD) Jawa Timur. Status ini menunjukkan bahwa Lamongan tidak hanya dilihat sebagai kabupaten agraris, melainkan telah diposisikan sebagai simpul utama dalam pengembangan Perdagangan, Industri, dan Logistik regional. Posisi Lamongan diperkuat dengan konektivitas logistik yang langsung ke Terminal DEPO/Pusat Distribusi di Tanjung Perak/ Perluasan - Kali Lamong. Relevansinya bagi RPKD adalah bahwa Lamongan memiliki basis infrastruktur yang kuat untuk menarik investasi skala besar dan melaksanakan strategi *Job-Creating Growth*, memanfaatkan kedekatan dengan pelabuhan utama untuk menghemat biaya logistik, yang merupakan insentif bagi investor.

- b. Kondisi infrastruktur mengidentifikasi keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah eksis di Lamongan dan area sekitarnya. Keberadaan klaster-klaster ini menjadi temuan penting karena memberikan target lokasi yang jelas bagi penanggulangan kemiskinan untuk memfokuskan program pembangunan ekonomi. Klaster tersebut adalah tempat dimana strategi peningkatan PDRB per kapita dan pengurangan TPT akan diimplementasikan melalui penyerapan tenaga kerja. Fokus investasi infrastruktur RPKD harus diarahkan untuk mendukung pengembangan klaster eksisting, termasuk penyediaan utilitas dan akses tenaga kerja, untuk memaksimalkan dampak ekonomi daerah.
 - c. Infrastruktur di Lamongan menunjukkan fokus yang kuat pada konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi (lokal dan nasional) dan tujuan untuk peningkatan konektivitas nasional. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pembangunan infrastruktur Lamongan bersifat *outward-looking* (berorientasi ke luar). Konsekuensinya, penanggulangan kemiskinan harus menyadari tantangan kesenjangan internal. Artinya, infrastruktur yang kuat secara eksternal harus diimbangi dengan perbaikan akses infrastruktur dari kantong-kantong kemiskinan (terutama Lamongan Selatan) menuju klaster industri yang berada di utara. Tanpa perbaikan konektivitas lokal, manfaat ekonomi dari posisi strategis regional Lamongan akan terpusat, dan penduduk miskin akan tetap terisolasi dari peluang kerja.
 - d. Prioritas harus diberikan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan dari desa miskin ke pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta jaringan air bersih dan sanitasi yang tahan terhadap bencana (banjir/kekeringan). Pembangunan infrastruktur dasar sangat vital untuk mengurangi kerentanan non-ekonomi (kesehatan dan pendidikan) dan mendukung modernisasi pertanian dengan menyediakan akses irigasi yang lebih baik, sehingga mendukung keberlanjutan pendapatan keluarga miskin.
2. Infrastruktur Transportasi
- a. Masih adanya celah layanan angkutan antar pusat kecamatan menghambat distribusi barang dari desa ke kota. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam RPKD harus ada pengembangan trayek perdesaan yang difokuskan untuk menghubungkan kawasan Agropolitan/ Minapolitan ke Koridor Ekonomi Surabaya-Gresik guna meng-efisienkan biaya logistik petani dan nelayan. Efisiensi biaya logistik merupakan faktor penentu utama dalam menjaga margin keuntungan petani dan nelayan skala kecil. Saat ini, tingginya biaya transportasi akibat minimnya layanan angkutan umum perdesaan memaksa produsen kecil bergantung pada perantara (tengkulak) yang memiliki akses transportasi mandiri. Dalam RPKD, pengembangan trayek ini harus dipandang sebagai upaya demokratisasi akses pasar. Dengan terkoneksi sentra produksi ke Koridor Ekonomi Surabaya-Gresik, hambatan geografis dapat dikurangi, sehingga mobilitas tenaga kerja dan hasil bumi menjadi lebih murah. Kondisi demikian secara langsung akan meningkatkan daya saing produk lokal dan mencegah

terjadinya *lost opportunity* akibat rusaknya komoditas yang tidak segera terserap pasar karena kendala angkutan.

- b. Keberadaan PPN Brondong dan Lamongan Shorebase adalah aset kunci ekspor. RPKD harus mengakomodir pentingnya pelabuhan yang harus dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah hasil tangkapan nelayan miskin, bukan hanya sebagai jalur transit kargo industri besar. Transformasi peran pelabuhan dari sekadar titik transit menjadi hub ekonomi inklusif sangat krusial untuk strategi *Job-Creating Growth*. RPKD perlu mendorong pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan pelabuhan, seperti Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan gudang pendingin (*cold storage*) yang dapat diakses oleh koperasi nelayan. Tanpa optimalisasi fungsi nilai tambah ini, keberadaan pelabuhan besar hanya akan menciptakan pertumbuhan yang bersifat *enclave* (eksklusif bagi industri besar). Dengan mengintegrasikan nelayan lokal ke dalam rantai pasok ekspor melalui pelabuhan tersebut, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa aktivitas maritim skala internasional memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) berupa pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan riil bagi rumah tangga nelayan.

3. Infrastruktur Kelistrikan

- a. Poin kritis infrastruktur kelistrikan terletak pada peran ganda listrik sebagai mesin pertumbuhan industri sekaligus jaring pengaman resiliensi masyarakat miskin (*Pro-Poor Resilience*). Ketersediaan total kapasitas terpasang sebesar 165.600.995 di Lamongan harus dipandang bukan sekadar angka layanan rumah tangga, melainkan sebagai prasyarat transformasi ekonomi dari sektor primer ke industri pengolahan. Relevansinya bagi RPKD adalah bahwa ketersediaan listrik yang stabil di sektor pertanian dan perikanan seperti untuk pompa irigasi listrik dan *cold storage* dapat memangkas biaya operasional petani dan nelayan secara drastis, sekaligus mencegah kerusakan hasil panen yang selama ini menjadi salah satu pemicu jatuhnya masyarakat ke jurang kemiskinan.
- b. Berikutnya adalah urgensi penyediaan kapasitas distribusi yang bersifat melampaui kebutuhan saat ini (*oversupply siap pakai*) di koridor ekonomi strategis seperti Surabaya-Gresik-Lamongan-Babat (Gelangban). Kepastian pasokan energi pada golongan tarif I3 dan I4 menjadi faktor penentu utama dalam menarik investasi padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Bagi strategi *Job-Creating Growth* dalam RPKD, keandalan listrik ini merupakan layanan prima bagi investor industri pengolahan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja formal bagi penduduk miskin sehingga mereka memiliki pendapatan tetap yang lebih stabil dibandingkan sektor informal.
- c. Poin kritis berikutnya berkaitan dengan pemetaan celah (*gap*) antara proyeksi target pertumbuhan industri sebesar 7,66 persen dengan realitas kapasitas terpasang saat ini. RPKD harus memastikan bahwa perluasan jaringan listrik tidak hanya berfokus pada pusat perkotaan, tetapi menjangkau titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan guna mendukung modernisasi UMKM dan unit pengolahan pasca-panen. Tanpa perencanaan distribusi yang agresif dan pro

investasi, tingginya angka elektrifikasi rumah tangga hanya akan menjadi indikator konsumtif, sementara potensi listrik sebagai alat produksi untuk meningkatkan PDRB per kapita dan mengangkat derajat ekonomi masyarakat rentan akan tetap tidak teroptimalkan.

4. Infrastruktur Air Minum

- a. Kondisi infrastruktur air minum di Lamongan saat ini terjadi dikotomi akses antara sistem perpipaan dan non-perpipaan yang menciptakan kesenjangan resiliensi bagi masyarakat miskin. Ketergantungan penduduk pada sumber non-perpipaan seperti sungai dan sumur terbuka di wilayah Lamongan bukan sekedar masalah teknis ketersediaan air, melainkan beban ekonomi dan kesehatan yang sistemik. Dalam kerangka RPKD, ketergantungan ini adalah titik rawan yang memperpetuasi kemiskinan. Air yang tidak terjamin kualitasnya meningkatkan prevalensi penyakit infeksi yang secara langsung berkorelasi dengan angka stunting dan tingginya belanja kesehatan rumah tangga. Oleh karena itu, percepatan konversi dari sumber air tidak terlindungi ke jaringan perpipaan (PDAM/HIPPAM) harus dipandang sebagai intervensi kesehatan masyarakat yang mendesak, bukan sekedar pembangunan fisik.
- b. Poin kritis berikutnya adalah dengan keberlanjutan operasional dan kelembagaan HIPPAM di tingkat desa. Meskipun infrastruktur perpipaan telah dibangun, efektivitasnya dalam menanggulangi kemiskinan sangat bergantung pada tata kelola tarif yang *pro-poor* dan kemampuan manajerial lokal. Titik kritisnya adalah risiko kegagalan sistem akibat kurangnya dana pemeliharaan atau tarif yang tidak terjangkau bagi kelompok desil bawah. Penanggulangan kemiskinan harus memastikan bahwa bantuan infrastruktur diirngi dengan skema subsidi Sambungan Rumah (SR) dan penguatan kapasitas pengelola desa agar layanan tetap stabil. Tanpa jaminan keberlanjutan ini, investasi infrastruktur hanya akan menjadi aset mangkrak yang gagal memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat rentan, terutama saat menghadapi tantangan perubahan iklim dan kekeringan musiman di Lamongan.
- c. Berikutnya adalah integrasi digital dalam pengawasan kualitas dan harga untuk menjamin keadilan akses. Transparansi dalam distribusi air merupakan instrumen akuntabilitas yang memastikan bahwa regulasi tarif progresif benar-benar dinikmati oleh keluarga miskin. Dengan mengadopsi sistem pelaporan berbasis komunitas, Pemerintah Daerah dapat memitigasi praktik pungutan liar atau ketidakstabilan pasokan yang sering kali paling berdampak pada warga di ujung jaringan. Dalam konteks RPKD, kedaulatan akses air bersih yang terjangkau adalah kunci untuk membebaskan waktu produktif masyarakat, khususnya perempuan dari keluarga miskin yang sebelumnya habis untuk urusan pemenuhan air, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.

5. Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi

- a. Meskipun beberapa kecamatan seperti Pucuk, Turi, dan Lamongan telah mencapai status *Open Defecation Free* (ODF), fakta bahwa 9,5 persen atau sekitar 30.201

Kepala Keluarga (KK) masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) merupakan indikator kritis kesenjangan infrastruktur yang harus segera ditangani dalam strategi RPKD. Angka BABS ini mengancam keberhasilan ODF secara keseluruhan dan menjadi sumber utama penyakit menular, pencemaran air, dan peningkatan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin. Keragaman sarana pembuangan air limbah, mulai dari cubluk hingga MCK komunal dan IPAL skala kecil, menunjukkan bahwa Lamongan memerlukan strategi yang lebih terfokus untuk mencapai sanitasi aman. Strategi yang disusun harus mengarahkan program subsidi stimulan jamban sehat dan mempercepat pembangunan/rehabilitasi MCK komunal dan jamban bersama, dengan target utama pada 30.201 KK yang belum memiliki jamban.

- b. Kondisi sarana pengolahan air limbah Lamongan, seperti IPAL yang masih terpusat dan berskala kecil (IPAL terbesar hanya melayani 162 KK di Kecamatan Tikung), menunjukkan bahwa skala cakupan pelayanan sanitasi masih sangat terbatas dan belum standar. Meskipun sarana yang ada diklaim berfungsi dengan baik dan dipelihara oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), keterbatasan cakupan ini berarti air limbah dari sebagian besar penduduk masih tidak diolah secara memadai sebelum dibuang ke lingkungan, yang berisiko mencemari sumber air baku. Strategi RPKD harus diarahkan untuk meningkatkan skala dan standar IPAL komunal agar mampu melayani cakupan yang jauh lebih luas, terutama di kawasan padat penduduk dan industri. Peningkatan IPAL bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah *Pro-Poor Resilience* karena menjamin lingkungan yang sehat dan layak huni, yang merupakan hak dasar bagi masyarakat miskin.

6. Infrastruktur Drainase

- a. Sistem drainase di Kabupaten Lamongan yang bertumpu pada sungai sebagai drainase primer dan saluran sisi jalan sebagai drainase sekunder menunjukkan keterbatasan kapasitas dan risiko tinggi terhadap banjir periodik. Kondisi geografis Lamongan yang relatif datar dan memiliki banyak cekungan/rawa memperburuk masalah ini, menyebabkan genangan dapat berlangsung lama, bahkan hingga tiga bulan pada musim kemarau di beberapa wilayah. Banjir dan genangan yang berkepanjangan secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi produktif, merusak infrastruktur, dan menyebabkan kerugian panen, sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga miskin dan menahan potensi pertumbuhan di sektor Agropolitan. Strategi penanggulangan kemiskinan harus menjadikan normalisasi sungai primer dan pembangunan sistem polder atau *retention pond* di area cekungan sebagai investasi prioritas untuk memitigasi risiko bencana hidrologi.
- b. Drainase yang tidak memadai di Lamongan tidak hanya masalah banjir, tetapi juga beririsan dengan masalah sanitasi dan kesehatan masyarakat. Genangan air, terutama yang bercampur dengan air limbah dari sistem sanitasi yang belum standar, menjadi tempat ideal bagi penyebaran penyakit menular, yang dampaknya paling terasa pada kelompok miskin. Oleh karena itu, strategi RPKD

harus mengintegrasikan perbaikan jaringan drainase sekunder, khususnya yang berada di sisi jalan di kawasan padat penduduk dengan program sanitasi (seperti penuntasan BABS dan pembangunan IPAL komunal). Peningkatan kualitas drainase akan membantu mengurangi pencemaran lingkungan, mendukung penciptaan lingkungan yang sehat dan layak huni, dan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran mereka untuk biaya pengobatan.

7. Infrastruktur Jaringan Irigasi

- a. Permasalahan selama ini terletak pada ketimpangan kualitas infra-struktur irigasi antar wilayah yang berdampak langsung pada tingkat kerentanan petani. Data menunjukkan bahwa hampir 45 persen (20.551 Ha) lahan di Lamongan masih bergantung pada irigasi Sederhana, dengan konsentrasi ekstrem di Seksi Pengairan Kuro yang 100 persen wilayahnya belum tersentuh irigasi teknis. Dalam konteks RPKD, wilayah dengan irigasi sederhana ini merupakan "kantong risiko" kemiskinan yang tinggi. Tanpa adanya peningkatan status dari irigasi sederhana menjadi setengah teknis atau teknis, petani di wilayah tersebut akan tetap terjebak dalam pola tanam yang volatil dan sangat bergantung pada cuaca, yang menjelaskan mengapa pertumbuhan sektor pertanian Lamongan stagnan di angka 0,11 persen pada 2024.
- b. Poin kritis kedua adalah mengenai urgensi modernisasi irigasi untuk mendukung strategi *Pro-Poor Resilience*. Luasnya irigasi teknis di Seksi Sumlaran (6.555 Ha) seharusnya menjadi standar acuan untuk mendorong Indeks Pertanian (IP) yang lebih tinggi di wilayah lain. Titik kritisnya adalah bagaimana RPKD dapat mengalokasikan investasi pada pembangunan jaringan tersier dan normalisasi pintu air agar air dari irigasi primer dapat terdistribusi secara adil hingga ke lahan milik petani gurem. Investasi pada irigasi adalah bentuk perlindungan sosial paling efektif bagi masyarakat perdesaan, karena stabilitas pasokan air berarti stabilitas pendapatan, yang secara otomatis mengurangi potensi penduduk rentan jatuh ke kategori kemiskinan ekstrem saat terjadi bencana kekeringan atau anomali iklim.
- c. Titik kritis berikutnya adalah integrasi antara infrastruktur irigasi dengan sektor pengolahan pascapanen. Peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari perbaikan jaringan irigasi di wilayah seperti Karanggeneng dan Kedungpring harus diimbangi dengan akses listrik (seperti yang dibahas sebelumnya) untuk pompa irigasi dan mesin pengolahan. Relevansi strategis bagi RPKD adalah mengubah wajah pertanian Lamongan dari sektor subsisten menjadi sektor agribisnis yang kompetitif. Jika irigasi berhasil ditingkatkan efisiensinya, maka biaya produksi petani akan turun, margin keuntungan meningkat, dan ketergantungan terhadap bantuan sosial tunai dapat berkurang karena masyarakat telah memiliki ketahanan ekonomi berbasis lahan yang mandiri.

8. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

- a. Implikasi utama dari kondisi infrastruktur perumahan dan permukiman bagi RPKD adalah penegasan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Lamongan harus bergeser dari sekadar bantuan karitatif (bantuan) menjadi intervensi struktural melalui penyediaan lingkungan hidup yang sehat. Peningkatan Indeks Permukiman yang mencapai angka 81,18 dan ketersediaan sarana persampahan sebesar 73,33 persen pada tahun 2024 merupakan modal sosial ekonomi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin harus dilakukan secara preventif, dengan lingkungan yang lebih bersih dan rumah yang lebih layak. Diharapkan risiko penyakit menular akibat sanitasi buruk dapat ditekan, sehingga alokasi pendapatan rumah tangga miskin tidak habis tersedot untuk biaya pengobatan dan dapat dialihkan untuk kebutuhan produktif lainnya.

- b. Namun, rendahnya angka akses sanitasi aman yang baru mencapai 5,99 persen dan cakupan air minum perpipaan yang masih di angka 55,71 persen menjadi catatan kritis bagi arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan. Relevansinya bagi strategi daerah dalam RPKD adalah perlunya sinkronisasi yang lebih tajam antara lokasi pembangunan jaringan perpipaan dan sanitasi dengan peta kantong kemiskinan. Tanpa adanya percepatan pada sektor ini, masyarakat miskin akan tetap terjebak dalam biaya tinggi untuk memperoleh air bersih non-perpipaan, yang secara langsung menghambat upaya peningkatan standar hidup layak sebagaimana yang diamanatkan dalam indikator kemiskinan multidimensi.
 - c. Kondisi tersebut menuntut strategi RPKD untuk melahirkan inovasi pembiayaan yang lebih agresif, mengingat pertumbuhan rumah layak huni mulai melandai dalam dua tahun terakhir. Implikasinya, Pemerintah Daerah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, misalnya melalui skema CSR atau kemitraan dengan sektor swasta untuk mengakselerasi program rehabilitasi RTLH dan penyediaan fasilitas air minum perpipaan di wilayah yang sulit terjangkau. Fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar ini bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan merupakan strategi investasi manusia untuk memastikan penduduk rentan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi guncangan ekonomi di masa depan.
9. Infrastruktur Pelayanan Publik
- a. Kondisi infrastruktur pelayanan publik di Lamongan saat ini adalah adanya paradoks kuantitas versus aksesibilitas fungsional. Meskipun jumlah fisik sarana pendidikan dan kesehatan sangat masif (seperti 6.960 TK dan 109 Pustu), titik kritis yang harus diperbaiki adalah sejauh mana fasilitas tersebut mampu menghilangkan hambatan biaya non-formal bagi keluarga miskin. Ketersediaan gedung sekolah tidak otomatis menjamin keberlanjutan pendidikan jika biaya transportasi dan seragam tetap menjadi beban. Begitu pula dengan Puskesmas Pembantu (Pustu), tanpa jaminan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan yang stabil di daerah terpencil, infrastruktur tersebut hanya akan menjadi aset fisik yang pasif. Oleh karena itu, fokus RPKD harus bergeser dari pembangunan fisik ke arah peme-rataan standar kualitas layanan agar penduduk miskin mendapatkan mutu layanan yang setara dengan penduduk perkotaan.

- b. Berikutnya adalah berkaitan dengan optimalisasi pasar tradisional sebagai basis ketahanan ekonomi inklusif. Keberadaan 150 pasar tradisional merupakan aset strategis, namun titik kritisnya adalah kerentanan pelaku usaha mikro di dalamnya terhadap persaingan modern dan jeratan modal informal. Dalam strategi RPKD, pasar tidak boleh hanya dianggap sebagai tempat transaksi, melainkan harus diintervensi sebagai pusat inklusi keuangan. Relevansinya dengan 111 bank yang ada adalah bagaimana menciptakan kanal kredit mikro yang mudah dan cepat di lokasi pasar. Jika akses modal formal tidak mendekat ke pasar tradisional, maka infrastruktur ekonomi ini gagal menjadi mesin pengangkat kesejahteraan, dan pedagang kecil akan tetap terjebak dalam siklus utang yang menghambat akumulasi modal untuk keluar dari kemiskinan.

Titik kritis berikutnya adalah digitalisasi sebagai solusi atas kendala geografis dan efisiensi biaya. Dengan hanya 15 kantor pusat bank untuk melayani seluruh kabupaten, hambatan utama masyarakat miskin adalah biaya akses (ongkos dan waktu tempuh). Implikasi kritis bagi RPKD adalah urgensi mentransformasi Pustu dan pasar menjadi titik akses digital, baik untuk *telemedicine* maupun agen perbankan desa. Jika digitalisasi layanan publik tidak segera diakselerasi, maka sebaran infrastruktur yang luas tetap akan menyisakan "biaya tinggi" bagi masyarakat rentan. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan yang akan dituangkan dalam strategi RPKD akan sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan infrastruktur fisik yang sudah ada dengan layanan berbasis teknologi untuk memangkas rantai birokrasi dan biaya perjalanan masyarakat.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Bab III mengenai Profil Kemiskinan Daerah berfungsi sebagai instrumen diagnosis untuk membedah anatomi kemiskinan di Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Melalui analisis data makro dan mikro, bab ini menyajikan gambaran objektif mengenai tren perkembangan, sebaran keruangan (spasial), hingga karakteristik sosial ekonomi penduduk miskin yang menjadi sasaran intervensi. Pemahaman yang mendalam terhadap profil ini sangat krusial agar strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat umum, tetapi mampu menysasar akar permasalahan secara presisi (targeted), efektif, dan selaras dengan dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Lamongan.

3.1. KONDISI UMUM KEMISKINAN DAERAH

Kondisi kemiskinan di Lamongan dapat dilihat melalui berbagai indikator yang mencerminkan baik jumlah maupun derajat kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan batas minimum pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara jumlah dan persentase penduduk miskin menggambarkan beban sosial yang harus ditangani Pemerintah Daerah. Indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) memberikan informasi lebih rinci mengenai sejauh mana penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan diantara mereka.

Analisis terhadap indikator-indikator ini diambil selama periode 2014–2024. Penggunaan rentang data tahun 2014–2024 bertujuan untuk menangkap dinamika kemiskinan dalam jangka panjang (long-term trend), sehingga Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan lintas periode kepemimpinan serta memahami daya tahan ekonomi masyarakat terhadap guncangan besar seperti pandemi COVID-19. Selain itu, periode sepuluh tahun ini memberikan basis data yang cukup kuat untuk membedah pola kemiskinan struktural di Lamongan, yang sangat penting bagi akurasi proyeksi dan sasaran intervensi dalam penyusunan RPKD ke depan.

Analisis data secara umum menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten, meskipun sempat terganggu oleh pandemi COVID-19. Selain itu, periode tersebut juga menunjukkan bahwa Lamongan mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata sambil tetap mengikuti pola perkembangan kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pemahaman menyeluruh terhadap profil kemiskinan ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

3.1.1 Perkembangan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan indikator kunci dalam memahami sejauh mana kemampuan minimum rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Ia berfungsi sebagai **batas ambang resmi** yang membedakan siapa yang tergolong miskin dan siapa yang tidak, sehingga menjadi fondasi bagi seluruh pengukuran kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin besar pula biaya hidup minimum yang harus dipenuhi. Sebaliknya, jika garis kemiskinan meningkat tetapi pendapatan tidak ikut naik, maka semakin banyak penduduk yang berisiko jatuh miskin. Dengan demikian, analisis terhadap dinamika garis kemiskinan sangat penting untuk

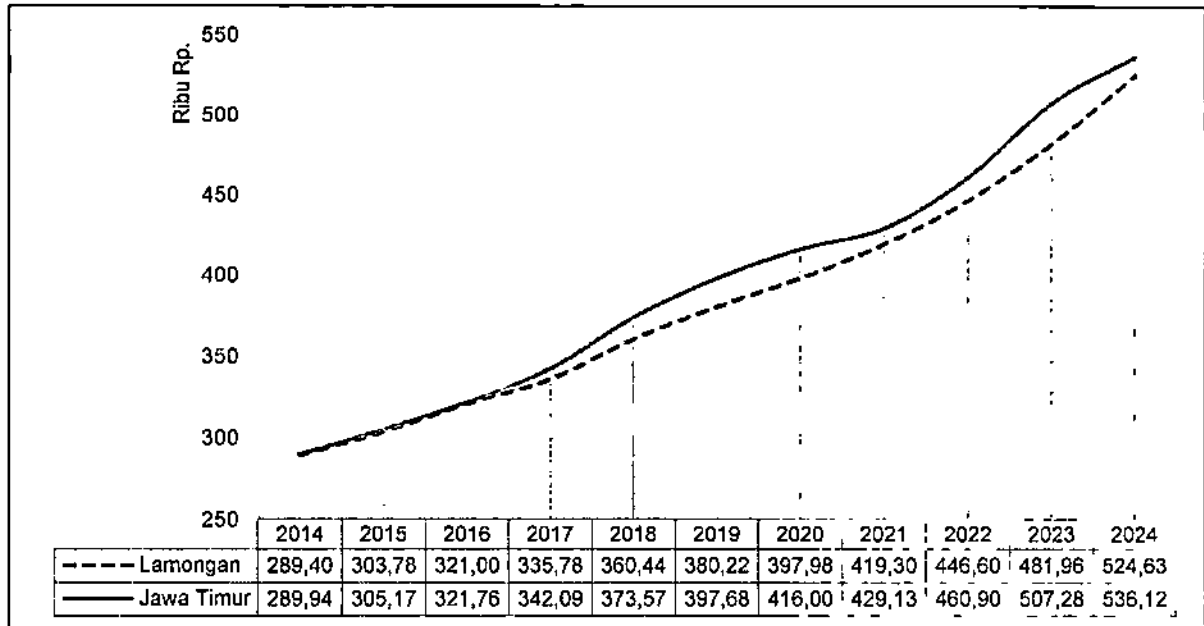
membaca tekanan ekonomi yang dihadapi rumah tangga, mengidentifikasi perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu, serta mengevaluasi apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar sejalan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Garis kemiskinan Lamongan menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sepanjang 2014–2024, mencerminkan meningkatnya biaya hidup minimum yang harus dipenuhi masyarakat. Pada 2014, garis kemiskinan berada di Rp289.403 per kapita per bulan, lalu meningkat stabil setiap tahun hingga mencapai Rp524.636 pada tahun 2024. Kenaikan yang relatif tajam terjadi setelah 2020, sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan inflasi bahan pangan yang cukup kuat. Tren ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar rumah tangga di Lamongan dari tahun ke tahun semakin mahal, sehingga ruang ekonomi masyarakat miskin kian tertekan apabila pendapatan tidak ikut naik secara proporsional.

Kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang konsisten ini memiliki implikasi serius terhadap fenomena penduduk "hampir miskin" (*vulnerable group*) di Kabupaten Lamongan. Ketika GK meningkat hingga mencapai Rp524.636 pada tahun 2024, kelompok masyarakat yang pengeluarannya berada sedikit di atas ambang tersebut menjadi sangat rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan hanya karena guncangan ekonomi kecil, seperti kenaikan harga beras atau biaya transportasi. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, data ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari mereka yang keluar dari kategori miskin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas daya beli agar kelompok rentan tersebut tidak menambah angka kemiskinan baru.

Selain itu, struktur garis kemiskinan di Lamongan masih didominasi secara signifikan oleh komoditas makanan. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga merupakan faktor penentu utama dalam fluktuasi angka kemiskinan daerah. Kenaikan GK yang cukup tajam pasca tahun 2020 mengonfirmasi bahwa inflasi pangan memiliki dampak yang jauh lebih merusak bagi kesejahteraan masyarakat miskin dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, intervensi strategi penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada penguatan rantai pasok pangan lokal dan pengendalian harga kebutuhan pokok guna memastikan bahwa kenaikan biaya hidup minimum tidak melampaui kemampuan adaptasi ekonomi masyarakat bawah.

Gambar 3.1. Perkembangan Garis Kemiskinan (Kapita/Bulan) Kab Lamongan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, terlihat bahwa garis kemiskinan Lamongan selalu berada sedikit di bawah angka provinsi. Pada tahun 2014, selisihnya sangat tipis, namun mulai melebar sejak 2017 ketika garis kemiskinan Jawa Timur meningkat lebih cepat. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Jawa Timur mencapai Rp536.122, atau sekitar Rp11 ribu lebih tinggi dibanding Lamongan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa biaya hidup minimum di tingkat provinsi rata-rata lebih mahal, yang biasanya dipengaruhi oleh struktur harga di wilayah perkotaan besar. Namun demikian, tren kenaikannya tetap paralel, baik Lamongan maupun Jawa Timur mengalami tekanan biaya hidup yang meningkat signifikan selama satu dekade terakhir.

Selisih yang relatif kecil antara GK Lamongan dengan Jawa Timur menunjukkan bahwa meskipun Lamongan memiliki karakteristik wilayah agraris, tekanan inflasi dan struktur harga komoditas pokok di daerah ini hampir setara dengan rata-rata provinsi. Kondisi demikian mengimplikasikan bahwa masyarakat miskin di Lamongan tidak memiliki "keunggulan biaya hidup" yang signifikan dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur. Dalam perspektif RPKD, realitas ini menjadi alarm bahwa tanpa adanya intervensi pada sektor pendapatan dan pengendalian harga lokal, penduduk Lamongan memiliki risiko kerentanan yang sama besarnya dengan penduduk di wilayah urban dalam menghadapi gejolak ekonomi makro.

Paralelisme tren kenaikan ini juga mencerminkan adanya ketergantungan yang kuat antara stabilitas ekonomi daerah dengan kondisi ekonomi regional Jawa Timur. Fenomena pelebaran selisih yang mulai tampak sejak 2017 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan relatif mampu melakukan stabilisasi harga kebutuhan dasar sedikit lebih baik daripada rata-rata wilayah lain, namun tetap tidak bisa sepenuhnya menghindari dari tren kenaikan global pasca-pandemi. Bagi penyusunan strategi daerah, kondisi demikian menuntut strategi penanggulangan kemiskinan untuk lebih fokus pada penguatan kemandirian pangan di tingkat desa sebagai bantalan (buffer) ekonomi, sehingga fluktuasi harga di tingkat provinsi tidak langsung menghantam daya beli masyarakat miskin di tingkat lokal.

Selain itu, posisi GK Lamongan yang berada di bawah angka provinsi memberikan gambaran bahwa standar hidup minimum di Lamongan sedikit lebih terjangkau, namun selisih sebesar Rp11 ribu pada tahun 2024 merupakan angka yang sangat tipis dan bisa sewaktu-waktu terlampaui jika rantai distribusi pangan lokal terganggu. Implikasi kritis bagi RPKD adalah perlunya sinkronisasi data program bantuan sosial antar-level pemerintahan. Dengan garis kemiskinan yang hampir berhimpitan. Strategi perlindungan sosial di Lamongan harus dipastikan tidak hanya mengandalkan bantuan tunai statis, tetapi juga harus mencakup intervensi non-tunai yang sensitif terhadap pergerakan GK provinsi agar tidak terjadi penurunan kualitas konsumsi pada rumah tangga sasaran.

3.1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

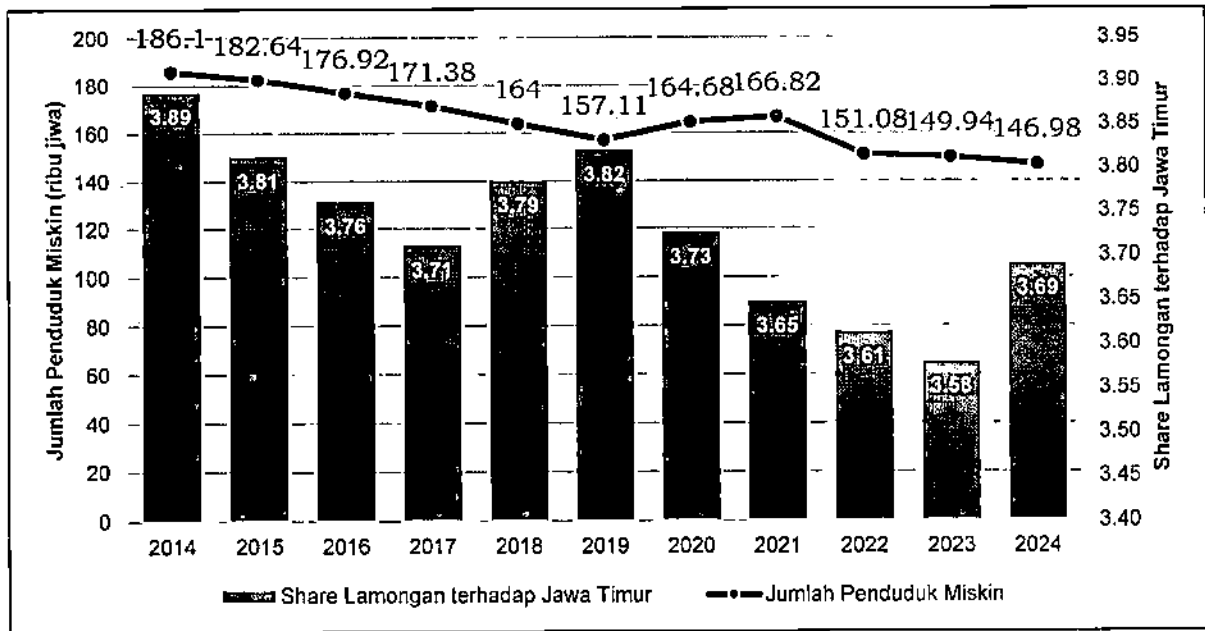
Jumlah penduduk miskin merupakan indikator paling mendasar dalam memahami kondisi kesejahteraan suatu daerah, mengingat angka ini secara langsung menunjukkan berapa banyak individu yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar. Berbeda dengan persentase kemiskinan yang bersifat relatif, jumlah absolut penduduk miskin memberikan gambaran nyata tentang beban sosial yang harus ditangani Pemerintah Daerah, kebutuhan intervensi anggaran, dan tekanan terhadap layanan publik.

Analisis jumlah penduduk miskin juga penting untuk menilai efektivitas program penanggulangan kemiskinan dari waktu ke waktu, sekaligus melihat sensitivitas masyarakat terhadap guncangan eksternal seperti inflasi, pandemi, maupun perlambatan ekonomi. Dengan mempertimbangkan fungsi strategisnya, perubahan jumlah penduduk miskin menjadi salah satu parameter utama dalam menilai kualitas pembangunan inklusif di Lamongan.

Sejak tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Lamongan menunjukkan tren penurunan yang stabil meskipun diselingi beberapa gangguan. Dari angka 186,1 ribu jiwa pada tahun 2014, jumlah tersebut turun perlahan menjadi 171,38 ribu jiwa pada tahun 2017 dan terus menyusut hingga 157,11 ribu jiwa pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 kemudian mengganggu tren ini, tercermin dari kenaikan kembali menjadi 164,68 ribu jiwa pada tahun 2020 dan 166,82 ribu jiwa pada tahun 2021. Namun sejak 2022, pemulihan terlihat cukup nyata, dimana jumlah penduduk miskin kembali merosot hingga mencapai 146,98 ribu jiwa pada tahun 2024, dan menjadi angka terendah dalam satu dekade terakhir. Pola ini menandakan bahwa meskipun Lamongan terdampak gejolak ekonomi global, kapasitas pemulihannya relatif kuat.

Penurunan jumlah penduduk miskin ke angka 146,98 ribu jiwa pada tahun 2024 yang merupakan angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi pasca-pandemi di Kabupaten Lamongan berjalan di jalur yang tepat. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga melampaui kondisi sebelum pandemi (tahun 2019) mengindikasikan bahwa mesin ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian dan UMKM, telah kembali bergerak produktif. Bagi RPKD, capaian ini bukan sekadar keberhasilan statistik, melainkan modalitas penting untuk meningkatkan target sasaran ke arah penghapusan kemiskinan ekstrem, mengingat kelompok penduduk yang tersisa dalam angka tersebut kemungkinan besar adalah kelompok kemiskinan struktural yang memerlukan intervensi lebih spesifik.

Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan dan Share Terhadap Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Meskipun tren menunjukkan pemulihan yang kuat, Pemerintah Daerah perlu mewaspadai fenomena "lenting kemiskinan", dimana penduduk yang baru saja keluar dari garis kemiskinan masih berada dalam kategori rentan. Penurunan jumlah absolut ini harus dibarengi dengan penguatan resiliensi ekonomi di tingkat rumah tangga agar mereka tidak kembali jatuh miskin saat menghadapi inflasi atau anomali cuaca. Dalam konteks strategis, strategi dalam RPKD harus memastikan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas hidup secara multidimensi, sehingga penduduk yang keluar dari statistik kemiskinan benar-benar memiliki akses yang stabil terhadap infrastruktur dasar yang telah dibahas sebelumnya, seperti sanitasi aman dan air minum perpipaan.

Pada sisi lain, keberhasilan penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan antara tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya efektivitas dalam sinkronisasi program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Implikasi bagi penyusunan anggaran ke depan adalah perlunya pergeseran fokus dari sekadar bantuan darurat menuju program-program yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk miskin yang kian mengerucut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki peluang untuk melakukan pemutakhiran data yang lebih presisi (by name by address), sehingga alokasi sumber daya dalam RPKD dapat dioptimalkan untuk menangani kantong-kantong kemiskinan yang selama ini sulit ditembus oleh program-program umum.

Gambar 3.2 juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2014–2024, share Lamongan terhadap total penduduk miskin Jawa Timur cenderung stabil dengan fluktuasi yang relatif kecil. Pada tahun 2014, share tercatat 3,89 persen, kemudian berangsur menurun menjadi 3,71 persen pada tahun 2017 dan bergerak di kisaran 3,7–3,8 persen hingga tahun 2019. Ketika pandemi melanda, share Lamongan justru tidak melonjak signifikan, tetap berada pada level 3,73–3,65 persen sepanjang tahun 2020–2021. Setelah itu, kontribusinya terhadap kemiskinan Jawa Timur sedikit menurun hingga 3,58 persen pada tahun 2023 sebelum naik tipis menjadi 3,69 persen pada tahun 2024. Stabilitas ini

menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin di Lamongan berubah, posisi relatif Lamongan dalam peta kemiskinan provinsi tetap berada pada kisaran yang sama, mengikuti ritme penurunan kemiskinan di daerah lain di Jawa Timur.

Stabilitas share atau kontribusi kemiskinan Lamongan terhadap Jawa Timur yang tertahan di angka 3,5–3,8 persen selama satu dekade terakhir mengonfirmasi adanya resiliensi ekonomi daerah yang selaras dengan perkembangan regional. Hal ini mengindikasikan bahwa guncangan ekonomi makro yang dialami oleh Provinsi Jawa Timur direspons oleh Kabupaten Lamongan dengan tingkat ketahanan yang serupa, sehingga tidak terjadi lonjakan kemiskinan ekstrem yang bersifat anomali dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dalam perspektif RPKD, stabilitas posisi relatif ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dan integrasi program provinsi, mengingat dinamika kemiskinan di Lamongan tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari ekosistem ekonomi Jawa Timur yang saling terkait secara struktural.

Secara keseluruhan, tren selama periode 2014–2024 menggambarkan dua hal penting, yaitu: (i) Lamongan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam jangka panjang; dan (ii) dinamika ini masih bergerak seirama dengan perkembangan kemiskinan di tingkat provinsi. Dengan demikian, tantangan ke depan bukan hanya mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga bagaimana Lamongan dapat melampaui kinerja rata-rata daerah lain sehingga share kemiskinannya terhadap Jawa Timur dapat menurun lebih tajam.

3.1.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0)

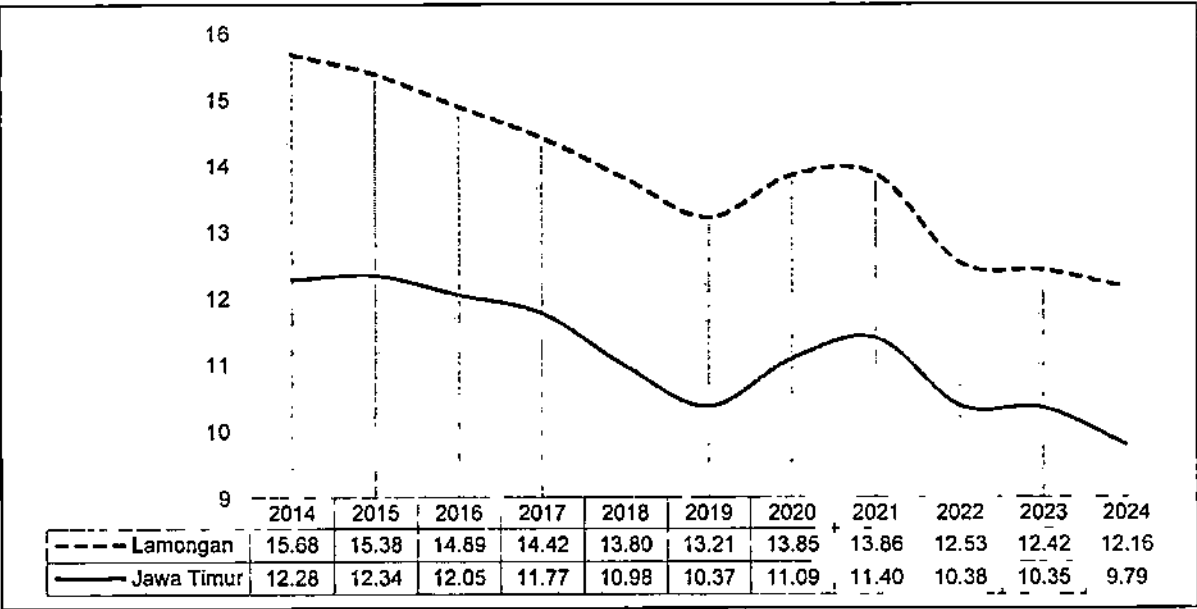
Persentase penduduk miskin (P0) merupakan indikator penting untuk memahami tingkat kesejahteraan secara proporsional karena menunjukkan seberapa besar bagian penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berbeda dengan jumlah absolut penduduk miskin, P0 memberikan gambaran yang lebih adil untuk membandingkan kondisi antar wilayah dan antar periode, sekaligus membantu melihat apakah penurunan kemiskinan benar-benar berasal dari perbaikan kesejahteraan atau sekadar perubahan struktur penduduk. Dengan demikian, analisis P0 menjadi krusial untuk menilai capaian pembangunan inklusif dan mengukur posisi Lamongan dalam kaitannya dengan kondisi kemiskinan di Jawa Timur.

Persentase penduduk miskin di Lamongan selama periode tahun 2014–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2014, P0 masih berada pada angka 15,68 persen, kemudian turun bertahap setiap tahun hingga mencapai 13,21 persen pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 sempat menghentikan tren positif tersebut, ditandai dengan kenaikan kembali ke kisaran 13,85–13,86 persen pada tahun 2020–2021. Namun setelah situasi mulai pulih, penurunan kembali berlangsung cukup kuat, yaitu P0 turun menjadi 12,53 persen pada tahun 2022, kemudian 12,42 persen pada tahun 2023, dan mencapai 12,16 persen pada tahun 2024 dan merupakan angka terendah sepanjang satu dekade terakhir.

Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, posisi Lamongan sepanjang periode tersebut tetap berada pada tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Selisihnya konsisten pada kisaran 2–3 persen, dimana P0 Jawa Timur bergerak dari 12,28 persen pada tahun 2014 menjadi 9,79 persen pada tahun 2024. Meski demikian, penurunan P0 di Lamongan mengikuti pola

penurunan provinsi secara umum, yaitu menurun sebelum pandemi, naik saat pandemi, dan kembali turun pascapandemi. Pola ini menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan di Lamongan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi regional, dan belum mampu melampaui kinerja Jawa Timur.

Gambar 3.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Fakta bahwa persentase penduduk miskin (P0) Lamongan secara konsisten berada di atas rata-rata Jawa Timur dengan selisih 2–3 poin persentase menunjukkan adanya tantangan struktural yang lebih berat di tingkat lokal. Meskipun Lamongan berhasil mencapai angka terendah dalam satu dekade (12,16% pada tahun 2024), ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian yang volatil membuat laju penurunan kemiskinan cenderung melambat dibandingkan daerah-daerah yang memiliki basis industri manufaktur lebih kuat. Dalam konteks RPKD, data ini menegaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi generik, melainkan harus melakukan intervensi yang mampu mempercepat transformasi ekonomi agar selisih persentase dengan provinsi dapat terus diperkecil.

Penurunan P0 yang cukup kuat pascapandemi (dari 13,86% ke 12,16%) mengindikasikan bahwa program-program pemulihan ekonomi daerah mulai membuahkan hasil, namun tetap menyisakan kelompok "kemiskinan inti" yang lebih sulit ditembus. Penurunan persentase pada fase ini biasanya lebih lambat karena yang tersisa di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang memiliki hambatan akses paling kompleks, baik dari sisi geografi maupun keterbatasan fisik/modal. Kelompok "kemiskinan inti" ini umumnya terdiri dari rumah tangga lansia tunggal, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah terisolasi yang tidak lagi mampu merespons stimulus ekonomi konvensional.

3.1.4 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa jauh rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Berbeda dengan persentase penduduk miskin (P0) yang hanya menunjukkan jumlah atau proporsi masyarakat miskin, P1 memberikan informasi mendalam tentang tingkat keparahan

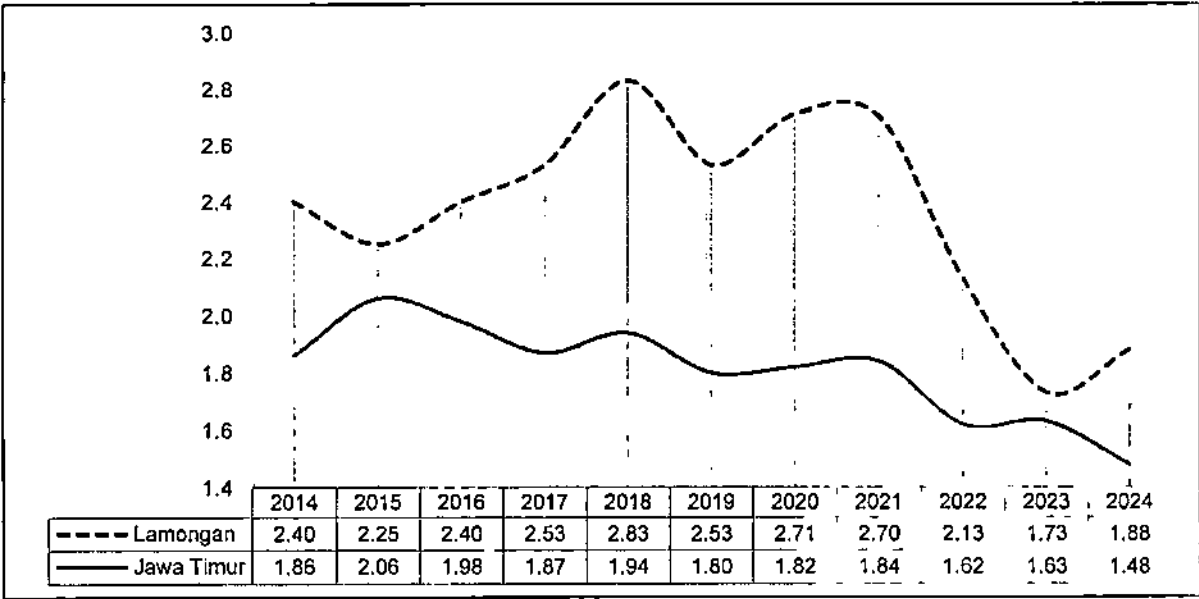
kemiskinan yang dialami rumah tangga. Semakin tinggi nilai P1, semakin besar jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang berarti semakin berat upaya yang dibutuhkan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut. Karena itu, P1 tidak hanya penting untuk menilai efektivitas program pengentasan kemiskinan, tetapi juga untuk menentukan jenis intervensi yang tepat, apakah cukup dengan bantuan jangka pendek atau membutuhkan strategi peningkatan pendapatan yang lebih struktural.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Lamongan selama periode 2014–2024 menunjukkan pola yang naik turun, namun dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Pada 2014, nilai P1 berada di angka 2,40 kemudian sempat turun sedikit pada 2015, tetapi kembali meningkat dan mencapai salah satu titik tertingginya pada 2018 sebesar 2,83. Setelah itu, P1 berfluktuasi, naik pada masa pandemi hingga 2,71 pada 2020 dan 2,70 pada 2021, sebelum akhirnya turun cukup tajam menjadi 2,13 pada 2022 dan mencapai titik terendah 1,73 pada 2023. Meskipun sedikit naik kembali ke 1,88 pada 2024, nilai ini tetap jauh lebih rendah dibandingkan pertengahan dekade sebelumnya, menunjukkan bahwa jarak penduduk miskin dari garis kemiskinan semakin menyempit dan kebutuhan tambahan pengeluaran untuk keluar dari kemiskinan semakin kecil.

Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, P1 Lamongan secara konsisten berada pada tingkat yang lebih tinggi sepanjang periode tersebut. Sementara Lamongan mencatat nilai P1 di kisaran 2,4–2,8 sebelum pandemi, Jawa Timur bergerak lebih rendah di kisaran 1,8–2,0. Bahkan ketika pandemi melanda, lonjakan P1 di Jawa Timur tetap lebih moderat dibandingkan Lamongan. Pada 2023–2024, selisih keduanya memang mengecil, tetapi Lamongan tetap berada sedikit di atas rata-rata provinsi. Pola ini menunjukkan meskipun kedalaman kemiskinan di Lamongan menurun signifikan, tingkat keparahan kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur, menandakan perlunya intervensi yang lebih intensif untuk mempercepat peningkatan daya beli penduduk miskin.

Penyempitan nilai P1 hingga ke angka 1,88 pada tahun 2024 merupakan sinyal positif bahwa penduduk miskin di Kabupaten Lamongan kini berada lebih dekat dengan ambang batas Garis Kemiskinan. Secara teknis, kondisi demikian berarti "biaya" atau upaya ekonomi yang diperlukan untuk mengangkat satu individu keluar dari kemiskinan menjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, fluktuasi yang masih terjadi menunjukkan bahwa daya beli kelompok ini sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas pangan. Dalam kerangka RPKD, kondisi tersebut menuntut pergeseran strategi dari bantuan sosial yang bersifat masif menjadi intervensi yang lebih mikro dan presisi, karena sedikit saja dorongan pendapatan tambahan atau pengurangan beban pengeluaran dapat secara efektif menggeser mereka ke atas garis kemiskinan.

Gambar 3.4. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Meskipun jarak ke garis kemiskinan menyempit, posisi P1 Lamongan yang masih berada di atas rata-rata Jawa Timur mengindikasikan bahwa beban untuk keluar dari kemiskinan di tingkat lokal tetap lebih berat dibandingkan wilayah lain secara proporsional. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh struktur ekonomi agraris yang memiliki siklus pendapatan musiman, dimana pada bulan-bulan tertentu (seperti masa tanam atau paceklik), pengeluaran rumah tangga tani gurem merosot jauh di bawah standar minimum. Oleh karena itu, RPKD perlu memperkuat kebijakan pendapatan berkelanjutan melalui diversifikasi usaha atau program padat karya yang tidak bergantung pada musim, guna memastikan indeks kedalaman ini terus menurun dan tidak kembali melebar saat terjadi gejolak pasar.

Selain itu, nilai P1 yang rendah namun stabil di angka 1,88 menunjukkan adanya kelompok penduduk yang sudah "hampir keluar" dari kemiskinan. Titik kritis bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah mencegah terjadinya fenomena churning, dimana penduduk keluar dari garis kemiskinan namun segera jatuh kembali karena tidak memiliki bantalan ekonomi yang kuat. Strategi RPKD yang dituangkan di Bab IV harus mengintegrasikan penurunan P1 ini dengan peningkatan akses infrastruktur dasar seperti listrik produktif dan irigasi teknis yang telah dibahas sebelumnya (Bab II). Dengan infrastruktur yang mendukung produktivitas, penduduk yang sudah mendekati garis kemiskinan akan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan status kesejahteraannya dan tidak lagi bergantung pada bantuan tunai pemerintah.

3.1.5 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

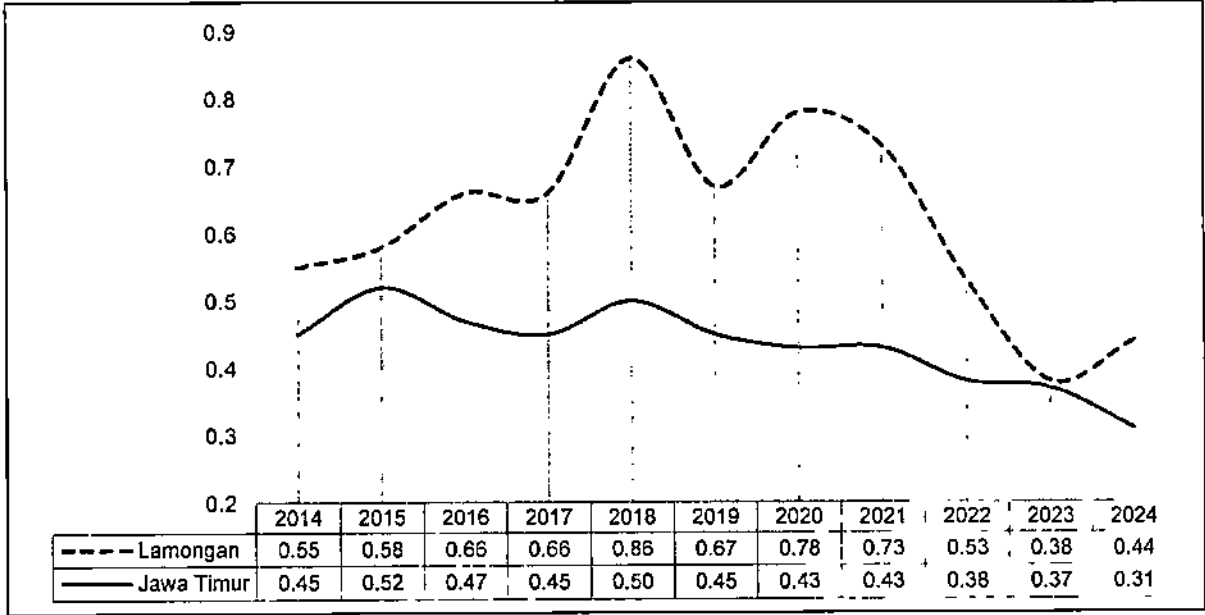
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Atau dengan kata lain, seberapa timpang kondisi kemiskinan di dalam kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berbeda dengan P0 yang hanya menghitung jumlah penduduk miskin dan P1 yang melihat jarak mereka dari garis kemiskinan, P2 memberikan gambaran lebih dalam tentang tingkat kerentanan dan ketidakmerataan diantara penduduk miskin itu sendiri, apakah sebagian besar hanya sedikit di bawah garis kemiskinan atau justru terdapat

kelompok yang sangat jauh tertinggal. Semakin tinggi nilai P2, semakin berat kondisi kemiskinan yang dihadapi karena menunjukkan adanya kelompok yang mengalami kemiskinan ekstrem. P2 sangat penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi ketimpangan antar penduduk miskin agar intervensi menjadi lebih tepat sasaran dan inklusif.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Lamongan selama 2014–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Pada tahun 2014, nilai P2 berada di angka 0,55, kemudian meningkat pada tahun 2015 dan mencapai titik tertinggi sepanjang dekade pada tahun 2018 sebesar 0,86. Setelah itu, nilai P2 mulai menurun, meskipun sempat kembali naik pada masa pandemi mencapai 0,78 pada tahun 2020 dan 0,73 pada tahun 2021 yang mencerminkan ketimpangan di antara penduduk miskin meningkat ketika ekonomi terguncang. Memasuki periode pemulihan, P2 Lamongan turun cukup tajam menjadi 0,53 pada tahun 2022 dan mencapai titik terendah 0,38 pada tahun 2023, sebelum sedikit naik kembali ke 0,44 pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit kenaikan di akhir periode, secara keseluruhan tren ini menunjukkan membaiknya pemerataan kondisi diantara penduduk miskin dan semakin berkurangnya kelompok kemiskinan paling ekstrem.

Bila dibandingkan dengan Jawa Timur, nilai P2 Lamongan selama satu dekade terakhir hampir selalu berada di atas rata-rata provinsi. Jawa Timur mencatat nilai P2 yang lebih rendah dan lebih stabil, bergerak di kisaran 0,37–0,52 pada awal periode dan terus menurun hingga 0,31 pada tahun 2024. Sementara itu, Lamongan menunjukkan volatilitas lebih tinggi dan nilai yang secara konsisten lebih besar, menandakan bahwa ketimpangan diantara penduduk miskin di Lamongan masih lebih dalam dibandingkan wilayah lainnya di Jawa Timur. Meskipun jarak antara keduanya mulai mengecil sejak tahun 2022, posisi Lamongan yang tetap berada di atas rata-rata provinsi menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah untuk mengurangi ketimpangan di dalam kelompok penduduk miskin.

Gambar 3.5. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Nilai P2 yang mencapai titik terendah 0,38 pada tahun 2023 dan bertahan di angka 0,44 pada tahun 2024 menandakan keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam mengurangi

populasi yang berada di kerak kemiskinan (kemiskinan ekstrem). Penurunan ini mengindikasikan bahwa kelompok penduduk yang sebelumnya memiliki pengeluaran sangat jauh di bawah garis kemiskinan mulai mengalami perbaikan kesejahteraan, sehingga distribusi pengeluaran diantara warga miskin menjadi lebih merata. Dalam perspektif RPKD, tren ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa program-program perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan dan bantuan sosial tepat sasaran, telah berhasil menyentuh kelompok yang paling rentan, meskipun fluktuasi kecil di tahun 2024 tetap memberikan peringatan akan adanya ketidakstabilan daya beli di level terbawah.

Namun demikian, volatilitas P2 yang lebih tinggi di Lamongan dibandingkan Jawa Timur mencerminkan bahwa struktur ekonomi masyarakat miskin di daerah ini masih sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Ketimpangan yang konsisten berada di atas rata-rata provinsi menunjukkan adanya disparitas kondisi antara kantong kemiskinan yang satu dengan lainnya, misalnya perbedaan antara buruh tani di wilayah irigasi teknis dengan masyarakat di wilayah rawan kekeringan. Oleh karena itu, strategi RPKD yang dituangkan dalam Bab IV tidak boleh hanya menggunakan pendekatan "pukul rata", melainkan harus fokus pada intervensi spasial yang menjangkau wilayah dengan indeks keparahan tertinggi, guna memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terisolasi dari manfaat pembangunan ekonomi daerah.

Berikutnya, kaitan antara P2 dan keberlanjutan infrastruktur pelayanan publik menjadi sangat relevan. Penduduk dengan tingkat keparahan kemiskinan tinggi biasanya memiliki akses yang paling buruk terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi. Dengan nilai P2 yang mulai melandai, Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki peluang untuk mengalihkan fokus dari sekadar "penyelamatan konsumsi" ke arah "penguatan modal manusia". Jika ketimpangan antar penduduk miskin dapat terus ditekan, maka efektivitas investasi pada jaringan air minum dan pendidikan yang telah dibahas di Bab II akan meningkat secara signifikan, karena masyarakat miskin memiliki kesiapan ekonomi yang lebih merata untuk mengakses dan memanfaatkan infrastruktur dasar tersebut.

3.1.6 Posisi Kemiskinan Kabupaten Lamongan di Jawa Timur

Mengetahui posisi Lamongan dalam peta kemiskinan Jawa Timur, baik pada tahun 2010 maupun 2024 penting karena memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai sifat dan skala persoalan kemiskinan yang dihadapi. Pembagian kuadran yang menggabungkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin memungkinkan analisis dua dimensi sekaligus, yaitu: (i) risiko kemiskinan (seberapa besar proporsi warga miskin); dan (ii) beban kemiskinan (berapa besar jumlah penduduk miskin yang harus ditangani). Kombinasi kedua indikator ini menghasilkan dasar analitis (kuadran) yang lebih kuat dibandingkan hanya melihat persentase kemiskinan semata. Melalui pendekatan ini, posisi Lamongan dapat diperbandingkan secara langsung dengan daerah lain, sehingga faktor-faktor struktural yang memengaruhi dinamika kemiskinannya dapat dipahami dalam konteks regional yang lebih luas.

Selain itu, pemetaan kuadran memungkinkan identifikasi perubahan posisi relatif Lamongan sepanjang waktu. Dengan membandingkan posisi tahun 2010 dan 2024, dapat dilihat apakah upaya pengentasan kemiskinan selama satu dekade terakhir menghasilkan pergeseran yang signifikan atau justru menunjukkan stagnasi. Pembagian kuadran ini

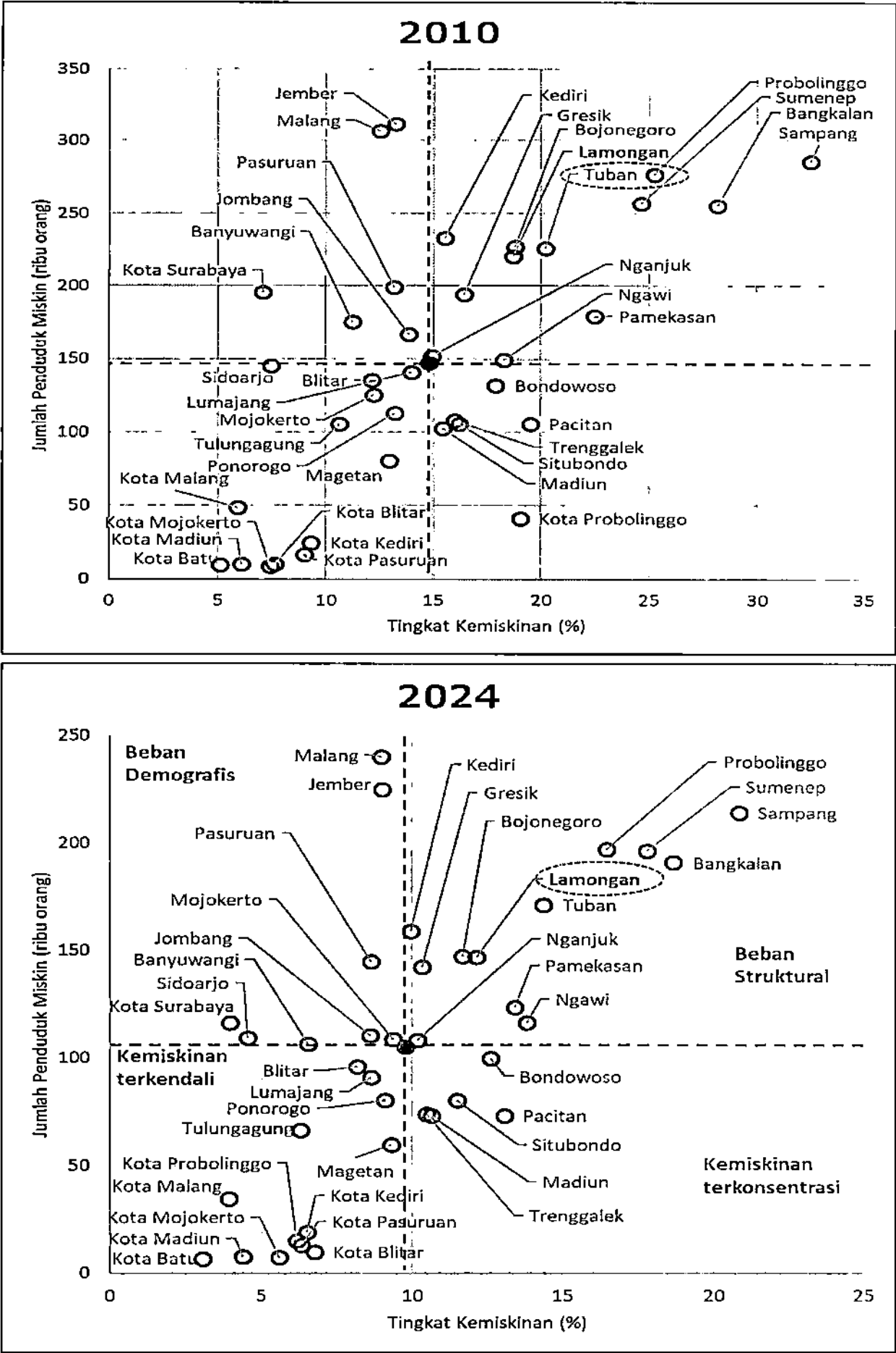
dirancang untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah menghadapi risiko kemiskinan yang tinggi, beban penduduk miskin yang besar, atau kedua-duanya sekaligus. Setiap kuadran mencerminkan karakter masalah yang berbeda dan membutuhkan respons kebijakan yang juga berbeda. Keempat kuadran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beban Struktural: Tingkat Kemiskinan Tinggi – Jumlah Penduduk Miskin Tinggi.** Posisi ini menandakan persoalan kemiskinan yang bersifat struktural. Daerah menghadapi proporsi kemiskinan yang besar sekaligus populasi penduduk miskin yang tinggi. Ini biasanya terkait dengan rendahnya kualitas tenaga kerja, produktivitas ekonomi yang stagnan, dan keterbatasan akses layanan dasar. Intervensi kebijakan di kuadran ini harus berskala besar karena tekanan kemiskinannya berat baik dari sisi risiko maupun volume.
2. **Kemiskinan Terkonsentrasi: Tingkat Kemiskinan Tinggi – Jumlah Penduduk Miskin Rendah.** Daerah dalam kuadran ini menghadapi persentase kemiskinan yang tinggi, tetapi jumlah penduduk miskinnya relatif kecil akibat ukuran populasi yang kecil. Tantangannya lebih banyak bersifat sektoral, spasial, atau terkait isolasi geografis. Meski beban absolutnya kecil, persoalan dasarnya sulit diatasi tanpa transformasi struktural. Strategi penanggulangan kemiskinan pada kelompok ini harus memprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi untuk membuka isolasi wilayah, sehingga biaya hidup dapat ditekan dan akses terhadap pusat layanan ekonomi menjadi lebih terjangkau bagi komunitas yang terpencil.
3. **Beban Demografis: Tingkat Kemiskinan Rendah – Jumlah Penduduk Miskin Tinggi.** Kuadran ini muncul pada daerah berpenduduk besar. Risiko kemiskinan rendah, tetapi secara absolut jumlah penduduk miskin tetap tinggi. Artinya, kemiskinan relatif terkendali, tetapi kapasitas ekonomi belum cukup kuat mengangkat jumlah besar penduduk keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang diperlukan adalah perluasan lapangan kerja, peningkatan upah riil, dan penguatan sektor padat karya.
4. **Kemiskinan Terkendali: Tingkat Kemiskinan Rendah – Jumlah Penduduk Miskin Rendah.** Daerah dalam kuadran ini berada pada kondisi paling ideal. Baik risiko maupun beban kemiskinannya rendah. Tantangan utamanya adalah mempertahankan stabilitas dan mencegah kerentanan baru. Kebijakan pembangunan dapat difokuskan pada peningkatan daya saing jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis posisi dalam kuadran, Lamongan pada tahun 2010 maupun 2024 konsisten berada dalam kategori **Beban Struktural**, yaitu daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan jumlah penduduk miskin yang juga besar. Posisi ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Lamongan bukan sekadar persoalan besaran penduduk, tetapi terkait dengan faktor struktural yang memengaruhi kualitas hidup masyarakatnya.

Posisi Lamongan dalam kuadran beban struktural mengindikasikan bahwa akar kemiskinan berada pada persoalan mendasar. Akar kemiskinan tersebut mencakup keterbatasan akses terhadap faktor produksi, rendahnya nilai tambah pada sektor basis seperti pertanian, serta ketimpangan kualitas infrastruktur dasar yang telah dibahas di Bab II. Kondisi ini menuntut RPKD untuk tidak hanya mengandalkan program bantuan sosial

yang bersifat konsumtif, melainkan harus melakukan intervensi makro yang mampu mengubah struktur ekonomi daerah menjadi lebih inklusif.



Gambar 3.6. Posisi Kemiskinan Kabupate Lamongan di Jawa Timur

Sumber: Hasil Analisis (2025), Berdasarkan Data BPS Jawa Timur (2025).

Selain itu, berdasarkan hasil analisis di Bab II, salah satu penyebab tingginya kemiskinan Lamongan adalah rendahnya nilai tambah akibat kurangnya industrialisasi. Padahal, secara geografis Kabupaten Lamongan mempunyai potensi kawasan peruntukan industri yang luas. Berdasarkan peta peluang pengembangan kawasan industri, wilayah Lamongan didominasi oleh area yang sangat direkomendasikan serta dapat digunakan sebagai kawasan industri, yang menjadi modal krusial untuk mengakselerasi value added perekonomian daerah melalui hilirisasi sektor unggulan.

Gambar 3.7. Potensi Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Lamongan



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2016

Pemanfaatan potensi ruang ini secara optimal diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja formal bagi angkatan kerja lokal yang kini memiliki akses pendidikan relatif baik, sehingga mampu menjamin upaya penanggulangan kemiskinan non-pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor industri pengolahan melalui optimalisasi kawasan peruntukan industri menjadi strategi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Lamongan secara menyeluruh.

Temuan di atas juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Lamongan belum sepenuhnya mampu meresolusi masalah kemiskinan secara fundamental. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik, dimana penduduk miskin sulit untuk melakukan mobilitas vertikal karena terbatasnya kepemilikan aset dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Dalam kerangka RPKD, posisi ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari sekadar pemberian bantuan (charity-based) menuju pemberdayaan ekonomi yang fokus pada penguatan rantai nilai (value chain) di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja miskin, seperti pertanian dan perikanan.

Selain itu, tingginya jumlah penduduk miskin yang dibarengi dengan tingkat persentase kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa intervensi Pemerintah Daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinkronisasi kebijakan yang masif antara

pembangunan infrastruktur dasar yang telah dibahas di Bab II (seperti jaringan irigasi dan air minum) dengan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pendekatan "Pro-Poor Resilience" menjadi sangat relevan karena bertujuan untuk membangun bantalan ekonomi bagi masyarakat agar tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan saat terjadi fluktuasi harga komoditas atau bencana alam (seperti banjir).

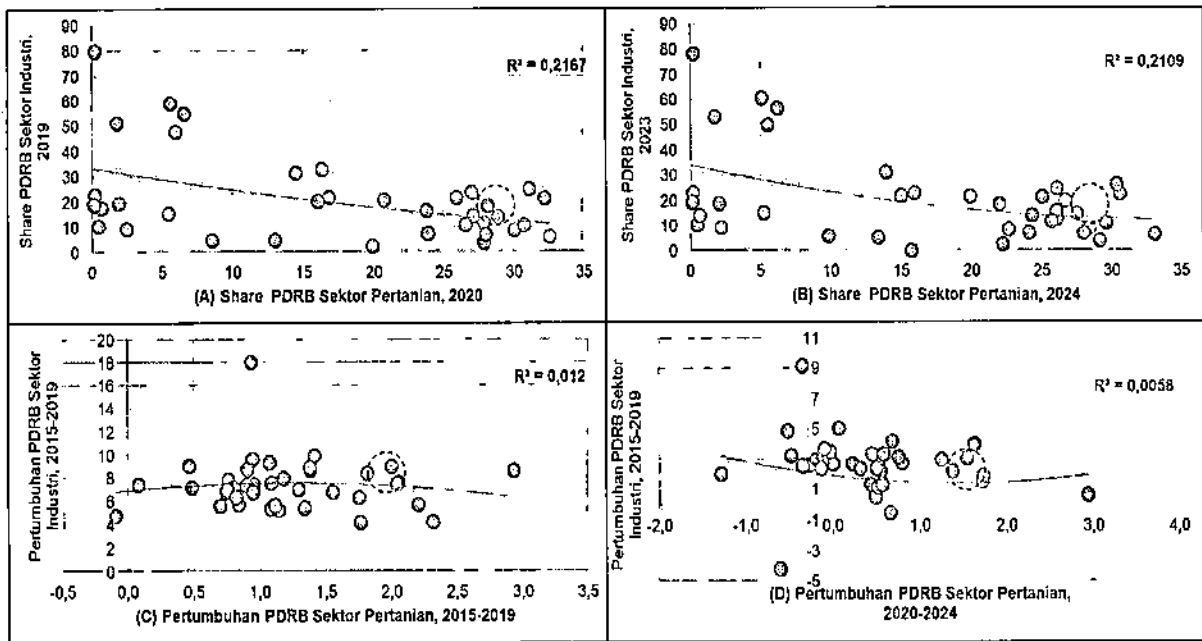
Terakhir, posisi beban struktural ini memberikan mandat bagi strategi RPKD (Bab IV) untuk lebih agresif dalam mendorong investasi padat karya yang mampu melakukan diversifikasi ekonomi di perdesaan. Transformasi sektor pertanian menuju industri pengolahan menjadi krusial agar nilai tambah dari hasil bumi tetap berputar di tingkat lokal dan memberikan peluang kerja baru bagi penduduk miskin. Dengan demikian, tantangan dalam kuadran ini hanya dapat diatasi jika Pemerintah Kabupaten Lamongan mampu mengintegrasikan kebijakan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan dengan penyediaan lapangan kerja berkualitas yang mampu menampung luapan tenaga kerja dari sektor primer.

3.1.7 Permasalahan Rendahnya Konektivitas Sektor Pertanian dan Industri

Meskipun Kabupaten Lamongan memiliki keunggulan komparatif sebagai lumbung pangan Jawa Timur dan memiliki potensi kawasan peruntukan industri yang sangat luas, realitas ekonomi menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam proses transformasi struktural akibat rendahnya konektivitas antara sektor pertanian dan industri. Permasalahan ini berakar pada minimnya infrastruktur hilirisasi di tingkat lokal, sehingga komoditas pertanian unggulan masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah. Ketidakterhubungan ini menyebabkan potensi besar dari sektor pendidikan yang sudah berada di kuadran tinggi tidak terserap oleh kebutuhan industri lokal, yang pada gilirannya menghambat akselerasi value added perekonomian daerah dan memperlambat laju pengentasan kemiskinan struktural di Kabupaten Lamongan.

Persoalan rendahnya konektivitas dapat dilihat dari analisis korelasi yang mencerminkan rendahnya tingkat pendapatan dan nilai tambah disebabkan masih lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan industri, atau disebut sebagai "mata rantai yang putus" dalam perekonomian Lamongan saat ini. Analisis regresi menunjukkan nilai R^2 yang sangat rendah (misalnya $R^2 = 0,0058$ pada periode 2020-2024), yang membuktikan bahwa pertumbuhan di sektor pertanian tidak diikuti atau tidak mendorong pertumbuhan di sektor industri secara signifikan. Karena sektor pertanian (tempat mayoritas penduduk miskin bekerja) tidak terhubung dengan industri pengolahan, maka keuntungan ekonomi dari hasil tani tidak maksimal, yang pada akhirnya memperlambat laju penurunan kemiskinan.

Gambar 3.8. Hubungan Korelasi Sektor Pertanian dan Industri di Lamongan



Sumber: Hasil Analisis (2025)

Gambar di atas memberikan pesan kuat bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Lamongan tidak boleh lagi hanya fokus pada bansos. Arah kebijakan harus menuju Industrialisasi Berbasis Pertanian. Kekuatan Lamongan saat ini adalah memiliki SDM yang relatif terdidik dan lahan industri yang tersedia, namun keduanya belum dioptimalkan satu sama lain karena rendahnya konektivitas ekonomi.

Lemahnya konektivitas menciptakan paradoks ekonomi di Lamongan, yaitu kelimpahan produksi pertanian tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan. Tanpa adanya industri pengolahan yang terintegrasi di wilayah lokal, nilai tambah dari hasil panen justru dinikmati oleh daerah lain yang memiliki fasilitas hilirisasi lebih lengkap. Hal ini memperburuk kondisi kemiskinan struktural karena masyarakat perdesaan terjebak dalam siklus pendapatan rendah, sementara potensi kawasan industri yang sangat luas di Lamongan belum mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Oleh karena itu, arah strategi penanggulangan kemiskinan dalam RPKD harus diprioritaskan pada pembangunan ekosistem industri yang bersifat inklusif dan berbasis potensi lokal. Pemerintah Daerah perlu mendorong investasi yang berfokus pada industri pengolahan produk turunan pertanian, seperti industri pakan ternak, pengolahan makanan, atau industri pengemasan modern. Strategi ini tidak hanya akan meningkatkan value added bagi petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja formal bagi generasi muda terdidik yang saat ini sudah memiliki modal kualitas pendidikan yang cukup tinggi di Kabupaten Lamongan.

Selain itu, diperlukan penguatan infrastruktur penghubung dan kelembagaan ekonomi petani agar mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok industri. Integrasi antara potensi ketersediaan ruang industri dengan kesiapan sumber daya manusia yang ada harus dijembatani melalui kebijakan insentif bagi industri yang mampu menyerap bahan baku dan tenaga kerja lokal secara maksimal. Dengan menghubungkan kembali mata rantai yang terputus ini, Lamongan dapat mentransformasi

struktur ekonominya dari ketergantungan pada sektor primer menuju ekonomi yang lebih tangguh dan terdiversifikasi, guna mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

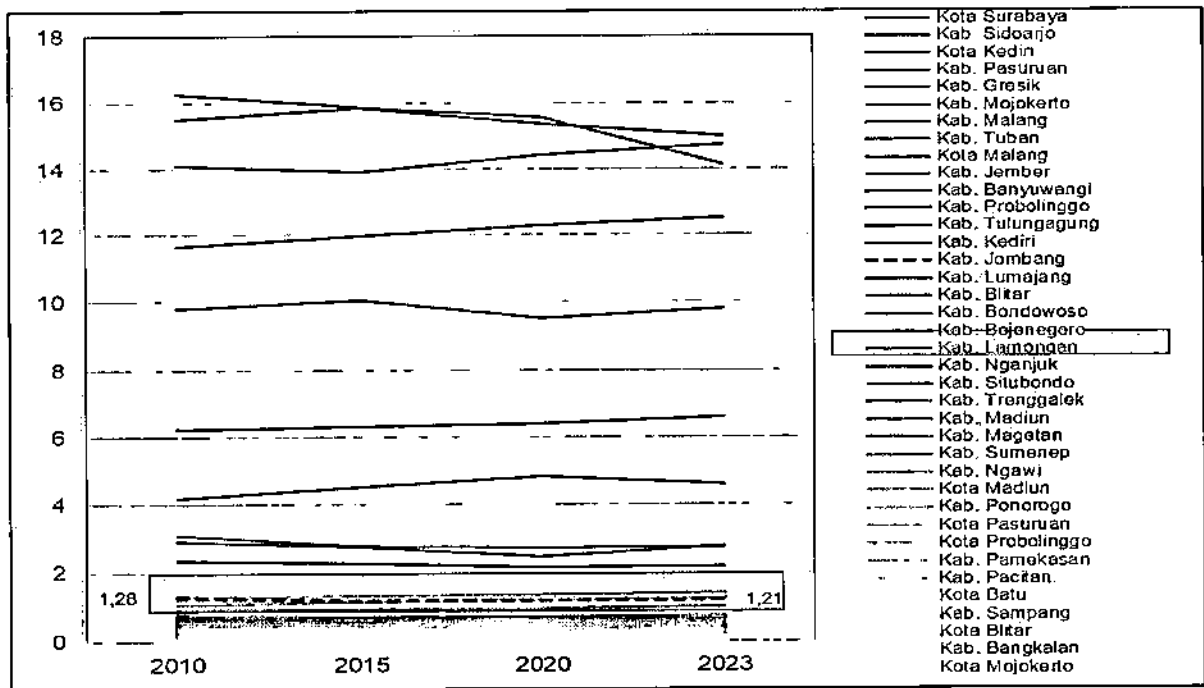
3.1.8 Permasalahan Rendahnya Efisiensi Industri

Permasalahan rendahnya efisiensi industri di Kabupaten Lamongan menjadi tantangan krusial yang menghambat percepatan transformasi ekonomi daerah, mengingat sektor ini diharapkan menjadi mesin penggerak nilai tambah dan penyerap tenaga kerja terdidik. Meskipun Kabupaten Lamongan memiliki kawasan peruntukan industri dan kualitas modal manusia yang terus membaik, performa sektor industri pengolahan belum mampu mencapai tingkat produktivitas yang optimal akibat tingginya biaya logistik, keterbatasan akses teknologi tepat guna, serta rantai pasok yang masih terfragmentasi.

Kondisi industri di Kabupaten Lamongan dapat dianalisis melalui kontribusi kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB industri pengolahan Jawa Timur. Saat ini, Kabupaten Lamongan hanya menempati posisi ke 20 dari 38 kabupaten/kota dalam pembentukan PDRB industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur. Posisi tersebut secara umum mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Lamongan memerlukan perhatian lebih, terutama skala IKM. Hal ini juga mengonfirmasi analisis sebelumnya bahwa meskipun memiliki potensi ruang industri yang luas, sektor industri di Lamongan belum mampu melakukan lompatan produktivitas yang dapat menaikkan posisi tawarnya dalam struktur ekonomi provinsi.

Rendahnya kontribusi di Lamongan sangat berkorelasi dengan dominasi IKM yang masih bergerak di sektor hulu tanpa sentuhan teknologi tinggi. Minimnya unit industri skala besar yang beroperasi di Lamongan menyebabkan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi lokal menjadi terbatas, sehingga penyerapan tenaga kerja miskin ke sektor formal berjalan sangat lambat. Akibatnya, sektor industri belum mampu secara signifikan mengurangi beban angka kemiskinan karena skala usaha yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hal margin keuntungan dan daya saing pasar.

Gambar 3.9. Kontribusi Kab/Kota Terhadap Pembentukan PDRB Industri Pengolahan Jawa Timur



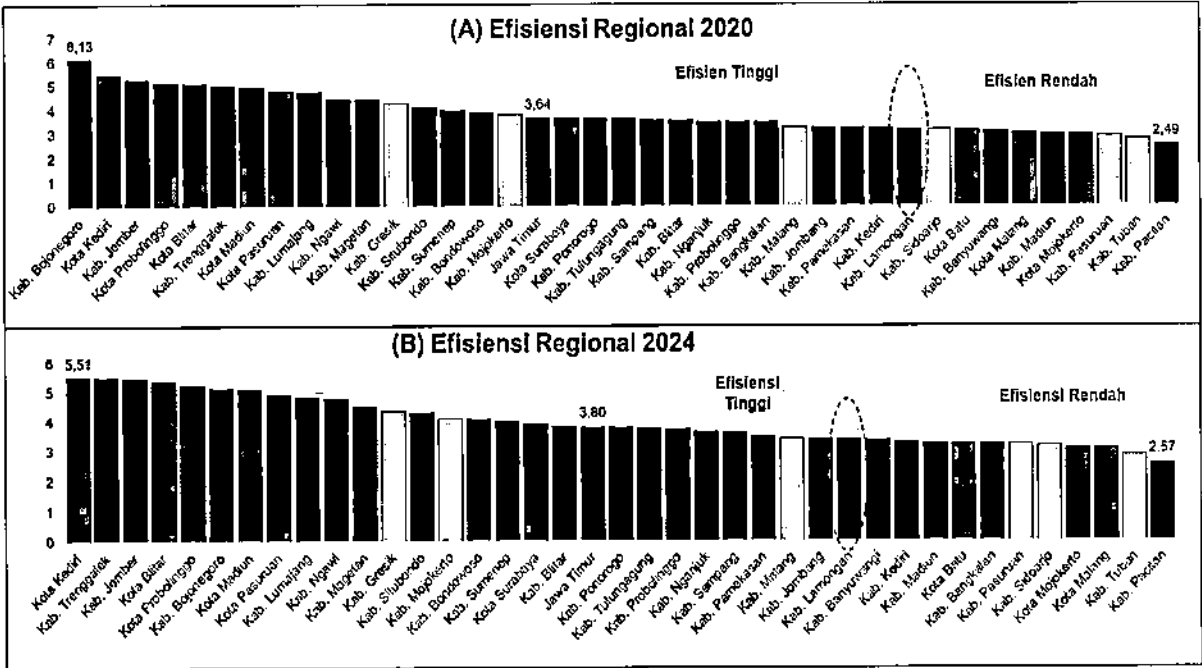
Sumber: Hasil Analisis (2025)

Dalam perspektif RPKD, strategi pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada transformasi IKM melalui digitalisasi dan standarisasi mutu produk agar dapat masuk ke dalam rantai pasok industri nasional bahkan global. Intervensi Pemerintah Daerah tidak boleh lagi hanya sebatas bantuan alat, melainkan harus mencakup fasilitasi kemitraan antara IKM lokal dengan perusahaan besar yang ada di Jawa Timur. Dengan memperkuat ekosistem industri dari skala kecil, Lamongan dapat perlahan memperbaiki angka efisiensi investasinya (ICOR) dan meningkatkan kontribusi PDRB industrinya, yang pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak peluang kerja berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, rendahnya efisiensi industri menyebabkan daya saing industri lokal di Lamongan menjadi lemah di tingkat regional, sehingga kontribusinya terhadap PDRB tidak berbanding lurus dengan besarnya alokasi ruang yang tersedia. Dalam kerangka RPKD, ketidakefisienan ini berimplikasi langsung pada lambatnya penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, yang akhirnya membatasi kemampuan sektor industri untuk berperan secara efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat di Lamongan.

Rendahnya efisiensi industri di Kabupaten Lamongan dapat dianalisis melalui indikator efisiensi regional (ICOR) yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2020 maupun 2024, Kabupaten Lamongan berada dalam kelompok "Efisiensi Rendah". Pada tahun 2020, angka efisiensi Lamongan berada di kisaran angka 3,1. Posisi ini menempatkan Lamongan di bawah rata-rata Jawa Timur (3,64) dan jauh tertinggal dari daerah dengan efisiensi tinggi seperti Bojonegoro (6,13) atau Kota Kediri. Pada tahun 2024, meskipun terdapat pergerakan, Lamongan tetap bertahan di zona efisiensi rendah dengan angka yang relatif stagnan di kisaran 3,3.

Gambar 3.10. Tingkat Efisiensi Industri Berbasis ICOR

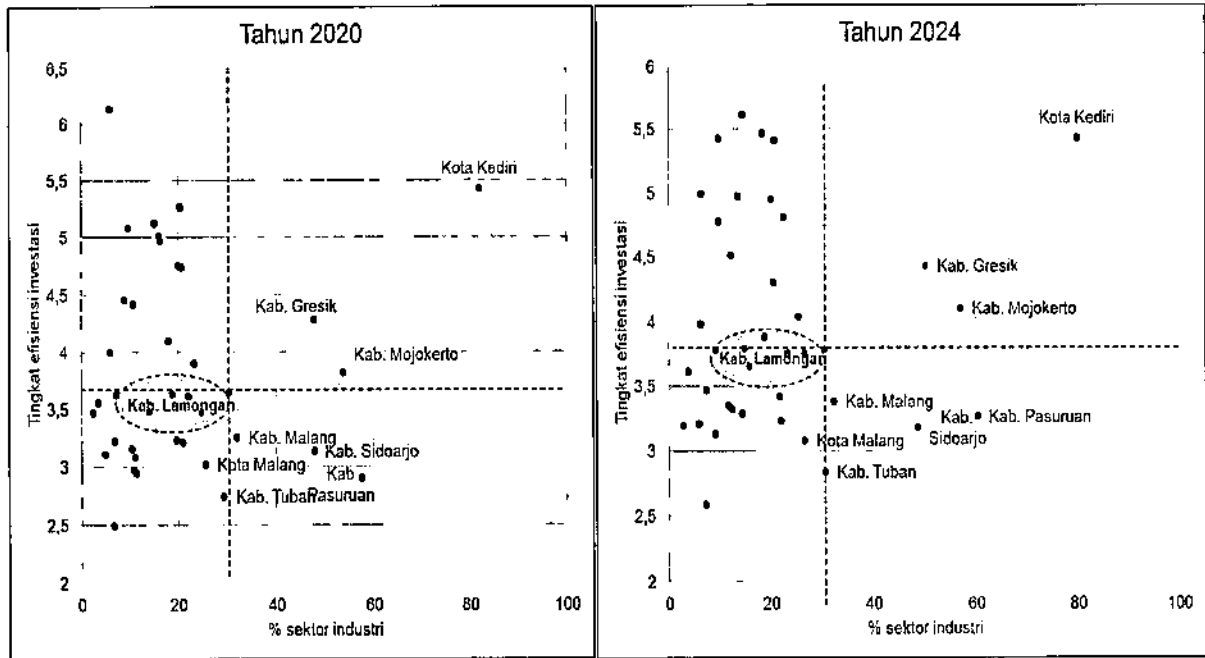


Sumber: Hasil Analisis (2025)

Fenomena inefisiensi ini menunjukkan adanya hambatan struktural dimana peningkatan investasi tidak diikuti dengan pertumbuhan output yang proporsional. Kondisi "Efisiensi Rendah" yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 mengindikasikan bahwa modal yang tertanam di sektor industri Lamongan belum bekerja secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kondisi tersebut berimplikasi pada lambatnya laju penurunan angka kemiskinan, karena sektor industri yang tidak efisien cenderung memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah dan upah yang sulit bersaing, sehingga gagal memobilisasi penduduk miskin untuk berpindah dari sektor primer ke sektor formal yang lebih produktif.

Permasalahan efisiensi industri juga dapat dianalisis dalam bentuk Tipologi Klassen yang menempatkan Lamongan dalam posisi efisiensi regional dalam konteks Jawa Timur. Data perbandingan efisiensi (ICOR) regional menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan secara konsisten berada pada kategori "Efisiensi Rendah" dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Melalui analisis grafik kuadran, dapat dilihat kaitan antara besarnya peran sektor industri terhadap PDRB dengan tingkat efisiensi investasinya. Pada grafik tahun 2020 dan 2024, titik Kabupaten Lamongan terletak pada kuadran kiri bawah. Hal ini menunjukkan bahwa Lamongan memiliki persentase sektor industri yang relatif masih kecil (di bawah 30 persen) sekaligus tingkat efisiensi investasi yang rendah. Kondisi ini sangat kontras dengan daerah seperti Kota Kediri atau Kabupaten Gresik yang memiliki pangsa industri besar sekaligus efisiensi yang lebih tinggi. Inefisiensi mengindikasikan bahwa setiap penambahan modal sektor industri di Lamongan belum menghasilkan output ekonomi yang optimal.

Gambar 3.11. Tipologi Klassen Tingkat Efisiensi Industri Berbasis ICOR



Sumber: Hasil Analisis (2025)

Persoalan utama dari rendahnya efisiensi industri (ICOR) di Lamongan adalah dampaknya yang langsung menghambat upaya pengentasan kemiskinan meskipun angka investasi terus meningkat. Hal ini dikarenakan industri yang tidak efisien cenderung memiliki nilai tambah (value added) yang kecil, sehingga kemampuan perusahaan untuk memberikan upah yang lebih baik atau menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar menjadi terbatas. Kegagalan industri dalam beroperasi secara efisien mengakibatkan sektor ini belum mampu menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat di lapisan bawah.

Dalam perspektif strategi RPKD, permasalahan tersebut menuntut pergeseran fokus kebijakan dari sekadar mengejar kuantitas nilai investasi menuju penguatan ekosistem industri yang berkualitas. Arah strategi ke depan harus diprioritaskan pada upaya penurunan biaya operasional industri melalui perbaikan konektivitas infrastruktur logistik dan simplifikasi regulasi daerah. Tanpa adanya intervensi untuk meningkatkan angka efisiensi regional (ICOR), peningkatan investasi yang masuk ke Lamongan hanya akan menjadi angka statistik pertumbuhan tanpa memberikan dampak distribusi pendapatan yang signifikan bagi masyarakat di lapisan bawah.

Selain itu, orientasi strategi penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan penguatan kapasitas teknologi pada IKM lokal agar mampu terhubung dengan rantai pasok industri besar yang lebih efisien. Dengan mendorong mekanisasi dan digitalisasi proses produksi, diharapkan nilai tambah yang dihasilkan per unit modal dapat meningkat, sehingga industri mampu memberikan margin keuntungan yang lebih baik bagi pelaku usaha sekaligus upah yang lebih layak bagi pekerja. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa sektor industri di Lamongan tidak hanya berkembang secara fisik di kawasan peruntukan industri, tetapi juga bertransformasi menjadi sektor yang tangguh, efisien, dan inklusif dalam mengentaskan kemiskinan.

3.1.9 Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi

Konsumsi merupakan salah satu indikator paling fundamental dalam mendeteksi kemiskinan karena menunjukkan kemampuan nyata rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak seperti pendapatan yang bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan sering kali sulit diukur terutama pada sektor informal, konsumsi memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana kebutuhan dasar dapat tercukupi. Melalui pengukuran konsumsi, dapat melihat kualitas hidup secara lebih realistis, apakah rumah tangga mampu membeli pangan yang cukup, memenuhi kebutuhan sandang, atau membiayai pengeluaran rutin lainnya.

Konsumsi makanan dan non-makanan dapat dijadikan indikator penting untuk mendeteksi kemiskinan karena keduanya secara langsung mencerminkan kemampuan dasar rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup. **Konsumsi makanan** adalah komponen paling mendasar: ketika pendapatan sangat terbatas, porsi terbesar pengeluaran rumah tangga biasanya terserap untuk membeli pangan. Jika sebuah rumah tangga hanya mampu membeli makanan dalam jumlah minimal, menurunkan kualitas nutrisi, atau bahkan mengurangi frekuensi makan, hal itu menjadi sinyal kuat bahwa mereka berada dalam tekanan ekonomi yang serius. Oleh karena itu, tingkat konsumsi makanan merupakan indikator paling awal dan paling sensitif untuk mengidentifikasi kerentanan.

Di sisi lain, **konsumsi non-makanan** seperti pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, sandang, dan transportasi memberi gambaran lebih luas tentang kapasitas rumah tangga untuk hidup layak. Rumah tangga miskin biasanya memprioritaskan pangan dan memangkas pengeluaran non-makanan ke tingkat yang sangat minimum. Ketika pengeluaran non-makanan rendah atau tidak stabil, itu menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar di luar pangan, termasuk kebutuhan produktif seperti sekolah anak atau biaya berobat. Karena itu, pola konsumsi makanan dan non-makanan bersama-sama menjadi jendela yang akurat untuk membaca tingkat kesejahteraan. Semakin kecil ruang rumah tangga untuk membelanjakan kebutuhan non-makanan, semakin besar kemungkinan mereka berada dalam kondisi kemiskinan atau rentan jatuh miskin.

3.1.10 Analisis Konsumsi Makanan

Berdasarkan analisis perkembangan antar waktu (2014–2024), pengeluaran makanan per kapita di Lamongan meningkat dari Rp343.480 pada tahun 2014 menjadi Rp704.189 pada tahun 2024. Kenaikan ini relatif stabil, meski terdapat fluktuasi pada tahun 2019, ketika pengeluaran menurun menjadi Rp480.093, dan sedikit penurunan pada tahun 2024 dari puncaknya di tahun 2023 sebesar Rp738.608. Tren ini mencerminkan kombinasi antara pertumbuhan daya beli rumah tangga dan kenaikan harga pangan dari tahun ke tahun. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi tertentu, rumah tangga tetap mempertahankan pengeluaran pangan sebagai prioritas utama, sehingga kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

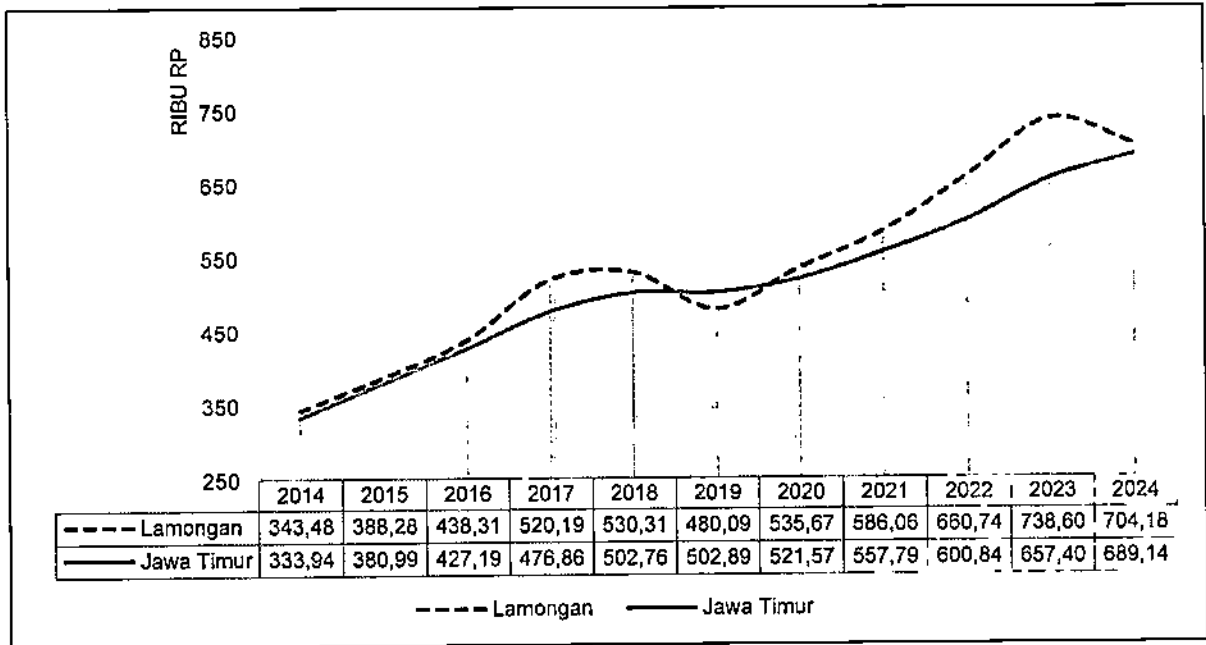
Berdasarkan analisis posisi relatif terhadap Jawa Timur, pengeluaran makanan Lamongan pada tahun 2024 (Rp704.189) sedikit lebih tinggi dibanding Jawa Timur (Rp689.148). Posisi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan Lamongan sejajar atau

bahkan sedikit lebih baik dari rata-rata provinsi. Kondisi tersebut menandakan daya beli pangan yang relatif stabil dan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, rumah tangga Lamongan relatif aman dari kekurangan pangan meskipun ada tekanan ekonomi lokal.

Dari sisi efektivitas pemerintah, intervensi seperti subsidi pangan dan bantuan tunai terbukti relatif berhasil menjaga atau meningkatkan konsumsi makanan. Tren kenaikan pengeluaran makanan menunjukkan bahwa kebijakan yang menysasar ketahanan pangan mampu melindungi rumah tangga dari kekurangan pangan. Namun, fluktuasi pada tahun 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa rumah tangga masih rentan terhadap kenaikan harga pangan dan tekanan daya beli. Hal ini menegaskan pentingnya program pemerintah yang terus menyesuaikan bantuan dengan kondisi ekonomi aktual.

Dalam hal relevansi terhadap pengentasan kemiskinan, pengeluaran makanan merupakan indikator dasar kesejahteraan rumah tangga. Konsumsi pangan yang stabil atau meningkat menandakan bahwa rumah tangga mampu bertahan dari kemiskinan ekstrem. Indikator ini juga membantu meng-identifikasi kelompok rumah tangga yang paling rentan terhadap kekurangan pangan. Dengan demikian, pengeluaran makanan menjadi salah satu alat ukur penting dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Gambar 3.12. Perkembangan Konsumsi Makanan per Kapita dalam Sebulan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Peningkatan pengeluaran makanan hingga mencapai Rp704.189 pada tahun 2024 membawa implikasi penting terhadap struktur konsumsi rumah tangga di Kabupaten Lamongan. Mengingat sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, tingginya angka pengeluaran pangan ini menunjukkan fenomena "paradoks petani", dimana produsen pangan justru harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sendiri akibat fluktuasi harga pasar. Dalam kerangka RPKD, data ini menuntut adanya strategi yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial tunai, tetapi juga pada penguatan kemandirian pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan atau optimalisasi lumbung pangan desa guna menekan ketergantungan terhadap pasar yang harganya fluktuatif.

Posisi pengeluaran makanan Lamongan yang sedikit melampaui rata-rata Jawa Timur mencerminkan adanya pergeseran pola konsumsi ke arah komoditas yang lebih bernilai gizi tinggi atau akibat dari inflasi pangan lokal yang lebih tinggi. Titik kritis yang perlu diwaspadai adalah kualitas asupan nutrisi di balik angka nominal tersebut; apakah kenaikan pengeluaran ini diiringi dengan diversifikasi pangan (protein hewani, sayur, dan buah) atau didominasi oleh kelompok padi-padian dan rokok. Strategi RPKD harus mengintegrasikan data konsumsi ini dengan program penurunan stunting, memastikan bahwa tingginya daya beli pangan juga berkorelasi positif dengan peningkatan status gizi keluarga miskin, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Penurunan pengeluaran makanan pada tahun tahun 2024 dibandingkan puncaknya di tahun 2023 (dari Rp738.608 ke Rp704.189) merupakan sinyal adanya kontraksi daya beli atau perubahan perilaku konsumsi masyarakat sebagai respon terhadap ketidakpastian ekonomi. Bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan, penurunan sekecil apapun pada alokasi pangan dapat berdampak pada pengurangan frekuensi atau kualitas makan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan ke depan perlu memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) terhadap gejolak harga pangan tingkat lokal, sehingga intervensi seperti operasi pasar atau bantuan pangan darurat dapat dilakukan secara presisi sebelum terjadi penurunan kualitas konsumsi yang lebih dalam pada rumah tangga rentan.

Berikutnya, efektivitas intervensi pemerintah dalam menjaga konsumsi pangan harus mulai dikaitkan dengan keberlanjutan infrastruktur irigasi yang telah dibahas sebelumnya di Bab II. Dengan menjamin stabilitas produksi melalui irigasi teknis di wilayah-wilayah kunci seperti Seksi Sumlaran dan Kedungpring, Pemerintah Daerah secara tidak langsung sedang melakukan stabilisasi harga pangan dari sisi hulu. Relevansi jangka panjang dari analisis konsumsi ini bagi RPKD adalah terciptanya keseimbangan antara subsidi di sisi hilir (konsumsi) dan perbaikan infrastruktur di sisi hulu (produksi), sehingga masyarakat miskin tidak hanya mampu membeli makanan, tetapi juga terlindungi dari lonjakan harga akibat kegagalan panen di tingkat lokal.

3.1.11 Analisis Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran non-makanan per kapita di Lamongan meningkat dari Rp336.631 pada tahun 2014 menjadi Rp610.344 pada tahun 2024, tetapi pertumbuhannya lebih tidak stabil dibanding konsumsi makanan. Beberapa tahun, seperti 2016–2017 dan 2019, menunjukkan penurunan atau stagnasi, yang menandakan bahwa rumah tangga cenderung memangkas pengeluaran non-makanan saat menghadapi tekanan ekonomi. Hal ini karena kebutuhan non-makanan dianggap sekunder dibanding pangan, meskipun tetap penting untuk kualitas hidup. Pola tersebut menekankan bahwa pengeluaran non-makanan sangat sensitif terhadap kemampuan ekonomi rumah tangga.

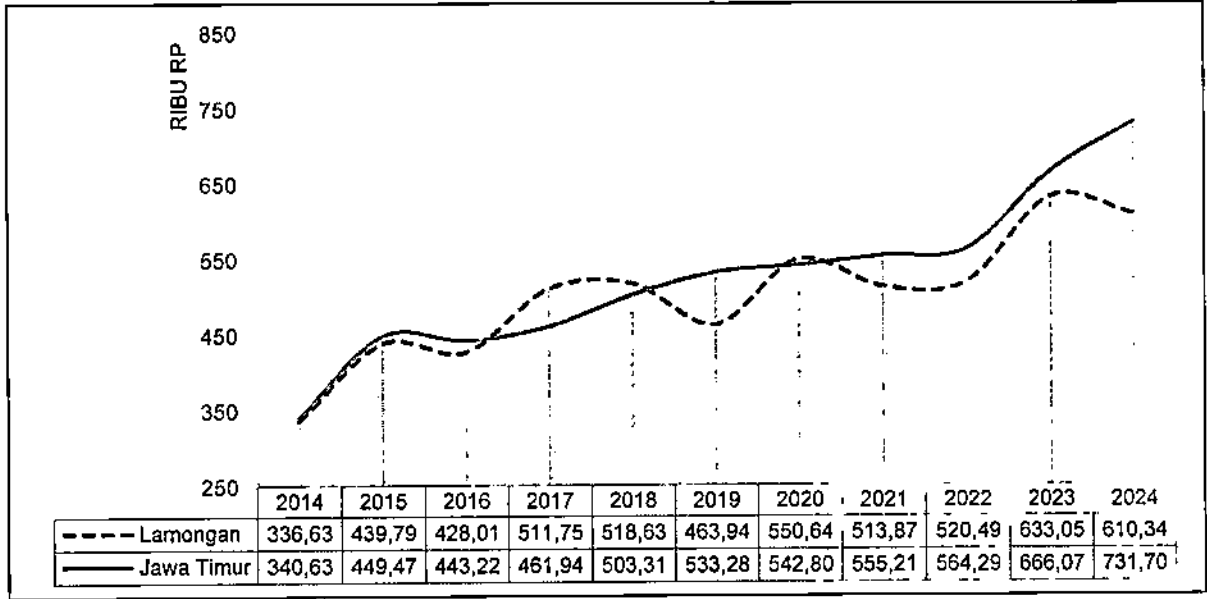
Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, pengeluaran non-makanan Lamongan pada tahun 2024 (Rp610.344) masih lebih rendah dibanding rata-rata provinsi (Rp731.700). Perbedaan ini menunjukkan keterbatasan kemampuan rumah tangga Lamongan untuk membelanjakan kebutuhan non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Akibatnya, kualitas hidup rumah tangga secara keseluruhan masih tertinggal

dibanding rata-rata provinsi. Posisi relatif ini juga menjadi indikator penting untuk menilai kesenjangan kesejahteraan di tingkat lokal.

Dari sisi efektivitas pemerintah, intervensi terkait konsumsi non-makanan terlihat kurang optimal. Fluktuasi pengeluaran dan posisi Lamongan yang lebih rendah dari rata-rata provinsi menandakan bahwa program pemerintah terkait pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program non-pangan yang lebih terarah dan merata. Tanpa intervensi yang efektif, rumah tangga tetap menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan produktif. Kesenjangan pengeluaran non-makanan yang cukup lebar dengan rata-rata provinsi ini menegaskan perlunya transformasi bantuan sosial dari sekadar pemenuhan kalori menuju subsidi biaya jasa layanan dasar.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pengeluaran non-makanan memiliki relevansi yang lebih luas dibanding konsumsi makanan. Kenaikan pengeluaran non-makanan mencerminkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan produktif, seperti pendidikan anak dan kesehatan keluarga, yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan jangka panjang. Sebaliknya, stagnasi atau penurunan pengeluaran non-makanan menandakan risiko rumah tangga tetap rentan terhadap kemiskinan, meskipun kebutuhan pangan tercukupi. Oleh karena itu, konsumsi non-makanan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Gambar 3.13. Perkembangan Konsumsi Non-Makanan per Kapita dalam Sebulan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Rendahnya proporsi pengeluaran non-makanan ini juga meng-indikasikan bahwa sebagian besar pendapatan rumah tangga di Lamongan masih terserap habis untuk kebutuhan konsumsi dasar (survival consumption). Kondisi ini menciptakan hambatan bagi pencapaian target inklusivitas dalam RPKD, karena masyarakat memiliki sisa ruang dana (uang) yang sangat sempit untuk mengakses teknologi, informasi, atau modal usaha yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Tanpa adanya kebijakan yang secara sengaja menurunkan biaya akses terhadap layanan dasar, seperti transportasi publik yang

murah dan subsidi perumahan layak, penduduk miskin di Lamongan akan terus terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak produktif.

Selain itu, volatilitas pengeluaran non-makanan yang tinggi menunjukkan lemahnya ketahanan finansial rumah tangga terhadap guncangan mendadak. Ketika terjadi kenaikan harga pangan atau biaya energi, kelompok pengeluaran ini menjadi "korban" pertama yang dipangkas, yang seringkali mencakup pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan preventif atau sarana penunjang pendidikan anak. Kondisi tersebut mempertegas bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Lamongan harus mengintegrasikan perlindungan sosial dengan stabilitas biaya hidup non-pangan, sehingga masyarakat tidak perlu mengorbankan investasi modal manusianya demi memenuhi kebutuhan perut saat ekonomi sedang melambat.

Secara jangka panjang, perbaikan pada indikator pengeluaran non-makanan akan menjadi parameter utama keberhasilan transformasi struktural yang dicanangkan Pemerintah Daerah. Peningkatan pengeluaran pada sektor-sektor seperti perumahan dan peralatan rumah tangga yang modern akan berkorelasi langsung dengan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan, yang pada gilirannya menurunkan angka penyakit menular dan meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, RPKD harus memandang peningkatan belanja non-pangan bukan sebagai perilaku konsumtif, melainkan sebagai bentuk penguatan resiliensi ekonomi masyarakat yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kab Lamongan.

Berdasarkan analisis indikator konsumsi, terlihat bahwa pengeluaran rumah tangga untuk makanan di Lamongan mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2024 dan posisinya terhadap Jawa Timur pada 2024 bahkan lebih baik. Fakta ini menandakan intervensi pemerintah relatif efektif dan tetap relevan dalam mengukur kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, konsumsi non-makanan meskipun membaik antar waktu, posisinya masih lebih buruk dibanding rata-rata Jawa Timur, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah belum efektif meskipun indikator ini tetap relevan karena mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan perlunya penguatan program pemerintah pada sektor non-makanan agar kesejahteraan rumah tangga meningkat secara menyeluruh dan risiko kemiskinan jangka panjang dapat diminimalkan.

Tabel 3.1. Masalah Kemiskinan pada Aspek Konsumsi Kabupaten Lamongan

Indikator	Aspek yang Dianalisis			
	Perkembangan Antar Waktu (2014-2024)	Posisi Relatif terhadap Jatim (2024)	Efektivitas	Relevansi
Konsumsi Makanan	Membaik	Lebih Baik	Efektif	Relevan
Konsumsi Non-Makanan	Membaik	Lebih Buruk	Tidak Efektif	Relevan

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Sintesis antara capaian konsumsi makanan yang efektif dan keteringgalan pada konsumsi non-makanan memberikan arah strategis yang jelas bagi penyusunan RPKD Kabupaten Lamongan ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan

kemiskinan harus mulai bergeser dari sekadar program perlindungan sosial yang bersifat bantalan (buffer) pangan menuju strategi pemberdayaan yang mampu menurunkan beban pengeluaran rumah tangga secara struktural pada sektor-sektor produktif. Relevansinya dalam RPKD adalah perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa penghematan pengeluaran pangan yang telah dicapai masyarakat dapat dialihkan menjadi investasi modal manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, melalui skema subsidi biaya layanan dasar yang lebih masif dan terintegrasi.

3.2. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

Indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memegang peranan penting dalam memahami dinamika kemiskinan di suatu daerah. Keduanya mencerminkan sejauh mana Penduduk Usia Kerja (PUK) mampu terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan memperoleh penghasilan yang layak.

TPT menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sebuah indikator yang sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, TPAK menggambarkan seberapa besar proporsi PUK yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sehingga memberikan petunjuk tentang potensi tenaga kerja yang benar-benar terserap dalam perekonomian.

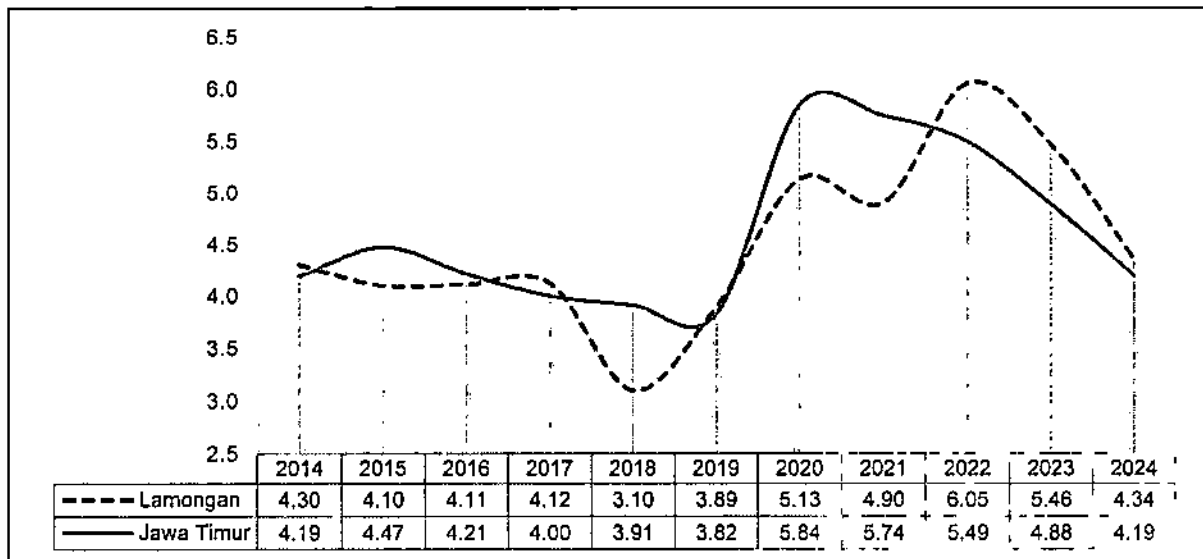
Ketika TPT tinggi dan TPAK rendah, risiko kemiskinan meningkat karena semakin banyak individu yang tidak memperoleh pendapatan atau tidak memiliki akses ke pasar kerja yang memadai. Dengan demikian, kedua indikator ini tidak hanya menggambarkan struktur pasar tenaga kerja, tetapi juga menjadi cermin ketahanan ekonomi rumah tangga dan kapasitas daerah dalam mengurangi kemiskinan.

3.2.1 Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT di Lamongan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2014–2024. Pada tahun 2014, TPT tercatat sebesar 4,30 persen, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Timur yang 4,19 persen. Selama periode berikutnya, TPT Lamongan menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah 3,10 persen pada tahun 2018. Kondisi ini menandakan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja lokal. Namun, pada tahun 2020–2022 terjadi lonjakan TPT yang signifikan, dengan puncak mencapai 6,05 persen pada tahun 2022, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, TPT kembali menurun ke 4,34 persen, menunjukkan pemulihan sebagian kondisi ketenagakerjaan dan sensitivitas pasar kerja Lamongan terhadap perubahan ekonomi serta gangguan eksternal.

Posisi TPT Lamongan terhadap Jawa Timur pada tahun 2024 menunjukkan angka 4,34 persen, sedikit lebih tinggi dibanding Jawa Timur yang sebesar 4,19 persen. Meskipun tren jangka panjang menunjukkan perbaikan, angka ini menandakan bahwa pengangguran di Lamongan masih sedikit di atas rata-rata provinsi. Posisi relatif tersebut mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperluas peluang ekonomi agar tingkat pengangguran dapat ditekan lebih rendah.

Gambar 3.14. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Fluktuasi TPT juga mencerminkan efektivitas Pemerintah Daerah dalam intervensi ketenagakerjaan. Program pelatihan kerja, bantuan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja telah memberikan dampak positif, terutama terlihat dari penurunan TPT setelah puncak pandemi pada 2022. Namun karena TPT sempat meningkat tajam, hal ini menunjukkan bahwa stabilisasi ketenaga-kerjaan masih memerlukan strategi yang lebih berkelanjutan dan proaktif, termasuk penguatan sektor padat karya dan peningkatan akses angkatan kerja ke peluang usaha formal maupun informal.

Tingginya fluktuasi TPT yang puncaknya terjadi pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Lamongan masih sangat rentan terhadap guncangan makro. Lonjakan hingga 6,05 persen mengindikasikan bahwa sektor-sektor andalan daerah belum sepenuhnya memiliki daya tahan (resilience) yang kuat untuk menyerap tenaga kerja dalam kondisi krisis. Dalam kerangka RPKD, realitas ini menjadi landasan penting untuk melakukan diversifikasi sektor lapangan kerja, sehingga ketergantungan pada satu atau dua sektor dominan dapat dikurangi melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM yang lebih inklusif bagi angkatan kerja muda.

Selain itu, posisi TPT Lamongan yang berada sedikit di atas rata-rata Jawa Timur pada tahun 2024 (4,34 persen banding 4,19 persen) mengisyaratkan adanya kesenjangan antara kualifikasi angkatan kerja lokal dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch). Meskipun jumlah penduduk miskin menurun sebagaimana dibahas sebelumnya, angka pengangguran yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang berada di zona "hampir miskin" karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Strategi RPKD perlu diarahkan pada revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan penguatan kemitraan dengan sektor industri agar lulusan pendidikan vokasi di Lamongan memiliki daya saing yang setara atau bahkan melampaui standar provinsi

Kaitan antara TPT dan kemiskinan struktural juga terlihat pada profil pengangguran di perdesaan yang seringkali bersifat musiman. Penurunan TPT ke angka 4,34 persen pada tahun 2024 memang merupakan kabar baik, namun tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta adalah pekerjaan berkualitas (decent work)

dengan upah yang layak. Tanpa kepastian pendapatan, penganggur yang baru terserap ke pasar kerja berisiko menjadi *working poor*, yaitu bekerja namun tetap miskin karena rendahnya produktivitas dan perlindungan kerja. Oleh karena itu, intervensi Pemerintah Daerah harus fokus pada penciptaan nilai tambah pada sektor basis seperti pengolahan hasil pertanian agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan stabil sepanjang tahun.

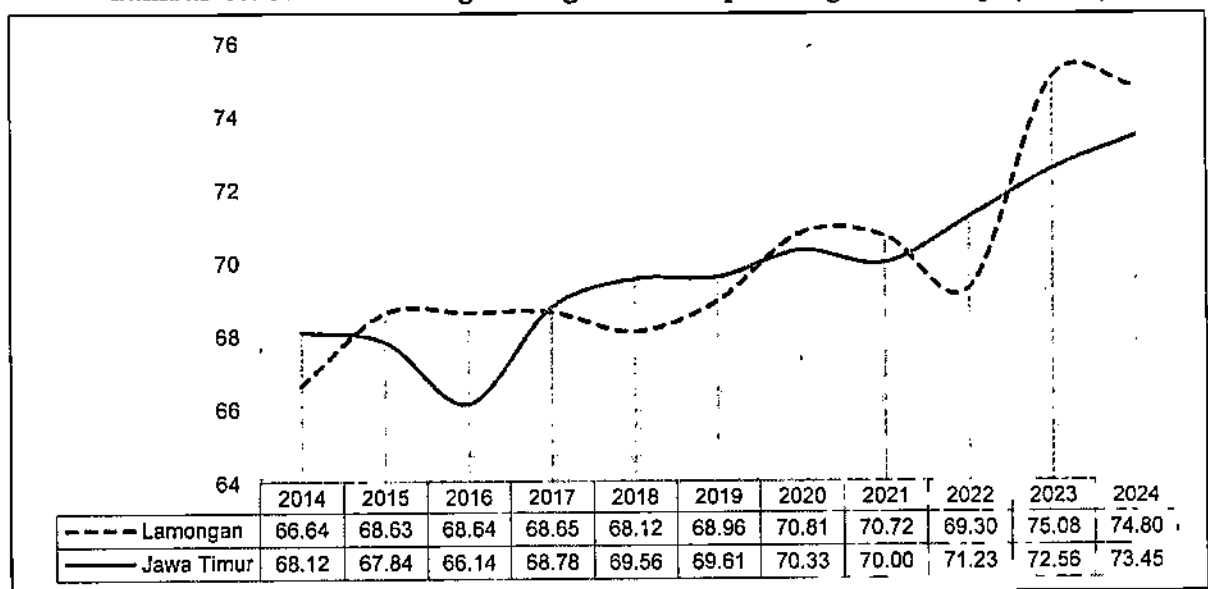
Strategi penurunan TPT dalam RPKD harus disinkronkan dengan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang telah dipetakan di bab sebelumnya. Kemudahan akses transportasi dan ketersediaan energi yang stabil di sentra-sentra produksi akan menurunkan biaya operasional usaha, yang pada gilirannya mendorong ekspansi bisnis dan pembukaan lowongan kerja baru. Dengan mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak hanya menurunkan angka pengangguran secara statistik, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi masyarakat untuk keluar dari jebakan kemiskinan.

3.2.2 Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK di Lamongan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2014-2024. Pada tahun 2014, TPAK tercatat 66,64 persen mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai 74,80 persen pada 2024. Meskipun sempat stagnan atau menurun tipis pada tahun 2018 (68,12 persen), tren jangka panjang ini menunjukkan semakin banyak pen-duduk usia kerja yang aktif memasuki pasar tenaga kerja. Peningkatan par-tisipasi sejak tahun 2019 menandakan motivasi rumah tangga untuk bekerja yang lebih tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh peluang kerja yang lebih banyak serta kebijakan pemerintah yang mendorong keterlibatan tenaga kerja.

Posisi TPAK Lamongan terhadap Jawa Timur pada tahun 2024 menunjukkan angka 74,80 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi sebesar 73,45 persen. Posisi ini mengindikasikan bahwa mobilisasi tenaga kerja di Lamongan cukup baik dan penduduk relatif siap berkontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif. Angka yang lebih tinggi dibanding provinsi juga menegaskan bahwa Lamongan memiliki potensi angkatan kerja yang lebih aktif, yang dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi lokal.

Gambar 3.15. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Kenaikan TPAK juga mencerminkan efektivitas intervensi Pemerintah Daerah. Program pelatihan vokasional, dukungan kewirausahaan, dan perluasan lapangan kerja relatif mampu mendorong penduduk usia kerja untuk aktif mencari dan melakukan pekerjaan produktif. Tingkat partisipasi yang meningkat menandakan bahwa kebijakan pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan tenaga kerja di pasar kerja, sekaligus memperluas akses penduduk terhadap peluang ekonomi.

Peningkatan TPAK yang konsisten hingga mencapai 74,80 persen pada tahun 2024 juga menunjukkan adanya pergeseran perilaku ekonomi rumah tangga di Kabupaten Lamongan yang semakin responsif terhadap peluang pasar. Fenomena ini mengindikasikan berkurangnya hambatan masuk (entry barrier) bagi angkatan kerja, termasuk peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan yang mulai banyak terserap di sektor industri pengolahan dan jasa. Dalam perspektif RPKD, tingginya TPAK merupakan aset strategis karena menunjukkan bahwa penduduk usia produktif memiliki dorongan mandiri yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga intervensi Pemerintah Daerah tinggal diarahkan pada penyediaan instrumen pendukung seperti permodalan dan perlindungan tenaga kerja.

Meskipun mobilisasi tenaga kerja di Lamongan melampaui rata-rata Jawa Timur, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa tingginya partisipasi ini berkorelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan secara drastis. Tingginya TPAK yang dibarengi dengan angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata provinsi mengisyaratkan adanya fenomena "bekerja namun tetap miskin", dimana penduduk aktif bekerja tetapi berada di sektor-sektor dengan produktivitas dan upah yang rendah. Oleh karena itu, strategi RPKD perlu difokuskan pada upaya eskalasi kualitas pekerjaan, dari sektor informal menuju sektor formal atau sektor mandiri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, agar partisipasi kerja yang tinggi benar-benar mampu mengangkat rumah tangga keluar dari garis kemiskinan.

Selain itu, tingginya TPAK di Lamongan harus diimbangi dengan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif untuk menjaga resiliensi angkatan kerja. Dengan banyaknya penduduk yang aktif di pasar kerja, risiko kerentanan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja juga meningkat, yang jika tidak dimitigasi, dapat menyebabkan rumah tangga jatuh kembali ke lubang kemiskinan. Relevansinya bagi penyusunan RPKD adalah pentingnya mengintegrasikan program perluasan kesempatan kerja dengan perlindungan sosial bagi pekerja rentan, sehingga semangat kerja masyarakat yang tinggi didukung oleh jaring pengaman yang kokoh.

Secara keseluruhan, dinamika TPT dan TPAK Lamongan dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa pasar kerja daerah saat ini berada dalam proses penyesuaian struktural yang masih berlangsung. Penurunan TPT pasca pandemi disertai lonjakan TPAK menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang masuk ke pasar kerja, meskipun belum seluruhnya terserap secara optimal. Dibandingkan Jawa Timur, Lamongan memperlihatkan performa yang relatif kompetitif, yaitu terdampak lebih ringan saat pandemi, namun pemulihannya sempat tersendat sebelum kembali menguat pada 2024. Pola ini mengisyaratkan bahwa pondasi ekonomi lokal cukup tangguh, tetapi tetap

memerlukan penguatan sektor-sektor pencipta lapangan kerja berkualitas agar partisipasi tenaga kerja yang tinggi dapat berbanding lurus dengan penurunan pengangguran secara berkelanjutan.

Tabel 3.2. Masalah Kemiskinan pada Aspek Ketenagakerjaan

Indikator	Aspek yang Dianalisis			
	Perkembangan Antar Waktu (2014-2024)	Posisi Relatif terhadap Jatim (2024)	Efektivitas	Relevansi
TPT	Memburuk	Lebih Buruk	Tidak Efektif	Relevan
TPAK	Membaik	Lebih baik	Efektif	Relevan

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Ketidakselarasan antara capaian TPAK yang tinggi namun TPT yang masih cenderung memburuk (lebih tinggi dari rata-rata provinsi) memberikan sinyal kuat bagi strategi RPKD untuk melakukan intervensi pada sisi permintaan tenaga kerja (demand side). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi masyarakat Lamongan untuk bekerja sangat besar, namun daya serap sektor-sektor ekonomi formal belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Oleh karena itu, strategi RPKD tidak boleh lagi hanya berfokus pada pelatihan skill (supply side), tetapi harus didorong pada penciptaan ekosistem investasi padat karya dan penguatan rantai pasok industri lokal yang mampu mengonversi semangat kerja masyarakat menjadi penghasilan tetap yang layak.

Relevansi temuan ini terhadap RPKD juga menuntut adanya kebijakan transformasi sektoral yang lebih agresif. Mengingat sebagian besar angkatan kerja di Lamongan masih berada di sektor pertanian yang bersifat musiman, Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi transisi tenaga kerja ke sektor industri pengolahan (hilirisasi) atau jasa produktif. Dengan meningkatkan nilai tambah produk lokal di dalam wilayah sendiri, ketergantungan pada pekerjaan informal yang rentan dapat dikurangi, sehingga fluktuasi TPT yang tajam di masa depan dapat dihindari melalui ketersediaan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan.

3.3. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG KESEHATAN

Aspek kesehatan memainkan peran penting dalam memahami dinamika kemiskinan, dan salah satu indikator yang paling informatif adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi biasanya menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang memadai, serta lingkungan hidup yang sehat, faktor-faktor yang secara langsung menekan panjang usia hidup penduduk.

Secara metodologis, UHH dihitung berdasarkan probabilitas seseorang untuk tetap hidup pada setiap kelompok umur, sehingga indikator ini menangkap kualitas kesehatan masyarakat secara komprehensif, mulai dari tingkat kematian bayi, kejadian penyakit, hingga efektivitas layanan kesehatan dasar. Dengan logika tersebut, rendahnya UHH sering kali mencerminkan tingginya risiko kesehatan yang dialami kelompok miskin, sementara peningkatan UHH mengindikasikan perbaikan kesejahteraan, keberhasilan layanan kesehatan, dan menurunnya kerentanan yang terkait dengan kemiskinan.

Selama satu dekade terakhir, UHH di Lamongan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan stabil. Pada tahun 2014, UHH Lamongan berada di angka 71,47 tahun, kemudian terus naik setiap tahun hingga mencapai 73,32 tahun pada 2024. Kenaikan lebih

dari 1,8 tahun dalam sepuluh tahun ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam aspek kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Kurva yang meningkat secara bertahap ini menunjukkan keberhasilan upaya penurunan angka kematian, peningkatan layanan kesehatan dasar, gizi, sanitasi, dan pengendalian penyakit, sekaligus menunjukkan bahwa risiko kesehatan populasi semakin menurun. Konsistensi kenaikan tanpa adanya tahun penurunan juga menegaskan bahwa pembangunan kesehatan di Lamongan bersifat berkelanjutan, bahkan tetap tumbuh di tengah tekanan pandemi pada awal 2020-an.

Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, UHH Lamongan secara konsisten berada di posisi yang lebih tinggi selama seluruh periode 2014–2024. Pada 2014, selisih antara keduanya sebesar 1,02 tahun, dan selisih ini tetap bertahan hingga satu dekade berikutnya, dengan Lamongan mencapai 73,32 tahun sementara Jawa Timur berada di 72,22 tahun pada 2024. Meskipun kedua wilayah menunjukkan tren peningkatan yang hampir paralel, Lamongan selalu unggul sekitar satu tahun lebih panjang. Pola ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi ketahanan hidup penduduk Lamongan cenderung lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Bahkan ketika pandemi COVID-19 melanda, baik Lamongan maupun Jawa Timur masih mempertahankan tren positif tanpa mengalami penurunan UHH. Kondisi demikian menandakan ketahanan sistem kesehatan dan keberlanjutan pelayanan dasar yang relatif terjaga.

Dari sisi efektivitas pemerintah, peningkatan UHH Lamongan menunjukkan keberhasilan kebijakan kesehatan dan pembangunan sosial yang dijalankan secara berkelanjutan. Intervensi seperti peningkatan akses layanan kesehatan, imunisasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta program gizi dan pendidikan kesehatan masyarakat terbukti efektif dalam memperpanjang usia harapan hidup penduduk. Stabilitas tren selama pandemi juga mengindikasikan bahwa layanan kesehatan dasar mampu bertahan dan tetap tersedia bagi masyarakat, meski terjadi tekanan pada sistem kesehatan.

Secara relevansi terhadap pengentasan kemiskinan, UHH menjadi indikator penting karena kesehatan yang baik memungkinkan penduduk produktif lebih lama, mengurangi biaya kesehatan yang dapat membebani rumah tangga miskin, dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga. Peningkatan UHH berimplikasi langsung pada kualitas hidup masyarakat dan kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, perbaikan UHH tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Lamongan.

Analisis aspek ketenagakerjaan menunjukkan bahwa UHH di Lamongan mengalami perbaikan yang konsisten selama periode 2014–2024, dengan tren membaik yang menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Posisi relatif UHH Lamongan terhadap Jawa Timur pada 2024 juga lebih baik, menandakan bahwa kondisi kesehatan dan faktor sosial-ekonomi yang mendukung ketahanan hidup penduduk Lamongan lebih unggul dibandingkan rata-rata provinsi. Dari sisi efektivitas, peningkatan UHH ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan intervensi kesehatan, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan pengendalian penyakit, yang mampu mempertahankan tren positif bahkan di tengah pandemi COVID-19. Secara relevansi terhadap pengentasan kemiskinan, UHH yang tinggi

menunjukkan penduduk lebih sehat dan produktif, mengurangi beban biaya kesehatan rumah tangga, serta meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, sehingga indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan di Lamongan.

Tabel 3.3. Masalah Kemiskinan pada Aspek Kesehatan

Indikator	Aspek yang Dianalisis			
	Perkembangan Antar Waktu (2014-2024)	Posisi Relatif terhadap Jatim (2024)	Efektivitas	Relevansi
Umur Harapan Hidup	Membaik	Lebih baik	Efektif	Relevan

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) yang terus membaik dan berada di atas rata-rata provinsi menunjukkan bahwa investasi pada sektor kesehatan di Kabupaten Lamongan telah berhasil membangun fondasi kualitas fisik masyarakat yang tangguh. Namun, dalam konteks penanggulangan kemiskinan, tren peningkatan harapan hidup ini membawa implikasi strategis pada munculnya risiko beban ketergantungan lansia (ageing population) di masa depan, terutama pada rumah tangga miskin. Oleh karena itu, arah strategi RPKD yang dituangkan dalam Bab IV tidak boleh lagi hanya terfokus pada intervensi kesehatan dasar dan penurunan angka kematian, melainkan harus mulai mengintegrasikan program perlindungan sosial lanjut usia yang produktif serta penguatan sistem perawatan jangka panjang (long-term care). Hal ini penting untuk memastikan bahwa bertambahnya usia penduduk Lamongan tidak berubah menjadi beban ekonomi baru yang dapat memperdalam jurang kemiskinan, melainkan tetap menjadi sumber daya yang sehat dan memiliki ketahanan finansial.

3.4. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG PENDIDIKAN

Aspek pendidikan memegang peran sentral dalam dinamika kemiskinan karena menentukan kualitas modal manusia yang pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap peluang pekerjaan, tingkat pendapatan, dan mobilitas sosial. Dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi kunci untuk membaca bagaimana akses dan pengalaman pendidikan membentuk kerentanan atau ketahanan rumah tangga terhadap kemiskinan. RLS menggambarkan capaian pendidikan faktual penduduk usia 25 tahun ke atas, sehingga mencerminkan kualitas tenaga kerja saat ini. Sementara itu, HLS mencerminkan seberapa panjang seorang anak diproyeksikan mengenyam pendidikan, sehingga menjadi gambaran masa depan kualitas sumber daya manusia. Ketika kedua indikator ini rendah, peluang penduduk untuk memasuki pekerjaan produktif juga semakin sempit, yang secara langsung meningkatkan risiko kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan mutu dan durasi pendidikan menjadi fondasi jangka panjang yang paling kuat untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

3.4.1 Analisis Kualitas Pendidikan dan Belanja Pendidikan

Dalam konteks analisis strategi RPKD, keterkaitan antara alokasi anggaran dan output pendidikan menjadi krusial untuk memastikan bahwa investasi modal manusia dilakukan secara efisien. Data korelasi menunjukkan angka 0,00 (Tidak Signifikan) yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di daerah belum sepenuhnya

linier dengan besaran belanja pendidikan yang dikucurkan. Hal ini menempatkan Lamongan pada tantangan untuk menggeser fokus kebijakan dari sekadar pemenuhan kuantitas anggaran menuju peningkatan efektivitas dan kualitas belanja (*quality of spending*).

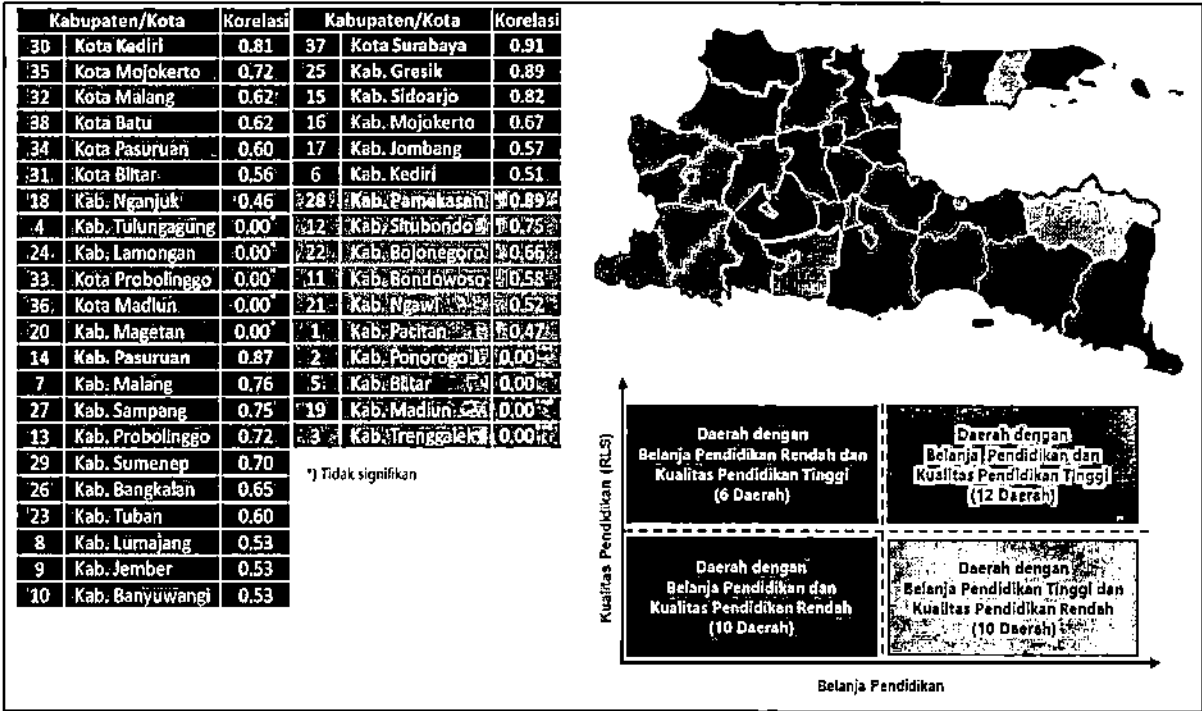
Dengan mengoptimalkan ketepatan sasaran belanja pada program-program yang berdampak langsung terhadap pengurangan angka putus sekolah dan penguatan kompetensi lulusan, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pada sektor pendidikan mampu menjadi mesin penggerak penanggulangan kemiskinan non-pangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tipologi wilayah, Kabupaten Lamongan menempati posisi strategis di Kuadran Biru (Kanan Atas), yang mengategorikannya sebagai Daerah dengan Belanja Pendidikan Tinggi dan Kualitas Pendidikan Tinggi. Posisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki komitmen anggaran yang besar terhadap sektor pendidikan, yang dibarengi dengan capaian kualitas modal manusia (RLS) yang juga tinggi di atas rata-rata provinsi.

Dalam kerangka RPKD, keberadaan Lamongan di kuadran ideal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan sudah berada pada jalur yang tepat (*on the right track*). Tantangan selanjutnya bagi Lamongan adalah mempertahankan konsistensi belanja tersebut sembari terus menyempurnakan efisiensi internal agar korelasi antara anggaran dan kualitas output semakin signifikan, guna memastikan keberlanjutan pemutusan rantai kemiskinan antar generasi.

Meskipun Kabupaten Lamongan berada pada kuadran ideal dengan belanja dan kualitas pendidikan yang tinggi, masih terdapat permasalahan struktural terkait relevansi antara luaran pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Angka HLS yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja formal yang mampu menyerap lulusan diploma maupun sarjana secara optimal, sehingga kondisi ini menciptakan risiko pengangguran terdidik.

Gambar 3.16. Kuadran Belanja Pendidikan dan Kualitas Pendidikan



Sumber: Hasil Analisis (2025)

Orientasi strategi dalam RPKD harus difokuskan pada penguatan sinergitas antara sektor pendidikan dan sektor ekonomi unggulan melalui model link and match yang lebih agresif. Pemerintah Daerah perlu mendorong transformasi kurikulum pada lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar lebih adaptif terhadap potensi hilirisasi pertanian dan perikanan di Lamongan. Strategi ini bertujuan agar lulusan dari keluarga miskin tidak hanya memiliki ijazah dengan masa sekolah yang panjang, tetapi juga mengantongi sertifikasi keahlian yang memiliki daya tawar tinggi di industri, sehingga mereka dapat segera masuk ke dunia kerja dan menjadi pengungkit ekonomi utama bagi keluarga mereka.

Selain itu, permasalahan efektivitas belanja pendidikan perlu diatasi dengan mempertajam sasaran bantuan pendidikan bagi penduduk di kantong-kantong kemiskinan. Strategi RPKD diarahkan pada pemberian beasiswa afirmatif yang tidak hanya mencakup biaya SPP, tetapi juga biaya penunjang pendidikan lainnya yang seringkali menjadi penyebab tersembunyi anak putus sekolah di keluarga miskin. Dengan memastikan bahwa belanja pendidikan yang tinggi tersebut benar-benar menysasar kelompok desil terendah, Lamongan dapat memperkecil kesenjangan kualitas modal manusia antarwilayah dan menjamin mobilitas sosial vertikal yang lebih merata di seluruh kecamatan.

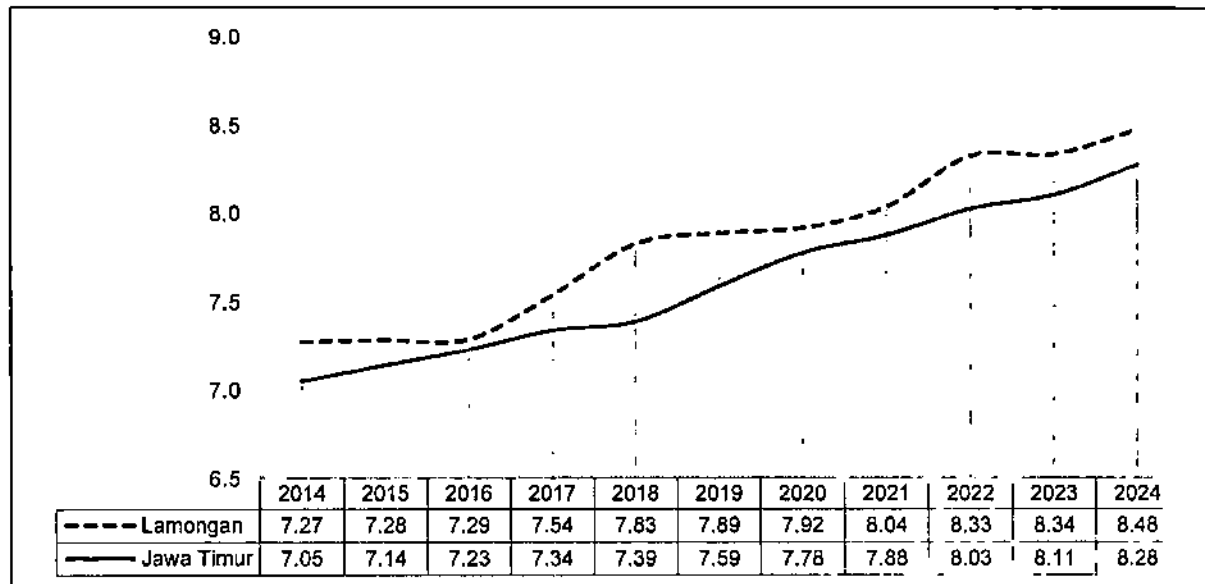
Terakhir, strategi penanggulangan kemiskinan melalui jalur pendidikan harus diintegrasikan dengan penciptaan ekosistem kewirausahaan muda. Mengingat tingginya HLS, orientasi strategi tidak hanya menyiapkan tenaga kerja untuk industri, tetapi juga mencetak wirausaha baru berbasis teknologi dan inovasi lokal. Dengan memberikan akses permodalan dan pendampingan bisnis bagi lulusan baru, Pemerintah Daerah dapat mengubah potensi modal manusia yang tinggi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

3.4.2 Analisis Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS di Lamongan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang 2014–2024. Dari posisi 7,27 tahun pada 2014, angka ini terus naik hingga mencapai 8,48 tahun pada 2024. Kenaikan hampir satu tahun sekolah dalam satu dekade menandakan perbaikan akses dan penyelesaian pendidikan dasar hingga menengah di masyarakat. Percepatan peningkatan terutama terjadi setelah 2017, menunjukkan bahwa intervensi pendidikan dan meluasnya akses sekolah mulai memberikan dampak nyata terhadap akumulasi modal manusia di Lamongan.

Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, RLS Lamongan secara umum berada sedikit lebih tinggi di seluruh periode pengamatan. Pada 2014, selisih Lamongan dengan Jawa Timur sekitar 0,22 tahun, dan selisih tersebut melebar hingga 0,20 tahun pada 2024 (8,48 vs 8,28). Meskipun kedua wilayah menunjukkan tren peningkatan, Lamongan bergerak lebih cepat, terutama pada periode 2017–2022 ketika gapnya cukup konsisten. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Lamongan relatif lebih mampu mempertahankan anak di bangku sekolah dalam waktu yang lebih lama dibandingkan rata-rata provinsi.

Gambar 3.17. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Dari sisi efektivitas, peningkatan RLS Lamongan menunjukkan bahwa kebijakan dan program pendidikan Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan lama sekolah, memperbaiki kualitas pendidikan, dan menurunkan putus sekolah. Intervensi yang efektif ini memperkuat akumulasi modal manusia, yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan kapasitas ekonomi dan produktivitas penduduk.

Secara relevansi terhadap pengentasan kemiskinan, RLS yang lebih tinggi berimplikasi langsung pada kemampuan rumah tangga meningkatkan penghasilan di masa depan, karena pendidikan yang lebih lama meningkatkan peluang kerja dan keterampilan produktif. Dengan demikian, peningkatan RLS tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan pendidikan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di Lamongan.

Meski demikian, tren RLS positif hingga mencapai 8,48 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Lamongan secara formal baru menuntaskan pendidikan hingga tingkat kelas 2 atau 3 SMP. Dalam konteks persaingan kerja modern dan target RPKD,

capaian ini masih menyisakan tantangan besar karena belum memenuhi standar Wajib Belajar 12 Tahun. Kesenjangan antara masa sekolah riil dengan kebutuhan kualifikasi industri (minimal lulusan SMA/SMK) berpotensi menjadi hambatan bagi penduduk miskin untuk mengakses lapangan kerja sektor formal yang menawarkan upah lebih tinggi dan perlindungan sosial yang lebih baik.

Relevansi RLS terhadap pengentasan kemiskinan di Lamongan harus dilihat dari sisi kualitas dan relevansi keahlian (skill relevance). Pendidikan yang lebih lama harus dibarengi dengan penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan teknis yang sesuai dengan potensi unggulan daerah, seperti agribisnis dan kelautan. Jika peningkatan RLS tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang relevan di tingkat lokal, risiko terjadinya migrasi tenaga kerja terdidik (brain drain) ke luar daerah akan semakin besar, sehingga investasi modal manusia yang telah dilakukan Pemerintah Daerah tidak memberikan dampak optimal bagi penurunan angka kemiskinan domestik.

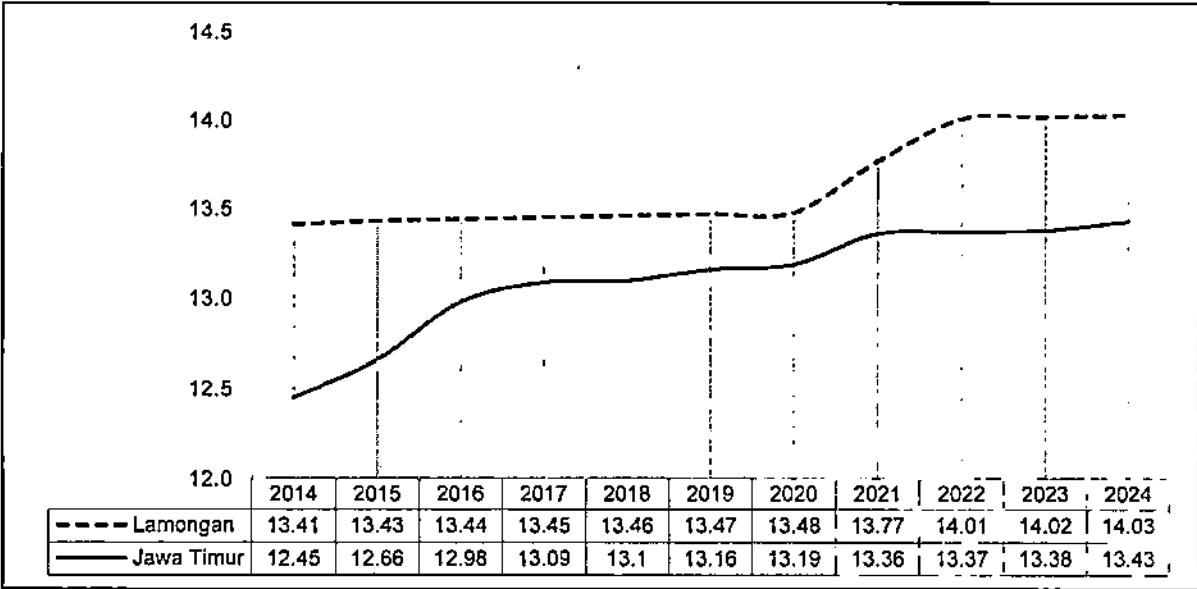
Berikutnya, strategi RPKD perlu memberikan perhatian khusus pada kelompok penduduk usia dewasa yang sudah melewati usia sekolah namun memiliki RLS rendah melalui program pendidikan kesetaraan atau pelatihan berbasis kompetensi. Hal ini krusial karena kelompok inilah yang saat ini mendominasi struktur kepala rumah tangga miskin di Lamongan. Dengan memberikan kesempatan "belajar sepanjang hayat" bagi mereka, Pemerintah Daerah tidak hanya fokus pada generasi masa depan, tetapi juga memberikan solusi jangka pendek untuk meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga yang saat ini sedang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat keterbatasan pendidikan formal di masa lalu.

3.4.3 Analisis Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS di Kabupaten Lamongan memperlihatkan tren positif yang stabil. Angka HLS meningkat dari 13,41 tahun pada 2014 menjadi 14,03 tahun pada 2024. Dengan kata lain, seorang anak yang lahir pada 2024 di Lamongan di proyeksikan menempuh pendidikan hingga jenjang lebih tinggi, mendekati level diploma atau awal sarjana. Lonjakan terbesar terlihat pada 2021–2022, ketika HLS naik dari 13,77 tahun menjadi 14,01 tahun, menunjukkan adanya ekspansi akses pendidikan lanjutan atau meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan jangka panjang.

Dibandingkan Jawa Timur, HLS Lamongan selalu berada di atas provinsi sepanjang satu dekade. Pada 2014, selisihnya berkisar 0,96 tahun dan pada 2024 selisih tersebut menjadi 0,60 tahun. Meski Jawa Timur juga mengalami peningkatan bertahap dari 12,45 tahun pada 2014 menjadi 13,43 tahun pada 2024, pertumbuhan Lamongan tetap lebih kuat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan masyarakat Lamongan cenderung lebih progresif, serta mencerminkan peluang masa depan yang lebih baik dalam mobilitas sosial dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan antar generasi.

Gambar 3.18. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Dari sisi efektivitas, peningkatan HLS di Lamongan mencerminkan ke-berhasilan Pemerintah Daerah dalam memperluas akses pendidikan, mening-katkan mutu sekolah, dan mendorong partisipasi anak-anak hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lonjakan HLS, terutama pada periode 2021–2022, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan mampu mendorong anak-anak untuk menempuh pendidikan lebih lama dan meng-akses pendidikan lanjutan, sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan di semua jenjang.

HLS yang tinggi berimplikasi pada peningkatan kapasitas generasi muda dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta mendorong mobilitas sosial. Dengan demikian, peningkatan HLS menjadi instrumen strategis bagi Peme-rintah Daerah untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lamongan.

Selain itu, pencapaian HLS yang menyentuh angka 14,03 tahun pada tahun 2024 menandakan bahwa Kabupaten Lamongan telah berhasil membangun ekosistem pendidikan yang mampu menumbuhkan optimisme lintas generasi. Secara sosiologis, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas orang tua di Lamongan, termasuk dari kalangan kurang mampu, kini memiliki aspirasi agar anak-anak mereka menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Dalam kerangka RPKD, ekspektasi pendidikan yang tinggi ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk mengubah profil kemiskinan daerah dari yang semula berbasis sektor primer (buruh tani/ nelayan) menjadi tenaga kerja terampil di sektor sekunder dan tersier.

Namun, tingginya angka harapan juga membawa tantangan baru bagi Pemerintah Daerah terkait ketersediaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi daerah tidak mampu menciptakan ruang bagi lulusan diploma dan sarjana, maka risiko "pengangguran terdidik" atau migrasi penduduk potensial keluar daerah (out-migration) akan meningkat. Oleh karena itu, strategi RPKD harus mulai mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan

pengembangan sektor-sektor berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dan hilirisasi industri lokal.

Selain itu, kesenjangan antara HLS (14,03 tahun) dengan RLS (8,48 tahun) yang cukup lebar mencerminkan adanya lag atau jeda waktu dalam akumulasi modal manusia di Lamongan. Sementara generasi muda memiliki peluang menempuh pendidikan lebih tinggi, generasi tua yang saat ini mendominasi angkatan kerja produktif masih memiliki bekal pendidikan yang terbatas. Intervensi RPKD perlu memberikan perhatian pada program transisi dan beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran bagi keluarga miskin (seperti program "Satu Keluarga Satu Sarjana"), guna memastikan bahwa tingginya harapan lama sekolah ini benar-benar menjadi realitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendali oleh hambatan finansial.

Berikutnya, efektivitas HLS dalam menurunkan kemiskinan jangka panjang sangat bergantung pada kualitas layanan pendidikan di setiap jenjang. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memastikan bahwa peningkatan durasi sekolah juga diikuti dengan penguatan kompetensi digital dan soft skills yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global. Dengan demikian, peningkatan HLS tidak hanya akan menjadi angka statistik semata, melainkan bertransformasi menjadi kekuatan pendorong utama bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan di Lamongan.

Secara keseluruhan, dinamika RLS dan HLS menunjukkan bahwa Lamongan berada pada jalur peningkatan kualitas pendidikan yang lebih cepat dibandingkan Jawa Timur. Peningkatan kedua indikator ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan memperluas akses pendidikan, tetapi juga membentuk fondasi penting bagi penanggulangan kemiskinan jangka panjang. Dengan semakin banyak penduduk yang menempuh pendidikan lebih lama dan gene-rasi muda yang memiliki ekspektasi belajar lebih tinggi, Lamongan memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan berdaya saing. Kondisi ini pada akhirnya akan memperkuat kapasitas ekonomi rumah tangga, memperluas peluang kerja, dan menjadi salah satu kunci strategis dalam memutus rantai kemiskinan struktural di daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis aspek pendidikan di Lamongan menunjukkan bahwa baik RLS maupun HLS mengalami perbaikan yang konsisten selama periode 2014–2024, dengan tren membaik yang mencerminkan keberhasilan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Posisi kedua indikator ini relatif lebih baik dibanding Jawa Timur pada 2024, menandakan bahwa kondisi pendidikan di Lamongan unggul dan orientasi masyarakat terhadap pendidikan lebih progresif. Dari sisi efektivitas, perbaikan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu sekolah, dan mendorong partisipasi anak-anak hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 3.4. Masalah Kemiskinan pada Aspek Pendidikan

Indikator	Aspek yang Dianalisis			
	Perkembangan Antar Waktu (2014-2024)	Posisi Relatif terhadap Jatim (2024)	Efektivitas	Relevansi

Rata-rata Lama Sekolah	Membaik	Lebih baik	Efektif	Relevan
Harapan Lama Sekolah	Membaik	Lebih baik	Efektif	Relevan

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Capaian indikator pendidikan yang secara konsisten berada di atas rata-rata Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki modal manusia yang sangat potensial untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Namun, strategi penanggulangan kemiskinan ke depan harus mampu menyelaraskan tingginya modal manusia ini dengan ketersediaan lapangan kerja yang relevan di tingkat lokal. Jika tidak, tingginya angka HLS hanya akan mendorong migrasi penduduk usia produktif ke luar daerah, sehingga investasi pendidikan yang telah dilakukan tidak memberikan dampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan domestik.

Oleh karena itu, arah kebijakan dalam RPKD perlu difokuskan pada penguatan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik, seperti pengembangan agribisnis modern dan industri pengolahan berbasis potensi lokal. Selain itu, Pemerintah Daerah harus memastikan adanya program afirmatif berupa beasiswa pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan penempatan kerja atau bantuan permodalan bagi lulusan dari keluarga miskin.

3.5. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

Akses terhadap infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, sanitasi layak, dan air minum layak merupakan fondasi penting dalam memahami dan mengurangi kemiskinan. Ketiga indikator ini tidak hanya mencerminkan kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga menentukan kualitas kesehatan, produktivitas, dan stabilitas sosial-ekonomi suatu rumah tangga. Sanitasi dan akses air bersih berperan langsung dalam menekan risiko penyakit, sementara kondisi rumah yang layak menjadi penentu kenyamanan, keamanan, serta kemampuan keluarga untuk menjalani aktivitas produktif. Di banyak daerah, kemiskinan seringkali berakar pada keterbatasan infrastruktur dasar ini, yang kemudian memicu masalah berantai seperti rendahnya kualitas kesehatan, tingginya pengeluaran medis, hingga terbatasnya kesempatan kerja. Dengan demikian, memantau perkembangan sanitasi, air minum, dan kelayakan hunian menjadi langkah kunci untuk menilai seberapa inklusif pembangunan berjalan dan sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat.

3.5.1 Analisis Ketersediaan Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni di Lamongan mengalami dinamika yang cukup tajam selama enam tahun terakhir. Pada 2019, proporsi rumah layak huni mencapai 67,29 persen, namun turun drastis pada 2021 hingga hanya 63,91 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan kualitas permukiman, yang bisa dipicu oleh dampak pandemi terhadap kemampuan perawatan rumah tangga. Meski begitu, tren mulai berbalik naik pada 2023 dan meningkat signifikan menjadi 71,34 persen pada 2024. Kenaikan ini menandakan perbaikan kualitas permukiman yang mulai stabil dan hasil dari peningkatan program hunian layak serta pembangunan infrastruktur perdesaan.

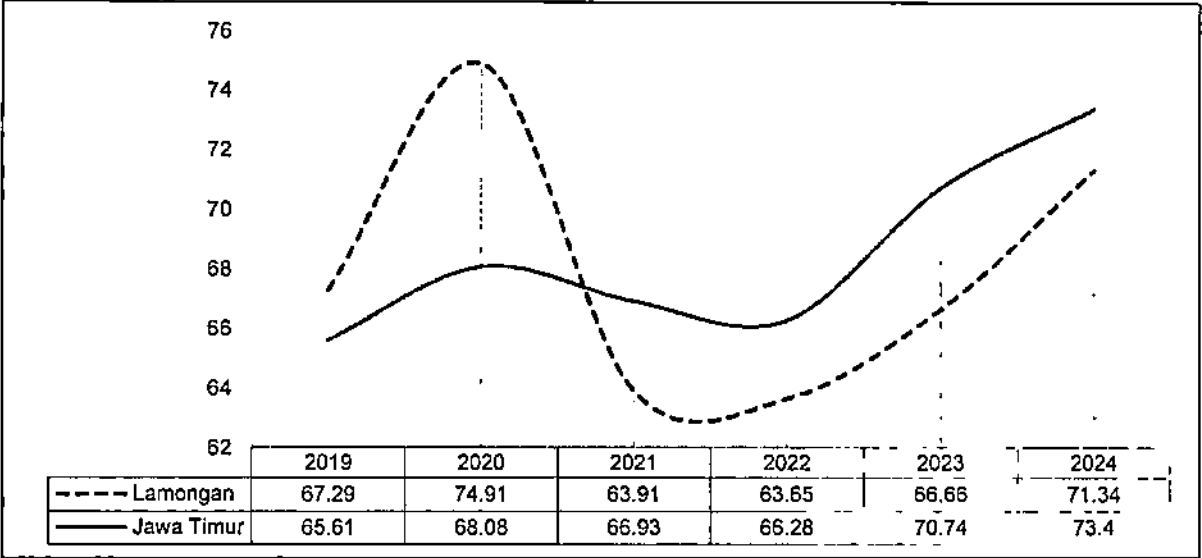
Jika dibandingkan Jawa Timur, Lamongan sempat tertinggal dalam penyediaan rumah layak huni. Pada 2019–2021, proporsi rumah layak huni di Lamongan berada di

bawah rata-rata provinsi. Namun pada 2023 dan 2024, jarak tersebut mulai menutup. pada 2024 Lamongan kembali mendekati capaian Jawa Timur (71,34 persen vs 73,40 persen), menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hunian di Lamongan bergerak relatif lebih cepat daripada provinsi.

Dari sisi efektivitas, peningkatan ketersediaan rumah layak huni di Lamongan mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program hunian layak, pembangunan infrastruktur perdesaan, serta intervensi kebijakan yang bertujuan memperbaiki kualitas permukiman masyarakat. Tren peningkatan yang signifikan pada 2023–2024 menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil, memperbaiki kondisi hunian masyarakat, dan memperkuat akses rumah layak di seluruh desa dan wilayah kota.

Peningkatan rumah layak huni berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan rumah tangga. Kondisi hunian yang lebih baik juga mengurangi kerentanan penduduk miskin terhadap risiko sosial dan ekonomi, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan stabilitas keluarga. Dengan demikian penyediaan hunian layak menjadi instrumen strategis yang penting dalam upaya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lamongan

Gambar 3.19. Perkembangan Rumah Layak Huni



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Pencapaian proporsi rumah layak huni yang melonjak hingga 71,34 persen pada tahun 2024 menunjukkan adanya komitmen kuat dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, namun angka ini juga mengisyaratkan adanya tantangan pembiayaan perumahan bagi kelompok berpendapatan rendah. Kenaikan signifikan pasca-pandemi kemungkinan besar didorong oleh program stimulasi seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang menysasar kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Dalam perspektif RPKD, keberhasilan ini harus dijaga agar tidak terjadi degradasi kualitas hunian di masa depan, terutama bagi keluarga miskin yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan pemeliharaan bangunan secara mandiri di tengah kenaikan harga material konstruksi.

Relevansi rumah layak huni dalam pengentasan kemiskinan di Lamongan juga berkaitan dengan indikator kesehatan yang telah dibahas sebelumnya, seperti penurunan

angka stunting dan penyakit menular. Rumah yang memiliki ventilasi baik, pencahayaan cukup, dan struktur bangunan yang kokoh merupakan prasyarat mutlak bagi produktivitas anggota rumah tangga. Strategi RPKD yang akan dituangkan di Bab IV perlu memastikan bahwa penyediaan rumah layak huni ini terintegrasi dengan penataan lingkungan permukiman secara makro, sehingga perbaikan rumah secara individu diikuti dengan penyediaan infrastruktur lingkungan seperti drainase dan pengelolaan persampahan yang memadai untuk mencegah terciptanya kawasan kumuh baru.

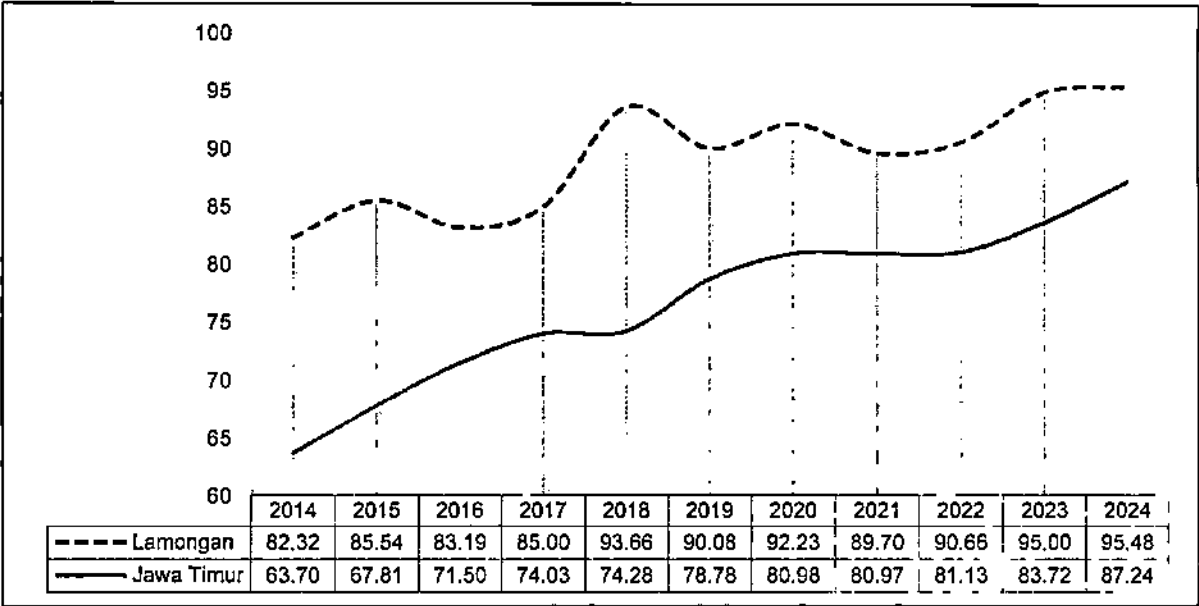
Berikutnya, posisi Lamongan yang kini mulai mendekati rata-rata Jawa Timur memberikan momentum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan standar hunian dari sekadar "layak" menjadi "berketahanan" (resilient housing). Mengingat beberapa wilayah di Lamongan merupakan daerah rawan bencana banjir luapan sungai, maka konstruksi rumah layak huni bagi penduduk miskin di wilayah tersebut harus menyesuaikan dengan karakteristik geografis setempat. Dengan mengintegrasikan aspek mitigasi bencana ke dalam standar rumah layak huni dalam RPKD, pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat saat ini, tetapi juga melindungi aset fisik rumah tangga miskin dari risiko kerusakan permanen akibat bencana alam di masa depan.

3.5.2 Analisis Akses Sanitasi Layak

Tren sanitasi layak di Lamongan memperlihatkan peningkatan jangka panjang yang konsisten. Dari 82,32 persen pada 2014, capaian ini melonjak hingga 95,48 persen pada 2024. Meski sempat menurun pada 2018 dan 2021, tren umum tetap menunjukkan akselerasi yang kuat dalam penyediaan sanitasi sehat, mencerminkan keberhasilan program air limbah domestik dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi.

Dibandingkan Jawa Timur, Lamongan konsisten memiliki capaian sanitasi yang lebih baik sepanjang satu dekade. Selisihnya cukup mencolok, terutama pada 2014–2019. Pada 2024, gap tersebut semakin melebar, dengan Lamongan mencapai 95,48 persen sementara Jawa Timur berada di 87,24 persen. Hal ini menegaskan bahwa kualitas sanitasi di Lamongan relatif lebih maju dan stabil daripada capaian provinsi secara keseluruhan.

Gambar 3.20. Perkembangan Akses Sanitasi Layak



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Dari sisi efektivitas, tren peningkatan sanitasi layak di Lamongan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam penyediaan fasilitas sanitasi dan edukasi masyarakat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Program air limbah domestik, pembangunan infrastruktur sanitasi, serta kampanye kesadaran masyarakat terbukti berhasil meningkatkan akses sanitasi sehat, bahkan dalam periode fluktuasi pada 2018 dan 2021. Hal ini menegaskan bahwa strategi Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup masyarakat berjalan efektif dan mampu mempertahankan capaian jangka panjang.

Peningkatan sanitasi layak berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup rumah tangga. Akses sanitasi yang lebih baik mengurangi risiko penyakit, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan beban ekonomi keluarga miskin akibat biaya pengobatan. Dengan demikian, penyediaan sanitasi sehat tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam strategi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Lamongan.

Pencapaian akses sanitasi layak yang menyentuh angka 95,48 persen pada tahun 2024 menempatkan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah dengan performa kesehatan lingkungan terbaik di Jawa Timur. Angka yang jauh melampaui rata-rata provinsi ini menandakan bahwa masyarakat Lamongan telah melewati tahap "perubahan perilaku" dasar dan kini berada pada fase pemantapan kualitas hidup. Dalam kerangka RPKD, keberhasilan ini harus dimanfaatkan sebagai pengungkit utama dalam percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem, mengingat minimnya risiko penyakit berbasis lingkungan (seperti diare dan tifus) secara langsung akan menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga miskin untuk biaya kesehatan.

Namun, tantangan strategis ke depan bagi Kabupaten Lamongan adalah melakukan transisi dari sekadar "sanitasi layak" menuju "sanitasi aman" yang berkelanjutan. Tingginya angka akses sanitasi harus diikuti dengan pengelolaan limbah domestik yang terstandarisasi, seperti penyediaan layanan sedot tinja yang teratur dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Strategi RPKD perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan di tingkat desa untuk mengelola sarana sanitasi komunal, guna memastikan bahwa infrastruktur yang telah terbangun tidak mengalami kerusakan dini dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga rentan.

Dengan cakupan sanitasi yang hampir menyeluruh, arah kebijakan Pemerintah Daerah harus difokuskan pada sinkronisasi data spasial antara wilayah dengan cakupan sanitasi yang belum 100 persen dengan wilayah kantong kemiskinan. Integrasi ini akan memastikan bahwa setiap sisa kesenjangan akses sanitasi dapat segera ditutup melalui intervensi yang presisi, sehingga modal manusia generasi mendatang di Lamongan tumbuh dengan sehat dan produktif.

3.5.3 Analisis Akses Air Minum Layak

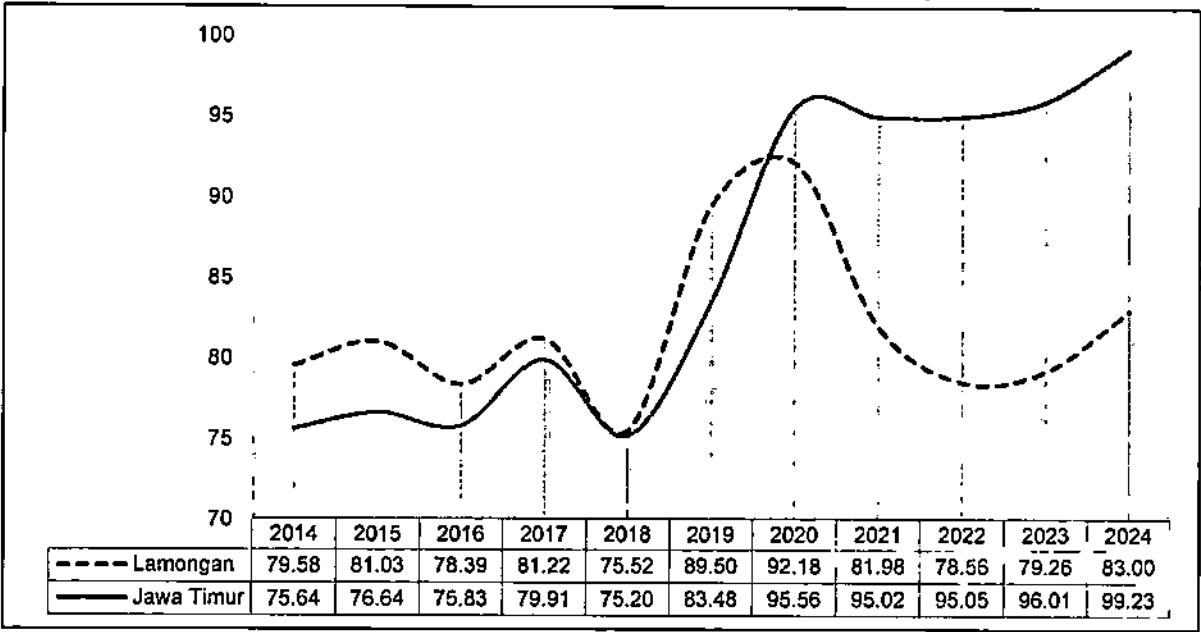
Akses air minum layak di Lamongan menunjukkan fluktuasi pada pertengahan periode, namun secara umum bergerak positif. Dari 79,58 persen pada 2014, capaian ini naik tajam hingga 92,18 persen pada 2020. Walau sempat menurun pada 2021–2022, tren kembali pulih pada 2023 dan meningkat ke 83,00 persen pada 2024. Pergerakan ini

menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidakstabilan pasokan atau kualitas air pada beberapa tahun, arah jangka panjang tetap menuju perbaikan.

Dalam hal air minum layak, posisi Lamongan cukup menarik karena sempat berada jauh di bawah Jawa Timur pada 2020–2023, terutama ketika provinsi melompat ke kisaran 95–96 persen. Namun pada 2024, Lamongan mulai menunjukkan perbaikan yang mempersempit selisih, meski Jawa Timur masih unggul jauh dengan capaian 99,23 persen. Pola ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses air minum layak di tingkat provinsi berjalan lebih cepat, namun Lamongan menunjukkan tanda pemulihan yang berarti pada tahun 2024.

Dari sisi efektivitas, tren akses air minum layak di Lamongan menunjukkan bahwa intervensi Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur air bersih, pemeliharaan jaringan distribusi, serta program penyuluhan masyarakat berjalan dengan cukup baik meski tidak selalu stabil. Kenaikan signifikan dari 79,58 persen pada 2014 menjadi 92,18 persen pada 2020 menunjukkan keberhasilan awal program, sementara penurunan pada 2021–2022 menandakan adanya tantangan terkait pasokan atau kualitas air. Pemulihan pada 2023–2024 hingga 83,00 persen memperlihatkan bahwa kebijakan perbaikan layanan air minum mulai membuahkan hasil kembali, menegaskan efektivitas intervensi pemerintah dalam jangka panjang meski dibandingkan capaian provinsi masih terdapat ketertinggalan.

Gambar 3.21. Perkembangan Akses Air Minum Layak



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Kesenjangan akses air minum layak antara Kabupaten Lamongan (83,00 persen) dengan rata-rata Jawa Timur yang hampir mencapai cakupan penuh (99,23 persen) pada tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan geografis dan teknis yang spesifik di wilayah Lamongan. Penurunan yang sempat terjadi pada periode 2021–2022 kemungkinan besar berkaitan dengan kerentanan sumber air baku terhadap perubahan iklim, seperti kekeringan ekstrem atau intrusi air asin di wilayah pesisir, yang menyebabkan sarana air bersih yang ada menjadi tidak berfungsi secara optimal. Dalam kerangka RPKD, realitas ini menuntut strategi yang lebih dari sekadar pembangunan fisik perpipaan, melainkan juga perlindungan sumber daya air dan diversifikasi teknologi penyediaan air minum, seperti

pemanenan air hujan atau teknologi desalinasi skala kecil untuk wilayah yang sulit terjangkau jaringan perpipaan pusat.

Relevansi akses air minum terhadap pengentasan kemiskinan di Lamongan sangat erat kaitannya dengan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga (expenditure saving). Ketika akses air minum layak tidak tersedia, penduduk miskin terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli air jerigen atau air minum kemasan yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan air layanan publik. Oleh karena itu, arah kebijakan RPKD harus memprioritaskan penyambungan baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema subsidi, sehingga efisiensi pengeluaran rumah tangga tersebut dapat dialihkan untuk pemenuhan gizi keluarga atau investasi pendidikan anak.

Berikutnya, efektivitas jangka panjang dari layanan air minum ini sangat bergantung pada keberlanjutan infrastruktur yang dikelola oleh masyarakat, seperti Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Mengingat fluktuasi capaian yang pernah terjadi, strategi penanggulangan kemiskinan dalam RPKD perlu memperkuat kapasitas manajerial dan teknis pengelola air di tingkat desa agar mampu menjaga kontinuitas pasokan dan kualitas air sesuai standar kesehatan. Dengan menjamin ketersediaan air minum yang stabil, Pemerintah Daerah secara tidak langsung sedang membangun ketahanan ekonomi masyarakat terhadap risiko penyakit dan inflasi biaya hidup, yang menjadi fondasi utama bagi kemandirian penduduk miskin di Kabupaten Lamongan.

Secara keseluruhan, hasil analisis aspek infrastruktur dasar di Lamongan menunjukkan dinamika yang beragam antara indikator-indikator utama. Ketersediaan rumah layak huni mengalami perbaikan antar waktu, namun posisi relatifnya terhadap Jawa Timur masih lebih buruk, menandakan bahwa intervensi pemerintah kurang efektif meski tetap relevan untuk pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, akses sanitasi layak menunjukkan tren membaik dan posisi yang lebih baik dibanding provinsi, mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperluas fasilitas sanitasi serta edukasi masyarakat, sekaligus memiliki relevansi tinggi terhadap kualitas hidup dan pengurangan risiko penyakit. Sementara itu, akses air minum layak mengalami fluktuasi dan pada 2024 masih tertinggal dibanding Jawa Timur, menandakan bahwa upaya pemerintah belum sepenuhnya efektif, meski peningkatan akses air bersih tetap relevan untuk meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan rumah tangga miskin, sehingga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Lamongan.

Tabel 3.5. Masalah Kemiskinan pada Aspek Infrastruktur Dasar

Indikator	Aspek yang Dianalisis			
	Perkembangan Antar Waktu (2014-2024)	Posisi Relatif terhadap Jatim (2024)	Efektivitas	Relevansi
Ketersediaan Rumah Layak Huni	Membaik	Lebih buruk	Tidak Efektif	Relevan
Akses Sanitasi Layak	Membaik	Lebih baik	Efektif	Relevan
Akses Air Minum Layak		Lebih buruk	Tidak Efektif	Relevan

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Ketimpangan capaian antara aspek sanitasi yang sangat baik (melampaui rata-rata Jawa Timur) dengan ketersediaan rumah layak huni serta akses air minum yang masih tertinggal memberikan sinyal bahwa intervensi infrastruktur di Lamongan masih bersifat parsial. Dalam konteks RPKD, hal ini menuntut pergeseran strategi dari pola pembangunan fisik yang terfragmentasi menuju pendekatan Kawasan Permukiman Terpadu. Artinya, penanggulangan kemiskinan tidak lagi cukup hanya dengan memperbaiki satu indikator saja, melainkan harus mengintegrasikan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sekaligus sepaket dengan penyambungan air minum perpipaan dan penyediaan sanitasi aman dalam satu intervensi spasial di kantong-kantong kemiskinan.

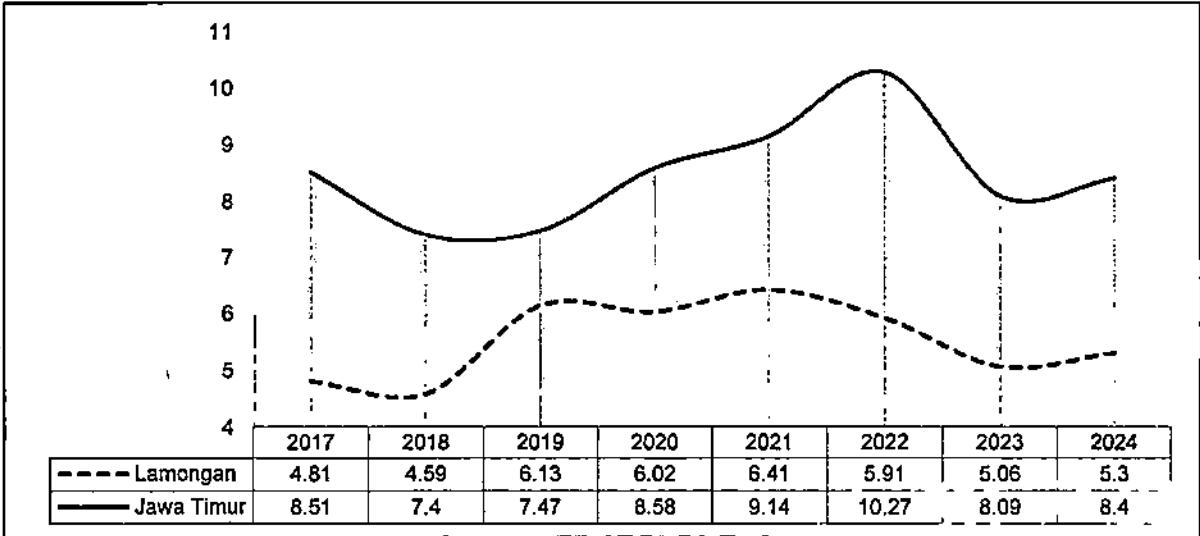
Selain itu, posisi relatif terhadap Jawa Timur yang menunjukkan angka "lebih buruk" pada aspek air minum dan hunian layak menjadi indikator kuat perlunya penguatan skema pembiayaan kreatif yang tidak hanya mengandalkan APBD. Strategi RPKD harus mulai mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan optimalisasi Dana Desa khusus untuk pemenuhan infrastruktur dasar. Dengan menstabilkan akses air minum dan kualitas hunian, Pemerintah Daerah secara langsung sedang menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, yang merupakan langkah prasyarat sebelum mereka dapat didorong menuju program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif.

3.6. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam upaya mengurangi kemiskinan, karena ketersediaan dan akses terhadap pangan yang cukup menjadi kebutuhan dasar setiap rumah tangga. Dalam konteks ini, ketahanan pangan diukur melalui prevalensi ketidakcukupan pangan, yaitu persentase penduduk yang tidak memiliki akses memadai terhadap pangan bergizi untuk memenuhi kebutuhan energi minimal sehari-hari. Tingginya prevalensi ketidakcukupan pangan mencerminkan kerentanan ekonomi rumah tangga dan berdampak langsung pada kesehatan, produktivitas, serta kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Memahami kondisi ini penting agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, cukup, dan bergizi.

Prevalensi ketidakcukupan pangan di Lamongan menunjukkan fluktuasi yang relatif moderat selama periode 2017–2024. Pada 2017, persentasenya tercatat sebesar 4,81 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 4,59 persen pada 2018. Namun pada 2019, terjadi lonjakan mencapai 6,13 persen yang diikuti sedikit penurunan pada 2020 (6,02 persen), sebelum kembali meningkat menjadi 6,41 persen pada 2021. Setelah puncak tersebut, tren mulai menurun hingga 5,06 persen pada 2023, dan kembali naik tipis menjadi 5,3 persen pada 2024. Pola ini menunjukkan adanya ketidakstabilan akses pangan, namun secara keseluruhan Lamongan mampu menjaga prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 7 persen.

Gambar 3.22. Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Pangan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Diolah)

Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, Lamongan secara konsisten memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan yang lebih rendah. Sepanjang periode 2017–2024, Jawa Timur mencatat angka yang lebih tinggi, mulai dari 8,51 persen pada 2017 hingga 8,4 persen pada 2024, dengan puncak 10,27 persen pada 2022. Selisih ini menunjukkan bahwa Lamongan relatif lebih aman dari risiko ketidakcukupan pangan dibandingkan rata-rata provinsi, menegaskan efektivitas strategi lokal dalam menjaga ketersediaan pangan dan mencegah kerentanan rumah tangga terhadap kekurangan gizi.

Dari sisi efektivitas, fluktuasi prevalensi ketidakcukupan pangan di Lamongan selama 2017–2024 menunjukkan bahwa intervensi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pangan, distribusi bantuan sosial, dan program ketahanan pangan mampu menjaga angka ketidakcukupan di bawah 7 persen. Lonjakan pada 2019–2021 mencerminkan adanya tantangan eksternal, seperti gangguan pasokan atau tekanan ekonomi, namun penurunan berikutnya hingga 2023 menegaskan bahwa kebijakan dan program penguatan ketahanan pangan mulai membuahkan hasil. Posisi Lamongan yang konsisten lebih baik dibanding Jawa Timur menunjukkan bahwa strategi lokal dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi akses cukup efektif dalam konteks regional.

Prevalensi ketidakcukupan pangan yang rendah berimplikasi langsung pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko malnutrisi, dan menurunkan beban ekonomi rumah tangga miskin. Dengan ketersediaan pangan yang lebih stabil, penduduk memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, menjaga pendapatan, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pengelolaan pangan yang efektif menjadi instrumen penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Lamongan, sekaligus menjaga masyarakat dari risiko kerentanan pangan jangka panjang.

Secara keseluruhan, analisis aspek ketahanan pangan di Lamongan menunjukkan bahwa prevalensi ketidakcukupan pangan mengalami perbaikan selama periode 2014–2024, dengan tren membaik yang mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas akses rumah tangga terhadap kebutuhan gizi dasar. Pada tahun 2024, posisi Lamongan relatif lebih baik dibanding Jawa Timur,

dengan potensi hilirisasi industri yang telah dibahas sebelumnya, daya dukung pangan yang kuat dapat bertransformasi menjadi rantai nilai ekonomi yang lebih tinggi, yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan riil para petani dan masyarakat berpenghasilan rendah di Lamongan.

Dari sisi efektivitas, intervensi pemerintah, seperti distribusi bantuan sosial, penguatan ketahanan pangan, dan pemantauan stok pangan, terbukti berhasil menjaga prevalensi ketidakcukupan pangan tetap rendah. Capaian ini penting karena ketersediaan pangan yang cukup meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, serta menjadi instrumen utama dalam upaya menurunkan kemiskinan dan mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga di Lamongan.

Tabel 3.6. Masalah Kemiskinan pada Aspek Ketahanan Pangan

Indikator	Aspek yang Dianalisis			
	Perkembangan Antar Waktu (2014-2024)	Posisi Relatif terhadap Jatim (2024)	Efektivitas	Relevansi
Prevalensi Ketidak Cukupan Pangan	Membaik	Lebih baik	Efektif	Relevan

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) yang membaik dan berada di atas rata-rata Jawa Timur menunjukkan bahwa kerangka ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan telah berhasil menjaga stabilitas pasokan nutrisi bagi masyarakat miskin. Namun dalam konteks RPKD, keberhasilan ini tidak boleh membuat kebijakan menjadi pasif. Arah strategi ke depan harus mulai bergeser dari sekadar "kecukupan jumlah kalori" menuju "kualitas keragaman konsumsi" melalui penguatan akses protein hewani dan sayuran yang terjangkau. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa ketahanan pangan yang kuat secara kuantitas juga berkorelasi linier dengan penurunan angka stunting dan peningkatan produktivitas kerja penduduk miskin, sehingga ketahanan pangan bertransformasi menjadi modal dasar bagi kemandirian ekonomi masyarakat Lamongan dalam jangka panjang.

BAB IV

PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan hasil diagnosis kemiskinan yang komprehensif pada Bab III, perumusan prioritas program dalam Bab IV ini diarahkan untuk menjawab tantangan struktural yang menjadi penghambat utama kesejahteraan di Kabupaten Lamongan. Strategi penanggulangan kemiskinan dalam RPKD tidak lagi hanya bertumpu pada intervensi bantuan sosial jangka pendek, melainkan bergeser pada penguatan konektivitas antara sektor pertanian yang memiliki daya dukung pangan melimpah dengan sektor industri yang memerlukan peningkatan efisiensi investasi, disamping penguatan sektor pertanian dan UMKM.

Dengan mengoptimalkan modal manusia yang sudah memiliki akses pendidikan relatif baik serta memanfaatkan potensi kawasan peruntukan industri yang ada (meski dinilai masih membutuhkan penambahan/ perluasan kawasan industri), program-program prioritas ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan menjamin ketersediaan infrastruktur dasar yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

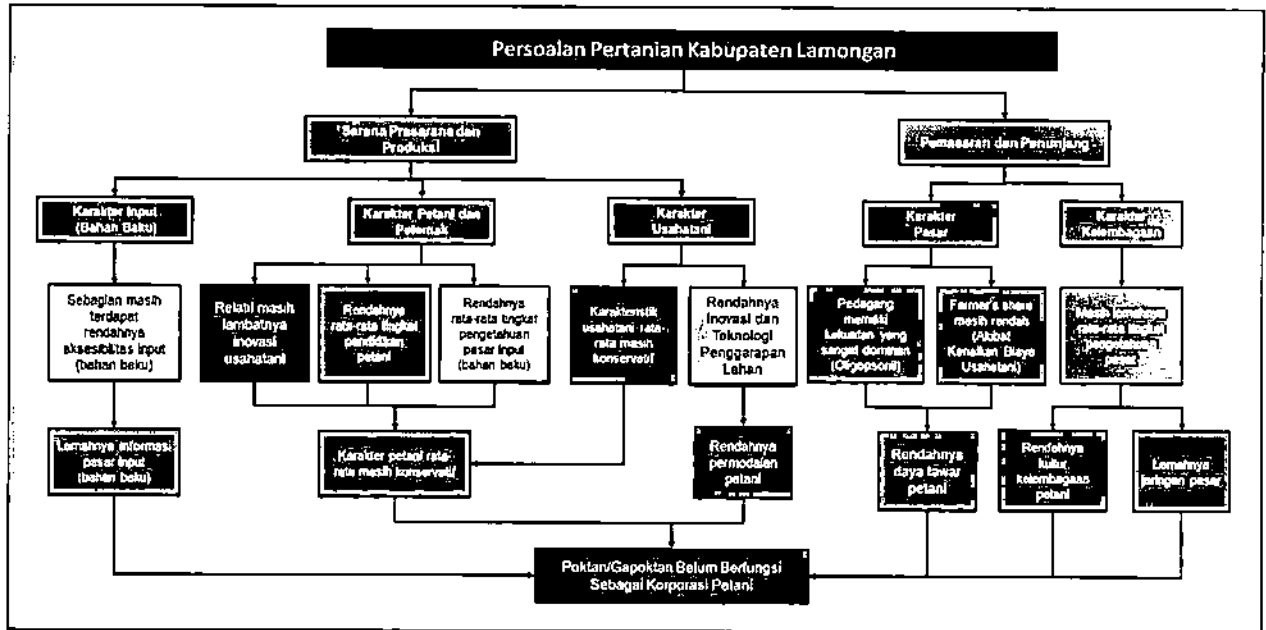
4.1 ANALISIS AKAR MASALAH KEMISKINAN KABUPATEN LAMONGAN

Analisis akar masalah kemiskinan difokuskan pada upaya membedah hambatan fundamental yang terjadi di sektor pertanian dan UMKM. Meskipun Lamongan memiliki status sebagai lumbung pangan dengan daya dukung lahan yang melampaui ambang batas kebutuhan, mayoritas penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian masih menghadapi kendala rendahnya produktivitas dan nilai tukar petani. Akar permasalahan ini seringkali bersumber pada ketergantungan terhadap komoditas mentah serta minimnya akses terhadap teknologi pengolahan pascapanen yang efisien, sehingga surplus produksi pangan yang tersedia belum mampu secara maksimal dikonversi menjadi peningkatan pendapatan yang signifikan bagi rumah tangga miskin di perdesaan.

Tahap pertama ini difokuskan pada akar masalah pertanian. Akar masalah ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari keterbatasan sarana prasarana produksi hingga kendala pada aspek pemasaran dan penunjang. Kondisi ini menyebabkan peran sektor pertanian sebagai pengungkit kesejahteraan belum optimal, sehingga diperlukan pemahaman mendalam terhadap mata rantai persoalan yang menghambat produktivitas dan daya tawar petani di lapangan. Berdasarkan pemetaan isu strategis di lapangan dan

berbasis data diskusi dengan OPD teknis, dapat dipetakan akar masalah sektor pertanian penyebab kemiskinan laten di Lamongan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Analisis Akar Masalah Sektor Pertanian Kabupaten Lamongan



Pada sisi sarana prasarana dan produksi, kendala utama berakar dari karakteristik input dan pelaku usaha tani itu sendiri. Aksesibilitas terhadap bahan baku yang masih rendah dan lemahnya informasi pasar input menjadi hambatan awal bagi petani. Hal ini diperburuk oleh karakteristik petani dan peternak yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan rendah serta masih bersifat konservatif, yang berimplikasi pada lambatnya adopsi inovasi teknologi usahatani dan rendahnya pengetahuan tentang input pasar. Akibatnya, metode pengolahan lahan tetap tradisional dan kurang efisien, yang secara langsung membatasi hasil produksi yang bisa dicapai.

Pada dimensi pemasaran dan penunjang, tantangan terbesar terletak pada struktur pasar yang tidak berpihak kepada petani. Karakter pasar yang cenderung oligopsonistik (banyak penjual sedikit pembeli), dimana pedagang memiliki kekuatan dominan, menyebabkan daya tawar petani menjadi sangat rendah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya farmer's share atau bagian keuntungan yang diterima petani akibat tingginya biaya usahatani, serta minimnya akses terhadap permodalan. Secara institusional, kelembagaan petani seperti Poktan (Kelompok Tani) atau Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) juga dinilai belum berfungsi optimal sebagai korporasi petani, ditambah dengan lemahnya jaringan pasar dan kultur kelembagaan yang masih rendah.

Rangkaian persoalan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di sektor pertanian Lamongan bukan sekadar masalah teknis budidaya, melainkan masalah sistemik yang melibatkan aspek pendidikan, permodalan, dan akses pasar. Tanpa adanya transformasi kelembagaan petani menjadi badan usaha yang lebih profesional (korporasi petani) dan

penguatan daya tawar terhadap pasar, keunggulan daya dukung lahan yang dimiliki Lamongan akan sulit dikonversi menjadi peningkatan pendapatan riil bagi para petani miskin.

Berdasarkan akar masalah di atas, strategi penanggulangan kemiskinan di Lamongan harus diarahkan pada transformasi ekosistem pertanian dari hulu ke hilir melalui model pemberdayaan yang integratif. Fokus utama strategi ini adalah memperkuat posisi tawar petani dengan mendorong digitalisasi rantai pasok dan fasilitasi akses permodalan yang lebih inklusif untuk mengatasi dominasi struktur pasar yang oligopsonistik. Selain itu, peningkatan efisiensi industri skala kecil berbasis produk turunan pertanian menjadi krusial, sehingga surplus daya dukung pangan yang melimpah di Lamongan dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan tetap yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin. Dengan mengintegrasikan peningkatan kapasitas SDM petani dan modernisasi kelembagaan menjadi korporasi petani yang pro-fesional, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa pertumbuhan sektor primer ini benar-benar berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di perdesaan.

Akar masalah berikutnya difokuskan pada UMKM. Berdasarkan hasil analisis lapang dan berbasis penggalian wawancara dengan OPD teknis, sektor industri pengolahan, khususnya pada skala mikro dan kecil, masih terjebak dalam inefisiensi produksi yang tercermin dari angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) regional yang masuk dalam kategori rendah. Industri skala kecil di Lamongan seringkali beroperasi secara terfragmentasi dan belum terhubung secara kuat dengan rantai pasok industri besar maupun potensi bahan baku pertanian lokal. Akibatnya, keterbatasan modal, rendahnya standarisasi mutu, dan lemahnya adopsi teknologi membuat industri skala mikro sulit untuk melakukan ekspansi skala usaha dan menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal.

Oleh karena itu, analisis ini akan menguraikan bagaimana rendahnya konektivitas antara hasil tani dan industri hilir menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Berdasarkan diagram pohon masalah, akar masalah rendahnya daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK/IKM) di Kabupaten Lamongan dapat diidentifikasi melalui dua dimensi utama, yaitu faktor internal organisasi dan hambatan eksternal lingkungan usaha. Berikut adalah penjelasan mendalamnya:

1. Kendala Internal: Inefisiensi dan Rendahnya Profitabilitas

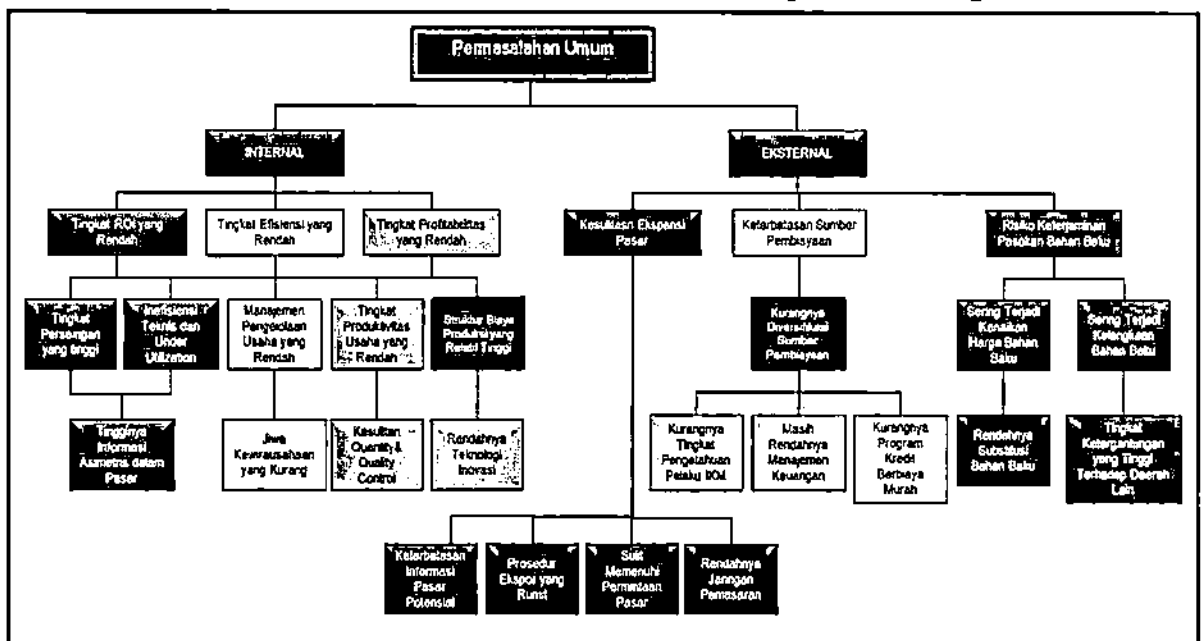
Permasalahan internal UMK di Lamongan berakar pada rendahnya tingkat efisiensi dan profitabilitas usaha. Hal ini dipicu oleh inefisiensi teknis dan manajemen pengelolaan usaha yang masih lemah, dimana jiwa kewirausahaan pelaku usaha dinilai masih kurang. Secara teknis, rendahnya adopsi teknologi inovasi menyebabkan produktivitas usaha menjadi rendah dan struktur biaya produksi relatif tinggi. Akibatnya, pelaku UMK sering mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi kuantitas dan kualitas kontrol produk (*quantity & quality control*), yang berujung pada

rendahnya *Return on Investment* (ROI) dan ketidakmampuan usaha untuk bersaing di pasar.

2. Kendala Eksternal: Rantai Pasok dan Akses Pembiayaan

Dari sisi eksternal, UMK menghadapi risiko ketidakpastian pasokan bahan baku yang sering mengalami kenaikan harga maupun kelangkaan. Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari daerah lain dan rendahnya substitusi bahan baku lokal membuat struktur biaya menjadi rapuh. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan sumber pembiayaan, minimnya program kredit berbiaya murah serta rendahnya literasi manajemen keuangan pelaku IKM membuat mereka sulit mendapatkan modal untuk ekspansi. Kombinasi dari keterbatasan modal dan jaringan pemasaran yang lemah ini mengakibatkan UMK di Lamongan sulit menembus pasar potensial atau memenuhi permintaan pasar dalam skala besar.

Gambar 4.2. Analisis Akar Masalah Sektor UMKM Kabupaten Lamongan



Rangkaian masalah hulu-hilir yang kompleks ini menjelaskan mengapa sektor UMKM di Lamongan belum mampu menjadi mesin penggerak ekonomi yang kuat bagi masyarakat miskin. Inefisiensi yang terjadi secara internal dan hambatan ekspansi pasar secara eksternal menyebabkan UMKM kurang berhasil menciptakan lapangan kerja formal yang stabil atau memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi daerah. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberian insentif teknologi, penyederhanaan akses pembiayaan mikro, serta penguatan konektivitas bahan baku lokal, terutama dari sektor pertanian yang surplus agar UMKM dapat beroperasi lebih efisien dan kompetitif.

4.2 ANALISIS ISU STRATEGIS UNTUK MENYUSUN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG AKSELERATIF DI KABUPATEN LAMONGAN

Analisis isu strategis diperlukan sebagai input dalam menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lamongan periode 2026-2030. Analisis isu strategis disusun dari analisis peluang dan tantangan yang informasinya didapat dari Bab II dan Bab III. Melalui pendekatan ini, isu strategis tidak hanya muncul sebagai daftar permasalahan, tetapi sebagai titik temu antara potensi modalitas yang dimiliki daerah (seperti surplus pangan dan kualitas SDM yang baik) dengan hambatan struktural seperti rendahnya efisiensi industri dan konektivitas antar sektor. Dengan memetakan isu-isu krusial tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi area intervensi prioritas yang memiliki daya ungkit paling besar dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan masyarakat miskin. Pada akhirnya, perumusan isu strategis ini berfungsi sebagai jembatan logis untuk memastikan bahwa strategi yang disusun benar-benar responsif terhadap realitas lapangan dan mampu mengoptimalkan peluang pembangunan yang ada di Kabupaten Lamongan.

Sebelum disusun isu strategis, dapat dipetakan peluang dan tantangan utama yang disarikan dari Bab II dan Bab III, dengan poin-poin penting sebagai berikut:

A. Peluang

1. Kinerja Makro Daerah dan Stabilitas Ekonomi

Kabupaten Lamongan pada dasarnya sudah mempunyai kinerja makro daerah yang mampu memberikan stabilitas ekonomi. Stabilitas makro daerah sangat penting untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menanamkan modal di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Kondisi ini menjadi fondasi yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan redistribusi pendapatan melalui berbagai program pemberdayaan tanpa terganggu oleh gejolak inflasi yang ekstrem. Dengan stabilitas ini, investasi per kapita dapat diarahkan secara lebih presisi untuk memperkuat daya beli masyarakat di lapisan bawah.

2. Perkembangan Sektoral Mampu Mendukung Potensi Lapangan Usaha

Pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang konsisten membuka ruang bagi diversifikasi ekonomi, sehingga masyarakat miskin tidak hanya bergantung pada satu jenis mata pencaharian saja. Keberagaman lapangan usaha ini memungkinkan terjadinya penyerapan angkatan kerja baru dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari sektor jasa hingga pengolahan. Optimalisasi potensi akan mempercepat pergeseran tenaga kerja dari sektor primer yang produktivitasnya rendah menuju sektor formal yang menawarkan upah lebih layak.

3. Posisi Lamongan yang Strategis Mampu Menjamin Ketersediaan Infrastruktur dan Logistik bagi Pengembangan Kinerja Sektoral

Letak geografis Lamongan yang berada di jalur utama logistik Jawa Timur meminimalkan biaya distribusi bagi industri lokal yang ingin melakukan ekspansi

pasar. Infrastruktur yang tersedia menjadi daya tarik bagi pembangunan kawasan industri baru yang terintegrasi dengan jaringan transportasi regional. Hal ini menjamin kelancaran arus barang dan jasa yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi operasional sektor industri pengolahan di seluruh wilayah kabupaten.

4. Surplus Pangan Mampu Menjamin Ketahanan Pangan

Kemampuan Lamongan memproduksi pangan (terutama padi/beras) melampaui kebutuhan daerahnya menjadikannya sebagai benteng pertahanan terhadap krisis pangan yang sering kali memicu lonjakan angka kemiskinan. Surplus ini memberikan peluang besar bagi pengembangan industri hilir berbasis pertanian yang dapat meningkatkan nilai tukar petani secara signifikan. Stabilitas stok pangan juga menjamin akses masyarakat miskin terhadap asupan gizi yang terjangkau, sehingga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga secara efektif.

5. Kualitas Akses Permukiman

Akses permukiman yang sudah relatif baik menjadi modal sosial untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif bagi keluarga berpenghasilan rendah. Lingkungan hunian yang tertata memudahkan intervensi infrastruktur lanjutan seperti sanitasi dan pengelolaan limbah yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Kondisi fisik lingkungan yang stabil ini juga mendukung tumbuhnya unit-unit usaha mikro berbasis rumah tangga yang dapat menambah pendapatan keluarga.

6. Kualitas Pembangunan Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)

Modal manusia yang unggul merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kompetensi dan daya saing di pasar kerja. Tingginya akses pendidikan menjamin ketersediaan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi, sementara akses kesehatan yang baik menjaga produktivitas kerja masyarakat tetap optimal. Integrasi keduanya menciptakan masyarakat yang resilien dan mampu memanfaatkan setiap peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan industri di Lamongan.

B. Tantangan

1. Rendahnya Nilai Tambah Sektor Lapangan Usaha (Industri)

Ketergantungan yang tinggi pada penjualan komoditas primer tanpa proses pengolahan lebih lanjut menyebabkan potensi pendapatan daerah menguap ke wilayah lain. Kondisi ini memperparah fenomena "mata rantai yang putus", dimana kekayaan sumber daya alam kurang optimal dikonversi menjadi kemakmuran ekonomi bagi masyarakat lokal. Tanpa adanya hilirisasi, sektor industri hanya akan menjadi penonton di tengah melimpahnya bahan baku pertanian.

2. Rendahnya Tingkat Pendapatan dan Upah

Struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor informal dan pertanian tradisional mengakibatkan standar upah di Lamongan sulit merangkak naik. Hal ini menciptakan jebakan kemiskinan bagi angkatan kerja terdidik yang terpaksa bekerja di bawah

kualifikasi mereka atau bermigrasi ke luar daerah demi penghasilan yang lebih layak. Rendahnya daya beli akibat upah yang minim ini pada akhirnya menghambat perputaran ekonomi di tingkat konsumsi rumah tangga.

3. Rendahnya Efisiensi Industri (ICOR)

Angka ICOR yang masih berada di kategori "Efisiensi Rendah" (kisaran 3,1 - 3,3) menunjukkan bahwa setiap investasi yang masuk di Lamongan belum memberikan output ekonomi yang optimal. Inefisiensi ini sering kali disebabkan oleh tingginya biaya logistik dan keterbatasan adopsi teknologi tepat guna di lingkungan pabrik lokal. Akibatnya, daya saing industri Lamongan di tingkat regional Jawa Timur tetap stagnan dan sulit menarik investasi berkualitas tinggi.

4. Rendahnya Konektivitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Sebagian besar UMKM di Lamongan masih beroperasi secara terisolasi dan belum terintegrasi ke dalam rantai pasok industri skala besar. Masalah internal seperti inefisiensi teknis dan masalah eksternal seperti kesulitan ekspansi pasar membuat unit usaha ini sulit berkembang melampaui skala subsisten. Lemahnya konektivitas menghambat terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar mutu produk lokal.

5. Rendahnya Akses Air Bersih

Keterbatasan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak menjadi hambatan serius dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Selain berdampak pada masalah kesehatan jangka panjang seperti stunting, rendahnya akses ini juga menambah beban pengeluaran rumah tangga yang harus membeli air dari pihak ketiga dengan harga lebih mahal. Pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi syarat mutlak agar intervensi ekonomi lainnya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis peluang dan tantangan, maka dapat disusun isu strategis (Tabel 4.1), dengan total terdapat 6 (enam) isu strategis untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lamongan tahun 2026-2030, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penguatan Daya Saing Sektoral untuk Mendorong Tingkat Pendapatan dan Upah

Isu ini muncul sebagai respons atas kontradiksi antara stabilitas ekonomi makro yang dimiliki Lamongan dengan kenyataan masih rendahnya nilai tambah pada sektor-sektor utama, terutama industri. Meskipun kinerja ekonomi daerah mampu menciptakan landasan yang stabil, pertumbuhan tersebut belum mampu mendorong tingkat pendapatan dan upah secara signifikan karena lemahnya keterkaitan antara sektor pertanian (sebagai basis ekonomi mayoritas penduduk miskin) dengan sektor industri pengolahan. Fokus isu ini adalah mentransformasi struktur ekonomi agar tidak lagi bergantung pada penjualan komoditas mentah,

melainkan pada penciptaan nilai tambah yang dapat memberikan remunerasi lebih tinggi bagi tenaga kerja lokal.

2. Penguatan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil untuk Menciptakan Nilai Tambah Perekonomian Lokal

Isu strategis ini dirumuskan dari adanya peluang berupa perkembangan sektoral yang luas, namun terhambat oleh rendahnya konektivitas dan efisiensi pada skala usaha mikro dan kecil (UMK). Potensi lapangan usaha di Lamongan belum teroptimalkan karena unit usaha kecil masih menghadapi masalah internal seperti inefisiensi teknis dan masalah eksternal berupa kesulitan akses pasar serta rantai pasok bahan baku. Tujuannya adalah membangun ekosistem yang menghubungkan UMK dengan industri skala besar agar terjadi transfer teknologi dan peningkatan standar kualitas produk yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

3. Peningkatan Kualitas Akses Pangan Sehat

Isu ini didasarkan pada posisi Lamongan yang memiliki surplus pangan melimpah, namun masih menghadapi tantangan dalam efektivitas distribusi dan kualitas konsumsi di tingkat rumah tangga miskin. Meskipun status lumbung pangan menjamin ketersediaan secara makro, akses terhadap pangan sehat dan bergizi harus diperkuat untuk memastikan ketahanan pangan fungsional bagi masyarakat rentan. Penguatan akses ini menjadi instrumen penting dalam penanggulangan kemiskinan untuk mencegah beban pengeluaran pangan yang tinggi sekaligus mengatasi isu kesehatan seperti stunting.

4. Peningkatan Kualitas Akses Permukiman

Isu strategis ini berangkat dari kondisi akses permukiman yang sudah relatif baik namun masih terkendala oleh rendahnya akses air bersih dan sanitasi di beberapa wilayah. Peluang stabilitas hunian yang ada harus ditingkatkan kualitasnya agar tidak hanya sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi lingkungan sehat yang mendukung produktivitas penghuninya. Perbaikan akses air minum dan infrastruktur dasar permukiman menjadi prioritas untuk menekan biaya hidup non-pangan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin secara kolektif.

5. Peningkatan Kualitas Akses Pendidikan dan Kesehatan

Isu ini menekankan pada optimalisasi kualitas pembangunan manusia yang telah memiliki fondasi akses relatif baik di Lamongan. Tantangannya adalah memastikan bahwa tingginya akses pendidikan dan kesehatan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar industri agar mampu menjawab masalah rendahnya upah. Peningkatan kualitas layanan dasar ini menjadi strategi kunci untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui penciptaan sumber daya manusia yang resilien, sehat, dan memiliki daya saing tinggi.

6. Peningkatan Kualitas Sosial

Isu strategis ini merupakan upaya integratif untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui penguatan jaring pengaman sosial yang lebih adaptif. Dengan memanfaatkan

data makro yang stabil, isu ini berfokus pada perbaikan akurasi dan kualitas perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial dimana kelompok masyarakat terbawah tetap mendapatkan perlindungan yang layak seiring dengan upaya daerah dalam mengejar efisiensi industri dan daya saing ekonomi.

Dari pemetaan peluang, tantangan, dan isu strategis di atas, maka dapat ditarik 4 (empat) arah strategi dalam RPKD Kabupaten Lamongan tahun 2026-2030, yang kemudian menghasilkan 3 (tiga) model intervensi penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Pemetaan Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kab Lamongan

Peluang	Tantangan	Isu Strategis	Strategi	Model Intervensi
Kinerja makro daerah mampu menciptakan stabilitas ekonomi	Masih rendahnya nilai tambah sektor lapangan usaha, terutama industri	Penguatan daya saing sektoral untuk mendorong tingkat pendapatan dan upah	1. Strategi peningkatan produktivitas sektor ekonomi 2. Strategi peningkatan kualitas ketenagakerjaan	1. Intervensi Pangan 2. Intervensi Non Pangan 3. Intervensi Investasi Per Kapita
Perkembangan sektoral mampu mendukung potensi lapangan usaha	Masih rendahnya tingkat pendapatan dan upah			
Posisi Lamongan yang strategis mampu menjamin ketersediaan infrastruktur dan logistik bagi pengembangan kinerja sektoral	Masih rendahnya efisiensi industri	Penguatan daya saing usaha mikro dan kecil untuk menciptakan nilai tambah perekonomian lokal		
	Masih rendahnya konektivitas usaha mikro dan kecil			
Surplus pangan mampu menjamin ketahanan pangan	Masih rendahnya akses air bersih	Peningkatan kualitas akses pangan sehat	3. Strategi peningkatan kualitas hidup layak	
Relatif baiknya akses permukiman		Peningkatan kualitas akses permukiman		
Kualitas pembangunan manusia sudah relatif baik yang		Peningkatan kualitas akses pendidikan dan kesehatan		

ditopang oleh tingginya akses pendidikan dan kesehatan		Peningkatan kualitas sosial	4. Strategi bantuan dan jaminan sosial	
---	--	--------------------------------	--	--

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Arah strategi dan model intervensi di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi

Strategi ini merupakan respon langsung terhadap rendahnya nilai tambah sektor industri dan fenomena "mata rantai yang putus" antara pertanian dan pengolahan. Fokus utamanya adalah mentransformasi sektor pertanian yang saat ini memiliki daya dukung pangan melimpah agar terintegrasi dengan industri hilir melalui modernisasi teknologi dan penguatan korporasi petani. Dengan meningkatkan angka efisiensi regional (ICOR), diharapkan setiap investasi yang masuk dapat menghasilkan output ekonomi yang lebih besar, sehingga mampu menarik masyarakat keluar dari garis kemiskinan melalui aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi.

2. Strategi Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan

Strategi ini bertujuan untuk menyelaraskan kualitas sumber daya manusia yang sudah memiliki basis pendidikan relatif baik dengan kebutuhan riil pasar kerja industri. Mengingat tantangan rendahnya tingkat pendapatan dan upah, strategi ini difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis dan sertifikasi keahlian bagi angkatan kerja lokal. Tujuannya adalah memastikan tenaga kerja di Lamongan memiliki daya saing tinggi sehingga mampu mengisi posisi-posisi formal di kawasan industri yang tersedia, yang pada gilirannya akan meningkatkan standar upah dan kesejahteraan rumah tangga secara sistemik.

3. Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Layak

Strategi ini bersifat multidimensi, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar mulai dari akses pangan sehat, permukiman, hingga layanan pendidikan dan kesehatan. Memanfaatkan peluang surplus pangan daerah, strategi ini memastikan stabilitas konsumsi nutrisi bagi warga miskin sekaligus melakukan intervensi pada infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi untuk memperbaiki kualitas hunian. Dengan menjamin standar hidup yang layak, beban pengeluaran non-pangan rumah tangga miskin dapat ditekan, sehingga mereka memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi dan terhindar dari risiko kemiskinan antar generasi.

4. Strategi Bantuan dan Jaminan Sosial

Sebagai instrumen jaring pengaman (*safety net*), strategi ini difokuskan pada penguatan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dan tidak produktif (seperti lansia dan penyandang disabilitas). Intervensi ini dilakukan melalui perbaikan akurasi data dan skema bantuan yang tepat sasaran agar dapat menjaga stabilitas sosial dan konsumsi minimum penduduk miskin ekstrem. Selain sebagai bantalan ekonomi, strategi jaminan sosial ini diarahkan untuk menjadi

jembatan bagi kelompok masyarakat yang masih potensial agar kelak dapat beralih ke program pemberdayaan ekonomi yang lebih mandiri sesuai dengan strategi produktivitas sektor ekonomi.

4.3 ANALISIS KONDISI FISKAL KABUPATEN LAMONGAN

Analisis fiskal daerah memegang peranan krusial sebagai instrumen penguji tingkat realistis tidaknya setiap strategi yang diusulkan dalam RPKD Kabupaten Lamongan. Tanpa pemetaan kapasitas fiskal yang akurat, strategi ambisius seperti peningkatan produktivitas sektor ekonomi atau penguatan daya saing UMK berisiko menjadi rencana yang sulit dieksekusi karena keterbatasan ruang belanja daerah. Oleh karena itu, analisis fiskal berfungsi untuk menyelaraskan antara kebutuhan pendanaan bagi intervensi kemiskinan dengan ketersediaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana transfer, sehingga target penurunan kemiskinan tetap berada pada koridor kemampuan keuangan daerah yang nyata.

Selain itu, evaluasi terhadap struktur fiskal memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menentukan skala prioritas dalam mengalokasikan model intervensi, baik yang bersifat pangan, non-pangan, maupun investasi per kapita. Analisis fiskal membantu mengidentifikasi seberapa besar ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek strategis tersebut tanpa mengganggu stabilitas makro daerah. Dengan demikian, analisis ini menjadi jembatan antara visi strategis penanggulangan kemiskinan dengan aspek teknis penganggaran, menjamin bahwa setiap program yang dirancang memiliki landasan finansial yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan keberlanjutannya.

4.3.1 Gambaran Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Lamongan selama periode 2020–2024 memperlihatkan komposisi yang sangat dipengaruhi oleh kuatnya peranan pendapatan transfer. Secara rata-rata kontribusi pendapatan transfer mencapai lebih dari tiga perempat total pendapatan daerah, sehingga menjadi penentu utama kapasitas fiskal daerah. Porsi terbesar berada pada kelompok Transfer Pemerintah Pusat, khususnya Dana Perimbangan, yang setiap tahun menyumbang lebih dari separuh total pendapatan daerah.

Di dalam Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen yang paling dominan dan stabil, mencerminkan fungsi DAU sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menunjukkan tren peningkatan terutama pada 2022–2024, yang mengindikasikan meningkatnya porsi pendanaan yang diarahkan secara spesifik ke sektor prioritas. Sementara itu, Dana Insentif Daerah (DID) terlihat berfluktuasi cukup signifikan, bahkan mencapai porsi yang relatif besar pada 2023 dan 2024, menandakan adanya capaian kinerja tertentu yang berhasil memicu peningkatan alokasi DID.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola fiskal dan kinerja pelayanan publik memiliki kontribusi terhadap kemampuan daerah menarik sumber-sumber transfer

berbasis insentif. Di sisi lain, kontribusi Transfer Antar Daerah relatif kecil dan tidak stabil. Porsi terbesar hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan pada 2023 tidak ada realisasi, mencerminkan sifat pendapatan ini yang sangat bergantung pada mekanisme bagi hasil antar pemerintah daerah yang tidak bersifat reguler. Pola tersebut menjadikan transfer antar daerah bukan sumber yang dapat diandalkan untuk memperkuat keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Berbeda dari pendapatan transfer, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pola stabil namun dengan kontribusi yang relatif rendah, yakni berkisar antara 16–20 persen dari total pendapatan daerah. Di dalam struktur PAD, komponen pajak daerah merupakan sumber terbesar, mengindikasikan bahwa basis pemajakan daerah menjadi tumpuan utama peningkatan kapasitas fiskal mandiri. Namun, laju peningkatannya cenderung moderat dan belum cukup untuk mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah.

Kontribusi retribusi daerah terlihat sangat kecil dan cenderung stagnan, sehingga memperlihatkan perlunya reformasi mendasar terhadap penetapan tarif, perluasan objek layanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi.

Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menunjukkan kontribusi minor, yang mencerminkan terbatasnya portofolio penyertaan modal daerah yang mampu menghasilkan dividen secara signifikan. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah memiliki peran cukup penting namun masih menghadirkan fluktuasi, menunjukkan bahwa sebagian penerimaan daerah bersifat situasional atau terkait kebijakan nonreguler seperti denda, hasil penjualan aset, atau pendapatan lain yang tidak dapat diproyeksikan secara stabil.

Adapun kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meskipun secara rata-rata hanya menyumbang kurang dari enam persen, memperlihatkan fluktuasi ekstrem dari tahun ke tahun. Pada 2020 komponen ini menyumbang lebih dari 20 persen, namun turun drastis pada 2021–2024. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh keberadaan hibah dan pendapatan insidental lainnya yang tidak berulang setiap tahun, sehingga kelompok pendapatan ini tidak dapat dijadikan sandaran dalam perencanaan fiskal standar. Pola penerimaan ini sekaligus menegaskan bahwa sebagian penerimaan daerah memiliki karakter sangat tidak stabil, sehingga perencanaan fiskal memerlukan penekanan lebih besar pada penguatan pendapatan reguler seperti PAD dan pendapatan transfer yang sifatnya berulang.

**Tabel 4.2. Perkembangan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
1	PENDAPATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.97%	20.32%	17.31%	16.47%	16.96%	17.61%
1.1.1	Pajak daerah	13.02%	16.34%	13.27%	12.49%	12.97%	13.62%
1.1.2	Retribusi daerah	0.55%	0.48%	0.80%	0.59%	0.54%	0.59%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.09%	1.09%	0.85%	1.04%	0.60%	0.94%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	11.29%	11.69%	11.69%	10.06%	10.91%	11.44%
1.2	Pendapatan Transfer	59.97%	75.61%	81.16%	83.49%	83.08%	76.46%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	54.85%	67.95%	79.10%	83.49%	79.09%	72.10%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	54.35%	53.50%	57.39%	59.53%	59.78%	56.02%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	3.03%	2.75%	3.07%	3.65%	3.31%	3.16%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	38.72%	36.52%	36.87%	37.79%	37.59%	37.10%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	11.68%	13.01%	17.45%	18.09%	18.47%	15.74%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.50%	14.45%	15.71%	23.56%	19.31%	14.31%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	5.62%	7.66%	2.06%	0.00%	3.99%	3.85%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.62%	7.10%	1.49%	0.00%	3.80%	3.60%
1.2.2.2	Pendapatan Lain-lain	0.00%	0.57%	0.57%	0.00%	0.19%	0.15%

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.06%	4.07%	1.53%	0.00%	0.95%	5.75%
1.3.1	Hibah	3.00%	2.11%	0.41%	0.00%	1.15%	1.33%
1.3.2	Dana Darurat	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.04%	0.05%
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	19.42%	3.76%	1.13%	0.00%	0.26%	4.56%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan

Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih sangat tinggi, sementara kinerja PAD yang relatif stagnan membatasi ruang fiskal daerah untuk memperluas program pembangunan secara mandiri. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa strategi peningkatan kemandirian fiskal harus diarahkan pada optimalisasi PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah, peningkatan kualitas layanan publik berbayar, pengembangan objek retribusi baru yang berbasis potensi riil wilayah, serta penguatan kapasitas BUMD dalam menghasilkan dividen.

Di sisi lain, konsistensi daerah dalam mempertahankan kinerja tata kelola dan kualitas belanja akan berpengaruh pada kemampuan memperoleh alokasi DID sebagai sumber insentif fiskal tambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah perlu dijalankan secara simultan antara penguatan PAD dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan skema-skema transfer berbasis kinerja.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh pendapatan transfer memiliki implikasi penting. Kapasitas fiskal yang sangat bergantung pada pemerintah pusat membuat ruang fiskal untuk memperluas program-program pengentasan kemiskinan menjadi relatif terbatas, terutama ketika PAD belum tumbuh signifikan. Ketergantungan ini berpotensi membatasi kemampuan daerah dalam melakukan inovasi pembiayaan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan akses layanan dasar.

Di sisi lain, stabilitas komponen transfer seperti DAU dan DAK tetap menyediakan fondasi pendanaan yang memungkinkan daerah mempertahankan program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan. Dengan demikian, penguatan PAD menjadi kunci penting untuk memperluas fleksibilitas fiskal daerah, sehingga intervensi penanggulangan kemiskinan dapat dirancang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan kelompok rentan di tingkat lokal.

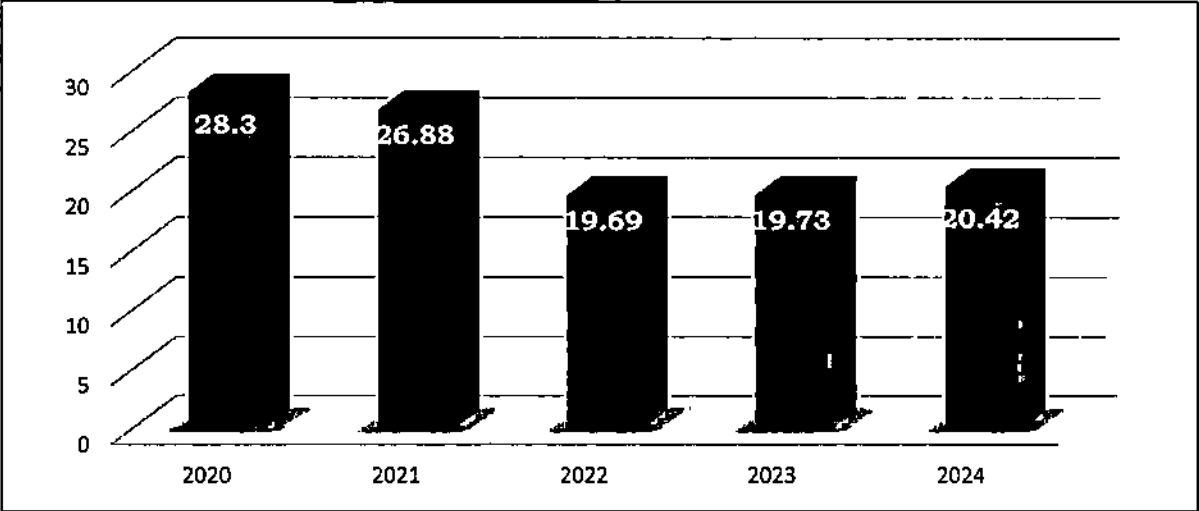
Analisis lanjutan terhadap aspek pendapatan daerah meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan

Daerah, serta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, semakin menegaskan bahwa struktur fiskal Kabupaten Lamongan masih di dominasi oleh pendapatan transfer. Rendahnya tingkat kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih terbatas, sementara rasio ketergantungan yang berada pada kategori sangat tinggi mengindikasikan peran transfer pusat dan provinsi sebagai sumber utama penerimaan. Temuan ini diperkuat oleh capaian kapasitas fiskal yang belum optimal, sehingga ruang fiskal daerah untuk mem-biayai pembangunan secara mandiri masih relatif sempit. Secara keseluruhan, konsistensi indikator-indikator tersebut membuktikan bahwa ketergantungan Lamongan pada pendapatan transfer masih sangat besar dan menjadi tantangan utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Uraian hasil analisis pada aspek pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

4.3.1.1 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKD) merupakan indikator fundamental yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik dari sumber PAD. Tingkat kemandirian yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan struktur ekonomi lokal yang kuat, basis pajak yang berkembang, kemampuan peme-rintah daerah mengelola potensi fiskal, serta semakin kecilnya ketergantungan pada pemerintahan supra-daerah. Selama kurun 2020–2024, RKD Kabupaten Lamongan menunjukkan tren yang melemah. Setelah sempat berada pada kisaran sekitar 28 persen pada 2020–2021, indikator ini menurun signifikan pada 2022, kemudian menetap pada kisaran 15–20 persen hingga 2024. Penurunan ini menggambarkan terjadinya pelemahan kapasitas fiskal daerah dalam menghasilkan penerimaan daerah secara mandiri.

Gambar 4.3. Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (Diolah)

Pola ini dapat dijelaskan oleh beberapa dinamika. Pertama, pertumbuhan PAD tidak sebanding dengan laju kenaikan penerimaan transfer. Kedua, struktur PAD sendiri masih didominasi oleh pajak daerah, yang pertumbuhannya relatif moderat dan sangat dipengaruhi dinamika ekonomi pasca-pandemi. Ketiga, komponen retribusi daerah masih menunjukkan kinerja stagnan akibat terbatasnya basis layanan publik yang dapat dikenakan tarif dan belum optimalnya pemutakhiran regulasi tarif. Keempat, pembentukan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sangat terbatas karena terbatasnya aset komersial daerah yang mampu memberikan dividen.

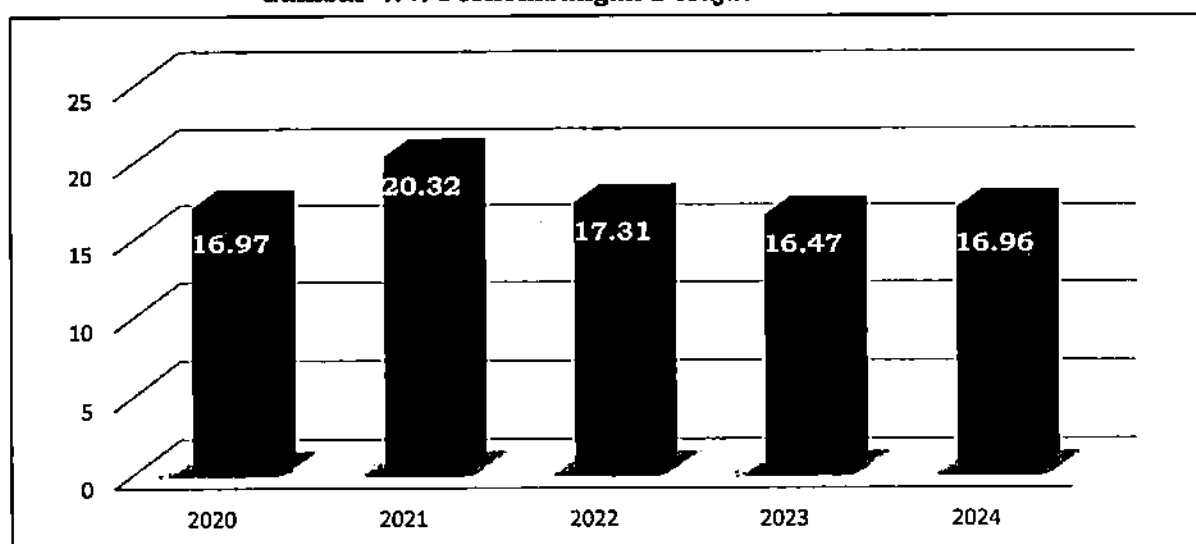
Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memberikan implikasi struktural. Ketika ruang fiskal daerah untuk membiayai program strategis sangat terbatas, Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk meluncurkan program pengentasan kemiskinan yang bersifat inovatif, kontekstual, dan responsif terhadap karakteristik kemiskinan lokal. Kebijakan berbasis kewilayahan (seperti program peningkatan produktivitas rumah tangga miskin, pemberdayaan UMKM mikro) dan peningkatan akses layanan dasar memerlukan ruang pembiayaan fleksibel yang sulit dilakukan apabila PAD tidak tumbuh memadai. Dengan kata lain, rendahnya RKD tidak hanya menunjukkan keterbatasan fiskal, tetapi juga keterbatasan keleluasaan untuk melakukan inovasi sosial yang penting dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

4.3.1.2 Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menggambarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Indikator ini berfungsi menilai sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tingkat desentralisasi yang nyata dalam aspek pendanaan pembangunan. Selama 2020–2024, Rasio DDF Kabupaten Lamongan berada pada kisaran 16–20 persen. Peningkatan sementara terjadi pada 2021, namun tren menurun kembali pada 2022–2024, mempertahankan posisi daerah dalam kategori “Kurang.” Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara otonom masih terbatas dan lebih banyak bergantung pada skema pendanaan pusat.

Fenomena ini juga mencerminkan belum optimalnya kontribusi aktivitas ekonomi lokal terhadap pendapatan daerah. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung Lamongan, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan, belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan adanya celah antara aktivitas ekonomi dan kapasitas fiskal daerah, yang bisa diakibatkan oleh struktur ekonomi informal yang besar, efisiensi pemungutan pajak yang belum maksimal, serta basis objek retribusi yang belum diperluas atau dimodernisasi. Selain itu, sebagian besar pendapatan transfer memiliki nilai nominal yang jauh lebih besar daripada PAD, sehingga kontribusi PAD secara relatif tampak semakin kecil.

Gambar 4.4. Perkembangan Derajat Desentralisasi



Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

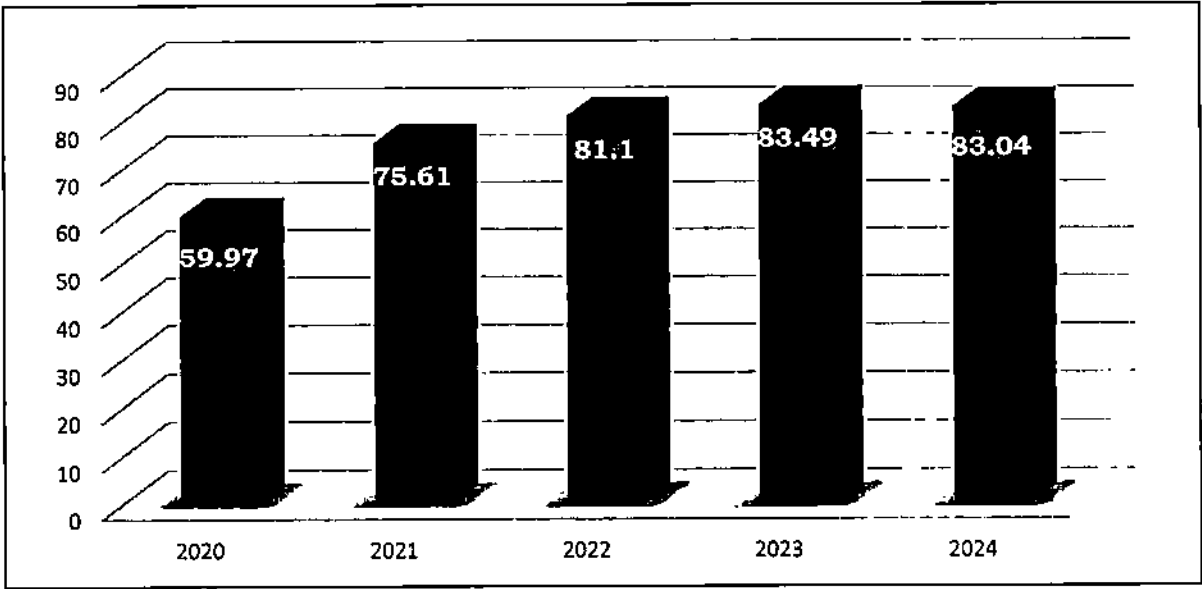
Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (Diolah)

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, rendahnya derajat desentralisasi fiskal berpotensi membatasi kemampuan daerah dalam memperluas prioritas pembangunan yang bersifat pro-poor. Kemiskinan di Lamongan memiliki karakteristik yang beragam, baik kemiskinan kronis yang membutuhkan layanan dasar berkelanjutan maupun kemiskinan sementara akibat kerentanan ekonomi. Untuk mengatasi kedua jenis kemiskinan tersebut secara simultan, dibutuhkan program pemberdayaan ekonomi, perbaikan kualitas SDM, penguatan konektivitas, serta dukungan pembiayaan produktif. Namun, program-program bersifat jangka panjang dan multidimensi ini membutuhkan sumber pendanaan fleksibel yang kuat, yang sulit dicapai apabila kontribusi PAD masih rendah. Dengan demikian, peningkatan Rasio DDF bukan hanya menyangkut persoalan fiskal, tetapi juga merupakan prasyarat penting untuk memperluas intervensi pembangunan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan.

4.3.1.3 Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengukur sejauh mana pendapatan daerah bertumpu pada transfer pemerintah pusat dan provinsi. Pada periode 2020–2024, rasio ini menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari sekitar 60 persen pada 2020 menjadi lebih dari 83 persen pada 2024. Tren tersebut mengindikasikan semakin kuatnya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer, sehingga posisi Kabupaten Lamongan berada dalam kategori “Sangat Tinggi.” Kondisi menunjukkan bahwa dinamika pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional dan mekanisme alokasi transfer yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Tingginya angka ketergantungan ini menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Daerah untuk segera mengoptimalkan penggalan potensi PAD.

Gambar 4.5. Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan (Diolah)

Ketergantungan yang tinggi ini dapat memiliki beberapa penyebab. Pertama, kenaikan signifikan DAU dan DAK dalam upaya pemulihan pasca-pandemi. Kedua, meningkatnya porsi dana transfer berbasis kinerja seperti Dana Insentif Daerah (DID). Ketiga, pertumbuhan PAD relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan transfer. Keempat, belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan alternatif. Ketika komposisi transfer sangat dominan, kemampuan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang menjadi sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah pusat.

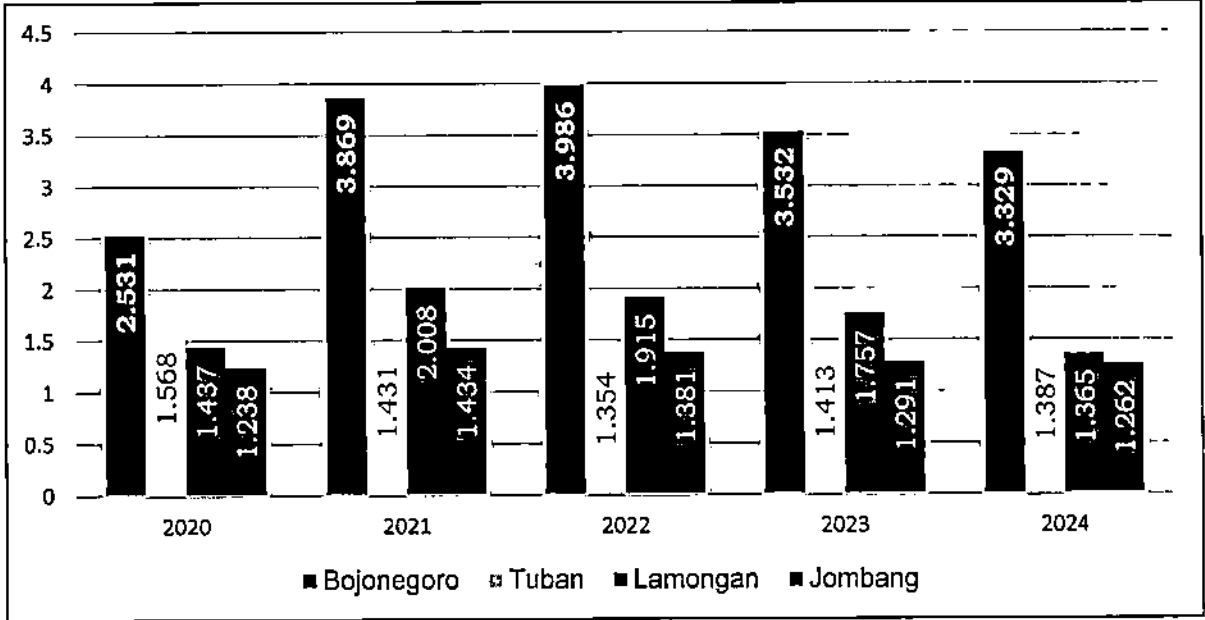
Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, ketergantungan fiskal yang tinggi dapat mengurangi fleksibilitas daerah dalam merancang dan mengeksekusi program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Banyak dana transfer memiliki keterikatan penggunaan yang ketat, sehingga daerah tidak selalu dapat mengalokasikannya untuk intervensi spesifik seperti peningkatan akses pekerjaan, intervensi gizi untuk balita, program keterampilan kerja bagi keluarga miskin, atau pembangunan infrastruktur berbasis komunitas. Di sisi lain, ketergantungan ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan program penanggulangan kemiskinan jika terjadi penyesuaian fiskal di tingkat nasional. Dengan demikian, penguatan PAD dan diversifikasi sumber pendapatan menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dan memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi risiko fiskal di masa depan.

4.3.1.4 Analisis Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) merupakan indikator komposit yang menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya fiskalnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. IKFD mempertimbangkan empat dimensi utama, yaitu: (i) kapasitas pendapatan per kapita; (ii) struktur pendapatan; (iii) beban belanja wajib; dan (iv) kapasitas pembiayaan jangka panjang.

Berdasarkan hasil pemetaan IKFD 2020–2024, posisi Kabupaten Lamongan berada pada kelompok menengah ke bawah dibandingkan dengan beberapa wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Jombang. Hal ini menunjukkan meskipun Lamongan memiliki aktivitas ekonomi yang cukup kuat, kapasitas fiskalnya belum mampu menyamai daerah yang memiliki struktur ekonomi lebih padat modal atau penerimaan transfer yang lebih besar.

Gambar 4.6. Posisi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lamongan dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Keuangan (Diolah)

Perbedaan tingkat kapasitas fiskal antar wilayah menggambarkan variasi struktur ekonomi daerah, kekuatan sektor unggulan, dan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi lokal. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi biasanya memiliki PAD yang kuat, basis ekonomi formal yang besar, serta aset strategis yang dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal menengah ke bawah seringkali menghadapi tantangan dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan layanan publik berbayar untuk menghasilkan pendapatan.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, rendahnya IKFD memiliki implikasi strategis karena mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk menjaga kesinambungan pendanaan program jangka panjang masih terbatas. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya membutuhkan bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga memerlukan investasi besar dalam peningkatan kualitas SDM, perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, akses air minum, sanitasi, serta penguatan aktivitas ekonomi produktif di pedesaan. Program-program ini tidak dapat berhasil tanpa kapasitas fiskal yang memadai dan stabil. Oleh karena itu, meningkatkan IKFD merupakan langkah penting agar daerah mampu merancang intervensi multi-tahun yang mampu menurunkan kemiskinan secara struktural dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi.

Secara keseluruhan, keempat indikator pendapatan daerah (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) menunjukkan konsistensi bahwa struktur fiskal Kabupaten Lamongan masih berada pada tahap yang belum sepenuhnya mapan untuk mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri.

Dominasi pendapatan transfer, disertai rendahnya kontribusi PAD dan kapasitas fiskal yang belum optimal, menandakan bahwa ruang fiskal daerah untuk melakukan inovasi kebijakan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut memberikan tantangan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan, karena upaya mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan membutuhkan pendanaan yang stabil, fleksibel, dan mampu mendukung intervensi multidimensi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penguatan basis PAD, peningkatan efektivitas pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta perluasan sumber pendapatan alternatif menjadi agenda strategis yang harus ditempatkan sebagai prioritas jangka menengah. Hanya dengan memperkuat fondasi fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan kapasitas untuk merancang dan mengeksekusi program penanggulangan kemiskinan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal menghadapi dinamika ekonomi di tahun-tahun mendatang.

4.3.2 Gambaran Belanja Daerah

Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Lamongan selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang relatif konsisten, dengan dominasi yang kuat pada Belanja Operasi. Rata-rata proporsi Belanja Operasi mencapai 65,73 persen, menjadikannya komponen terbesar dalam struktur belanja daerah. Di dalamnya, Belanja Pegawai menjadi elemen yang paling dominan dengan rata-rata 32,67 persen, mencerminkan komitmen daerah terhadap pembiayaan aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik dasar. Belanja Barang dan Jasa juga memiliki kontribusi signifikan sebesar 24,31 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung keberlangsungan fungsi operasional perangkat daerah. Sementara itu, komponen seperti Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial masing-masing menempati porsi rata-rata 8,24 persen dan 0,43 persen.

Meskipun relatif kecil, kedua jenis belanja ini memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan program pelayanan publik dan perlindungan sosial.

Belanja Modal menempati posisi kedua dalam struktur belanja dengan rata-rata 12,25 persen. Proporsi ini mencerminkan ruang fiskal yang terbatas bagi Pemerintah Daerah untuk memperluas investasi publik jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peralatan, maupun aset tetap lainnya. Di dalam Belanja Modal, komponen terbesar berasal dari pembangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan rata-rata 5,83 persen, diikuti Peralatan dan Mesin sebesar 4,18 persen. Namun, komposisi yang relatif kecil pada pembangunan Gedung dan Bangunan (2,00 persen) serta aset tetap lainnya (0,39 persen hingga 2,57 persen) menunjukkan bahwa investasi fisik strategis belum menjadi fokus utama dalam alokasi fiskal daerah. Belanja Tidak Terduga tercatat sangat kecil dengan rata-rata 0,40 persen, menandakan kapasitas penyangga risiko fiskal yang masih terbatas. Sementara itu, Belanja Transfer konsisten berada pada kisaran 21,63 persen, dengan mayoritas dialokasikan pada Bantuan Keuangan kepada desa melalui rata-rata 21,17 persen, mencerminkan peran strategis desa dalam penyelenggaraan pembangunan.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah yang lebih berat pada komponen operasional dan relatif rendahnya porsi belanja modal menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih terserap untuk kebutuhan rutin. Konsekuensinya, ruang fiskal untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pembentukan aset produktif masih belum optimal. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kondisi ini memiliki implikasi penting. Proporsi Belanja Operasi yang tinggi memang menjaga keberlanjutan pelayanan dasar, tetapi kontribusinya terhadap peningkatan kesempatan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin cenderung terbatas. Sebaliknya, rendahnya porsi Belanja Modal dapat memperlambat perluasan akses infrastruktur, konektivitas ekonomi, dan fasilitas sosial yang berperan langsung dalam menurunkan biaya hidup, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan daerah menggeser struktur fiskalnya menuju komposisi yang lebih berimbang antara belanja operasional dan investasi publik. Peningkatan belanja modal yang terarah, terutama pada sektor-sektor produktif seperti jalan, irigasi, air bersih, dan sarana layanan dasar, akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kapasitas ekonomi rumah tangga miskin. Dengan memperkuat investasi fisik dan sosial secara bersamaan, Pemerintah Daerah dapat menciptakan lingkungan pembangunan yang lebih inklusif, mempercepat mobilitas ekonomi masyarakat rentan, dan meningkatkan efektivitas intervensi penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

**Tabel 4.3. Perkembangan Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun					Rata- Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	2020- 2024
2	BELANJA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.1	Belanja Operasional	65.95%	65.70%	63.00%	64.31%	68.11%	65.73%
2.1.1	Belanja Pegawai	31.83%	30.22%	30.09%	31.15%	39.25%	32.67%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.62%	24.62%	25.50%	24.99%	24.81%	24.31%
2.1.3	Belanja Bunga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	12.50%	9.00%	6.31%	6.94%	5.43%	8.24%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00%	2.56%	1.10%	1.49%	0.31%	0.43%
2.2	Belanja Modal	19.52%	11.74%	15.46%	10.48%	9.09%	12.25%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0.30%	0.00%	1.33%	0.00%	0.00%	0.27%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.53%	4.10%	9.07%	3.96%	2.99%	4.18%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.37%	0.74%	0.73%	1.69%	1.66%	2.00%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.90%	4.73%	9.15%	5.69%	5.38%	5.83%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.96%	0.24%	0.94%	0.46%	0.55%	0.39%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	6.46%	1.93%	4.25%	2.68%	4.46%	2.57%
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.08%	0.68%	0.00%	0.13%	0.00%	0.40%
2.4	Belanja Transfer	21.44%	21.35%	21.64%	24.19%	21.87%	21.63%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0.05%	0.56%	0.35%	0.64%	0.00%	0.46%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	21.39%	20.79%	20.94%	23.56%	21.18%	21.17%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan

Analisis terhadap struktur belanja daerah yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer memberikan gambaran penting mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Lamongan mengalokasikan sumber daya fiskal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, analisis berbasis jenis belanja tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan arah dan kedalaman intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini karena klasifikasi menurut jenis belanja lebih menggambarkan bentuk pengeluaran, apakah berupa belanja barang dan jasa, pembangunan aset, bantuan tidak terduga, atau transfer ke desa, tanpa menunjukkan sektor atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Oleh sebab itu, diperlukan penajaman analisis dengan menggunakan Klasifikasi Belanja Berdasarkan Fungsi (Urusan Pemerintahan). Melalui klasifikasi ini, pemerintah

dapat mengidentifikasi secara lebih spesifik bagaimana belanja daerah berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Belanja Perlindungan Sosial menjadi komponen kunci karena secara langsung menyasar kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta intervensi pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain, belanja pada fungsi Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, serta Perumahan dan Fasilitas Umum berperan sebagai instrumen peningkat kapasitas masyarakat miskin. Belanja-belanja tersebut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat akses terhadap layanan dasar, menyediakan infrastruktur permukiman yang layak, dan membuka peluang ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan demikian, untuk menilai sejauh mana belanja daerah benar-benar efektif dalam menurunkan kemiskinan, diperlukan pendekatan analitis yang mampu menghubungkan antara arah belanja dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi memberikan dasar yang kuat untuk itu, namun interpretasi dampaknya tetap harus dibuktikan melalui analisis empiris. Oleh karena itu, analisis korelasi antara Belanja Perlindungan Sosial, Belanja Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, serta Perumahan dan Fasilitas Umum dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Lamongan selama tahun 2010–2024 menjadi relevan dan penting dilakukan. Analisis ini memungkinkan penilaian apakah peningkatan alokasi pada fungsi-fungsi tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, baik secara langsung melalui bantuan sosial maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat miskin.

Melalui hasil korelasi tersebut, dapat ditelusuri pola hubungan antara alokasi belanja fungsional dan dinamika penurunan kemiskinan. Belanja Perlindungan Sosial diharapkan menunjukkan korelasi negatif yang kuat karena sifatnya yang langsung menyasar rumah tangga miskin. Sementara itu, belanja pada fungsi Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, serta Perumahan dan Fasilitas Umum diharapkan memberikan dampak jangka menengah-panjang melalui peningkatan produktivitas, kualitas layanan dasar, dan lingkungan permukiman. Dengan demikian, hasil korelasi akan memberikan gambaran apakah arah kebijakan belanja daerah selama 2010–2024 telah memadai dalam mendukung agenda penanggulangan kemiskinan serta menjadi dasar untuk merumuskan strategi penganggaran yang lebih tepat sasaran pada periode selanjutnya.

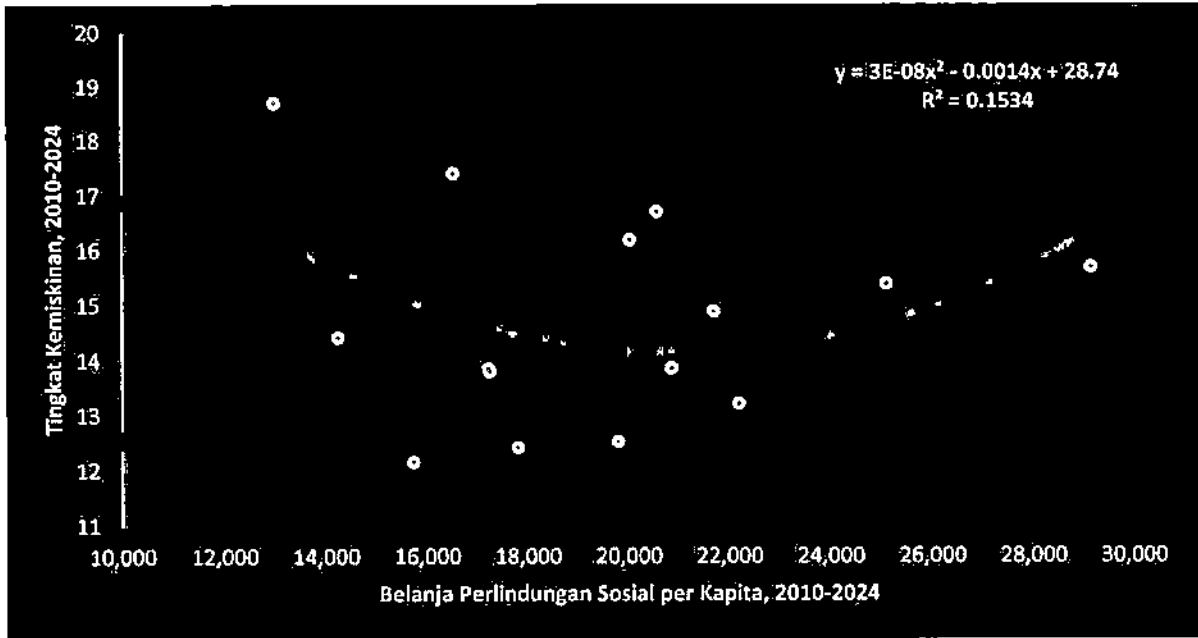
Adapun hasil korelasi belanja menurut fungsi (urusan pemerintahan) dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan selama tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Analisis Korelasi Belanja Perlindungan Sosial dengan Tingkat Kemiskinan

Hubungan antara Belanja Perlindungan Sosial per kapita dan tingkat kemiskinan menunjukkan kekuatan korelasi yang lemah, dengan nilai $R^2 = 0,1534$. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan belanja perlindungan sosial hanya mampu menjelaskan sekitar 15 persen variasi tingkat kemiskinan sepanjang periode 2010–2024.

Rendahnya korelasi menggambarkan bahwa belanja ini, meskipun secara konseptual ditujukan langsung kepada rumah tangga miskin, belum memiliki daya ungkit yang kuat dalam mengubah struktur kemiskinan secara signifikan.

Gambar 4.7. Korelasi Belanja Perlindungan Sosial per Kapita dengan Tingkat Kemiskinan



Sumber: Hasil Analisis (2025)

Hubungan matematis antara kedua variabel digambarkan melalui persamaan $y = 3E-08x^2 - 0,0014x + 28,74$. Koefisien linear yang bernilai negatif menunjukkan kecenderungan bahwa peningkatan belanja perlindungan sosial dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, besarnya koefisien kuadrat yang sangat kecil memperlihatkan bahwa pola hubungan tersebut tidak kuat dan cenderung mendekati linear yang lemah. Persamaan ini juga menunjukkan bahwa efek marginal tambahan dari setiap peningkatan belanja perlindungan sosial tidak selalu memberikan perubahan signifikan pada tingkat kemiskinan.

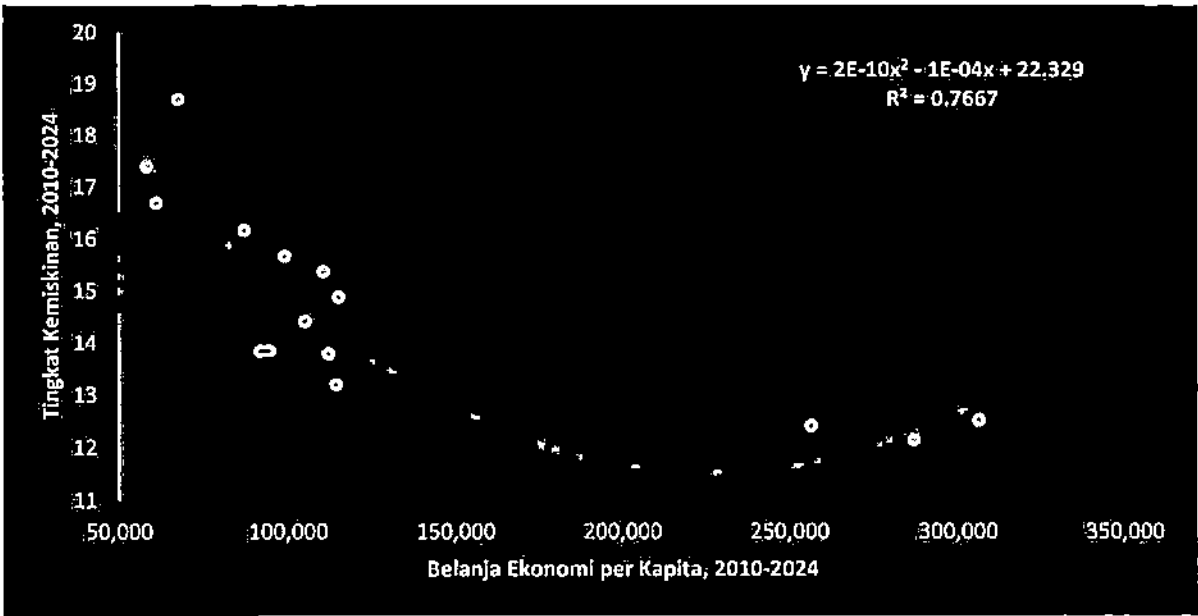
Implikasinya, belanja perlindungan sosial berperan lebih sebagai bantalan jangka pendek (short-term buffer) untuk meringankan tekanan ekonomi pada masyarakat miskin, tetapi belum cukup menjadi instrumen utama dalam menurunkan kemiskinan secara struktural. Agar efektif, belanja ini perlu ditingkatkan cakupan, ketepatan sasaran, serta integrasinya dengan program pemberdayaan lain yang dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang.

4.3.2.2 Analisis Korelasi Belanja Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan

Belanja Ekonomi menunjukkan hubungan yang kuat dengan tingkat kemiskinan, di mana nilai $R^2 = 0,7667$ mengindikasikan bahwa sekitar 77 persen variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh perubahan belanja pada fungsi ekonomi. Tingginya korelasi ini

menunjukkan bahwa intervensi pada fungsi ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan bahkan penguatan produktivitas masyarakat miskin.

Gambar 4.8. Korelasi Belanja Ekonomi per Kapita dengan Tingkat Kemiskinan



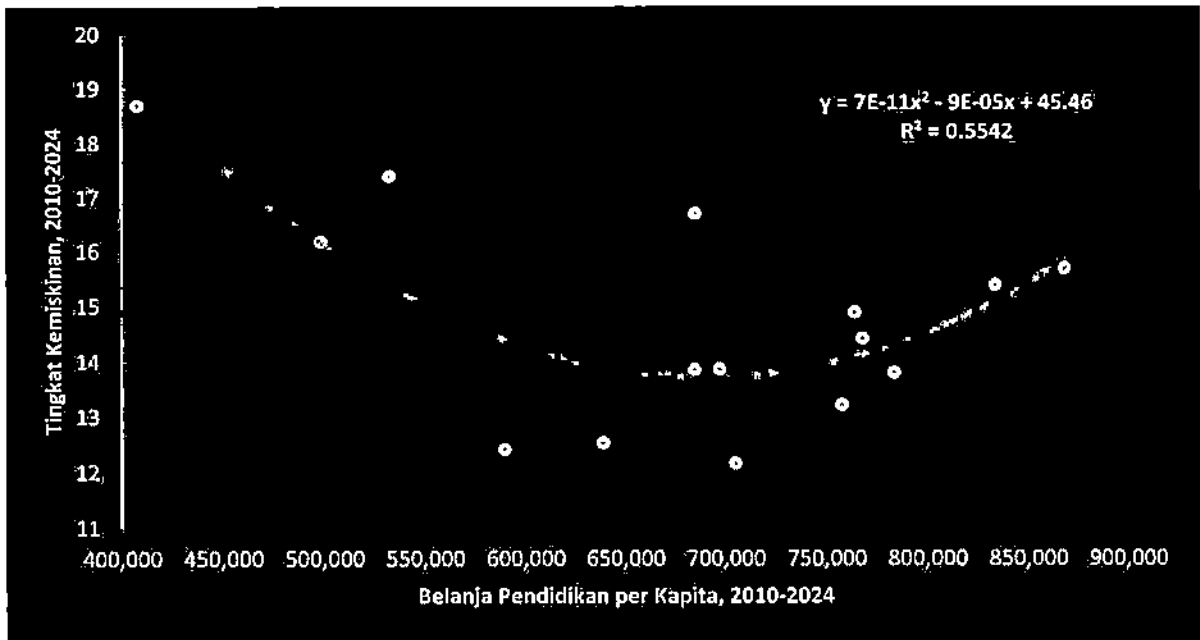
Sumber: Hasil Analisis (2025)

Persamaan matematis yang menggambarkan hubungan keduanya adalah $y = 2E-10x^2 - 1E-04x + 22,329$. Koefisien linear bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan belanja ekonomi berasosiasi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Nilai koefisien kuadrat yang kecil memperlihatkan bahwa hubungan keduanya cenderung bersifat linear meskipun tetap menunjukkan sedikit kelengkungan. Persamaan ini mengindikasikan bahwa tambahan belanja ekonomi pada tingkat tertentu masih memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Implikasinya terhadap penanggulangan kemiskinan sangat kuat. Belanja pada sektor ekonomi mampu memperluas akses masyarakat miskin terhadap peluang usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperbaiki struktur pendapatan. Intervensi yang tepat pada sektor pertanian, UMKM, dan infrastruktur ekonomi menjadi salah satu strategi paling efektif untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

4.3.2.3 Analisis Korelasi Belanja Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan

Tingkat hubungan antara Belanja Pendidikan per kapita dan tingkat kemiskinan menunjukkan kekuatan korelasi sedang hingga kuat, dengan nilai $R^2 = 0,5542$. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 55 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh perubahan belanja pendidikan selama periode 2010–2024. Namun, berbeda dengan belanja ekonomi atau kesehatan yang memiliki pola hubungan linear, belanja pendidikan memiliki pola non-linear yang lebih kompleks sehingga tingkat korelasi yang moderat ini mencerminkan adanya perilaku dua fase dalam hubungannya dengan kemiskinan.

Gambar 4.9. Korelasi Belanja Pendidikan per Kapita dengan Tingkat Kemiskinan

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Secara matematis, hubungan tersebut digambarkan oleh persamaan $y = 7E-11x^2 - 9E-05x + 45,46$, dimana koefisien kuadratik bernilai positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan belanja pendidikan per kapita dengan tingkat kemiskinan membentuk pola kurva-U. Pada tingkat belanja yang rendah menuju sedang, peningkatan belanja pendidikan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan (koefisien linear negatif). Namun setelah mencapai titik tertentu, peningkatan belanja pendidikan yang terlalu tinggi justru berkaitan dengan peningkatan kemiskinan kembali. Pola ini biasanya muncul ketika peningkatan belanja tidak sebanding dengan peningkatan kualitas hasil pendidikan, atau ketika belanja tersebut tidak langsung dinikmati oleh rumah tangga miskin.

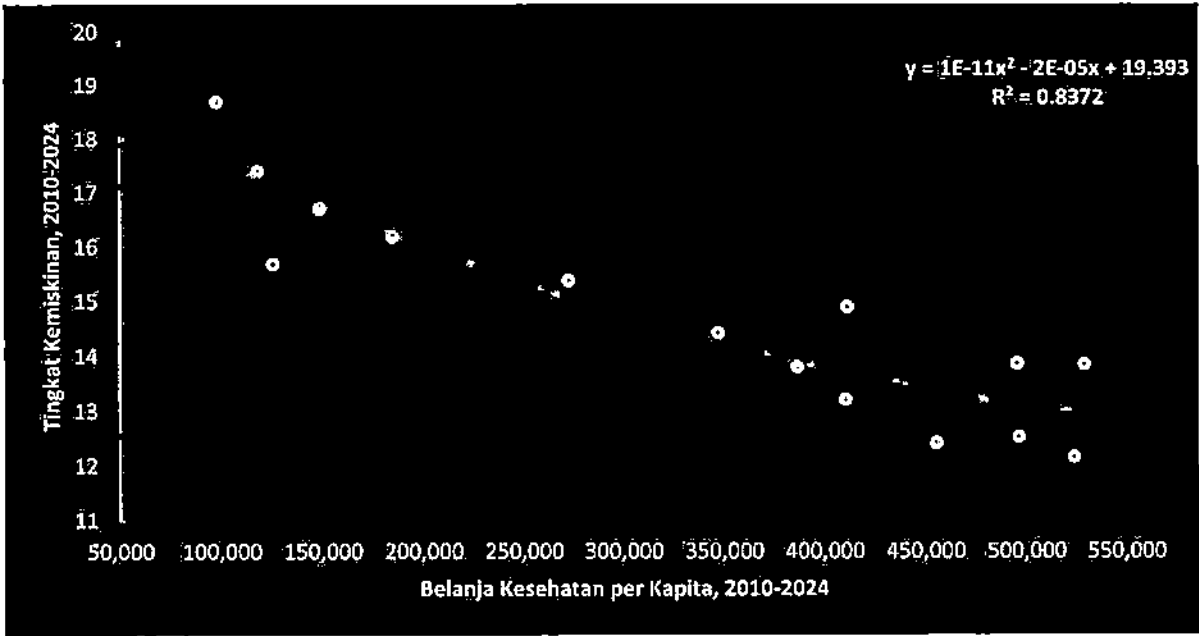
Implikasinya terhadap penanggulangan kemiskinan memerlukan interpretasi hati-hati. Pada fase pertama, belanja pendidikan berperan efektif dalam menekan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar. Namun pada fase kedua, ketika belanja sudah berada pada level tinggi tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hasil belajar, relevansi kurikulum, atau pemerataan akses bagi kelompok miskin, dampak penurunan kemiskinannya melemah. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas belanja pendidikan bukan semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan sasaran, efisiensi belanja, serta kemampuannya menghasilkan keterampilan dan peluang ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

4.3.2.4 Analisis Korelasi Belanja Kesehatan dengan Tingkat Kemiskinan

Belanja Kesehatan menunjukkan hubungan yang sangat kuat dengan tingkat kemiskinan, dengan nilai $R^2 = 0,8372$. Ini berarti 84 persen variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh perubahan belanja kesehatan, menjadikannya salah satu indikator paling

kuat dalam menjelaskan dinamika kemiskinan. Korelasi ini realistis karena kesehatan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja dan beban biaya rumah tangga.

Gambar 4.10. Korelasi Belanja Kesehatan per Kapita dengan Tingkat Kemiskinan



Sumber: Hasil Analisis (2025)

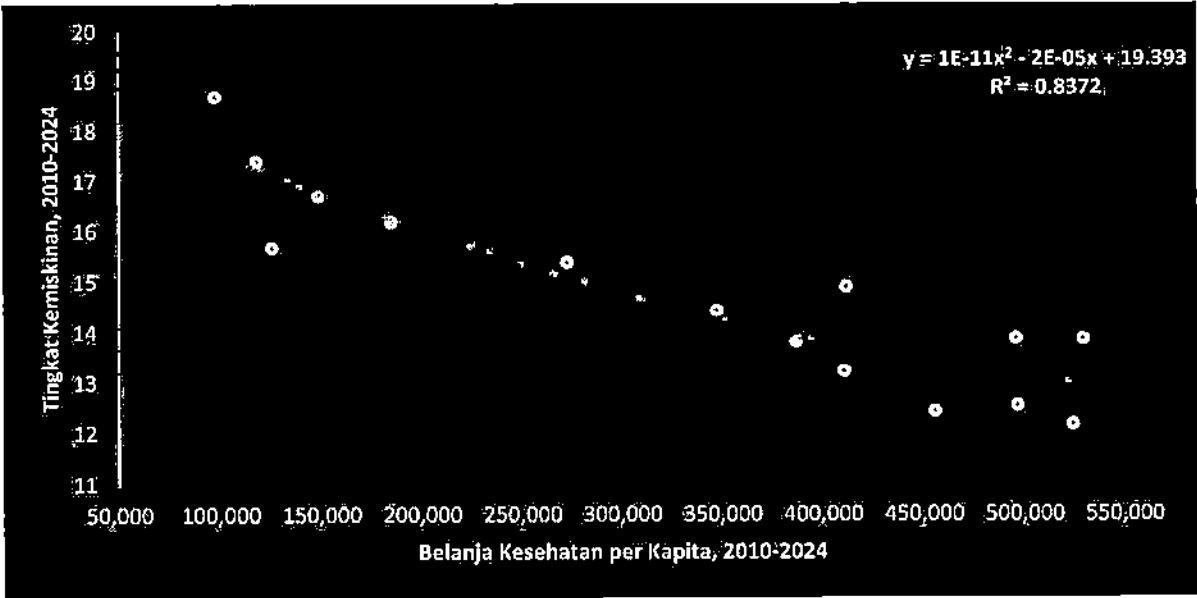
Persamaan matematis hubungan keduanya adalah $y = 1E-11x^2 - 2E-05x + 19,393$. Koefisien linear negatif menandakan bahwa peningkatan belanja kesehatan memiliki kecenderungan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Koefisien kuadratik yang kecil menunjukkan hubungan yang konsisten dan mendekati linear. Persamaan ini juga mencerminkan bahwa efek belanja kesehatan bersifat signifikan dan relatif stabil sepanjang waktu.

Implikasinya, belanja kesehatan sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Akses layanan kesehatan yang memadai mengurangi risiko kemiskinan akibat beban biaya pengobatan, meningkatkan produktivitas penduduk miskin, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan kesehatan universal, dan pengurangan biaya kesehatan menjadi kunci efektivitas belanja ini.

4.3.2.5 Analisis Korelasi Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum dengan Tingkat Kemiskinan

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum memiliki korelasi yang sangat lemah dengan tingkat kemiskinan, ditunjukkan melalui nilai $R^2 = 0,0079$. Angka ini menunjukkan bahwa belanja pada fungsi ini hampir tidak menjelaskan variasi kemiskinan selama periode 2010–2024. Lemahnya hubungan ini menunjukkan bahwa belanja perumahan sering kali tidak langsung menyasar kelompok miskin. Selain itu, dampak pembangunan infrastruktur permukiman biasanya membutuhkan waktu lama untuk dirasakan oleh masyarakat miskin.

Gambar 4.11. Korelasi Belanja Perumahan dan Fasum per Kapita dengan Tingkat Kemiskinan



Sumber: Hasil Analisis (2025)

Persamaan matematis hubungan tersebut adalah $y = -2E-11x^2 + 8E-06x + 14,194$. Koefisien linear positif menunjukkan arah hubungan yang tidak mendukung penurunan kemiskinan secara langsung. Komponen kuadratik yang kecil dan nilai R^2 yang sangat rendah menunjukkan bahwa persamaan tersebut tidak memiliki kekuatan penjelas yang berarti. Dengan demikian, peningkatan belanja perumahan dan fasilitas umum tidak selalu menghasilkan perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Implikasinya, belanja perumahan memerlukan penajaman target jika ingin memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan. Program seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, dan penyediaan air bersih dapat diarahkan lebih fokus kepada masyarakat miskin agar dampaknya lebih langsung. Tanpa targeting yang kuat, belanja ini hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan umum tanpa menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, perbaikan desain program menjadi kunci efektivitasnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

Secara keseluruhan, analisis korelasi ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah dalam menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh jenis intervensi dan relevansinya dengan akar persoalan kemiskinan di tingkat lokal. Belanja Kesehatan dan Belanja Ekonomi terbukti memiliki hubungan paling kuat dengan penurunan kemiskinan, menegaskan pentingnya intervensi yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat miskin. Belanja Pendidikan juga memberikan kontribusi struktural yang signifikan dalam jangka panjang. Sementara itu, Belanja Perlindungan Sosial memerlukan penguatan desain program agar dampaknya lebih terarah dan berkelanjutan. Rendahnya pengaruh Belanja Perumahan dan Fasum menunjukkan perlunya peninjauan kembali efektivitas sasaran dan cakupan program yang bersifat infrastruktur permukiman.

4.4 RINCIAN STRATEGI DAN PROGRAM DALAM MENGAKSELERASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LAMONGAN

Penyusunan rincian strategi dan program dalam mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan memerlukan landasan analisis yang presisi, termasuk perlunya proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pemetaan sektor basis sebagai instrumen pendukung kebijakan. Proyeksi PDRB memberikan gambaran mengenai kapasitas pertumbuhan ekonomi di masa depan, sementara identifikasi sektor basis memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menentukan sektor unggulan yang memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian lokal. Integrasi kedua data ini sangat krusial agar program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat reaktif, namun selaras dengan dinamika struktur ekonomi daerah, sehingga alokasi sumber daya dapat difokuskan pada sektor-sektor yang paling efektif dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4.4.1 Analisis Sektor Basis untuk Mendukung Diagnosa Rincian Strategi dan Program Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan

Upaya menganalisis proyeksi pertumbuhan ekonomi dilakukan beriringan dengan pemetaan sektor basis (unggulan) melalui Tipologi Klassen. Tipologi Klassen merupakan pendekatan klasifikasi daerah atau sektor berdasarkan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral. Analisis ini membagi sektor atau wilayah ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) maju dan cepat tumbuh; (ii) maju tetapi tertekan; (iii) berkembang cepat; dan (iv) tertinggal. Alat analisis ini memberikan gambaran yang sangat strategis bagi perencana pembangunan dalam memetakan posisi struktur ekonomi daerah dan menentukan sektor mana yang harus dipercepat, distimulus, atau ditopang agar tidak semakin tertinggal.

Ketika suatu sektor berada pada kuadran “maju dan cepat tumbuh”, sektor tersebut menjadi pendorong utama ekonomi daerah dan layak menjadi prioritas dalam penyusunan program flagship pembangunan. Sementara itu, sektor pada kuadran “maju tetapi tertekan” perlu distabilkan melalui peningkatan daya saing, efisiensi, dan diversifikasi produk agar tidak mengalami penurunan kontribusi. Pada sisi lain, sektor pada kuadran “berkembang cepat” merupakan sektor potensial yang perlu diberikan dorongan kebijakan untuk menjadi sektor unggulan di masa mendatang. Sedangkan sektor “tertinggal” biasanya memerlukan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan intervensi kebijakan fundamental. Dari perspektif perencanaan, Tipologi Klassen sangat efektif sebagai basis segmentasi kebijakan yang lebih presisi.

Tipologi Klassen pada dasarnya mengelompokkan sektor atau wilayah berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi. Namun, untuk pengembangan perencanaan yang lebih tajam, Tipologi Klassen dapat diperkuat dengan dua analisis penting yaitu Location Quotient (LQ) yang merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi sektor basis. Sedangkan

Shift Share (SS) adalah alat analisis untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan struktur pertumbuhan sektoral. Dengan menggabungkan ketiganya, Tipologi Klassen tidak lagi hanya melihat besar-kecil kontribusi dan cepat-lambat pertumbuhan, tetapi juga memahami struktur ekonomi, daya saing sektoral, dan potensi basis unggulan.

Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa 10 sektor di Kabupaten Lamongan memiliki nilai LQ > 1, yang berarti sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis atau memiliki keunggulan kompetitif relatif dibandingkan perekonomian provinsi atau nasional. Sektor basis ini mampu menghasilkan surplus output yang tidak hanya memenuhi kebutuhan internal daerah, tetapi juga berpotensi diekspor ke luar wilayah. Sektor dengan nilai LQ tertinggi antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (2,97), diikuti sektor administrasi pemerintahan (1,82) dan sektor informasi dan komunikasi (1,46). Apabila sektor pertanian memiliki LQ yang tinggi, maka sektor tersebut menjadi penopang utama struktur ekonomi daerah, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, sektor dengan nilai LQ mendekati 1 dikategorikan sebagai sektor non-basis namun tetap penting, karena perannya relatif seimbang dengan struktur ekonomi di wilayah pembanding. Sektor seperti industri pengolahan dan perdagangan berada pada kategori ini. Meskipun tidak memiliki keunggulan komparatif yang kuat, sektor-sektor tersebut tetap memiliki kontribusi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari, menjaga stabilitas konsumsi, dan menjadi forward linkage bagi sektor pertanian. Pengembangan sektor ini membutuhkan pendekatan peningkatan produktivitas dan efisiensi agar dapat mengikuti dinamika perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.

Adapun sektor dengan nilai LQ < 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut belum menjadi kekuatan utama perekonomian daerah. Sektor non-basis lebih banyak bergantung pada pasokan dari luar wilayah, sehingga kontribusi ekonominya belum optimal. Namun, sektor-sektor ini justru sering menjadi peluang pengembangan baru, terutama jika memiliki tren pertumbuhan yang positif pada analisis lain seperti shift share atau tipologi Klassen. Pemerintah Daerah dapat menjadikan hasil LQ ini sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan ekonomi, yaitu mempertahankan dan menguatkan sektor basis, mendorong peningkatan produktivitas pada sektor yang mendekati 1, dan mempercepat transformasi pada sektor non-basis agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan di masa mendatang.

Tabel 4.4. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

Sektor	Rata2 LQ	Ket.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.9719	Basis
Pertambangan dan Penggalian	0.3182	Non Basis
Industri Pengolahan	0.3682	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0.2567	Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.2188	Basis
Konstruksi	1.2109	Basis

Sektor	Rata2 LQ	Ket.
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.0704	Basis
Transportasi dan Pergudangan	0.3155	Non Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.3116	Non Basis
Informasi dan Komunikasi	1.4638	Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.8058	Non Basis
Real Estat	1.3799	Basis
Jasa Perusahaan	0.3656	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.8245	Basis
Jasa Pendidikan	1.0846	Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.4402	Basis
Jasa Lainnya	1.3614	Basis

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Hasil perhitungan shift share menunjukkan bahwa sebagian besar sektor di Lamongan mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi nasional, yang tercermin dari komponen nasional share (Ns) yang bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum perekonomian nasional memberikan dorongan pertumbuhan yang merata kepada hampir seluruh sektor di Lamongan. Sektor yang memiliki kontribusi Ns lebih besar mencerminkan ketergantungan yang lebih kuat terhadap dinamika nasional, misalnya sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi yang sangat responsif terhadap kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, serta stabilitas pasar domestik.

Pada komponen kedua, yaitu industry mix (Im), terlihat bahwa terdapat perbedaan kinerja antar sektor dalam menanggapi tren pertumbuhan sektoral nasional. Sektor yang menunjukkan nilai Im positif berada dalam kategori sektor yang tumbuh cepat secara nasional, sehingga daerah menikmati keuntungan dari struktur ekonomi yang sesuai dengan arah pertumbuhan nasional. Contohnya, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, informasi dan komunikasi dan jasa lainnya. Nilai Im positif dikarenakan secara nasional tumbuh lebih cepat dibanding rata-rata. Sebaliknya, sektor dengan Im negatif, misalnya pertanian, pertambangan, pengadaan air, jasa keuangan, real estat, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa Kesehatan menandakan bahwa sektor tersebut secara nasional berada dalam tekanan sehingga daerah yang tergantung pada sektor itu tidak memperoleh keuntungan struktural yang memadai.

Tabel 4.5. Hasil Perhitungan SS Kabupaten Lamongan 2020-2024

Sektor	Rata2 LQ	Ket.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1196.94	-411.24
Pertambangan dan Penggalian	-100.55	176.46
Industri Pengolahan	11.03	355.38

Sektor	Rata2 LQ	Ket.
Pengadaan Listrik dan Gas	6.42	-4.99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dsb	-2.02	2.94
Konstruksi	66.68	187.08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dsb	373.68	-8.89
Transportasi dan Pergudangan	71.55	11.60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.80	30.83
Informasi dan Komunikasi	170.14	92.86
Jasa Keuangan dan Asuransi	-44.32	4.92
Real Estat	-46.43	63.19
Jasa Perusahaan	4.19	-0.94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dsb	-125.76	-27.16
Jasa Pendidikan	-67.19	36.64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-7.20	10.83
Jasa Lainnya	96.16	11.20

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Komponen ketiga, yaitu regional shift (Rs) atau competitive effect, memberikan gambaran paling penting tentang daya saing daerah. Sektor yang memiliki nilai Rs positif dapat dikategorikan sebagai sektor kompetitif, karena tumbuh lebih cepat dibanding sektor yang sama di tingkat nasional. Ini mencerminkan keunggulan lokal berupa efisiensi, inovasi, kualitas tenaga kerja, infrastruktur pendukung, atau kebijakan daerah yang pro-bisnis.

Sebaliknya, sektor dengan Rs negatif menunjukkan bahwa daerah belum mampu bersaing secara optimal, meskipun sektor tersebut mungkin memiliki potensi besar. Informasi dari Rs ini menjadi dasar utama bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas intervensi, yaitu memperkuat sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif, sambil merancang strategi peningkatan produktivitas pada sektor yang tertinggal agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap transformasi ekonomi daerah. Adapun sektor berdaya saing tinggi di Kabupaten Lamongan adalah industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi.

Integrasi hasil analisis Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), dan Tipologi Klassen memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang struktur, dinamika, dan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah. LQ mengidentifikasi sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif, SS mengukur kinerja sektor berdasarkan pengaruh nasional, struktur industri, dan daya saing lokal, sementara Tipologi Klassen memetakan setiap sektor berdasarkan kombinasi pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB. Ketiga metode ini, bila digunakan bersama, memungkinkan Pemerintah Daerah menilai tidak hanya sektor mana yang kuat saat ini, tetapi juga sektor mana yang menunjukkan potensi pertumbuhan jangka menengah-panjang.

Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa beberapa sektor memiliki nilai $LQ > 1$ sehingga dapat dikategorikan sebagai sektor basis yang menjadi penopang utama

perekonomian daerah. Namun, keunggulan komparatif tersebut perlu diuji lebih lanjut dengan SS untuk memastikan apakah sektor basis tersebut benar-benar kompetitif. Dalam beberapa kasus, sektor dengan LQ tinggi justru memiliki nilai regional shift (Rs) negatif, sehingga meskipun menjadi basis, sektor tersebut tidak tumbuh secepat sektor serupa di tingkat nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keunggulan komparatif belum tentu diikuti oleh keunggulan kompetitif, dan diperlukan strategi peningkatan produktivitas ataupun inovasi agar sektor basis tetap berfungsi sebagai motor ekonomi daerah.

Sementara itu, sektor dengan nilai $LQ < 1$ tidak otomatis dianggap kurang penting, terutama bila analisis shift share menunjukkan nilai Rs positif, yang berarti sektor tersebut sedang mengalami pertumbuhan kompetitif meskipun bukan sektor basis. Sektor-sektor seperti ini biasanya merupakan sektor yang sedang naik daun, yang memperoleh momentum dari perubahan teknologi, dinamika pasar lokal, atau pergeseran permintaan masyarakat. Kombinasi LQ rendah dan Rs tinggi menandakan peluang transformasi struktural yang dapat mendorong diversifikasi ekonomi daerah, sehingga sektor ini layak menjadi fokus pengembangan jangka menengah.

Tabel 4.6. Hasil Pemetaan Tipologi Klasen Kab Lamongan Tahun 2020-2024

Typo- logi	Sektoral	LQ	IM	RS	Tingkat Potensial
I	Informasi dan Komunikasi	1.46	170.14	92.86	Istimewa
	Jasa Lainnya	1.36	96.16	11.20	
	Konstruksi	1.21	66.68	187.08	
II	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.07	373.68	(8.89)	Baik Sekali
III	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.44	(7.20)	10.83	Baik
	Real Estat	1.38	(46.43)	63.19	
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.22	(2.02)	2.94	
	Jasa Pendidikan	1.08	(67.19)	36.64	
IV	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.97	(1,196.94)	(411.24)	Lebih dari Cukup
	Administrasi Pemerintah-an, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.82	(125.76)	(27.16)	
V	Industri Pengolahan	0.37	11.03	355.38	Cukup
	Transportasi dan Pergudangan	0.32	71.55	11.60	
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.31	42.80	30.83	
VI	Jasa Perusahaan	0.37	4.19	(0.94)	Hampir dari Cukup
	Pengadaan Listrik dan Gas	0.26	6.42	(4.99)	

Typo- logi	Sektoral	LQ	IM	RS	Tingkat Potensial
VII	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.81	(44.32)	4.92	Kurang
	Pertambangan dan Penggalian	0.32	(100.55)	176.46	
VIII	-	-	-	-	Kurang Sekali

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Ketika hasil LQ dan SS dipadukan dalam Tipologi Klassen, diperoleh pemetaan yang lebih strategis. Sektor dengan LQ > 1, Rs positif, dan IM positif berada dalam kuadran “Istimewa” adalah sektor unggulan daerah yang secara simultan memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan pertumbuhan tinggi. Sektor dalam kuadran I ini antara lain Informasi dan Komunikasi, Jasa Lainnya dan Konstruksi. Kedua sektor ini adalah lokomotif pertumbuhan daerah dan menjadi prioritas pengembangan jangka panjang. Melihat karakteristik sektor ini, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kapasitas dan inovasi untuk memastikan pertumbuhan tetap tinggi meski struktur ekonomi berubah.

Di sisi lain, sektor kuadran II dengan LQ dan IM tinggi namun nilai RS negatif adalah sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil Motor menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu bersaing secara optimal meskipun memiliki potensi besar. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa sektor ini sebenarnya punya potensi besar secara struktural, tetapi belum mampu memanfaatkan peluang pasar nasional/global secara optimal. Tantangannya adalah meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan efisiensi agar sektor tersebut kembali kompetitif secara regional. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah peningkatan daya saing, konektivitas pasar dan jejaring usaha agar sektor Kembali mampu bersaing dengan wilayah lain dan memanfaatkan momentum pertumbuhan nasional.

Kuadran III yaitu sektor dengan nilai LQ dan RS tinggi namun nilai IM negatif, yaitu sektor Jasa Kesehatan, Real Estat, Pengadaan Air, dan Jasa Pendidikan menunjukkan sektor yang berdaya saing di tingkat daerah namun tumbuh melambat secara nasional. Sektor seperti ini membutuhkan intervensi kebijakan untuk menghindari stagnasi, misalnya modernisasi teknologi, hilirisasi, atau peningkatan nilai tambah. Kombinasi informasi ini membantu Pemerintah Daerah menentukan sektor mana yang harus dipertahankan, didorong, atau direvitalisasi.

Pada kuadran IV, sektor Pertanian dan Administrasi Pemerintahan merupakan sektor dengan nilai LQ > 1, namun IM dan RS bernilai negatif. Artinya, sektor ini penting bagi perekonomian Kabupaten Lamongan dan memiliki keunggulan komparatif (kontribusinya lebih besar dibanding struktur provinsi Jawa Timur), namun mengalami pelambatan baik secara domestik maupun pertumbuhan sektor yang sama di tingkat regional (sektor basis tertekan). Sektor Pertanian Kabupaten Lamongan, secara historis berkontribusi utama dalam menggerakkan perekonomian namun mengalami tekanan transformasi baik karena teknologi, preferensi pasar dan perubahan struktur ekonomi nasional. Rekomendasi kebijakan antara lain dengan modernisasi dan hilirisasi

(transformasi struktur produksi), kebijakan diversifikasi produk dan pasar, perlindungan dan penyesuaian struktur melalui gradual transition policy dengan tetap mempertahankan sektor inti namun perlahan memindahkan Sebagian tenaga kerja dan investasi ke sektor baru dengan nilai IM dan RS positif.

Kuadran V, VI dan VII merupakan kumpulan sektor non basis dengan nilai IM dan RS yang beragam. Kuadran V adalah sektor Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi sebagai sektor dengan kontribusi kecil dibanding nasional, tetapi tumbuh lebih cepat secara nasional dan sangat kompetitif di daerah. Sektor ini tergolong sektor yang sedang menanjak meski kontribusinya masih kecil. Untuk itu, sektor yang dimaksud perlu mendapat perhatian dalam skala-up dan percepatan pengembangan prioritas investasi, peningkatan infrastruktur pendukung, kemitraan, promosi dan ekstensifikasi pasar regional.

Termasuk dalam kuadran VI dengan $LQ < 1$, IM positif namun RS negatif adalah Jasa Perusahaan dan pengadaan Listrik gas. Sektor ini berpotensi besar, namun daerah kurang berhasil menangkap peluang pertumbuhan yang sedang berkembang di tingkat nasional. Untuk menaikkan nilai RS sehingga dapat mengejar pertumbuhan nasional perlu untuk penguatan daya saing lokal seperti kemudahan izin usaha, digitalisasi layanan dan efisiensi rantai pasok.

Terakhir, kuadran VII dengan nilai $LQ < 1$, RS positif namun IM negatif termasuk di dalamnya Jasa Keuangan dan sektor Pertambangan. Sektor ini memiliki keunggulan lokal meskipun tidak berkembang secara nasional. Bentuk rekomendasi adalah fokus pada niche market (produk khas daerah), penguatan hilirisasi produk lokal, digitalisasi pemasaran dan perlindungan terhadap tekanan pasar nasional tujuannya mempertahankan keunggulan lokal agar tetap hidup meskipun tren nasional lesu.

Dengan demikian, pengembangan tipologi Klassen berbasis LQ dan Shift Share memberikan kerangka analitis yang lebih kaya dan akurat dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah. Melalui pendekatan integratif ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan yang lebih terukur, yaitu mempertahankan sektor basis yang benar-benar kompetitif, mempercepat pertumbuhan sektor potensial yang menunjukkan dinamika positif, serta memperkuat sektor tertinggal yang secara struktural penting namun lemah secara daya saing. Analisis gabungan ini menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan wilayah serta pengambilan keputusan terkait investasi dan pengembangan ekonomi lokal.

4.4.2 Analisis Proyeksi Pertumbuhan PDRB untuk Mendukung Diagnosa Rincian Strategi dan Program Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan secara historis berada sedikit di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, perekonomian tumbuh sekitar 4 persen sejalan dengan perekonomian tingkat regional. Perekonomian Jawa Timur ditopang oleh sektor Industri Pengolahan dengan sektor Transportasi dan Pergudangan

tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi sekitar 9,50 persen. Seiring dengan itu, perkembangan infrastruktur, investasi, dan aktivitas ekonomi di sektor industri-manufaktur, logistik dan jasa turut mendorong dinamika ekonomi provinsi. Kombinasi basis industri yang kuat dan permintaan lokal yang stabil menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu kontributor utama bagi ekonomi nasional.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Meskipun pertumbuhan cukup baik, keberlanjutan ekspansi ekonomi tetap perlu diiringi upaya peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing sektor manufaktur dan jasa, serta diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada segelintir sektor dominan. Ini penting agar pertumbuhan tidak stagnan dan membantu pemerataan kesejahteraan antar wilayah di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan menunjukkan dinamika yang menarik: pada triwulan II 2024 Lamongan mencatat pertumbuhan tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Timur — mencapai angka 7,61 persen (q-on-q). Hal ini menunjukkan bahwa Lamongan dalam periode tersebut berada dalam fase ekspansi ekonomi yang kuat, jauh melampaui rata-rata provinsi. Faktor yang mendorong antara lain investasi yang terus meningkat, serta upaya Pemerintah Kabupaten dalam memperbaiki infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif.

Berdasar pada pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mirip dengan Kabupaten Lamongan menunjukkan secara historis pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang tidak linier diakibatkan kondisi krisis covid-19 kemudian percepatan pemulihan dan pelandaian. Oleh karena itu selain regresi linear (garis lurus), perlu mempertimbangkan model non-linear (polinomial, eksponensial, log-power, logistik) yang bisa menangkap kelengkungan atau laju pertumbuhan proporsional. Pendekatan praktisnya adalah membandingkan beberapa model (linear, polinomial, exponential), memilih berdasarkan kecocokan (R^2), kesalahan prediksi (RMSE atau MAE pada data validasi), dan pemeriksaan residual (autokorelasi, heteroskedastisitas).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan menggunakan metode trendline secara linier dan non linier (polynomial) berbasis pada data historis 10 tahun terakhir dan menambahkan scenarios-based forecasting (asumsi baseline) yang dapat memberikan gambaran pertumbuhan lebih realistis. Model polinomial (kuadratik atau kubik) dipilih karena data PDRB/pertumbuhan daerah sering menunjukkan pola non-linear misalnya percepatan pemulihan pasca-shock, pelandaian setelah fase ekspansi, atau efek kebijakan yang membuat laju perubahan tidak konstan. Polinomial orde-2 (kuadratik) menangkap satu titik belok (naik → melandai atau sebaliknya), sementara orde-3 (kubic) mampu merepresentasikan dua perubahan kelengkungan (naik → turun → naik). Oleh karena itu bila historis menampilkan kelengkungan tunggal atau ganda, polinomial memberi fleksibilitas lebih baik daripada regresi linear sederhana tanpa memaksakan asumsi persentase konstan seperti pada model eksponensial.

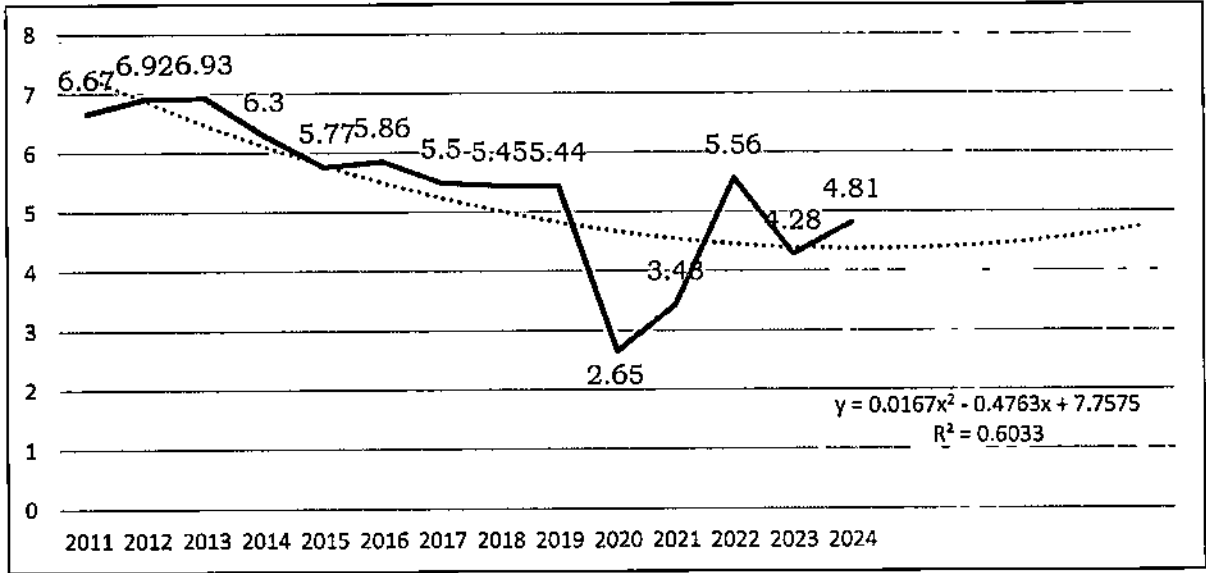
Terdapat dua skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi yaitu moderat dan optimis. Proyeksi moderat berbasis pada asumsi pertumbuhan yang mengikuti laju historis rata-rata

tanpa mengantisipasi guncangan besar maupun percepatan ekonomi yang luar biasa. Regresi linier menangkap hubungan garis lurus antara waktu dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tren masa lalu diasumsikan berlanjut secara stabil. Dengan demikian, skenario moderat mencerminkan pandangan perekonomian berjalan seperti biasa dimana ekonomi tetap tumbuh, tetapi tidak jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibanding tren historisnya.

Skenario optimis dengan menggunakan regresi polinomial berarti memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dengan asumsi adanya percepatan (accelerated growth) yang tidak tertangkap oleh tren linier sederhana. Regresi polinomial, misalnya orde 2 (kuadrat) atau orde 3 (kubik) memungkinkan kurva pertumbuhan membentuk pola naik yang semakin cepat, karena model ini mampu menangkap dinamika nonlinier seperti percepatan investasi, ekspansi industri baru, atau meningkatnya produktivitas akibat inovasi teknologi. Skenario optimis menunjukkan bahwa pertumbuhan di masa depan tidak hanya mengikuti pola masa lalu, tetapi laju pertumbuhan meningkat berkat faktor pendukung struktural.

Tingkat pertumbuhan yang awalnya mengikuti momentum historis lalu melandai, misalnya proyeksi menunjukkan laju pertumbuhan nominal meningkat selama 1–2 tahun pertama (memanfaatkan momentum investasi atau pemulihan konsumsi) seperti ditunjukkan pada pola pertumbuhan ekonomi Kab. Lamongan tahun 2023-2024 dari 4,28 persen ke 4,81 persen yang kemudian perlahan menurun menuju tingkat keseimbangan jangka menengah. Titik puncak kurva menandai periode optimal bagi intervensi untuk mengekstraksi nilai tambah (hilirisasi, peningkatan kapasitas), sedangkan periode pelandaian mengingatkan untuk memberikan perhatian pada kebutuhan reformasi struktural untuk mempertahankan momentum. Penting juga menafsirkan koefisien matematika, bahwa koefisien X^2 negatif memberi indikasi pelandaian yang nyata, sedangkan positif menunjukkan percepatan non-linier, informasi ini berguna untuk menyusun skenario kebijakan.

Gambar 4.12. Tren Polinomial Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan



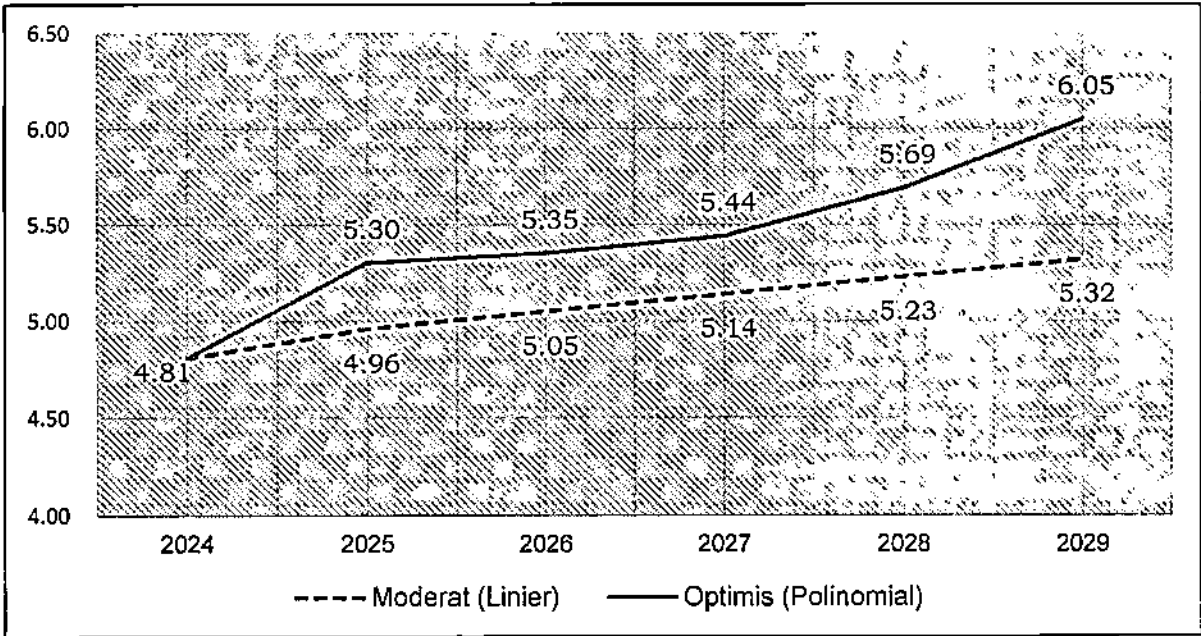
Sumber: Hasil Analisis (2025)

Penambahan asumsi baseline digunakan untuk lebih realistis dengan pertumbuhan ekonomi secara historis. Pada persamaan model polynomial Kab. Lamongan menunjukkan nilai 7,75 persen atau dianggap sebagai titik awal proyeksi pertumbuhan. Namun berdasarkan asumsi historis, maka analisis memberikan asumsi baseline sebesar 4,81 persen yaitu pertumbuhan ekonomi tahun terakhir sebagai titik awal proyeksi pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

Hasil proyeksi lima tahunan berbasis regresi linier dan polynomial ditunjukkan pada gambar di bawah. Dalam skenario moderat, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada lintasan yang relatif stabil dengan peningkatan yang sejalan dengan tren historis dan perkembangan ekonomi nasional. Skenario ini mengasumsikan bahwa kondisi makro tetap terjaga, stabilitas inflasi, konsumsi rumah tangga tumbuh moderat, realisasi investasi berjalan sesuai pola historis, serta tidak terdapat gejolak eksternal yang signifikan. Dari sisi regional, sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan diperkirakan tumbuh sesuai rata-rata lima tahun terakhir dengan peningkatan produktivitas yang bertahap. Dengan demikian, skenario moderat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mencerminkan perbaikan bertahap dari sisi kapasitas produksi dan konsumsi tanpa lonjakan pertumbuhan yang drastis.

Pada skenario optimis, proyeksi pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi yang lebih kuat, didorong oleh peningkatan signifikan pada sektor-sektor unggulan serta realisasi investasi yang lebih tinggi dari tren normal. Skenario ini mengasumsikan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan peran investasi swasta, ekspansi perdagangan berbasis digital, serta penguatan kinerja ekspor daerah. Selain itu, implementasi kebijakan pro-growth, seperti kemudahan perizinan, peningkatan kualitas SDM, dan support UMKM berkontribusi memperbesar kapasitas ekonomi daerah dalam waktu relatif cepat. Kombinasi faktor tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang yang lebih tinggi, mencerminkan optimisme bahwa transformasi struktural dan inovasi sektor riil dapat mendorong percepatan pertumbuhan melampaui baseline historis.

Gambar 4.13. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan 2025-2029



Sumber: Hasil Analisis (2025)

Secara sektoral, proyeksi pertumbuhan juga disusun berdasarkan skenario moderat dan optimis. Skenario moderat menggambarkan kondisi pertumbuhan sektoral yang mengikuti pola historis secara relatif stabil tanpa adanya lonjakan signifikan. Pada skenario ini, sektor-sektor utama diproyeksikan tumbuh dengan laju yang sejalan dengan tren lima tahun terakhir, dimana tidak terjadi perubahan struktural besar atau akselerasi investasi yang drastis.

Pertumbuhan sektoral pada skenario moderat diturunkan dari model regresi linier, sehingga mencerminkan asumsi bahwa pertumbuhan berjalan secara konstan dan proporsional terhadap perkembangan sebelumnya. Dengan demikian, sektor yang sudah mapan, seperti perdagangan, konstruksi, dan pertanian, tetap menunjukkan kinerja positif, namun tidak mengalami peningkatan tajam. Skenario ini umum digunakan sebagai baseline karena menggambarkan kondisi yang paling realistis jika tidak ada intervensi kebijakan besar atau perubahan eksternal yang signifikan.

Skenario optimis, sebaliknya, mengasumsikan adanya percepatan pertumbuhan pada beberapa sektor sebagai dampak dari kebijakan strategis, investasi baru, peningkatan kapasitas produksi, atau inovasi teknologi. Dalam skenario ini, analisis sering menggunakan regresi polinomial yang mampu menangkap pola percepatan (accelerated growth) dan dinamika nonlinier pada sektor tertentu. Sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa modern diproyeksikan tumbuh lebih cepat karena adanya peluang pasar yang meningkat, digitalisasi ekonomi, serta ekspansi infrastruktur. Skenario optimis menggambarkan kondisi ketika perekonomian daerah berhasil memanfaatkan momentum pertumbuhan nasional maupun global, yang akhirnya menciptakan lompatan kinerja sektoral yang melampaui tren historis.

Secara lebih rinci, tiga prime mover sectors di Jawa Timur yaitu sektor pertanian, industry pengolahan dan perdagangan diproyeksikan pertumbuhannya di Kabupaten Lamongan dalam lima tahun ke depan. Sektor Pertanian dengan share PDRB terbesar di Kabupaten Lamongan diprediksi akan tumbuh karena tiap sub sektornya secara positif. Dalam skenario moderat, sektor Pertanian diproyeksikan tumbuh pada laju yang stabil mengikuti pola historis, dengan pertumbuhan yang dipengaruhi terutama oleh produktivitas lahan, pola cuaca, dan penggunaan teknologi yang sudah ada. Sub-sektor Tanaman Pangan diperkirakan tumbuh moderat karena masih sangat dipengaruhi fluktuasi musim dan keterbatasan inovasi benih unggul. Perikanan tetap tumbuh positif, tetapi tidak signifikan, seiring keterbatasan peningkatan kapasitas budidaya dan tantangan kualitas lingkungan perairan. Sub-sektor Kehutanan cenderung stagnan atau tumbuh rendah mengingat kebijakan pembatasan pemanfaatan hutan, menurunnya potensi kayu komersial, serta pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor jasa dan manufaktur. Dengan demikian, skenario moderat mencerminkan kondisi Pertanian yang tetap menjadi penopang ekonomi, namun tanpa adanya akselerasi besar dalam produktivitas maupun investasi.

Tabel 4.5. Proyeksi Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Lamongan 2025-2029

Kode	Uraian	PREDIKSI PERTUMBUHAN MODERAT					PREDIKSI PERTUMBUHAN OPTIMIS				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.39	0.48	0.57	0.66	0.75	1.39	1.44	1.53	1.78	2.14
B	Pertambangan dan Penggalian	6.00	6.09	6.18	6.27	6.36	6.49	6.54	6.63	6.88	7.24
C	Industri Pengolahan	7.42	7.51	7.60	7.69	7.78	8.15	8.20	8.29	8.54	8.90
D	Pengadaan Listrik, Gas	4.70	4.79	4.88	4.97	5.06	5.19	5.24	5.33	5.58	5.94
E	Pengadaan Air	5.70	5.79	5.88	5.97	6.06	6.20	6.25	6.34	6.59	6.95
F	Konstruksi	8.47	8.56	8.65	8.74	8.83	8.96	9.01	9.10	9.35	9.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.52	5.61	5.70	5.79	5.88	6.02	5.66	5.79	6.04	6.24
H	Transportasi dan Pergudangan	9.35	9.44	9.53	9.62	9.71	9.84	9.89	9.98	10.23	10.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.37	6.46	6.55	6.64	6.73	6.86	6.91	7.00	7.25	7.61
J	Informasi dan Komunikasi	6.65	6.74	6.83	6.92	7.01	7.15	7.20	7.29	7.54	7.90
K	Jasa Keuangan	2.59	2.68	2.77	2.86	2.95	3.59	3.64	3.73	3.98	4.34
L	Real Estate	4.50	4.59	4.68	4.77	4.86	5.50	5.55	5.64	5.89	6.25
M,N	Jasa Perusahaan	5.04	5.13	5.22	5.31	5.40	5.54	5.59	5.68	5.93	6.29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.06	1.15	1.24	1.33	1.42	2.06	2.11	2.20	2.45	2.81
P	Jasa Pendidikan	3.65	3.74	3.83	3.92	4.01	4.14	4.19	4.28	4.53	4.89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.70	4.79	4.88	4.97	5.06	5.19	5.24	5.33	5.58	5.94
R,S,T,U	Jasa lainnya	9.46	9.55	9.64	9.73	9.82	9.96	10.01	10.10	10.35	10.71
PDRB		4.96	5.05	5.14	5.23	5.32	5.30	5.35	5.44	5.69	6.05

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Dalam skenario optimis, sektor pertanian diproyeksikan mengalami percepatan pertumbuhan melalui peningkatan teknologi budidaya, perluasan akses pasar, dan kebijakan intensifikasi serta modernisasi pertanian. Sub-sektor perikanan memiliki potensi pertumbuhan pesat melalui ekspansi budidaya ikan air tawar dan laut, peningkatan rantai dingin (cold chain), serta industrialisasi pengolahan hasil laut. Sub-sektor tanaman pangan dapat tumbuh lebih cepat jika terjadi peningkatan penggunaan mekanisasi, benih unggul, serta digital farming yang mendorong efisiensi produksi. Bahkan sub-sektor kehutanan dapat mengalami perbaikan kinerja melalui pengembangan hutan rakyat, agroforestry, dan komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, gaharu, dan rotan. Skenario

optimis ini mengasumsikan intervensi kebijakan yang pro-investasi, peningkatan infrastruktur pertanian, dan adaptasi teknologi yang mampu mendorong sektor pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

Tabel 4.6. Proyeksi Pertumbuhan Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Lamongan 2025-2029

Ket.	Uraian	PREDIKSI PERTUMBUHAN MODERAT					PREDIKSI PERTUMBUHAN OPTIMIS				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.39	0.48	0.57	0.66	0.75	1.39	1.44	1.53	1.78	2.14
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.05	0.14	0.23	0.32	0.41	1.05	1.10	1.19	1.44	1.80
	a. Tanaman Pangan	0.03	0.12	0.21	0.30	0.39	1.03	1.17	0.30	0.55	0.75
	b. Tanaman Hortikultura	0.21	0.30	0.39	0.48	0.57	1.21	1.26	1.35	1.60	1.99
	c. Tanaman Perkebunan	0.13	0.22	0.31	0.40	0.49	1.13	1.18	1.27	1.52	1.88
	d. Peternakan	0.04	0.13	0.22	0.31	0.40	1.04	1.09	1.18	1.43	1.79
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.06	0.15	0.24	0.33	0.42	1.06	1.11	1.20	1.45	1.81
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.05	0.14	0.23	0.32	0.41	1.05	1.10	1.19	1.44	1.80
	3 Perikanan	0.08	0.17	0.26	0.35	0.44	1.08	1.13	1.22	1.47	1.83

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Sektor Industri Pengolahan diprediksi tumbuh dalam lima tahun kedepan, didukung peranan industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil,dan industri barang galian bukan logam. Pada skenario moderat, pertumbuhan Industri Pengolahan diperkirakan bergerak stabil mengikuti tren lima tahun terakhir tanpa adanya lonjakan investasi yang signifikan. Industri makanan dan minuman tetap tumbuh positif karena permintaan domestik yang konsisten, namun pertumbuhannya cenderung moderat akibat keterbatasan ekspansi kapasitas dan biaya input yang fluktuatif.

Industri barang dari logam dan tekstil diproyeksikan tumbuh terbatas karena tekanan kompetisi luar negeri dan teknologi produksi yang belum banyak mengalami pembaruan. Sementara itu, industri kayu dan tembakau menghadapi pertumbuhan rendah atau stagnan dalam skenario moderat karena terbatasnya pasokan bahan baku, regulasi yang lebih ketat, serta perubahan preferensi pasar. Dengan demikian, skenario moderat menggambarkan pertumbuhan industri pengolahan yang stabil namun masih bergantung pada pola historis tanpa adanya lompatan produktivitas.

Pada skenario optimis, Industri Pengolahan diproyeksikan mengalami akselerasi pertumbuhan seiring masuknya investasi baru, modernisasi mesin, peningkatan ekspor, serta adopsi teknologi industri 4.0. Industri makanan dan minuman memiliki peluang tumbuh pesat karena perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan inovasi produk berbasis komoditas lokal. Industri barang dari logam dapat meningkat tajam apabila proyek infrastruktur dan manufaktur nasional mendorong permintaan komponen logam. Industri tekstil mendapat dorongan dari modernisasi mesin, diversifikasi produk, dan integrasi e-commerce. Sementara industri kayu dapat tumbuh lebih baik jika rantai pasokan kayu rakyat menguat dan produk kayu olahan bernilai tambah dikembangkan. Industri tembakau juga dapat tumbuh moderat-optimis melalui diversifikasi produk dan pasar. Skenario optimis ini mengasumsikan kondisi iklim investasi yang kuat, inovasi teknologi, dan perluasan pasar yang mampu mendorong industri pengolahan bergerak lebih dinamis dalam lima tahun ke depan.

Tabel 4.7. Proyeksi Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Kabupaten Lamongan 2025-2029

No	Uraian	PREDIKSI PERTUMBUHAN MODERAT					PREDIKSI PERTUMBUHAN OPTIMIS				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
C	Industri Pengolahan	7.42	7.51	7.60	7.69	7.78	8.15	8.20	8.29	8.64	8.90
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industri Makanan dan Minuman	12.44	12.53	12.62	12.71	12.80	12.93	12.98	13.07	13.32	13.68
3	Pengolahan Tembakau	13.86	13.95	14.04	14.13	14.22	14.35	14.40	14.49	14.74	15.10
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	11.27	11.36	11.45	11.54	11.63	11.77	11.82	11.91	12.16	12.52
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4.59	4.68	4.77	4.86	4.95	5.59	5.64	5.73	5.98	6.34
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	1.22	1.31	1.40	1.49	1.58	2.22	2.27	2.36	2.61	2.97
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0.14	0.23	0.32	0.41	0.50	1.14	1.19	1.28	1.53	1.89
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.01	0.10	0.19	0.28	0.37	1.01	1.06	1.15	1.40	1.76
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.02	0.11	0.20	0.29	0.38	1.02	1.07	1.16	1.41	1.77
10	Industri Barang Galian bukan Logam	19.79	19.88	19.97	20.06	20.15	20.79	20.84	20.93	21.18	21.54
11	Industri Logam Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektrik	0.06	0.15	0.24	0.33	0.42	1.06	1.11	1.20	1.45	1.81
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Industri Alat Angkutan	0.95	1.04	1.13	1.22	1.31	1.95	2.00	2.09	2.34	2.70
15	Industri Furnitur	0.52	0.61	0.70	0.79	0.88	1.52	1.57	1.66	1.91	2.27
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasar	0.07	0.16	0.25	0.34	0.43	1.07	1.12	1.21	1.46	1.82

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Dalam skenario moderat, pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan perdagangan mobil-sepeda motor diproyeksikan meningkat secara stabil mengikuti tren permintaan domestik yang berkembang namun tidak mengalami lonjakan signifikan. Perdagangan besar tumbuh moderat karena tetap didorong oleh aktivitas distribusi barang kebutuhan pokok, produk industri, dan logistik regional, tetapi masih dibatasi oleh efisiensi rantai pasok dan fluktuasi biaya transportasi. Perdagangan mobil dan sepeda motor, meski menunjukkan permintaan yang konsisten, cenderung tumbuh pada laju yang terkendali karena faktor daya beli masyarakat kelas menengah, biaya kredit, dan pergeseran preferensi konsumen ke pasar kendaraan bekas serta transportasi berbasis aplikasi. Dengan demikian, skenario moderat mencerminkan pertumbuhan normal yang mencerminkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tanpa intervensi kebijakan atau stimulasi pasar yang besar.

Tabel 4.8. Proyeksi Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Kabupaten Lamongan 2025-2029

Kec	Uraian	PREDIKSI PERTUMBUHAN MODERAT					PREDIKSI PERTUMBUHAN OPTIMIS				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.52	5.61	5.70	5.79	5.88	6.02	6.06	6.19	6.04	6.24
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.68	2.97	3.06	3.15	3.24	3.37	3.42	3.51	3.76	4.12
	2. Perdagangan Besar dan Eceran	6.93	7.02	7.11	7.20	7.29	7.42	7.47	7.56	7.81	8.17

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Dalam skenario optimis, subsektor perdagangan diperkirakan mengalami akselerasi pertumbuhan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, penguatan daya beli, dan percepatan ekonomi digital. Perdagangan besar akan berkembang lebih cepat dengan dukungan ekspansi jaringan distribusi, digitalisasi rantai pasok, peningkatan aktivitas e-commerce, serta integrasi logistik antar kabupaten/kota. Sementara itu, perdagangan mobil dan sepeda motor dapat tumbuh pesat melalui insentif pembelian kendaraan ramah

lingkungan, peningkatan akses kredit, dan pertumbuhan kelas menengah yang mendorong permintaan kendaraan baru. Modernisasi showroom, penetrasi penjualan digital, serta peningkatan investasi dealership juga memperkuat pertumbuhan sektor ini dalam skenario optimis. Secara keseluruhan, skenario optimis mencerminkan kondisi ketika inovasi, kebijakan pro-pasar, dan peningkatan daya beli mendorong subsektor perdagangan bergerak lebih agresif dalam lima tahun mendatang.

4.5 ANALISIS STRATEGI DAN PROGRAM DI LEVEL NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

Bagian ini menguraikan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dimulai dengan menelusuri kebijakan nasional yang menjadi kerangka acuan wajib bagi seluruh Pemerintah Daerah, kemudian dilanjutkan dengan strategi Provinsi Jawa Timur yang memberikan arah sektoral dan regional bagi Lamongan. Dari dua tingkat kebijakan tersebut, analisis kemudian mengerucut pada respons dan inisiatif Kabupaten Lamongan dalam menerjemahkan mandat nasional dan provinsi ke dalam RPJMD. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana RPKD membangun strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, kontekstual, dan selaras dengan kerangka pembangunan yang lebih luas.

4.5.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

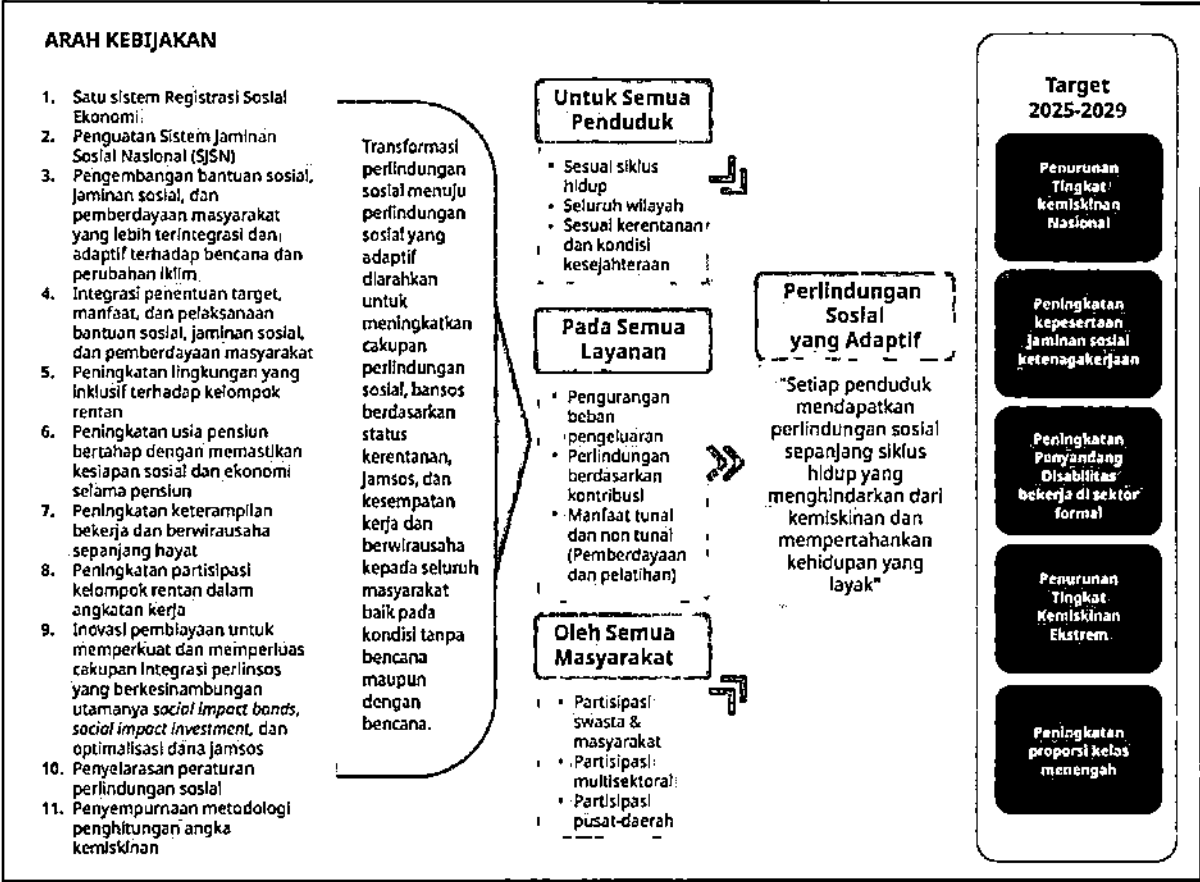
Secara umum, RPJMN tahun 2025–2029 memberikan penekanan khusus pada strategi penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Ketiga strategi tersebut, yang dikenal sebagai trisula pembangunan, diposisikan sebagai pilar utama dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, sekaligus menjadi fondasi yang memperkuat arah pembangunan jangka panjang nasional. Melalui trisula pembangunan ini, RPJMN menegaskan pentingnya keterpaduan antara peningkatan kesejahteraan, penguatan kapasitas manusia, dan transformasi ekonomi. Dengan fokus yang saling melengkapi, RPJMN berupaya memastikan bahwa transformasi struktural ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Dalam strategi menurunkan tingkat kemiskinan, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas kemiskinan dalam berbagai dimensinya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Pada periode 2025–2029, Pemerintah menetapkan dua target utama dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan, yaitu:

1. Menurunkan tingkat kemiskinan nasional menjadi 4,5–5,0 persen sebagai langkah strategis untuk memastikan lebih banyak penduduk mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, yang sekaligus berada di bawah target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Target kemiskinan ekstrem ini menggunakan standar internasional sebesar USD 2,15 *Purchasing Power Parity* per kapita per hari.

Gambar 4.14. Kerangka Pikir Penurunan Kemiskinan dalam RPJPN pada periode RPJMN Tahun 2025-2029



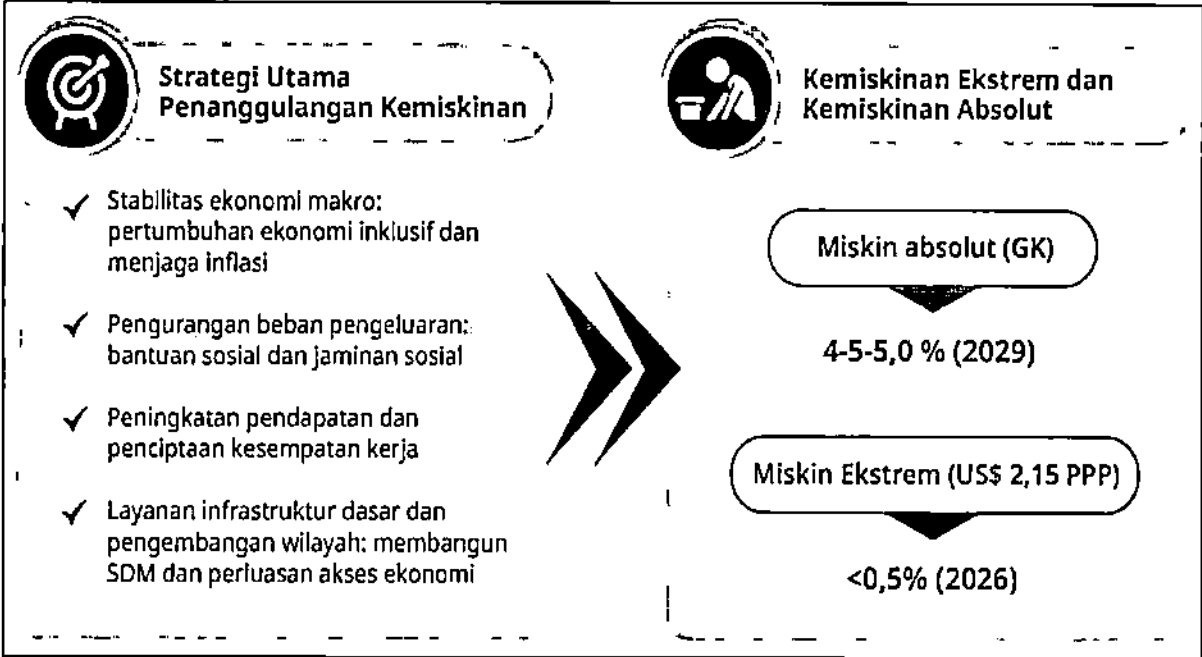
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Fokus intervensi diarahkan pada kelompok penduduk termiskin dan kelompok rentan yang menghadapi hambatan struktural, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kelompok tersebut tergraduasi dari kemiskinan secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas strategi penurunan kemiskinan, Pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan agar lebih akurat, relevan dengan perkembangan standar hidup layak, serta terbandingkan antar waktu dan wilayah.

Pemerintah menempatkan perlindungan sosial adaptif sebagai motor penggerak untuk memfpercepat pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap paketjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standardisasi kegiatan yang

selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan (caregiving).

Gambar 4.15. Strategi Empat Pilar Utama Penurunan Kemiskinan



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

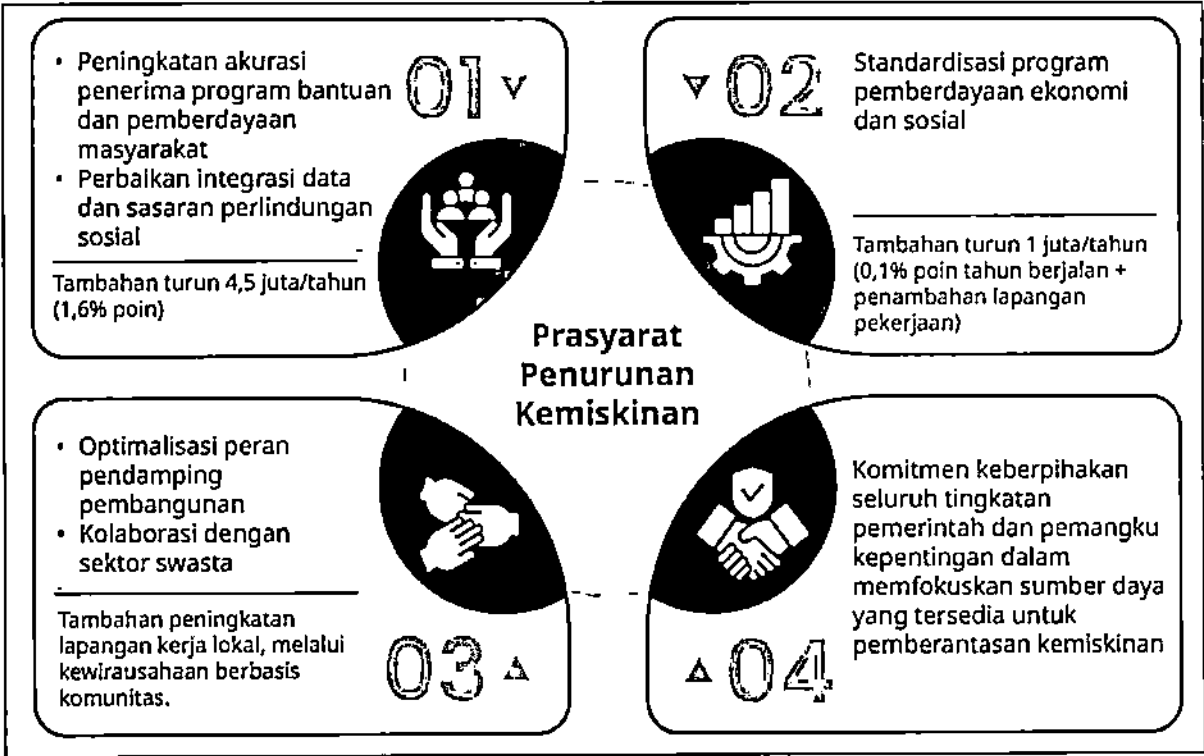
Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan 4 (empat) strategi, yaitu:

1. Strategi pertama adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan agar manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Upaya yang ditempuh mencakup penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan sektor UMKM. Langkah tersebut disertai dengan pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
2. **Strategi kedua** dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan *Kartu Kesejahteraan* sebagai instrumen integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Untuk memastikan akurasi dan efektivitas penyalurannya, Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi yang terus diperbarui dan dibagi pakai melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi, serta memanfaatkan teknologi digital dalam mekanisme penyaluran.
3. **Strategi ketiga** adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja dengan *Kartu Usaha* sebagai instrumen pendukung graduasi dari kemiskinan. Intervensi yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas yang relevan dan berbasis potensi lokal, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, serta penerapan prinsip afirmatif. Strategi ini menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

4. **Strategi keempat** berfokus pada penguatan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Fokus geografis diarahkan pada 10 provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, serta daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan. Intervensi meliputi penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.

Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas prioritas nasional. Pelaksanaannya memerlukan beberapa prasyarat penting. Pertama, integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar intervensi lebih tepat dan efektif. Kedua, penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ketiga, optimalisasi pendampingan pembangunan serta peningkatan kolaborasi strategis multisektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan, menciptakan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan memperluas akses terhadap pasar serta teknologi. Keempat, komitmen keberpihakan di seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memfokuskan sumber daya yang tersedia bagi upaya pemberantasan kemiskinan.

Gambar 4.16. Prasyarat Penurunan Kemiskinan



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Melalui sinergi dari keempat prasyarat tersebut, Pemerintah optimis bahwa penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih cepat dan terarah. Keyakinan ini didasarkan pada penguatan koordinasi antarsektor yang memungkinkan intervensi berjalan lebih efektif di berbagai tingkatan pemerintahan. Pendekatan berbasis data menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap program diarahkan tepat pada kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan. Pemanfaatan inovasi teknologi semakin memperkuat efektivitas program melalui peningkatan akurasi penyaluran, transparansi pelaksanaan, serta efisiensi operasional. Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan, sehingga program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

4.5.2 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur

Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 tidak terlepas dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029. Visi dan misi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 yang dirancang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan demi masyarakat Jawa Timur lebih sejahtera, yaitu:

Gambar 4.17. Visi dan Misi Jawa Timur 2025-2029



Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi

kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan infrastruktur dasar. Pada periode 2025-2029, ditetapkan dua target utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertama, menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sekaligus memperoleh perlindungan sosial yang adaptif untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko dan krisis. Kedua, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan yang inklusif. Fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, dan lanjut usia serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan.

Tujuan pembangunan misi Jatim Sejahtera yaitu Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan, merupakan salah satu upaya pencapaian dari sasaran visi kedua RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan sehingga indikator pencapaian menggunakan Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini yang juga merupakan indikator sasaran visi RPJPD. Penetapan sasaran pembangunan pada misi Jatim Sejahtera selain memperhatikan upaya pencapaian tujuan dari misi, mempertimbangkan pula arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2045 yaitu Perlindungan Sosial yang Adaptif pada arah pembangunan pertama dan arah pembangunan kedelapan yaitu Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di perdesaan, diterapkan pendekatan lintas sektoral dan spasial secara terpadu, melalui strategi pemenuhan perlindungan sosial dengan fokus pembangunan melalui pemenuhan sistem perlindungan sosial, pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dan berbasis satu data serta peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan. Strategi ini mencakup penguatan peran perempuan dalam program pemberdayaan serta pemberian prioritas kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui skema bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.

Kebijakan tersebut dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, strategi utama yang diterapkan berfokus pada pemenuhan perlindungan sosial melalui penguatan sistem perlindungan yang komprehensif, penyediaan rumah layak huni yang terintegrasi, serta pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal yang berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Dalam mendukung implementasi strategi ini, arah kebijakan yang diambil mencakup penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu, penyediaan hunian layak yang terintegrasi dengan layanan sosial, serta peningkatan akses dan kapasitas

ekonomi bagi masyarakat miskin. Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antar sektor dalam pemberdayaan kelompok rentan, memastikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan pula arah kebijakan dan fokus pembangunan pada transformasi sosial di tahapan pertama periode 2025-2029.

Secara spesifik, arah pembangunan Jawa Timur sebagaimana tercermin dalam sembilan *Bhakti* sesungguhnya terhubung erat dengan kerangka strategi penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN. Seluruh pilar pembangunan ini dapat dipetakan ke dalam 4 (empat) strategi utama, yaitu:

1. memastikan stabilitas ekonomi makro;
2. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan;
3. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
4. penguatan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah untuk penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Dengan demikian, visi pembangunan tidak hanya mengarahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif terlihat dari penguatan lapangan kerja yang berkualitas melalui misi *Jatim Kerja*, yang menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Dukungan terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui misi *Jatim Agro* memperkuat ekonomi rakyat di pedesaan, sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam misi *Jatim Cerdas* memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan untuk beradaptasi dan naik kelas dalam pasar kerja. Seluruh ini dibingkai oleh misi *Jatim Harmoni* yang menegaskan pentingnya inklusi sosial sebagai landasan pertumbuhan yang merata dan adil.

Pada saat yang sama, penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Misi *Jatim Sejahtera* memprioritaskan percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, yang dipadukan dengan misi *Jatim Sehat* untuk menjamin akses kesehatan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan berkeadilan. Layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang kuat berfungsi sebagai penyangga utama bagi rumah tangga miskin, sehingga beban pengeluaran dasar dapat ditekan melalui intervensi yang lebih efektif dan terintegrasi.

Di sisi lain, peningkatan pendapatan masyarakat melalui wirausaha dan kesempatan kerja terus diperkuat melalui serangkaian misi yang berorientasi pada produktivitas. Misi *Jatim Kerja* membuka ruang bagi perluasan kesempatan kerja yang lebih baik, sedangkan misi *Jatim Agro* menopang peningkatan produktivitas pelaku sektor pangan. Peningkatan kualitas SDM melalui misi *Jatim Cerdas* memberikan kemampuan

bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas usahanya. Sinergi ketiga misi ini mencerminkan strategi yang menekankan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.

Penguatan layanan dasar dan konektivitas wilayah juga menjadi pilar penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Misi *Jatim Akses* berfokus pada peningkatan infrastruktur dasar, termasuk air minum, sanitasi, transportasi, dan konektivitas antarwilayah yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui misi *Jatim Lestari* memastikan bahwa pengembangan wilayah tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Keseluruhan proses ini diperkuat oleh misi *Jatim Berkah Amanah*, yang menempatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif sebagai prasyarat bagi peningkatan kualitas layanan publik.

Secara keseluruhan, integrasi sembilan *Bhakti* dengan 4 (empat) strategi penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN menghasilkan arah pembangunan yang menyeluruh. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan, mulai dari perlindungan sosial hingga penguatan infrastruktur, memberikan kontribusi langsung pada penurunan kemiskinan secara struktural, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Timur.

4.5.3 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan

Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.18. Visi Kabupaten Lamongan 2025-2029

KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN	
KEJAYAAN	BERKELANJUTAN
• Kabupaten yang Terdepan (Masyhur) • Sosial Ekonomi Berdaya Saing • SDM Unggul Berkarakter • Pengembangan SDA dan Budaya • Layanan Publik yang Prima • Kesejahteraan Masyarakat Lahir dan Batin	• Pembangunan yang Lestari • Merawat Harmonisasi Sosial • Keselarasan Pembangunan Terhadap Nilai Agama, Solidaritas, dan Toleransi Ditengah Keberagaman

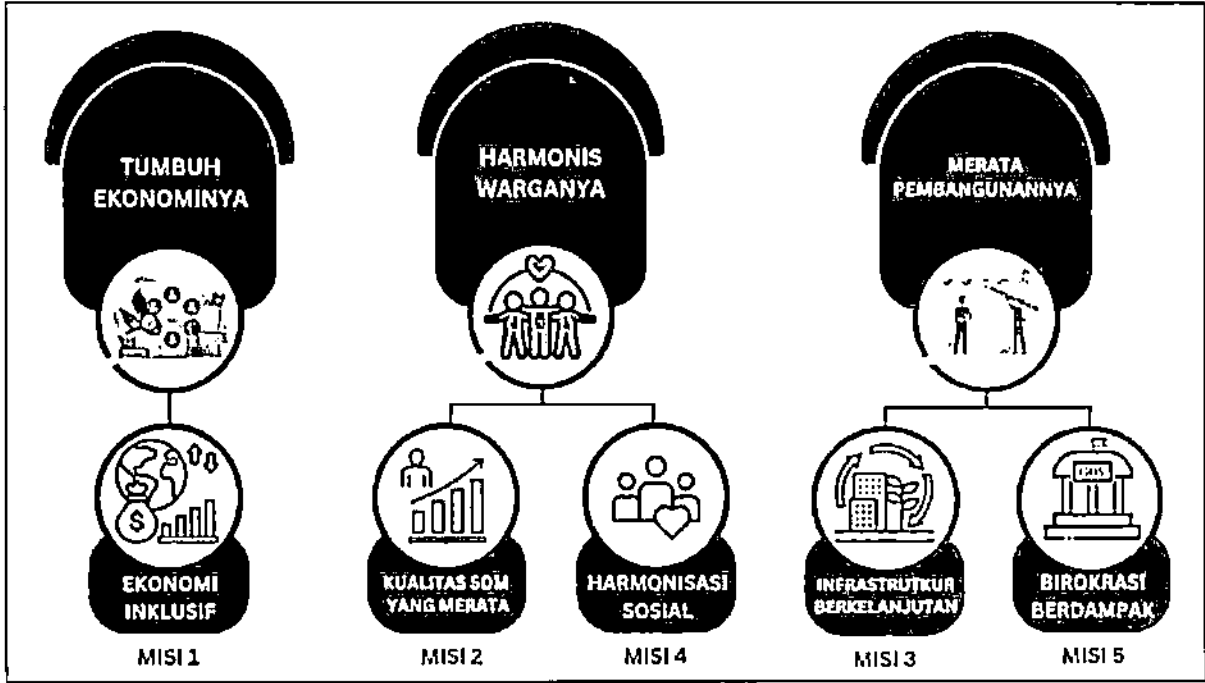
Sumber: RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Visi "Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan" mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Kejaya-an diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional mau-pun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya

alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Capaian tersebut diiringi dengan penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

Sementara itu, prinsip berkelanjutan dalam visi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu, mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan juga memiliki tagline yakni tumbuh ekonominya, merata pembangunannya, dan harmonis warganya. Berkaitan dengan misi pembangunan sebagai agregat yang tidak dapat dipisahkan dari instrumen pencapaian visi. Berikut ilustrasi keterkaitan tagline visi terhadap misi Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029:

Gambar 4.19. Keterkaitan Tagline Visi Terhadap Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029

Misi yang diusung oleh kepala daerah terpilih ini telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui proses pemilihan demokratis, sekaligus menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pelaksanaan program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut merupakan misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan;

2. Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman;
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan;
4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan; dan
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

Jika ditelaah lebih lanjut, Misi pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan 4 (empat) strategi penurunan kemiskinan dalam RPJMN. Setiap misi memberikan kontribusi berbeda namun saling melengkapi, sehingga arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan strategi nasional dalam menurunkan kemiskinan secara struktural, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi I, yaitu *“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan,”* selaras dengan **Strategi Pertama RPJMN**. Misi ini sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, UMKM, industri kreatif, dan pariwisata. Kontribusinya terlihat pada penciptaan lapangan kerja, perluasan basis ekonomi lokal, serta peningkatan pendapatan kelompok rentan seluruhnya merupakan unsur penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.

Misi II, yaitu *“Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman,”* memiliki keterkaitan paling kuat dengan **Strategi Ketiga**, yang berfokus pada peningkatan pendapatan melalui penguatan wirausaha dan peningkatan kapasitas masyarakat. Penguatan kualitas SDM Lamongan secara intelektual, spiritual, dan keterampilan menjadi fondasi bagi produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemampuan berusaha, serta peningkatan akses terhadap peluang ekonomi. Dengan demikian, misi ini memperkuat jalur graduasi masyarakat dari kemiskinan melalui peningkatan kompetensi.

Misi III, yaitu *“Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan,”* selaras langsung dengan **Strategi Keempat RPJMN**, yang menekankan penguatan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Fokus misi ini pada pemerataan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan memberi dampak pada peningkatan konektivitas, penurunan biaya logistik, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air minum, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini mempercepat penanganan kantong-kantong kemiskinan, sekaligus menciptakan lingkungan pendukung bagi aktivitas sosial ekonomi.

Misi IV, yaitu *“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, dan Partisipatif,”* beririsan kuat dengan **Strategi Kedua**, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Melalui penguatan kesejahteraan sosial, harmonisasi kehidupan sosial, dan peran masyarakat dalam

pembangunan, misi ini mendukung perluasan akses terhadap berbagai bentuk perlindungan sosial. Kehadiran layanan sosial yang inklusif dan stabilitas sosial daerah mendorong efektivitas penyaluran bantuan dan meningkatkan ketahanan kelompok rentan terhadap guncangan ekonomi.

Misi V, yaitu *“Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif,”* menjadi penunjang lintas strategi yang memperkuat efektivitas keseluruhan agenda penurunan kemiskinan. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik memastikan akurasi data, mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, serta memudahkan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, misi ini menjadi katalis yang memperkuat implementasi strategi pertama hingga strategi keempat.

Secara keseluruhan, kelima misi Kabupaten Lamongan terpetakan secara jelas dalam kerangka strategi penurunan kemiskinan RPJMN. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan daerah bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai orientasi utama melalui peningkatan kapasitas manusia, penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur dasar, serta tata kelola yang transparan dan responsif. Dengan sinergi ini, Lamongan memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

4.5.4 Rincian Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2030

Berdasarkan ragam uraian di atas, maka dapat disusun rincian strategi dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lamongan tahun 2026-2030. Strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lamongan dirumuskan melalui 4 (empat) pilar utama yang saling melengkapi dan menjadi landasan intervensi secara menyeluruh, yaitu:

- **Pilar Strategi 1: Memastikan Stabilitas Ekonomi Makro** diarahkan untuk menjaga fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas fiskal dan efektivitas belanja pemerintah yang berorientasi pada stimulus pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan. Stabilitas harga pangan dan energi dijaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga. Selain itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pasti dilakukan untuk memperluas kegiatan ekonomi produktif dan memperkuat basis kesempatan kerja.
- **Pilar Strategi 2: Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin** menitikberatkan pada penyediaan akses layanan dasar yang terjangkau. Penurunan beban pengeluaran pendidikan dilakukan melalui jaminan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Pengurangan beban pengeluaran kesehatan dicapai melalui peningkatan akses layanan kesehatan dasar, pencegahan stunting, deteksi dini penyakit, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Pilar ini juga diperkuat oleh perluasan jangkauan perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial yang adaptif, sehingga

masyarakat miskin memiliki bantalan kesejahteraan yang memadai saat menghadapi guncangan.

- **Pilar Strategi 3: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin** berfokus pada penguatan struktur ekonomi produktif di tingkat rumah tangga. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan sektor perikanan diarahkan untuk memperbesar nilai tambah dan pendapatan bagi petani serta nelayan. Hilirisasi industri berbasis pertanian (agroindustri) ditumbuhkan untuk memperluas pasar dan memperkuat rantai pasok lokal, sejalan dengan pe-ningkatan peranan koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi rakyat yang mampu menciptakan nilai tambah dan peluang kerja baru.
- **Pilar Strategi 4: Memperkuat Layanan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Kewilayahan untuk Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan** memastikan bahwa seluruh wilayah, khususnya yang ter-tinggal, memperoleh akses infrastruktur dan layanan dasar yang memadai. Penguatan layanan pendidikan dilakukan melalui pengembangan sekolah unggul yang inklusif dan berdaya saing. Peningkatan kualitas layanan kesehatan diarahkan untuk mendukung pembangunan manusia yang lebih unggul. Pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas untuk mengurangi kawasan kumuh dan mening-katkan kualitas hidup. Pemerataan infrastruktur dasar, seperti akses air minum, sanitasi, listrik, dan konektivitas, difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah guna menekan kantong kemiskinan. Selain itu, peningkatan kemandirian desa menjadi langkah penting untuk memper-kuat aktivitas ekonomi lokal dan menurunkan kantong kemiskinan pedesaan secara berkelanjutan.

Tabel 4.3. Perkembangan Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
2	BELANJA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.1	Belanja Operasional	65.95%	65.70%	63.00%	64.31%	68.11%	65.73%
2.1.1	Belanja Pegawai	31.83%	30.22%	30.09%	31.15%	39.25%	32.67%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.62%	24.62%	25.50%	24.99%	24.81%	24.31%
2.1.3	Belanja Bunga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	12.50%	9.00%	6.31%	6.94%	5.43%	8.24%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0.00%	2.56%	1.10%	1.49%	0.31%	0.43%

2.2	Belanja Modal	19.52%	11.74%	15.46%	10.48%	9.09%	12.25%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0.30%	0.00%	1.33%	0.00%	0.00%	0.27%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.53%	4.10%	9.07%	3.96%	2.99%	4.18%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.37%	0.74%	0.73%	1.69%	1.66%	2.00%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.90%	4.73%	9.15%	5.69%	5.38%	5.83%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.96%	0.24%	0.94%	0.46%	0.55%	0.39%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	6.46%	1.93%	4.25%	2.68%	4.46%	2.57%
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.08%	0.68%	0.00%	0.13%	0.00%	0.40%
2.4	Belanja Transfer	21.44%	21.35%	21.64%	24.19%	21.87%	21.63%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0.05%	0.56%	0.35%	0.64%	0.00%	0.46%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	21.39%	20.79%	20.94%	23.56%	21.18%	21.17%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan

Tabel 4.9. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kab Lamongan untuk Memastikan Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Memastikan Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatkan kapasitas fiskal dan efektivitas belanja pemerintah untuk stimulus pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	✓ Peningkatan pengelolaan pajak dan potensi PAD daerah ✓ Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ✓ Memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien dan responsif. ✓ Meningkatkan porsi belanja produktif pada sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. ✓ Mengarahkan belanja daerah pada program yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan.
	Menjaga stabilitas harga pangan dan energi	✓ Meningkatkan efektivitas koordinasi TPID dalam pengendalian harga. ✓ Memperluas sistem informasi harga agar pasar lebih transparan.
	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pasti.	✓ Menyederhanakan perizinan dan mempercepat layanan investasi yang menjadi kewenangan daerah ✓ Memastikan kepastian regulasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

**Tabel 4.10. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Lamongan untuk Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Miskin**

Pilar Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan	Penurunan beban pengeluaran pendidikan melalui jaminan akses pendidikan	✓ Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar ✓ Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi ✓ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan ✓ Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); ✓ Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
	Penurunan beban pengeluaran kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pencegahan stunting, deteksi dini penyakit, dan penguatan kesehatan ibu dan anak	✓ Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal ✓ Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya ✓ Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; ✓ Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; ✓ Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;
	Peningkatan jangkauan perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial yang adaptif	✓ Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. ✓ Penuntasan kemiskinan dengan satu system regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi ✓ Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebagai penuntasan kemiskinan jangka panjang ✓ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal ✓ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. ✓ Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan ✓ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan

Tabel 4.11. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin

Pilar Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin	Peningkatan produktivitas sektor pertanian	✓ Penciptaan Ekosistem Usaha Pertanian Berkelanjutan yang selaras dengan arahan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo melalui pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk kebijakan perlindungan lahan, optimalisasi, dan revitalisasi lahan; ✓ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Bengawan Solo, Brantas, dan Tapal Kuda ✓ Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian, Farming Corporation, dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca) ✓ Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global ✓ Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis ✓ Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemu-pukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform ✓ Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian ✓ Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian ✓ Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
	Peningkatan produktivitas sektor perikanan	✓ Peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak ✓ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan

		pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform
		✓ Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak ✓ Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan dan petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan ✓ Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan; ✓ Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif; ✓ Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan; ✓ Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya;
	Hilirisasi industri berbasis pertanian (agroindustry) dan Peningkatan Peranan Koperasi dan UMKM untuk peningkatan nilai tambah ekonomi	✓ Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; ✓ Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; ✓ Standarisasi dan sertifikasi Produk barang dan jasa UKM dalam rangka meningkatkan daya saing menuju persaingan global; ✓ Peningkatan produktivitas BUMD; ✓ Modernisasi Kawasan Ekonomi Strategis melalui Revitalisasi Pasar Rakyat, Rebranding Sentra UMKM, serta Relokasi dan Pembangunan Pasar Ikan Modern yang dilengkapi fasilitas Cold Storage ✓ Pembangunan Kawasan Agroindustri Lamongan ✓ Integrasi Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro berbasis Digital dengan Mendayagunakan Koperasi Desa yang selaras dengan Program Koperasi Merah Putih ✓ Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi

Tabel 4.12. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamongan untuk Memperkuat Layanan infrastruktur Dasar dan Pengembangan Kewilayahan pada Kantong Kemiskinan

Pilar Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Menguatkan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan kewilayahan untuk penurunan jumlah kantong kemiskinan	Penguatan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing melalui pengembangan sekolah unggul	✓ Program Sekolah Rakyat Untuk Membuka Belenggu Keterbatasan Akses Pendidikan terutama Bagi Warga Rentan ✓ Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah ✓ Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) ✓ Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) ✓ Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. ✓ Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; ✓ Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan ✓ Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

Pilar Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk mendukung pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing	✓ Membangun Sistem Layanan Kesehatan yang Terintegrasi secara Digital untuk Mendukung Program Cek Kesehatan Gratis dan Penurunan Stunting ✓ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan ✓ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan ✓ Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan; ✓ Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	Pemenuhan hunian layak pada masyarakat berpenghasilan rendah	✓ Penyediaan rumah layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis. ✓ Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, termasuk pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen-Z, dan milenial. ✓ Penyediaan hunian vertikal perkotaan untuk MBR dan penataan kawasan kumuh yang langsung menyasar kantong kemiskinan perkotaan. ✓ Urban renewal di kawasan yang mengalami urban decay - menghilangkan kluster kumuh baru.

	Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang diprioritaskan pada masyarakat berpenghasilan rendah	✓ Pemantapan infrastruktur jalan daerah dan jalan desa – meningkatkan akses ekonomi desa-desa miskin. ✓ Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi (termasuk SPAM Mojolagres dan SPAL Regional). ✓ Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet pada area weak coverage untuk mengurangi digital divide bagi komunitas miskin.
		✓ Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK sampai pelosok – membuka akses informasi, pendidikan, dan ekonomi digital untuk daerah miskin. ✓ Penguatan pengelolaan jalan daerah, jalan desa, dan jalan pesisir daerah perikanan untuk mendukung akses ekonomi, terutama petani dan nelayan ✓ Percepatan peningkatan struktur jalan kabupaten menuju mantap untuk membuka keterisolasian desa miskin. ✓ Peningkatan kondisi ruas jalan menuju akses masuk/keluar rencana Tol Tuban–Gresik dan Lingkar Selatan Babat untuk membuka akses ekonomi bagi wilayah miskin di hinterland. ✓ Penguatan infrastruktur jalan pesisir dan daerah perikanan – meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan. ✓ Percepatan pelaksanaan reforma agraria – memperkuat kepemilikan/akses lahan bagi rumah tangga miskin pedesaan. ✓ Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C – memastikan masyarakat memperoleh kompensasi adil dan tidak terdorong masuk ke kantong kemiskinan baru. ✓ Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana dan daya dukung – mencegah kemiskinan baru akibat banjir atau degradasi lingkungan.
	Peningkatan kemandirian desa untuk menurunkan kantong kemiskinan pedesaan	✓ Lamongan 100% Desa Mandiri

Dari tahapan strategi di atas, maka dapat disusun indikasi program. Masing-masing sasaran menghasilkan strategi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan kemudian disusun indikasi program. Indikasi program tersebut kemudian dirinci dengan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan. Berdasarkan hasil pemetaan, didapatkan 29 (dua puluh sembilan) indikasi program sebagai berikut:

Tabel 4.13. Indikasi Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Lamongan

Sasaran	Strategi Prioritas	Indikasi Program
1. Meningkatnya kualitas pembangunan industri berbasis pertanian	Penguatan Sinergitas (Linkage) antara Sektor	1. Program pengelolaan sistem informasi industri
		2. Program penelitian dan pengembangan daerah

Sasaran	Strategi Prioritas	Indikasi Program
2. Meningkatnya kualitas bahan baku lokal	Industri dan Sektor Pertanian	3. Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		4. Program pengelolaan perikanan budidaya
		5. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		6. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		7. Program penyuluhan pertanian
3. Menguatnya daya saing IKM primer		8. Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pada sektor pertanian maupun industri pengolahan	Penguatan Kewirausahaan bagi Petani dan IKM	9. Program perizinan usaha pertanian
5. Meningkatnya kemampuan produksi tenaga kerja pada sektor pertanian maupun industri pengolahan		10. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
6. Meningkatnya kapasitas permodalan yang dimiliki petani dan pelaku IKM		11. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
		12. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
		13. Program penilaian kesehatan KSP/USP
		14. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
		15. Program pemberdayaan dan perlindungan Koperasi

Sasaran	Strategi Prioritas	Indikasi Program
7. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN di sektor pertanian maupun industri		16. Program pengembangan iklim penanaman modal
		17. Program promosi penanaman modal
		18. Program pelayanan penanaman modal
		19. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		20. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
8. Meningkatnya konektivitas kawasan pertanian, industri, dan perdagangan	Peningkatan Efisiensi Produksi dan Pemasaran bagi Petani dan IKM	21. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
9. Menguatnya keterkaitan industri primer dan sekunder		22. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
10. Meningkatnya skala usaha dan nilai penjualan IKM		23. Program perencanaan dan pembangunan industri
11. Meningkatnya penguasaan pangsa pasar regional, nasional, dan internasional		24. Program pemberdayaan UMKM
12. Menurunnya tingkat pencemaran limbah industri		25. Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan
	Peningkatan Pangsa Pasar Regional, Nasional, dan Internasional	26. Program pengembangan UMKM
		27. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
		28. Program pengembangan ekspor
		29. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mengacu pada masing-masing sasaran. Prioritas penyusunan setiap tahunnya mengacu pada strategi yang telah disusun arahan prioritas tahunannya. Meski demikian, prioritas tahunan tersebut juga bersifat kondisional, sehingga tidak semua sasaran pada masing-masing strategi berdasarkan periodisasi bersifat kaku, namun dinamis. Sementara itu, penyusunan penganggaran dilakukan atas dasar proyeksi berbasis data time series yang dimiliki masing-masing OPD teknis.

5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
5	05	02	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peng-kajian Peraturan	Bapperida	√	√	√	√	√	-	-	-	-	
5	05	02	2.0 1	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		√	√	√	√	√	105.000.000	113.400.000	117.600.000	119.700.000	123.900.000
5	05	02	2.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		√	√	√	√	√	98.000.000	105.840.000	109.760.000	111.720.000	115.640.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
5	05	02	2.0 2	0 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Disparbud	√	√	√	√	√	100.000.000	108.000.000	112.000.000	114.000.000	118.000.000
5	05	02	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappelitbangda	√	√	√	√	√	100.000.000	108.000.000	112.000.000	114.000.000	118.000.000
5	05	02	2.0 3	0 1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskopum	√	√	√	√	√	100.000.000	108.000.000	112.000.000	114.000.000	118.000.000
5	05	02	2.0 3	0 2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag	√	√	√	√	√	100.000.000	108.000.000	112.000.000	114.000.000	118.000.000
5	05	02	2.0 3	0 3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bappelitbangda	√	√	√	√	√	100.000.000	108.000.000	112.000.000	114.000.000	118.000.000
5	05	02	2.0 3	0 4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	DKPP, Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	100.000.000	108.000.000	112.000.000	114.000.000	118.000.000
5	05	02	2.0 3	0 5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	90.000.000	97.200.000	100.800.000	102.600.000	106.200.000

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas bahan baku lokal											Proyeksi Penganggaran				
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN										
2	09	02	2.0 1		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan			√	√	√	-	-	-	-

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
2	09	02	2.0 1	0 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKPP, Dinas Perikanan			√			-	-	450.000.000	-	-
2	09	02	2.0 1	0 2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	DKPP			√			-	-	400.000.000	-	-
2	09	02	2.0 1	0 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	DKPP			√	√		-		325.000.000	370.000.000	-
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
3	25	03	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	25	03	3	0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau	Dinas Perikanan	√	√				120.000.000	129.600.000	-	-	-

[illegible]

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	25	03	3	0 2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan / atau Tenaga Kerja Asing	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	110.000.000	118.800.000	123.200.000	125.400.000	129.800.000
3	25	03	2.0 2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	25	03	2.0 2	0 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	40.00.000	43.200.000	44.800.000	45.600.000	47.200.000
3	25	03	2.0 2	0 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	35.000.000	37.800.000	39.200.000	39.900.000	41.300.000

3	25	03	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	200.000.000	216.000.000	224.000.000	228.000.000	236.000.000
3	25	03	2.0 2	0 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	90.000.000	97.200.000	100.800.000	102.600.000	106.200.000

Urusan	Bidang Ilmu Kelautan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	25	0 3	2.0 3		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	25	0 3	2.0 3	0 1	Penetapan persyaratan dan pro-sedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	60.000.000	64.800.000	67.200.000	68.400.000	70.800.000
3	25	0 3	2.0 3	0 2	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	50.000.000	54.000.000	56.000.000	57.000.000	59.000.000
3	25	0 3	2.0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	25	0 3	2.0 4	0 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	75.000.000	81.000.000	84.000.000	85.500.000	88.500.000

3	25	0 3	2.0 4	0 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	75.000.000	81.000.000	84.000.000	85.500.000	88.500.000
3	25	0 3	2.0 4	0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	75.000.000	81.000.000	84.000.000	85.500.000	88.500.000
3	25	0 3	2.0 4	0 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	65.000.000	70.200.000	72.800.000	74.100.000	76.700.000

Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	25	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	55.000.000	59.400.000	61.600.000	62.700.000	64.900.000
3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	98.000.000	105.840.000	109.760.000	111.720.000	115.640.000
3	25	03	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	85.000.000	91.800.000	95.200.000	96.900.000	100.300.000
3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
3	25	05	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-

					Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil											
3	25	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√	75.000.000	81.000.000	84.000.000	85.500.000	88.500.000
3	25	05	2.01		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan			√	√	√	-	-	-	-	-

Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	25	05	2.01	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Pene-rapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan			√	√	√	-	-	55.000.000	62.700.000	64.900.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota	DKPP			√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Peng-ganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DKPP			√	√	√	-	-	55.000.000	62.700.000	64.900.000
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	DKPP			√	√	√	-	-	65.000.000	74.100.000	76.700.000

					Hortikultura, dan Perkebunan												
3	27	0 5	2.0 1	0 3	Pencegahan, Penanganan Keba-karan Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DKPP			√	√	√	-	-	60.000.000	68.400.000	70.800.000	
									√	√	√						

[illegible]

3	31	0 3	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	DPM-PTSP, Disperindag			√	√	√	-	-	-	-	-
3	31	0 3	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kab/ Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPM-PTSP, Disperindag			√	√	√	-	-	110.000.000	125.400.000	129.800.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	31	0 3	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kab/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	DPM-PTSP, Disperindag			√	√	√	-	-	100.000.000	114.000.000	118.000.000
3	31	0 3	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Disperindag			√	√	√	-	-	100.000.000	114.000.000	118.000.000
Sasaran 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pada sektor pertanian maupun industri pengolahan												Proyeksi Penganggaran				
3	27	0 6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN											
3	27	0 6	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP, DKPP	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	0 6	2.0 1	0 1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	DPM-PTSP, DKPP	√	√	√	√	√	70.000.000	75.600.000	78.400.000	79.800.000	82.600.000

3	27	0 6	2.0 1	0 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	DPM-PTSP, DKPP	√	√	√	√	√	60.000.000	64.800.000	67.200.000	68.400.000	70.800.000
3	27	0 6	2.0 1	0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	DKPP	√	√	√	√	√	72.000.000	77.760.000	80.640.000	82.080.000	84.960.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	DKPP	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ter-nak dan Pakan, Fasilitas Pemeli-haraan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	DKPP	√	√	√	√	√	45.000.000	48.600.000	50.400.000	51.300.000	53.100.000
3	27	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	DKPP	√	√	√	√	√	40.000.000	43.200.000	44.800.000	45.600.000	47.200.000
3	27	06	2.02	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usa-ha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	DKPP	√	√	√	√	√	45.000.000	48.600.000	50.400.000	51.300.000	53.100.000

2	07	0 3	2.0 1	0 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√	85.000.000	91.800.000	95.200.000	96.900.000	100.300.000
2	07	0 3	2.0 4		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Diskopum	√	√	√	√	√	25.000.000	27.000.000	28.000.000	28.500.000	29.500.000
2	07	0 3	2.0 4	0 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Diskopum	√	√	√	√	√	30.000.000	32.400.000	33.600.000	34.200.000	35.400.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 6. Meningkatnya kapasitas permodalan yang dimiliki petani dan pelaku IKM												Proyeksi Penganggaran				
2	17	0 2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM											
2	17	0 2	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Diskopum	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
2	17	0 2	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Diskopum	√	√	√	√	√	125.000.000	135.000.000	140.000.000	142.500.000	147.500.000
2	17	0 2	2.0 1		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang	Diskopum	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Diskopum	√	√	√	√	√	125.000.000	135.000.000	140.000.000	142.500.000	147.500.000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Diskopum	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	Diskopum	√	√	√	√	√	294.000.000	317.520.000	329.280.000	335.160.000	346.920.000

[illegible]

2	18	0 2	2.0 1												
2	18	0 2	2.0 1		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
2	18	0 2	2.0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	√	√	√	√	√	-	-	-	-

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	√	√	√	√	√	160.000.000	172.800.000	179.200.000	182.400.000	188.800.000
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	DPM-PTSP	√	√	√	√	√	50.000.000	54.000.000	56.000.000	57.000.000	59.000.000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Ma-syarakat	DPM-PTSP	√	√	√	√	√	40.000.000	43.200.000	44.800.000	45.600.000	47.200.000

2	18	0 6	2.0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
---	----	--------	----------	--	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
2	18	0 6	2.0 1	0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Ber-usaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	√	√	√	√	√	75.000.000	81.000.000	84.000.000	85.500.000	88.500.000
Sasaran 8. Meningkatnya konektivitas kawasan pertanian, industri, dan perdagangan												Proyeksi Penganggaran				
3	27	0 2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PE-NGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
3	27	0 2	2.0 1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	DKPP		√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	0 2	2.0 1	0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DKPP		√	√	√	√	-	30.000.000	33.600.000	34.200.000	35.400.000

3	27	0 2	2.0 1	0 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DKPP		√	√	√	√	-	30.000.000	33.600.000	34.200.000	35.400.000
3	27	0 2	2.0 3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DPKH		√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	0 2	2.0 3	0 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	DPKH		√	√	√	√	-	25.000.000	27.000.000	28.000.000	28.500.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	27	0 2	2.0 3	0 2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	DPKH		√	√	√	√	-	25.000.000	27.000.000	28.000.000	28.500.000
3	27	0 2	2.0 4		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	DPKH		√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	0 2	2.0 4	0 1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	DPKH		√	√	√	√	-	25.000.000	27.000.000	28.000.000	28.500.000
3	27	0 2	2.0 4	0 2	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	DPKH		√	√	√	√	-	25.000.000	27.000.000	28.000.000	28.500.000
3	27	0 2	2.0 5		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kab/Kota	DPKH		√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	0 2	2.0 5	0 1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	DPKH		√	√	√	√	-	21.000.000	23.520.000	23.940.000	24.780.000

3	27	0 2	2.0 5	0 2	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	DPKH		√	√	√	√	-	300.000.00 0	324.000.00 0	336.000.00 0	342.000.00 0
3	27	0 2	2.0 5	0 3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	DPKH		√	√	√	√	-	30.000.000	32.400.000	33.600.000	34.200.000
3	27	0 2	2.0 5	0 4	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	DPKH		√	√	√	√	-	50.000.000	54.000.000	56.000.000	57.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	27	0 2	2.0 5	0 5	Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DPKH		√	√	√	√	-	50.000.000	54.000.000	56.000.000	57.000.000
3	27	0 2	2.0 5	0 6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	DPKH		√	√	√	√	-	50.000.000	54.000.000	56.000.000	57.000.000
3	27	0 3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
3	27	0 3	2.0 1		Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP		√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	0 3	2.0 1	0 1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	DKPP		√	√	√	√	-	50.000.000	54.000.000	56.000.000	57.000.000

3	27	0 3	2.0 1	0 2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	DKPP		√	√	√	√	-	75.000.000	81.000.000	84.000.000	85.500.000
3	27	0 3	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	DKPP		√	√	√	√	-	80.000.000	89.600.000	91.200.000	94.400.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Ka-wasan dan Komoditas Perkebunan	DKPP		√	√	√	√	-	200.000.000	224.000.000	228.000.000	236.000.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	DKPP		√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DKPP		√	√	√	√	-	300.000.000	324.000.000	336.000.000	342.000.000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	DKPP		√	√	√	√	-	300.000.000	324.000.000	336.000.000	342.000.000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DKPP		√	√	√	√	-	300.000.000	324.000.000	336.000.000	342.000.000
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DKPP		√	√	√	√	-	300.000.000	324.000.000	336.000.000	342.000.000
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	DKPP		√	√	√	√	-	300.000.000	324.000.000	336.000.000	342.000.000

3	27	0 3	2.0 2	0 6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	DKPP		√	√	√	√	-	300.000.000	324.000.000	336.000.000	342.000.000
3	27	0 3	2.0 2	0 7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	DPKH		√	√	√	√	-	500.000.000	540.000.000	560.000.000	570.000.000
3	27	0 3	2.0 2	0 8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	DPKH		√	√	√	√	-	540.000.000	583.200.000	604.800.000	615.600.000

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	27	0 3	2.0 2	0 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DPKH		√	√	√	√	-	280.000.000	302.400.000	313.600.000	319.200.000
3	27	0 3	2.0 3		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DPKH		√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	0 3	2.0 3	0 1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	DPKH		√	√	√	√	-	30.000.000	33.600.000	34.200.000	35.400.000
3	27	0 3	2.0 3	0 2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	DPKH		√	√	√	√	-	20.000.000	22.400.000	22.800.000	23.600.000
3	27	0 3	2.0 4		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	DPKH		√	√	√	√	-	-	-	-	-
3	27	0 3	2.0 4	0 1	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	DPKH		√	√	√	√	-	50.000.000	56.000.000	57.000.000	59.000.000

3	27	0	2.0	0	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	DPKH		√	√	√	√	-	25.000.000	28.000.000	28.500.000	29.500.000
3	27	0	2.0	0	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	DPKH		√	√	√	√	-	30.000.000	33.600.000	34.200.000	35.400.000
Sasaran 9. Menguatnya keterkaitan industri primer dan sekunder												Proyeksi Penganggaran				
3	31	0			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			√	√	√	√	-				
3	31	0	2.0		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Disperindag		√	√	√	√	-	-	-	-	-

2	17	0 7	2.0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Diskopum		√	√	√	√	-	-	-	-	-
2	17	0 7	2.0 1	0 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Diskopum		√	√	√	√	-	200.000.000	224.000.000	228.000.000	236.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Diskopum		√	√	√	√	-	2.500.000.000	2.800.000.000	2.850.000.000	2.950.000.000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Diskopum		√	√	√	√	-	2.500.000.000	2.800.000.000	2.850.000.000	2.950.000.000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Diskopum		√	√	√	√	-	200.000.000	224.000.000	228.000.000	236.000.000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi de-ngan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Diskopum		√	√	√	√	-	175.000.000	196.000.000	199.500.000	206.500.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	DPMD		√	√	√	√	-	-	-	-	-
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Partisipasi Masyara-kat Dalam Forum	DPMD		√	√	√	√	-	200.000.000	224.000.000	228.000.000	236.000.000

					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
7	01	0 3	2.0 1	0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	DPMD		√	√	√	√	-	200.000.000	224.000.000	228.000.000	236.000.000

3	30	0 3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
3	30	0 3	2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag				√	√	-	-	-	-	-
3	30	0 3	2.0 1	0 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag				√	√	-	-	-	228.000.000	236.000.000
3	30	0 3	2.0 1	0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag				√	√	-	-	-	199.500.000	206.500.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Disperindag				√	√	-	-	-	-	-
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pe-ngelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag				√	√	-	-	-	60.000.000	70.800.000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag				√	√	-	-	-	60.000.000	70.800.000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag				√	√	-	-	-	-	-
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Disperindag				√	√	-	-	-	500.000.000	590.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Deskripsi	OPD Penanggung Jawab	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 12. Menurunnya tingkat pencemaran limbah industri												Proyeksi Penganggaran				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DLH, Disperindag				√	√	-	-	-	-	-
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DLH, Disperindag				√	√	-	-	-	350.000.000	424.800.000
	03	05	2.01	02	Supervisi pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	DLH, Disperindag				√	√	-	-	-	350.000.000	424.800.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), dokumen ini bukan sekadar naskah administratif, melainkan sebuah peta jalan strategis untuk membawa Kabupaten Lamongan menuju tingkat kesejahteraan yang lebih inklusif. Keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada konsistensi dalam mengintegrasikan keunggulan daya dukung pertanian (dalam arti luas) dengan upaya perbaikan efisiensi industri yang selama ini menjadi hambatan struktural. Melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat, potensi geografis dan modal sosial Lamongan dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan ekonomi riil yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

Penting untuk diingat bahwa transformasi ekonomi yang diupayakan, mulai dari penguatan korporasi petani hingga peningkatan daya saing UMKM, memerlukan pengawalan yang ketat agar tidak terjadi inefisiensi investasi di masa mendatang. Analisis isu strategis yang telah disusun menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap program kerja memiliki daya ungkit yang nyata terhadap peningkatan pendapatan dan upah masyarakat. Dengan memprioritaskan produktivitas dan konektivitas hulu-hilir, Pemerintah Daerah harus berkomitmen untuk mengubah struktur ekonomi dari ketergantungan pada sektor primer menjadi ekonomi berbasis nilai tambah yang lebih resilien.

Sisi pembangunan manusia dan infrastruktur dasar juga menjadi pilar yang tidak terpisahkan untuk menjamin kualitas hidup layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta sarana air bersih merupakan investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi di Lamongan. Upaya ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki modalitas yang cukup untuk terlibat aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan teknologi di masa depan.

Terakhir, meskipun tantangan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, strategi ini tetap dirancang dengan prinsip realistis dan akuntabel melalui analisis kapasitas keuangan daerah. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan ruang fiskal yang terbatas guna mendanai program-program prioritas yang telah disepakati. Dengan semangat gotong royong dan visi yang selaras, RPKD ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi bagi seluruh warganya.

